



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2024
DI BONTANG**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA**

**Nomor : 15.A/LHP/XIX.SMD/5/2025
Tanggal : 20 Mei 2025**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bontang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bontang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bontang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bontang tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XIX.SMD/5/2025 tanggal 20 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 20 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan, k**



**Mochammad Suharyanto S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No-45153**



WALI KOTA BONTANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bontang, Mei 2025

Walikota

dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG



WALI KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG
NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1)	273.607.969.471,45	584.521.534.086,41
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2)	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.3)	0,00	0,00
6	Kas Dana BOS	5.3.1.1.a.4)	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54
7	Kas Dana Kapitasi JKN	5.3.1.1.a.5)	1.605.416.610,60	1.946.947.502,60
8	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.a.6)	568.653.462,00	0,00
9	Kas BLUD	5.3.1.1.a.7)	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55
9	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.b.1)	63.162.418.077,00	55.164.999.100,00
11	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.b.2)	1.228.244.261,00	947.549.871,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.b.3)	7.790.241.980,22	2.369.779.863,22
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
15	Piutang Tranfer Antar Daerah	5.3.1.1.b.4)	0,00	21.955.167.000,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.c	(31.359.905.812,14)	(28.876.762.192,46)
17	Belanja Dibayar di Muka	5.3.1.1.d	639.432.676,00	627.150.278,00
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
22	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
23	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
24	Piutang Lainnya	5.3.1.1.b.5)	0,00	47.639.680.735,00
25	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.c	0,00	(5.075.420,00)
26	Persediaan	5.3.1.1.e	142.602.905.842,00	85.863.653.471,00
27	Jumlah Aset Lancar		466.220.854.921,34	790.946.839.841,86
28	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
29	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.a		
30	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
31	Investasi Dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
32	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
33	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.a	5.638.652.369,40	5.509.854.325,98
34	Jumlah Investasi Non Permanen		5.638.652.369,40	5.509.854.325,98
35	Investasi Permanen	5.3.1.2.b		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.b	256.273.028.271,14	229.673.259.715,01
37	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00

No	Uraian	Ref	2024	2023
38	Jumlah Investasi Permanen		256.273.028.271,14	229.673.259.715,01
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang		261.911.680.640,54	235.183.114.040,99
40				
41	ASET TETAP	5.3.1.3		
42	Tanah	5.3.1.3.a	894.118.450.408,00	887.408.927.014,00
43	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	1.511.364.046.327,00	1.251.592.918.697,00
44	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	2.581.291.923.138,12	2.278.112.282.276,12
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	3.221.292.724.738,00	2.758.400.752.100,00
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	78.794.396.864,00	76.206.062.560,00
47	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	211.691.971.792,00	164.285.126.421,00
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(3.615.251.801.059,00)	(3.274.158.392.164,00)
49	Jumlah Aset Tetap		4.883.301.712.208,12	4.141.847.676.904,12
50	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
51	Properti Investasi	5.3.1.4	36.732.340.272,00	36.732.340.272,00
52	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
53	Jumlah Properti Investasi		36.732.340.272,00	36.732.340.272,00
54	DANA CADANGAN	5.3.1.5		
55	Dana Cadangan	5.3.1.5	0,00	0,00
56	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
57	ASET LAINNYA	5.3.1.6		
58	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
59	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.6.a	2.983.389.987,00	828.832.832,00
60	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.b	246.121.650.427,00	246.121.650.427,00
61	Aset Tak Berwujud	5.3.1.6.c	121.044.226.668,00	117.928.855.251,00
62	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.6.d	(112.699.834.387,40)	(108.959.159.412,40)
63	Aset Lain-Lain	5.3.1.6.e	698.859.087.030,00	1.010.899.461.075,00
64	Jumlah Aset Lainnya		956.308.519.724,60	1.266.819.640.172,60
65	TOTAL SELURUH ASET		6.604.475.107.766,60	6.471.529.611.231,57
66				
67	KEWAJIBAN	5.3.2		
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	0,00	0,00
70	Utang Bunga		0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
73	Utang Belanja	5.3.2.1.b	37.654.681.939,00	44.824.535.795,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.c	0,00	0,00
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		37.654.681.939,00	44.824.535.795,00
76	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
77	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
78	Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
79	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
80	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
81	JUMLAH KEWAJIBAN		37.654.681.939,00	44.824.535.795,00
82				
83	EKUITAS	5.3.3		
84	EKUITAS	5.3.3	6.566.820.425.827,60	6.426.705.075.436,57
85				
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.604.475.107.766,60	6.471.529.611.231,57

Wali Kota



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



WALI KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	Ref	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.5.a	6.426.705.075.436,57	5.461.930.846.704,18
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.5.b	135.091.949.273,03	955.296.842.787,39
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.5.c		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
6	LAIN-LAIN		5.023.401.118,00	9.477.385.945,00
7	EKUITAS AKHIR	5.5.d	6.566.820.425.827,60	6.426.705.075.436,57

Wali Kota

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



WALI KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	157.725.862.180,95	123.482.869.878,42	34.242.992.302,53	27,73
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	107.816.580.560,03	2.928.936.840,00	104.887.643.720,03	3.581,08
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.c	4.137.180.321,93	3.487.431.779,72	649.748.542,21	18,63
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.d	73.645.002.683,08	138.184.916.008,14	(64.539.913.325,06)	(46,71)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		343.324.625.745,99	268.084.154.506,28	75.240.471.239,71	28,07
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.a				
12	Dana Bagi Hasil Pajak		152.871.607.000,00	168.235.765.000,00	(15.364.158.000,00)	(9,13)
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.223.483.180.000,00	1.662.372.869.000,00	(438.889.689.000,00)	(26,40)
14	Dana Alokasi Umum		267.889.833.686,00	240.542.351.201,00	27.347.482.485,00	11,37
15	Dana Alokasi Khusus		80.829.609.598,00	65.590.084.613,00	15.239.524.985,00	23,23
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.725.074.230.284,00	2.136.741.069.814,00	(411.666.839.530,00)	(19,27)
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.b				
19	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian		13.164.686.000,00	16.446.800.000,00	(3.282.114.000,00)	(19,96)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		13.164.686.000,00	16.446.800.000,00	(3.282.114.000,00)	(19,96)
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.c				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		206.382.175.164,00	238.763.572.219,00	(32.381.397.055,00)	(13,56)
25	Bantuan Keuangan		132.982.740.000,00	0,00	132.982.740.000,00	0,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		339.364.915.164,00	238.763.572.219,00	100.601.342.945,00	42,13
27	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		2.077.603.831.448,00	2.391.951.442.033,00	(314.347.610.585,00)	(13,14)
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
30	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.a	60.014.092.779,60	159.352.090.205,07	(99.337.997.425,47)	(62,34)
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.b	25.632.811.199,28	0,00	25.632.811.199,28	0,00
33	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		85.646.903.978,88	159.352.090.205,07	(73.705.186.226,19)	(46,25)
34	JUMLAH PENDAPATAN		2.506.575.361.172,87	2.819.387.686.744,35	(312.812.325.571,48)	(11,10)
35						
36	BEBAN	5.4.2				
37	Beban Pegawai	5.4.2.1	708.241.008.022,00	585.135.436.816,00	123.105.571.206,00	21,04

No	Uraian	Ref	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
38	Beban Persediaan	5.4.2.2.a	258.816.574.347,00	145.411.461.488,78	113.405.112.858,22	77,99
39	Beban Jasa	5.4.2.2.b	616.348.449.970,02	435.291.739.789,00	181.056.710.181,02	41,59
40	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.c	41.673.570.870,22	36.571.315.112,00	5.102.255.758,22	13,95
41	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.d	274.302.635.159,00	162.089.510.053,20	112.213.125.105,80	69,23
42	Beban Bunga	5.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Subsidi	5.4.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Hibah	5.4.2.5	49.938.220.008,00	92.088.583.690,00	(42.150.363.682,00)	(45,77)
45	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.6	1.199.600.000,00	1.645.992.234,00	(446.392.234,00)	(27,12)
46	Beban Penyusutan	5.4.2.7	343.034.728.084,00	285.564.829.621,00	57.469.898.463,00	20,12
47	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.8	2.552.523.136,43	4.371.524.461,51	(1.819.001.325,08)	(41,61)
48	Beban Transfer	5.4.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Beban Lain-lain	5.4.2.10	75.960.477.483,47	93.474.693.590,34	(17.514.216.106,87)	(18,74)
50	JUMLAH BEBAN		2.372.067.787.080,14	1.841.645.086.855,83	530.422.700.224,31	28,80
51						
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3.1	134.507.574.092,73	977.742.599.888,52	(843.235.025.795,79)	(86,24)
53						
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.2				
55	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non		44.666.377.405,00	55.245.688.304,00	(10.579.310.899,00)	(19,15)
56	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		0,00	121.986.951,98	(121.986.951,98)	100,00
58	Surplus Penyelesaian Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.177.473.484,30	16.216.008.797,91	(13.038.535.313,61)	(80,41)
60	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non		(43.372.103.491,00)	(76.900.549.815,00)	33.528.446.324,00	(43,60)
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Defisit Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Defisit Penghapusan Aset		0,00	(1.621.766.831,00)	1.621.766.831,00	(100,00)
65	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.285.474.160,00)	(13.975.052.653,02)	10.689.578.493,02	(76,49)
66	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.186.273.238,30	(20.913.685.245,13)	22.099.958.483,43	(105,67)
67						
68	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		135.693.847.331,03	956.828.914.643,39	(821.135.067.312,36)	(85,82)
69						
70	POS LUAR BIASA	5.4.3.5				
71	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Beban Luar Biasa		601.898.058,00	1.532.071.856,00	(930.173.798,00)	(60,71)
73	POS LUAR BIASA		(601.898.058,00)	(1.532.071.856,00)	930.173.798,00	(60,71)
74						
75	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.3.6	135.091.949.273,03	955.296.842.787,39	(820.204.893.514,36)	(85,86)

Wali Kota



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



WALI KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

No.	Uraian	Ref	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Pajak Daerah		150.018.177.986,95	118.218.692.064,81
4	Retribusi Daerah		107.833.253.435,03	2.961.878.370,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.137.180.321,93	3.487.431.779,72
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		66.245.438.500,08	139.459.759.861,15
7	Dana Bagi Hasil Pajak		173.553.679.000,00	137.901.212.119,50
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.515.746.095.989,00	1.396.592.239.499,50
9	Dana Alokasi Umum		267.889.833.686,00	240.542.351.201,00
10	Dana Alokasi Khusus		80.829.609.598,00	65.590.084.613,00
11	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian		13.164.686.000,00	16.446.800.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		228.337.342.164,00	259.257.683.219,00
14	Bantuan Keuangan		132.982.740.000,00	0,00
15	Hibah		2.296.338.156,60	67.554.692.895,00
16	Dana Darurat		0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya		73.210.793.519,28	0,00
18	Jumlah Arus Kas Masuk		2.816.245.168.356,87	2.448.012.825.622,68
19	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
20	Belanja Pegawai		709.969.282.885,00	571.593.451.714,00
21	Belanja Barang dan Jasa		1.257.207.393.171,71	867.525.260.190,32
22	Beban Bunga		0,00	0,00
23	Beban Subsidi		0,00	0,00
24	Beban Hibah		96.086.644.312,00	111.127.371.310,00
25	Beban Bantuan Sosial		1.199.600.000,00	1.645.992.234,00
26	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
27	Belanja Tak Terduga		601.898.058,00	1.532.071.856,00
28	Belanja Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
30	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
31	Jumlah Arus Kas Keluar		2.065.064.818.426,71	1.553.424.147.304,32
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	751.180.349.930,16	894.588.678.318,36
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
34	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
35	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.165.754.200,00	280.014.800,00
37	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		257.472.000,00	13.652.000,00
38	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00

No.	Uraian	Ref	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
40	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
41	Jumlah Arus Kas Masuk		1.423.226.200,00	293.666.800,00
42	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
43	Belanja Tanah		5.263.015.170,00	1.520.000.000,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin		243.101.129.946,00	245.818.086.686,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan		259.132.176.018,00	118.003.698.038,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		537.738.283.319,00	289.457.351.037,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.130.404.098,00	4.390.143.417,00
48	Belanja Aset Lainnya		1.600.123.816,00	1.844.684.359,00
49	Jumlah Arus Kas Keluar		1.051.965.132.367,00	661.033.963.537,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2.3	(1.050.541.906.167,00)	(660.740.296.737,00)
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
52	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
53	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
57	Penerimaan Piutang		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
59	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
60	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
62	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
63	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
64	Jumlah Arus Kas Keluar		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3.3	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)
66	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
67	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		21.308.333.227,00	28.695.866.298,00
69	Kiriman Uang Masuk (Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2022)		0,00	0,00
70	Jumlah Arus Kas Masuk		21.308.333.227,00	28.695.866.298,00
71	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		21.308.333.227,00	28.695.866.298,00
73	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (Transito)		0,00	0,00
74	Jumlah Arus Kas Keluar		21.308.333.227,00	28.695.866.298,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4.3	0,00	0,00
76				
77	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(324.361.556.236,84)	208.848.381.581,36
78	Saldo Awal Kas	5.5.6	605.260.697.136,10	396.412.531.479,74
79	Koreksi Saldo Awal Kas	5.5.7	1.258.376.998,00	0,00
80	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		273.607.969.471,45	584.521.534.086,41
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
82	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
83	Saldo Akhir Kas BLUD		5.241.023.205,67	17.728.342.936,55
84	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN di Klinik PNS dan Puskesmas		2.174.070.072,60	1.946.947.502,60
85	Saldo Akhir Kas Dana BOS		1.134.455.147,54	1.063.872.610,54
86	Saldo Akhir Kas	5.5.8	282.157.517.897,26	605.260.697.136,10

Wali Kota


dr. Hj. NENI MCERNIAENI, Sp. OG



WALI KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	148.640.154.163,00	150.018.177.986,95	100,93	118.218.692.064,81
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	126.512.187.027,00	107.833.253.435,03	85,24	2.961.878.370,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	4.075.813.311,00	4.137.180.321,93	101,51	3.487.431.779,72
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	17.101.812.892,00	67.668.664.700,08	395,68	139.753.426.661,15
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		296.329.967.393,00	329.657.276.443,99	111,25	264.421.428.875,68
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	142.148.124.443,00	173.553.679.000,00	122,09	137.901.212.119,50
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	1.583.433.574.000,00	1.515.746.095.989,00	95,73	1.396.592.239.499,50
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3)	263.439.139.000,00	267.889.833.686,00	101,69	240.542.351.201,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4)	88.462.309.996,00	80.829.609.598,00	91,37	65.590.084.613,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.077.483.147.439,00	2.038.019.218.273,00	98,10	1.840.625.887.433,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b	6.695.352.000,00	13.164.686.000,00	196,62	16.446.800.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		6.695.352.000,00	13.164.686.000,00	196,62	16.446.800.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	238.874.730.000,00	228.337.342.164,00	95,59	259.257.683.219,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2)	132.982.740.000,00	132.982.740.000,00	100,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		371.857.470.000,00	361.320.082.164,00	97,17	259.257.683.219,00
26	Total Pendapatan Transfer		2.456.035.969.439,00	2.412.503.986.437,00	98,23	2.116.330.370.652,00
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	1.684.139.648,00	2.296.338.156,60	136,35	67.554.692.895,00
30	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.c	26.688.035.104,00	73.210.793.519,28	0,00	0,00
32	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		28.372.174.752,00	75.507.131.675,88	266,13	67.554.692.895,00
33	JUMLAH PENDAPATAN		2.780.738.111.584,00	2.817.668.394.556,87	101,33	2.448.306.492.422,68

No	Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
34						
35	BELANJA	5.1.2				
36	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
37	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	736.619.612.973,00	709.969.282.885,00	96,38	571.593.451.714,00
38	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	1.360.705.501.733,42	1.257.207.393.171,71	92,39	867.525.260.190,32
39	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	99.609.483.114,00	96.086.644.312,00	96,46	111.127.371.310,00
42	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	1.200.000.000,00	1.199.600.000,00	99,97	1.645.992.234,00
43	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Belanja Operasi		2.198.134.597.820,42	2.064.462.920.368,71	93,92	1.551.892.075.448,32
45						
46	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
47	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	62.331.818.000,00	5.263.015.170,00	8,44	1.520.000.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	254.064.539.459,58	243.101.129.946,00	95,68	245.818.086.686,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	272.933.938.254,00	259.132.176.018,00	94,94	118.003.698.038,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	562.627.007.183,00	537.738.283.319,00	95,58	289.457.351.037,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	5.335.933.187,00	5.130.404.098,00	96,15	4.390.143.417,00
52	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	1.937.158.460,00	1.600.123.816,00	82,60	1.844.684.359,00
53	Jumlah Belanja Modal		1.159.230.394.543,58	1.051.965.132.367,00	90,75	661.033.963.537,00
54						
55	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
56	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	1.532.071.856,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	1.532.071.856,00
58						
59	TRANSFER					
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
61	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
65						
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.360.998.808.720,00	3.117.029.950.793,71	92,74	2.214.458.110.841,32
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(580.260.697.136,00)	(299.361.556.236,84)	(51,59)	233.848.381.581,36
69						
70	PEMBIAYAAN	5.1.4				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
72	Penggunaan SILPA	5.1.4.1	605.260.697.136,00	606.519.074.134,10	100,21	396.412.315.554,74
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Jumlah Penerimaan		605.260.697.136,00	606.519.074.134,10	100,21	396.412.315.554,74
85						

No	Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
87	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jumlah Pengeluaran		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
100						
101	Pembiayaan Netto		580.260.697.136,00	581.519.074.134,10	100,22	371.412.315.554,74
102						
103	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0,00	282.157.517.897,26	100,00	605.260.697.136,10

Wali Kota



dr. Hj. NENI MODERNIAENI, Sp. OG



WALI KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Ref	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	605.260.697.136,10	396.412.347.579,74
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(605.260.697.136,10)	(396.412.315.554,74)
3	Sub Total (1 + 2)		0,00	32.025,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		280.899.140.899,26	605.260.697.136,10
5	Sub Total (3 + 4)		280.899.140.899,26	605.260.729.161,10
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.3	1.258.376.998,00	(32.025,00)
7	Lain-Lain	5.2.4	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	282.157.517.897,26	605.260.697.136,10

Wali Kota

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bontang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bontang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bontang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bontang tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XIX.SMD/5/2025 tanggal 20 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 20 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan, k**



**Mochammad Suharyanto S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No-45153**



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	10
2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	17
2.1 EKONOMI MAKRO	17
2.1.1 ANGKATAN KERJA.....	19
2.1.2 TINGKAT KEMISKINAN.....	20
2.1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	21
2.1.4 INFLASI	22
3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD	23
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	23
3.1.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2024.....	24
3.1.2 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH TA 2024	24
3.1.3 TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TA 2024.....	25
3.2 TANTANGAN DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN....	25
3.3 MANDATORY SPENDING	26
4. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	30
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	30
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	31
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	33
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA PPKD.....	34
4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.....	34
4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO DAN BEBAN	41
4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET.....	45
4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS	52
4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSOLIDASI.....	54
4.4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	55
5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	65
5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	65
5.1.1 PENDAPATAN-LRA	65
5.1.2 BELANJA-LRA.....	96
5.1.3 SURPLUS – DEFISIT LRA.....	123
5.1.4 PEMBIAYAAN	124



5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	125
5.2	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	126
5.2.1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL TAHUN 2024.....	126
5.2.2	PENGUNAAN SALDO AWAL LEBIH.....	126
5.2.3	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA.....	126
5.2.4	LAIN-LAIN	127
5.2.5	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR.....	127
5.3	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	128
5.3.1	ASET	128
5.3.2	KEWAJIBAN	191
5.3.3	EKUITAS	193
5.4	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	194
5.4.1	PENDAPATAN-LO	194
5.4.2	BEBAN – LO.....	206
5.4.3	SURPLUS/DEFISIT – LO	228
5.5	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	235
5.5.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	235
5.5.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN.....	241
5.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	245
5.5.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	246
5.5.5	KENAIKAN PENURUNAN KAS	249
5.5.6	SALDO AWAL KAS.....	249
5.5.7	KOREKSI SALDO AWAL KAS.....	249
5.5.8	SALDO AKHIR KAS.....	249
5.6	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	251
5.7	PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG BELUM DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN	252
6.	INFORMASI NON KEUANGAN	254
6.1	GAMBARAN UMUM DAERAH	255
6.1.1	KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	255
6.1.2	TOPOGRAFI KOTA BONTANG	255
6.1.3	IKLIM.....	256
6.2	GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS	256
6.2.1	KEPENDUDUKAN.....	256
6.2.2	PENDIDIKAN	257
6.2.3	KESEHATAN.....	257
6.2.4	PRASARANA DAN SARANA DASAR.....	258
6.2.5	POTENSI UNGGULAN DAERAH	258
6.3	STRUKTUR ORGANISASI.....	260
6.4	VISI DAN MISI.....	262



7. PENUTUP	263
------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.1.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	17
Tabel 2.1.1.1.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	18
Tabel 2.1.1.1.3	Statistik Ketenagakerjaan.....	19
Tabel 2.1.2.1.1	Statistik Kemiskinan	20
Tabel 2.1.3.1.1	Statistik Indeks Pembangunan Manusia	21
Tabel 2.1.4.1.1	Inflasi.....	22
Tabel 3.1.1.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	23
Tabel 3.1.1.1.2	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024	24
Tabel 3.1.1.1.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	24
Tabel 3.1.2.1.1	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024.....	24
Tabel 3.1.3.1.1	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024	25
Tabel 3.3.1.1.1	<i>Mandatory Spending</i>	27
Tabel 4.4.6.3.1	Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan terhadap Aset Tetap.....	57
Tabel 4.4.6.4.1	Masa Manfaat Aset Tetap	63
Tabel 5.1.1.1.1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024	65
Tabel 5.1.1.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	66
Tabel 5.1.1.1.3	Hasil Penerimaan dari Pajak Daerah Pemerintah Kota Bontang TA 2024	67
Tabel 5.1.1.1.4	Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bontang TA 2024	72
Tabel 5.1.1.1.5	Retribusi Jasa Umum TA 2024	73
Tabel 5.1.1.1.6	Retribusi Jasa Usaha TA 2024	76
Tabel 5.1.1.1.7	Retribusi Perijinan Tertentu TA 2024	78
Tabel 5.1.1.1.8	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024.....	78
Tabel 5.1.1.1.9	Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bontang TA 2024	79
Tabel 5.1.1.1.10	Daftar Surat Keputusan Penjualan Peralatan dan Mesin TA 2024	80
Tabel 5.1.1.1.11	Daftar Surat Keputusan Penjualan Gedung dan Bangunan TA 2024	81
Tabel 5.1.1.1.12	Rincian Pendapatan Bunga TA 2024	82
Tabel 5.1.1.1.13	Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2024.....	83
Tabel 5.1.1.1.14	Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2024.....	84
Tabel 5.1.1.1.15	Rincian Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2024.....	84
Tabel 5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bontang TA 2024.....	86
Tabel 5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang ...	86
Tabel 5.1.1.2.3	Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2024 Pemerintah Kota Bontang	86
Tabel 5.1.1.2.4	Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Bontang	88
Tabel 5.1.1.2.5	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Bontang	89
Tabel 5.1.1.2.6	Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bontang.....	89
Tabel 5.1.1.2.7	Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Bontang.....	90
Tabel 5.1.1.2.8	Transfer Pemerintah Provinsi.....	91
Tabel 5.1.1.2.9	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kota Bontang	92
Tabel 5.1.1.2.10	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.....	92
Tabel 5.1.1.3.1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bontang.....	93
Tabel 5.1.1.3.2	Pendapatan Hibah Kota Bontang	93
Tabel 5.1.1.3.3	Daftar Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Pengembalian Lainnya	94
Tabel 5.1.1.3.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	95
Tabel 5.1.1.3.5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	95
Tabel 5.1.1.3.6	Dana IUPK	95



Tabel 5.1.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bontang Menurut Jenis Belanja.....	96
Tabel 5.1.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	97
Tabel 5.1.2.1.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023	98
Tabel 5.1.2.1.4	Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023	100
Tabel 5.1.2.1.5	Belanja pegawai BLUD, JKN dan BOS Tahun 2024 dan 2023	101
Tabel 5.1.2.1.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023	103
Tabel 5.1.2.1.7	Belanja Barang dan Jasa per perangkat daerah tahun 2024 dan tahun 2023..	104
Tabel 5.1.2.1.8	Belanja Barang BLUD, JKN, BOK, BOS, dan BOP Tahun 2024 dan 2023 .	105
Tabel 5.1.2.1.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah	108
Tabel 5.1.2.1.10	Belanja Hibah Uang Dana BOS Kinerja	110
Tabel 5.1.2.1.11	Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahap I	110
Tabel 5.1.2.1.12	Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahap II	111
Tabel 5.1.2.1.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	112
Tabel 5.1.2.1.14	Realisasi Belanja Bantuan Sosial	112
Tabel 5.1.2.2.1	Belanja Modal Pemerintah Kota Bontang.....	113
Tabel 5.1.2.2.2	Belanja Modal BLUD, JKN dan BOS Tahun 2024 dan 2023	113
Tabel 5.1.2.2.3	Belanja Modal Tanah.....	114
Tabel 5.1.2.2.4	Belanja Modal Tanah Perangkat Daerah.....	114
Tabel 5.1.2.2.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	115
Tabel 5.1.2.2.6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perangkat Daerah.....	116
Tabel 5.1.2.2.7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	118
Tabel 5.1.2.2.8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perangkat Daerah.....	118
Tabel 5.1.2.2.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	120
Tabel 5.1.2.2.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Perangkat Daerah.....	120
Tabel 5.1.2.2.11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	121
Tabel 5.1.2.2.12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah.....	121
Tabel 5.1.2.2.13	Belanja Modal Aset Lainnya.....	122
Tabel 5.1.2.2.14	Belanja Modal Aset Lainnya Perangkat Daerah.....	122
Tabel 5.1.2.3.1	Belanja Tak Terduga.....	123
Tabel 5.1.4.1.1	Pembiayaan Neto Kota Bontang	124
Tabel 5.1.4.1.2	Penerimaan Pembiayaan	124
Tabel 5.1.4.2.1	Pengeluaran Pembiayaan	125
Tabel 5.1.5.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	125
Tabel 5.2.1.1.1	Ringkasan LPSAL 2024 dan 2023	126
Tabel 5.3.1.1.1	Total Aset 2024.....	128
Tabel 5.3.1.1.2	Aset Lancar.....	128
Tabel 5.3.1.1.3	Kas dan Setara Kas	129
Tabel 5.3.1.1.4	Saldo Dana Operasional Sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	130
Tabel 5.3.1.1.5	Saldo Kas Kapitasi JKN.....	131
Tabel 5.3.1.1.6	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	132
Tabel 5.3.1.1.7	Kas di BLUD	132
Tabel 5.3.1.1.8	Piutang Pajak	133
Tabel 5.3.1.1.9	Piutang Pajak	134
Tabel 5.3.1.1.10	Ketetapan Pajak tahun 2024.....	134
Tabel 5.3.1.1.11	Piutang Pajak macet tahun 2024	135
Tabel 5.3.1.1.12	Piutang Retribusi.....	136
Tabel 5.3.1.1.13	Piutang Retribusi.....	137
Tabel 5.3.1.1.14	Piutang Retribusi macet Tahun 2024	138
Tabel 5.3.1.1.15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2024	138



Tabel 5.3.1.1.16	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	139
Tabel 5.3.1.1.17	Piutang Transfer Antar Daerah	140
Tabel 5.3.1.1.18	Reklasifikasi Saldo Awal Piutang Lainnya	141
Tabel 5.3.1.1.19	Piutang Lainnya	141
Tabel 5.3.1.1.20	Penyisihan Piutang.....	141
Tabel 5.3.1.1.21	Klasifikasi Persediaan per Jenis	142
Tabel 5.3.1.1.22	Persediaan per SKPD.....	143
Tabel 5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang	145
Tabel 5.3.1.2.2	Perkembangan Dana Bergulir	146
Tabel 5.3.1.2.3	Investasi Permanen	147
Tabel 5.3.1.2.4	Dividen PT BME	148
Tabel 5.3.1.2.5	Metode Penilaian Investasi Permanen.....	148
Tabel 5.3.1.3.1	Aset Tetap.....	149
Tabel 5.3.1.3.2	Aset tanah per SKPD	149
Tabel 5.3.1.3.3	Aset Peralatan dan Mesin.....	151
Tabel 5.3.1.3.4	Aset Peralatan dan Mesin per SKPD.....	151
Tabel 5.3.1.3.5	Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium ke Peralatan dan Mesin.....	153
Tabel 5.3.1.3.6	Mutasi Tambah Kapitalisasi Barang/Jasa ke Peralatan dan Mesin	154
Tabel 5.3.1.3.7	Reklasifikasi dari Persediaan ke Peralatan dan Mesin.....	154
Tabel 5.3.1.3.8	Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Peralatan dan Mesin	155
Tabel 5.3.1.3.9	Mutasi Masuk antar SKPD	155
Tabel 5.3.1.3.10	Mutasi Masuk Donasi/Hibah.....	156
Tabel 5.3.1.3.11	Mutasi Kurang Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin	156
Tabel 5.3.1.3.12	Mutasi Kurang antar KIB.....	157
Tabel 5.3.1.3.13	Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jasa	157
Tabel 5.3.1.3.14	Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan	157
Tabel 5.3.1.3.15	Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin	158
Tabel 5.3.1.3.16	Mutasi Kurang dari Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel.....	158
Tabel 5.3.1.3.17	Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan.....	159
Tabel 5.3.1.3.18	Aset Gedung dan Bangunan.....	159
Tabel 5.3.1.3.19	Aset Gedung dan Bangunan per SKPD.....	159
Tabel 5.3.1.3.20	Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium dan Barang/Jasa ke Gedung dan Bangunan	161
Tabel 5.3.1.3.21	Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Gedung dan Bangunan	162
Tabel 5.3.1.3.22	Mutasi Masuk dari SKPD Lain	162
Tabel 5.3.1.3.23	Mutasi kurang usulan penghapusan Gedung dan Bangunan	163
Tabel 5.3.1.3.24	Mutasi kurang gedung dan bangunan ke beban jasa.....	163
Tabel 5.3.1.3.25	Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KIB lainnya....	164
Tabel 5.3.1.3.26	Mutasi Keluar ke SKPD Lain	164
Tabel 5.3.1.3.27	Mutasi Kurang Reklas ke Ekstrakomptabel	165
Tabel 5.3.1.3.28	Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan.....	165
Tabel 5.3.1.3.29	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	166
Tabel 5.3.1.3.30	Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD.....	166
Tabel 5.3.1.3.31	Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	167
Tabel 5.3.1.3.32	Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	168
Tabel 5.3.1.3.33	Mutasi Kurang Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Beban Jasa	169
Tabel 5.3.1.3.34	Mutasi Kurang Reklasifikasi antar KIB dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	169
Tabel 5.3.1.3.35	Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan.....	170



Tabel 5.3.1.3.36	Aset Tetap Lainnya	170
Tabel 5.3.1.3.37	Aset Tetap Lainnya per SKPD	170
Tabel 5.3.1.3.38	Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB	172
Tabel 5.3.1.3.39	Mutasi Kurang antar KIB.....	173
Tabel 5.3.1.3.40	Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	173
Tabel 5.3.1.3.41	Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB	174
Tabel 5.3.1.3.42	Mutasi Kurang Reklasifikasi antar KIB	175
Tabel 5.3.1.3.43	Akumulasi Penyusutan.....	175
Tabel 5.3.1.3.44	Akumulasi penyusutan per SKPD.....	177
Tabel 5.3.1.3.45	Daftar Aset dan Akumulasi Penyusutan.....	178
Tabel 5.3.1.3.46	Aset Ekstrakomptabel	179
Tabel 5.3.1.4.1	Properti Investasi	180
Tabel 5.3.1.6.1	Aset Lainnya.....	180
Tabel 5.3.1.6.2	Aset Tak Berwujud per Jenis	183
Tabel 5.3.1.6.3	Aset Tak Berwujud per SKPD	183
Tabel 5.3.1.6.4	Amortisasi per SKPD.....	185
Tabel 5.3.1.6.5	Aset Lain-Lain per Jenis	186
Tabel 5.3.1.6.6	Daftar Aset Lain-Lain per SKPD	186
Tabel 5.3.1.6.7	Usulan Penghapusan Aset.....	188
Tabel 5.3.1.6.8	Penyusutan Penghapusan Aset.....	188
Tabel 5.3.1.6.9	Penghapusan Aset Lain-Lain	189
Tabel 5.3.1.6.10	Penyusutan Usulan Penghapusan Aset.....	190
Tabel 5.3.1.6.11	Aset Lainnya dan Amortisasi	190
Tabel 5.3.2.1.1	Kewajiban Jangka Pendek	191
Tabel 5.3.2.1.2	Utang Belanja per SKPD	192
Tabel 5.4.1.1.1	Pendapatan-LO	194
Tabel 5.4.1.1.2	Pendapatan Asli Daerah-LO	194
Tabel 5.4.1.1.3	Pendapatan Pajak Daerah-LO	195
Tabel 5.4.1.1.4	Ketetapan Pajak tahun 2024 dan 2023	196
Tabel 5.4.1.1.5	Selisih Pajak Daerah dalam LO dengan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024	197
Tabel 5.4.1.1.6	Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	197
Tabel 5.4.1.1.7	Selisih Pendapatan retribusi LO dengan pendapatan retribusi LRA.....	198
Tabel 5.4.1.1.8	Lain-lain PAD yang Sah-LO.....	199
Tabel 5.4.1.1.9	Selisih Pendapatan Asli Daerah Lainnya dalam LO terhadap LRA TA 2024	201
Tabel 5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer-LO	201
Tabel 5.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-LO.....	202
Tabel 5.4.1.2.3	Selisih Dana Perimbangan dalam LRA dengan Dana Perimbangan dalam LO.....	202
Tabel 5.4.1.2.4	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO.....	203
Tabel 5.4.1.2.5	Transfer Pemerintah Provinsi-LO.....	204
Tabel 5.4.1.2.6	Selisih Transfer Pemerintah Provinsi dalam LRA dengan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO	204
Tabel 5.4.1.2.7	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	204
Tabel 5.4.1.2.8	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO per SKPD	205
Tabel 5.4.1.2.9	Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LRA	205
Tabel 5.4.1.2.10	Pendapatan Hibah pada SKPD.....	206
Tabel 5.4.1.2.11	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	206
Tabel 5.4.2.1.1	Beban-LO	207



Tabel 5.4.2.1.2	Beban Pegawai.....	207
Tabel 5.4.2.1.3	Beban Pegawai per SKPD.....	208
Tabel 5.4.2.1.4	Selisih Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA.....	209
Tabel 5.4.2.2.1	Beban Barang dan Jasa	209
Tabel 5.4.2.3.1	Beban Persediaan	210
Tabel 5.4.2.3.2	Beban Persediaan per SKPD	211
Tabel 5.4.2.1.5	Selisih Beban Persediaan -LO dengan Belanja Persediaan - LRA	212
Tabel 5.4.2.4.1	Beban Jasa	213
Tabel 5.4.2.4.2	Beban Jasa per SKPD	217
Tabel 5.4.2.1.6	Selisih Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa – LRA.....	218
Tabel 5.4.2.5.1	Beban Pemeliharaan.....	219
Tabel 5.4.2.5.2	Beban Pemeliharaan per SKPD	219
Tabel 5.4.2.1.7	Selisih Beban Pemeliharaan -LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA.....	220
Tabel 5.4.2.6.1	Beban Perjalanan Dinas	221
Tabel 5.4.2.6.2	Beban Perjalanan Dinas per SKPD	221
Tabel 5.4.2.1.8	Selisih Beban Perjalanan Dinas dalam LO dan LRA	222
Tabel 5.4.2.9.1	Beban Hibah	223
Tabel 5.4.2.9.2	Beban Hibah per SKPD	223
Tabel 5.4.2.1.9	Selisih Beban Hibah -LO dengan Belanja Hibah – LRA	224
Tabel 5.4.2.10.1	Beban Bantuan Sosial	224
Tabel 5.4.2.13.1	Beban Penyusutan.....	225
Tabel 5.4.2.13.2	Beban Penyusutan per SKPD.....	225
Tabel 5.4.2.11.1	Beban penyisihan piutang pendapatan	226
Tabel 5.4.2.12.1	Beban Lain-lain per SKPD	227
Tabel 5.4.3.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per rincian objek	228
Tabel 5.4.3.3.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per jenis transaksi	229
Tabel 5.4.3.4.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per SKPD	229
Tabel 5.4.3.4.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per rincian objek	230
Tabel 5.4.3.4.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per jenis transaksi	231
Tabel 5.4.3.4.4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per SKPD.....	231
Tabel 5.4.3.6.1	Surplus/Defisit LO per SKPD.....	233
Tabel 5.5.1.1.1	Arus Kas Bersih.....	235
Tabel 5.5.1.1.2	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	236
Tabel 5.5.1.2.3	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	239
Tabel 5.5.1.2.4	Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi BLUD, JKN, BOK, BOS	240
Tabel 5.5.1.1.5	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	240
Tabel 5.5.2.1.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	241
Tabel 5.5.2.1.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	242
Tabel 5.5.2.1.3	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi BLUD, JKN, BOS.....	244
Tabel 5.5.2.3.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.....	245
Tabel 5.5.3.1.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....	245
Tabel 5.5.3.1.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....	246
Tabel 5.5.3.1.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	246
Tabel 5.5.4.1.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	247
Tabel 5.5.4.1.2	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	247
Tabel 5.5.4.1.3	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran.....	248
Tabel 5.5.4.1.4	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	248



Tabel 5.5.4.1.5	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	249
Tabel 5.5.4.1.6	Kenaikan/Penurunan Kas Bersih.....	249
Tabel 5.5.4.1.7	Saldo Awal Kas	249
Tabel 5.5.8.1.1	Saldo Akhir Kas.....	250
Tabel 5.6.1.1.1	Penjelasan Lain-lain yang Menyebabkan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SKPD	251
Tabel 5.6.1.1.2	Penjelasan Lain-lain yang Menyebabkan Perubahan Ekuitas.....	251
Tabel 6.1.1.1.1	Luas Kemiringan Lahan rata-rata Kota Bontang.....	256
Tabel 6.2.1.1.1	Indikator Kependudukan Kota Bontang.....	257



BAB I

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 menjadi tahun politik di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak. Tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh energi politik di seluruh negeri terserap, termasuk pada kebijakan anggaran. Dan pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia yang terdiri dari pemilihan gubernur (pilgub 2024) dan pemilihan bupati/walikota.

Sejalan dengan tema APBN Tahun Anggaran 2024, kebijakan fiskal tahun 2024, Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 memfokuskan pada pengembangan ekonomi daerah Kota Bontang, penanganan dampak inflasi akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak. Dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, dilaksanakan kebijakan-kebijakan, yaitu pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan, program perlindungan sosial, peningkatan daya saing dan produktivitas, serta optimalisasi pendapatan dan inovasi pembiayaan.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dipresentasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 320 ayat (2) menyatakan Laporan Keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan, antara lain masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat, yang berisi informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan melalui informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- f. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bontang serta hasil-hasil yang dicapai;
- g. mengenai posisi keuangan dan kondisi sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- h. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di bagian yang mengatur tentang keuangan negara;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



- o. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- w. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tanggal 3 Desember 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;



- z. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);
- cc. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 76);
- dd. Peraturan Walikota Bontang nomor 16 Tahun 2014 tanggal 24 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 11);
- ff. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 32);
- gg. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2024 tanggal tanggal 16 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 6);
- hh. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2024 tanggal tanggal 16 Agustus 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 21);

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan



- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Umum Anggaran

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Tantangan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD

BAB 5 PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja - LRA
 - 5.1.3. Surplus – Defisit LRA
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.4. Lain-lain
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan atas pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas



5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional

5.4.1. Pendapatan-LO

5.4.2. Beban-LO

5.4.3. Surplus/Defisit-LO

5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

5.5.5. Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.7 Pengungkapan Informasi yang Belum Disampaikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

BAB 6 INFORMASI NON KEUANGAN



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Perekonomian Kota Bontang tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 68,42 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 41,56 triliun rupiah.

Ekonomi Kota Bontang tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 2,15 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dari sisi produksi, kontraksi tertinggi dialami oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Pertambangan dan Pengalihan. Kontraksi ekonomi terjadi pada dua kategori lapangan usaha yaitu lapangan usaha pertambangan dan pengalihan dan lapangan usaha industri pengolahan dengan kontraksi sebesar 4,82 persen dan 4,99 persen. Sementara, untuk kategori lainnya mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.1.1.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	693,14	713,43	735,51	774,78	826,75
B. Pertambangan dan Pengalihan	268,01	294,56	320,47	252,92	248,51
C. Industri Pengolahan	44.129,95	46.021,84	49.683,27	53.372,25	52.226,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	21,50	21,07	22,62	27,22	30,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,00	15,66	16,44	17,27	19,35
F. Konstruksi	3.723,66	3.762,70	4.445,21	5.022,56	5.518,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.889,95	1.912,16	2.094,68	2.311,40	2.527,56
H. Transportasi dan Pergudangan	881,39	959,69	1.137,66	1.260,95	1.370,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	325,89	331,27	367,24	420,06	457,11
J. Informasi dan Komunikasi	477,33	506,00	534,15	582,63	680,85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	461,19	486,69	583,39	666,91	687,69
L. Real Estat	280,04	288,93	298,96	316,26	334,53
M,N. Jasa Perusahaan	276,02	287,92	333,00	378,00	418,63
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	806,42	815,60	865,90	888,47	1.116,22
P. Jasa Pangkatanan	673,24	699,09	777,73	836,67	905,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	510,30	594,83	634,47	687,68	720,18
R,S,T,U. Jasa lainnya	231,01	236,69	257,17	287,67	329,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	55.664,04	57.948,13	63.107,88	68.105,67	68.418,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Dalam lingkup regional Kalimantan Timur, PDRB Kota Bontang tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 7,98 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Ekonomi Kota Bontang didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha, yakni



Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 76,33 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 8,07 persen. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 3,70 persen, dan Transportasi dan Pergudangan dengan peranan sebesar 2,00 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 23,92 persen diikuti oleh lapangan usaha Informasi Komunikasi, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa lainnya dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan masing masing 13,94 persen, 10,63 persen, 9,98 persen, dan 8,96 persen.

Besarnya kinerja berbagai lapangan usaha ekonomi sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur PDRB Kota Bontang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya. Perekonomian Kota Bontang masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 76,33 persen, diikuti Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 8,07 persen, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 3,70 persen, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peranan sebesar 2,00 persen, dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan peranan sebesar 1,63 persen.

Tabel 2.1.1.1.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,50	2,27	2,28	1,57	5,86
B. Pertambangan dan Penggalian	-10,77	-10,32	-11,21	-5,93	-4,82
C. Industri Pengolahan	-3,77	1,63	1,64	3,87	-4,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,32	-2,14	3,89	17,41	10,63
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,86	4,36	4,96	4,89	8,96
F. Konstruksi	0,03	0,12	8,15	6,71	7,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,73	0,65	5,85	5,51	7,05
H. Transportasi dan Pergudangan	3,14	3,30	9,22	3,83	4,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,41	1,51	8,25	9,27	6,76
J. Informasi dan Komunikasi	5,60	5,92	5,38	6,32	13,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,45	2,44	10,12	10,19	1,3
L. Real Estat	4,08	0,22	1,35	2,81	4,87
M,N. Jasa Perusahaan	-1,72	1,65	5,23	6,04	7,34
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,18	1,01	6,12	2,53	23,92
P. Jasa Pengangkutan	5,28	2,24	2,32	5,05	4,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,65	14,16	4,23	5,48	3,76
R,S,T,U. Jasa lainnya	-1,02	1,08	6,35	5,65	9,98



Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-2,74	1,60	2,46	4,16	-2,51

Sumber: Kota Bontang Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kota Bontang

2.1.1 ANGKATAN KERJA

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Program pemerintah diharapkan dapat dilakukan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Jumlah angkatan kerja di Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sekitar 93.930 atau sebesar 67,75 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan, sebanyak 44.716 jiwa atau sekitar 32,25 persen tergolong sebagai bukan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau mengerjakan kegiatan lainnya.

Tabel 2.1.1.1.3 Statistik Ketenagakerjaan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja (15+)	132.766	135.172	135.172	138.878	138.646
Angkatan Kerja	91.932	90.071	99.150	94.923	93,930
Bekerja	83.232	81.136	91.408	87.575	87.299
Pengangguran terbuka	8.700	8.935	7.742	7.349	6,631
Bukan Angkatan Kerja	40.834	45.101	45.101	43.955	44.716
Sekolah	9.166	10.585	10.585	11.356	11,310
Mengurus Rumah Tangga	27.290	29.347	29.347	28.411	26,693
Lainnya	4.378	5.169	5.169	4.188	3,713
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,46%	9,92%	7,81%	7,74%	7,06
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,24	66,63	72,08	68,35	67,75

Sumber: Kota Bontang Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Jumlah angkatan kerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan, dengan kondisi jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran juga menurun. Terjadinya penurunan pengangguran sebesar 0,68 persen ini dapat disebabkan oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sangat memengaruhi aspek ketenagakerjaan melalui penambahan lapangan usaha/pekerjaan dan sebagainya.

Indikator untuk melihat angka pengangguran adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu proporsi penduduk yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2023 angka TPT di Kota Bontang adalah sebesar 7,74 persen dan pada tahun 2024 sebesar 7,06 persen. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Penurunan TPT tidak terlepas dari indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tercatat TKK di Kota Bontang adalah sebesar 92,94 persen pada tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 92,26 persen yang artinya terdapat peningkatan proporsi angkatan kerja yang bekerja.



2.1.2 TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan oleh BPS diukur melalui pengukuran konsumsi dengan menggunakan data Susenas. Berdasarkan pengolahan Susenas, dihitung besaran garis kemiskinan sebagai ukuran dalam menentukan kategori miskin. Seseorang dikategorikan miskin jika memiliki pengeluaran kurang dari atau dibawah garis kemiskinan tersebut. Garis Kemiskinan (GK) Kota Bontang berada pada level Rp801.945,00 per kapita per bulan atau meningkat sekitar Rp38.284,00 dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2023 pada level Rp763.661,00 per kapita per bulan. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin, artinya 3,74 persen penduduk Kota Bontang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp801.945,00.

Kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2024 mengalami penurunan. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin menjadi 3,74 persen pada tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kota Bontang yang hidup di atas garis kemiskinan. Penduduk yang sebelumnya di bawah garis kemiskinan yang kemudian karena ekonominya membaik maka dapat terangkat ke atas garis kemiskinan pada periode berikutnya. Begitu pula sebaliknya dengan mereka yang sedikit di atas garis kemiskinan pada periode sebelumnya, akan dapat turun ke bawah garis kemiskinan ketika perekonomiannya terguncang.

Tabel 2.1.2.1.1 Statistik Kemiskinan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	636.491	665.572	697.326	763.661	801.945
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	7.91	8.41	8.39	8.39	7,11
Penduduk Miskin (%)	4.38	4.62	4.54	4.11	3,74
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0.54	0.47	0.37	0.39	0,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0.09	0.08	0.05	0.05	0,04

Sumber: Kota Bontang Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 3,74 persen, menurun 0,37 persen poin terhadap tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Kota Bontang tahun 2024 sebanyak 7,11 ribu orang, menurun 0,6 ribu orang terhadap tahun 2023. Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bontang pada tahun 2023 sebesar 0,39 turun sebesar 0,08 poin pada tahun 2024 menjadi 0,31. Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bontang tercatat menurun yang diindikasikan oleh perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,05 turun sebesar 0,01 poin pada tahun 2024 menjadi 0,04.



2.1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan 4 indikator utama yang digunakan yakni: Derajat Kesehatan dan usia hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dan Standar hidup layak yang diukur dengan daya beli masyarakat. Pembangunan manusia di Kota Bontang terus mengalami kemajuan. Status pembangunan manusia Kota Bontang sudah berada di level “sangat tinggi” sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 IPM Kota Bontang mencapai 80,06 dan terus meningkat hingga mencapai 82,49 pada tahun 2024. Secara rata-rata pertumbuhan IPM Kota Bontang dari tahun 2020-2024 sebesar 0,61 poin atau 0,75 persen.

Pada tahun 2024, IPM di Kota Bontang naik sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi karena keseluruhan dimensi penyusun IPM mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada dimensi standar hidup layak dimana rata-rata pengeluaran riil per kapita naik sebesar 4,16 persen. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan dimensi umur panjang dan hidup sehat mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami perlambatan. Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 2,23 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,90 persen dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya 1,02 persen, serta Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pertumbuhannya dari 0,16 persen menjadi 0,29 persen.

Tabel 2.1.3.1.1 Statistik Indeks Pembangunan Manusia

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,79	10,80	10,81	10,92	10,97
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,03	13,17	13,18	13,43	13,73
Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,28	74,55	74,57	74,81	75,03
Pengeluaran Riil Per kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	16.278	16.765	17.327	17.659	18.394
Indeks Pembangunan Manusia	80,02	80,59	80,74	81,63	82,49

Peningkatan IPM Kota Bontang 2024 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,03 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020 LF). Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 meningkat 0,3 tahun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 13,73 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,05 tahun, dari 10,92 tahun menjadi 10,97 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil



Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan). Pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran riil per kapita di Kota Bontang sebesar 18,394 juta rupiah, meningkat 735 ribu rupiah (4,16 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.4 INFLASI

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Timur di 4 kabupaten/kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,47 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,38 pada Desember 2023 menjadi 106,93 pada Desember 2024. Secara *month to month* (m-to-m), terjadi kenaikan indeks harga (inflasi).

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,64 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,65 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,92 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,67 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 2,03 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,62 persen.

Tabel 2.1.4.1.1 Inflasi

Daerah Penentu Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
Balikpapan	0,86	2,15	5,51	3,60	1,11
Samarinda	0,65	2,05	5,22	3,37	1,50
Kalimantan Timur	0,78	2,28	5,35	3,46	1,47
Indonesia	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Indikator dalam kinerja keuangan masih menggunakan serapan anggaran.

Tabel 3.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan (juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	199.787,61	245.901,87	231.351,60	264.421,43	329.657,27
Pajak Daerah	100.014,20	116.883,39	134.539,08	118.218,69	150.018,18
Retribusi Daerah	4.490,74	2.937,30	3.959,82	2.961,88	107.833,25
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.561,26	2.747,61	3.847,66	3.487,43	4.137,18
Lain-lain PAD yang Sah	92.721,42	123.333,57	89.005,05	139.753,43	67.668,66
2. Dana Transfer	1.239.620,18	923.312,58	1.488.368,99	2.116.330,37	2.412.503,99
DBH Pajak	147.435,53	110.206,99	183.119,36	137.901,21	173.553,68
DBH Sumber Daya Alam	602.408,45	329.031,57	809.468,54	1.396.592,24	1.515.746,10
Dana Alokasi Umum	229.778,99	225.977,74	224.104,36	240.542,35	267.889,83
Dana Alokasi Khusus	60.438,92	75.882,54	68.050,83	65.590,09	80.829,61
Dana Penyesuaian	85.731,30	44.114,43	16.205,60	16.446,80	13.164,69
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.827,00	138.099,32	187.420,30	259.257,68	361.320,08
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	90.711,49	37.622,55	78.193,14	67.554,69	75.507,13
Pendapatan Hibah	86.139,65	31.903,18	31.522,30	67.554,69	2.296,34
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	4.571,83	5.719,37	46.670,84	0,00	73.210,79
Jumlah	1.530.119,29	1.206.837,01	1.797.913,74	2.448.306,49	2.817.668,39



Serapan anggaran atas realisasi belanja daerah TA 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Jenis Belanja	Realisasi Belanja (juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	1.056.646,87	1.132.943,99	1.191.858,65	1.551.892,07	2.064.462,92
Belanja Pegawai	501.023,77	514.312,21	548.463,61	571.593,45	709.969,28
Belanja Barang dan Jasa	510.489,48	559.932,67	600.544,25	867.525,26	1.257.207,39
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	44.227,70	58.699,12	39.655,25	111.127,37	96.086,64
Belanja Bantuan Sosial	234,94	0,00	2.882,79	1.645,99	1.199,60
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	670,98	0,00	312,75	0,00	0,00
Belanja Modal	336.342,84	217.831,32	250.247,64	661.033,97	1.051.965,13
Belanja Tidak Terduga	56.080,90	9.229,57	2.472,54	1.532,07	601,90
Jumlah	1.449.070,61	1.360.004,88	1.444.578,83	2.214.458,11	3.117.029,95

3.1.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran juga merupakan alat bantu pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan. Alokasi anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 3.1.1.1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	296.329.967.393,00	329.657.276.443,99
Pendapatan Transfer	2.456.035.969.439,00	2.412.503.986.437,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.372.174.752,00	75.507.131.675,88
Jumlah Pendapatan Daerah	2.780.738.111.584,00	2.817.668.394.556,87

3.1.2 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH TA 2024

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target keuangan. Serapan anggaran menunjukkan kinerja yang positif. Alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 3.1.2.1.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.198.134.597.820,42	2.064.462.920.368,71



Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	1.159.230.394.543,58	1.051.965.132.367,00
Belanja Tidak Terduga	3.633.816.356,00	601.898.058,00
Jumlah Belanja Daerah	3.360.998.808.720,00	3.117.029.950.793,71

3.1.3 TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TA 2024

Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 terdiri dari penggunaan SiLPA tahun lalu dan penyertaan modal, dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 3.1.3.1.1 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	605.260.697.136,00	606.519.074.134,10
Pembiayaan Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00

3.2 TANTANGAN DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut:

- 1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk objek pajak tertentu;
- 2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- 4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan Kota Bontang;
- 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2024 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan RPJPD dan arahan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026, secara vertikal juga harus menjadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik
- 3) Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir



- 4) Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas
- 5) Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
- 6) Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah
- 7) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif

3.3 MANDATORY SPENDING

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Besarnya dana tersebut telah dialokasikan secara pasti (*earmarked*) setiap tahun berdasarkan konstitusi (UUD 1945), atau dalam undang-undang organik secara sektoral. Belanja ini juga diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya urusan dan bidang tertentu, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah untuk tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Belanja wajib fungsi pendidikan ini dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran yang menunjang fungsi Pendidikan, alokasi disusun sesuai KMK No. 35/KM.7/2024 tentang Perubahan atas KMK No.10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Belanja infrastruktur pelayanan public yang langsung berkaitan dengan percepatan Pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Infrastruktur Langsung, seperti: pembangunan prasarana/aplikasi/sistem, rehabilitasi prasarana, pengembangan prasarana, revitalisasi prasarana;
 - 2) Belanja Infrastruktur yang bersifat Tidak Langsung, seperti: pemeliharaan prasarana dan sarana, pengembangan sarana, penyediaan sarana, pengelolaan prasarana dan sarana, pengadaan sarana, operasional;
 - 3) Belanja Infrastruktur pendukung, seperti: penyediaan bahan logistik, survei, desain, investigasi, supervisi Pembangunan.Alokasi belanja wajib infrastruktur pelayanan publik disusun sesuai KMK No. 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas KMK No.11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD
- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah



PEMERINTAH KOTA BONTANG

dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Kota Bontang tidak mengalokasikan ADD, karena tidak memiliki wilayah Desa.

Tabel 3.3.1.1.1 Mandatory Spending

No	Uraian	Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	Dalam APBD	Realisasi	%
		%	(Rp)	%	(Rp)	
1	2		3	4	5	6
A	FUNGSI PENDIDIKAN	20,00%	682.165.520.352,00	20,31%	646.316.906.148,00	94,74%
A.1	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		522.594.807.457,00	15,55%	493.027.478.227,00	94,34%
	1) Belanja Operasi		370.593.094.403,00		346.998.806.839,00	93,63%
	2) Belanja Modal		152.001.713.054,00		146.041.671.388,00	96,08%
A.2	Urusan Bidang Perpustakaan		24.489.150.841,00	0,73%	23.660.114.393,00	96,61%
	1) Belanja Operasi		17.066.981.261,00		16.420.817.443,00	96,21%
	2) Belanja Modal		7.422.169.580,00		7.239.296.950,00	97,54%
A.3	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		98.500.692.854,00	2,93%	94.164.107.542,00	95,60%
	1) Belanja Operasi		65.992.626.431,00		62.977.748.660,00	95,43%
	2) Belanja Modal		32.508.066.423,00		31.186.358.882,00	95,93%
A.4	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain		36.580.869.200,00	1,10%	35.465.205.986,00	96,95%
	1) Belanja Transfer		0,00		0,00	0,00
	2) Belanja pada SKPD lain yang menunjang fungsi pendidikan a) Sekretariat Daerah (Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi (Pegiat Agama) b) Sekretariat Daerah (Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat) Belanja Sewa Asrama Belanja Beasiswa		25.462.869.200,00 1.217.000.000,00 9.901.000.000,00		25.441.110.259,00 1.023.099.076,00 9.000.996.651,00	99,91% 84,07% 90,91%
B	BELANJA FUNGSI KESEHATAN	10,00%	512.782.694.327,00	16,41%	465.700.667.921,00	0,00%
B.1	Belanja pada Dinas Kesehatan		263.793.346.969,00		261.805.073.004,00	0,00%



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Uraian	Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	Dalam APBD	Realisasi	%
		%	(Rp)	%	(Rp)	
1	2		3	4	5	6
	1) Belanja Operasi		231.258.563.220,00		233.289.227.286,00	100,88%
	a) Belanja Pegawai		142.831.468.277,00		150.802.612.837,00	105,58%
	b) Belanja Barjas		87.927.094.943,00		81.986.614.449,00	93,24%
	c) Belanja Hibah		500.000.000,00		500.000.000,00	100,00%
	2) Belanja Modal		32.530.122.845,00		28.515.845.718,00	87,66%
B.2	Belanja di Luar Dinas Kesehatan (RSUD Taman Husada)		248.989.347.358,00		203.895.594.917,00	82,09%
	1) Belanja Operasi		179.386.492.257,00		139.163.844.980,00	0,00%
	a) Belanja Pegawai		63.036.770.811,00		38.658.249.804,00	61,33%
	b) Belanja Barjas		116.349.721.446,00		100.505.595.176,00	86,38%
	c) Belanja Hibah		0,00		0,00	0,00
	d) Belanja Bansos		0,00		0,00	0,00
	2) Belanja Modal		69.602.855.101,00		64.731.749.937,00	93,00%
C	BELANJA FUNGSI PENGAWASAN	0,46%	16.424.590.714,00	0,65	14.436.571.572,00	87,90%
C.1	Belanja pada Inspektorat Daerah		21.776.936.904,00	0,65	18.450.587.900,00	95,13%
	1) Belanja Operasi		17.413.208.406,00		17.068.110.570,00	
	a) Belanja Pegawai diluar belanja gaji dan tunjangan ASN		8.027.363.416,00		7.865.481.141,00	97,98%
	b) Belanja Barang dan Jasa		9.385.844.990,00		9.202.629.429,00	98,05%
	2) Belanja Modal		1.599.863.330,00		1.382.477.330,00	86,41%
D	BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH	38,65%	1.305.994.572.030,00		1.191.979.522.482,00	91,27%
	1) Belanja Modal Tanah		62.331.818.000,00		5.263.015.170,00	8,44%
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin		254.064.539.459,00		243.101.129.946,00	95,68%
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		272.933.938.254,00		259.132.176.018,00	94,94%
	4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		562.627.007.183,00		537.738.283.319,00	95,58%
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.335.933.187,00		5.130.404.098,00	96,15%
	6) Belanja Modal Aset Lainnya		1.937.158.460,00		1.600.123.816,00	82,60%
	7) Belanja Pemeliharaan		45.954.694.373,00		42.728.145.803,00	92,98%
	8) Belanja Hibah		99.609.483.114,00		96.086.644.312,00	96,46%
	9) Belanja Bantuan Sosial		1.200.000.000,00		1.199.600.000,00	99,97%
E	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	1,40%	47.159.373.697,00		41.069.869.892,00	87,09%

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Uraian	Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	Dalam APBD	Realisasi	%
		%	(Rp)	%	(Rp)	
1	2		3	4	5	6
	Belanja pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan					
	1) Belanja Barang Jasa		15.366.029.909,00		14.850.558.350,00	96,65%
	Pengurang (belanja pemeliharaan)		-231.707.500,00		-226.800.844,00	97,88%
	2) Belanja diluar SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan, yang menunjang Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN		27.056.991.000,00		26.446.112.386,00	97,74%
G	ALOKASI DANA DESA (ADD)		0,00		0,00	



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan tataran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pedoman dan standar bagi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Di Pemerintah Kota Bontang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah kota Bontang terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan Finansial

terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang yaitu basis akrual. Namun demikian, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Pemerintah Kota Bontang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bontang masih berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah



atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bontang.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kota Bontang, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kelima, periodisitas adalah pelaporan keuangan dan kegiatan akuntansi Pemerintah Kota Bontang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kota Bontang dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah Tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Bontang (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi untuk aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah yang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan Pemerintah Kota Bontang;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengukuran, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis pengukurannya. Akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dan dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai

uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kriteria pengukuran pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengukuran didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengukuran transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA PPKD

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.4.1.1 PENDAPATAN LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut sumber yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan terdiri dari Pendapatan hibah, Pendapatan dana darurat, dan Pendapatan lainnya.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan-LRA juga diakui saat:

a. Kas diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD,



dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan

- b. Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah Kota Bontang berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;

- a. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui sebagai Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak;
- b. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima;
- c. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika pembayaran diterima pemerintah daerah;
- d. Pengakuan pendapatan untuk pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengukuran dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan Tahun berkenaan setelah berakhirnya Tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan Tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

Koreksi Pendapatan LRA dilakukan Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, serta atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.1.2 BELANJA LRA

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja pegawai adalah pengeluaran dalam bentuk gaji dan tunjangan, atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Bunga merupakan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Hibah merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak



diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang antara lain belanja per unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Belanja juga diakui saat: Kas yang digunakan untuk belanja yang digunakan langsung oleh Satker/SKPD dan tanpa penyetoran ke RKUD terlebih dahulu dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai belanja daerah.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, informasi lain yang dianggap perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian belanja per SKPD sampai dengan rincian objek belanja;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka laporan keuangan;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut, dan yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh **kriteria** sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: bertambah ekonomis/efisien dan/atau, bertambah umur ekonomis dan/atau, bertambah volume dan/atau, bertambah kapasitas produksi; dan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan:
 - 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pemeliharaan barang/aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp2.000.000,00; Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00; Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya, kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00; Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar



Rp150.000,00.

- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pemeliharaan barang/aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00.

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Penganggaran belanja hibah didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi kepada pemerintah kota didefinisikan sebagai berikut:

- a. Bantuan keuangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang pertanggungjawabannya menjadi wewenang Pemerintah Kota Bontang, sehingga bantuan tersebut diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Bontang harus diakui sebagai penerimaan Pemerintah Kota Bontang. Untuk itu, belanja-belanja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme APBD Pemerintah Kota Bontang dan menjadi bagian dari belanja daerah yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Bantuan keuangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang pertanggungjawabannya menjadi wewenang Pemerintah Pusat/Provinsi (seperti Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang hanya sebagai kepanjangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan atau sebagai penerima barang/jasa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Pengeluaran bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi ini tetap disajikan sebagai belanja pada LRA Pemerintah Pusat/Provinsi dan tidak dicatat sebagai belanja Pemerintah Kota Bontang.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Belanja tidak terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bontang, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya

yang telah ditutup.

4.4.1.3 SURPLUS - DEFISIT LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.4.1.4 PEMBIAYAAN LRA

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan pada pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang, pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang dan informasi lain yang dianggap perlu.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO DAN BEBAN

4.4.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas **pelaporan** dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.



Pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif, yaitu:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO
- c. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah dilalui
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan untuk pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengukuran pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan

terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Koreksi Pendapatan LO pada pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama, dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.2.2 BEBAN-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada

pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kota Bontang menggunakan pendekatan yaitu Metode Pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*straight line method*).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Rincian beban per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.4.2.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4.4.2.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit



sebelum pos luar biasa

4.4.2.5 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik, yakni kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.2.6 SURPLUS – DEFISIT LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.2.7 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4.2.8 TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Bontang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat



dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum dipertanggungjawabkan hingga pelaporan neraca, termasuk uang tunai dan saldo simpanan di bank pada SKPD/BLUD. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Penilaian investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pengakuan hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bontang dan/atau hak Pemerintah Kota Bontang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak



daerah yang belum ditransfer. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir Tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Bontang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah Kota Bontang, dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Bontang. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat



ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kota Bontang adalah dana bergulir yang ada di UPT Dana Bergulir dibawah Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan Koperasi di wilayah Kota Bontang. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Bontang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. Perumda AUJ
- b. Perumda Tirta Taman
- c. PT BME
- d. Bankaltim

Pengakuan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Bontang dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Bontang dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Penilaian investasi Pemerintah Kota Bontang dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Kota Bontang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi Pemerintah Kota Bontang setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang



diterima Pemerintah Kota Bontang akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Bontang dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota Bontang, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dalam kegiatan Pemerintah Kota Bontang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai digunakan berikut:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat pelaporan. Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar (material). Aset tetap yang nilai per unitnya kecil (tidak material) dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana cadangan diakui pada saat terjadi realisasi pembentukan dana cadangan yaitu saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas



Daerah ke Rekening dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Bontang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS) atau *Built Operate Transfer* (BOT). Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG) atau *Built Tranfer Operate* (BTO). Dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap/nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah kepada pihak ketiga ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa dan dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset tak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal

pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dapat meliputi software komputer yang memiliki manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, lisensi dan franchise, goodwill, hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya, royalti, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, biaya rencana pembangunan berupa Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED). FS adalah studi kelayakan sebuah penilaian terhadap kepraktisan rencana atau proyek yang diusulkan. DED adalah gambar desain teknis secara detail yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan proyek.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai dengan lima tahun dicatat sebagai Aset lainnya-Aset Tidak Berwujud. Setelah Tahun kelima FS dan DED tersebut apabila belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset lainnya-Aset Lain-lain. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan. Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Aset lain-lain terdiri dari aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Bontang, aset yang belum bernilai dan aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Bontang direklasifikasi ke dalam aset lain-lain setelah ada usulan penghapusan dari SKPD. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Persediaan dicatat dengan metode periodik, pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- h. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- i. Aset tak berwujud dicatat sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada

pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*);
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya:

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, yang atas hal tersebut belum dibayar. Jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
- b. Pengukuran Utang Transfer. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Pengukuran Utang Bunga. Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas terdiri dari Ekuitas dan Surplus Defisit LO
- b. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain
- c. Ekuitas SAL
- d. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- e. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD dan Rekening Koran SKPD, yang akan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSOLIDASI

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Prosedur Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

4.4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain sebagai berikut:

4.4.6.1 PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), dan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Harga pokok produksi persediaan, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp500.000,00 yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dicatat sendiri di dalam inventaris non aset dan diakui sebagai beban persediaan, sehingga akan mengurangi ekuitas.

Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang/fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.4.6.2 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan kualitas piutang setelah melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya

dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diberlakukan terhadap piutang transfer.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan piutang dana bergulir dihitung berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas macet sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet.

4.4.6.3 KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu Tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00;
- b. Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar



Rp500.000,00;

- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku – buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00;
- d. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp150.000,00; dan
- e. Aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset; dan
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian tersebut adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal sebagaimana kondisi awal aset tersebut diperoleh, atau hanya untuk memindahkan atau mempercantik suatu aset tetap.

Kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak disertai dengan penambahan umur ekonomis sedangkan kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan bangunan disertai dengan penambahan umur ekonomis dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4.6.3.1 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan terhadap Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Berat Apung	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkut			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	10% s.d. 15%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	25% s.d. 50%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	10% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	25% s.d. 50%	1
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	10% s.d. 15%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	10% s.d. 15%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Alat Bengkel Tidak Bermesin	Renovasi	>50% s.d. 75%	1
Alat Ukur	Overhaul	10% s.d. 15%	1
		>25% s.d. 75%	2
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	10% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 40%	2
		>51% s.d. 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Studio	Overhaul	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Komunikasi	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
Alat Pemancar	Overhaul	10% s.d. 15%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	10% s.d. 30%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	10% s.d. 15%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Unit Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	10% s.d. 15%	3
		>25% s.d. 50%	5



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	7
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Radiation Aplication & On Destructive Testing Laboratory	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Alat Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	10% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>50% s.d. 75%	1
Senjata Sinar	Overhaul	50% s.d. 75%	1
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>50% s.d. 75%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	15% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	15% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	15% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	10% s.d. 15%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	10% s.d. 30%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	25% s.d. 75%	1
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	Renovasi	>25% s.d. 75%	1
Sumur			
Produksi	Renovasi	>25% s.d. 75%	1
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	10% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
Alat Bantu Produksi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	6
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
Alat Pelindung	Renovasi	>50% s.d. 75%	1
Alat SAR	Renovasi	>25% s.d. 50%	1
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Peralatan Proses/Produksi		10% s.d. 25%	2
Unit Peralatan Proses/ Produksi	Overhaul	>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
Rambu-Rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	2,5% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu/Peringatan/Prasasti	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jalan dan Jembatan:			
Jalan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	1% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	1% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	1% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	1% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	1% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/ Air Kotor	Renovasi	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	2,5% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	2,5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	2,5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	2,5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	2,5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	2,5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	2,5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	Renovasi	2,5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	2,5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	2,5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	10% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	10% s.d 75%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	10% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	10% s.d 75%	5

4.4.6.4 PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Bontang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen sebagai berikut ini.

- Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- Untuk aset sumbangan /hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 Tahun). Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus :

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 Tahun.

Tabel 4.4.6.4.1 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Mesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen / Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu- Rambu	50
1	3	3	11	Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Mium	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Barang bercorak kesenian / Kebudayaan	Tidak disusutkan
1	3	5	02	Hewan ternak dan tumbuhan	Tidak Disusutkan
1	3	5	03	Aset Tetap – Renovasi	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
1	3	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa peminjaman/sewa.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang dicatat menggunakan basis kas.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan pada rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.780.738.111.584,00 dan realisasi selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.817.668.394.556,87 atau 101,33% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp329.657.276.443,99, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.412.503.986.437,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp75.507.131.675,88. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	296.329.967.393,00	329.657.276.443,99	111,25	264.421.428.875,68
Pendapatan Transfer	2.456.035.969.439,00	2.412.503.986.437,00	98,23	2.116.330.370.652,00
Pendapatan Lain-lain yang Sah	28.372.174.752,00	75.507.131.675,88	266,13	67.554.692.895,00
Jumlah	2.780.738.111.584,00	2.817.668.394.556,87	101,33	2.448.306.492.422,68



Penjelasan atas realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut ini.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Bontang untuk periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.1.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	148.640.154.163,00	150.018.177.986,95	100,93	118.218.692.064,81
Pendapatan Retribusi Daerah	126.512.187.027,00	107.833.253.435,03	85,24	2.961.878.370,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311,00	4.137.180.321,93	101,51	3.487.431.779,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.101.812.892,00	67.668.664.700,08	395,68	139.753.426.661,15
Jumlah	296.329.967.393,00	329.657.276.443,99	111,25	264.421.428.875,68

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp329.657.276.443,99 atau 111,25% dari anggaran sebesar Rp296.329.967.393,00. Hal ini menunjukkan kenaikan Rp65.235.847.568,31 atau 24,67% dari realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp264.421.428.875,68. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2024 tersaji sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penetapan tarif pajak daerah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp150.018.177.986,95 atau 100,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp148.640.154.163,00 serta dapat dijelaskan bahwa dalam realisasi tersebut terdapat pembayaran piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp2.226.532.232,00. Dari ketetapan di tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp147.791.645.754,95.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp118.218.692.064,81 dengan kenaikan sebesar



Rp31.799.485.922,14 atau 26,90%, lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel.

Tabel 5.1.1.1.3 Hasil Penerimaan dari Pajak Daerah Pemerintah Kota Bontang TA 2024

Uraian Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2024 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Pajak Hotel	1.784.418.873,00	1.951.400.183,00	12.169.678,00	1.963.569.861,00	110,04	1.624.455.991,50
Pajak Restoran	21.967.232.238,00	26.949.018.191,00	460.711.782,00	27.409.729.973,00	124,78	20.116.052.505,91
Pajak Hiburan	3.260.082.135,00	3.082.442.331,00	1.110.000,00	3.083.552.331,00	94,59	1.958.767.487,90
Pajak Reklame	1.646.011.408,00	1.006.665.802,50	17.998.060,00	1.024.663.862,50	62,25	1.126.670.784,25
Pajak Penerangan Jalan	36.000.000.000,00	39.605.146.598,00	0,00	39.605.146.598,00	110,01	16.521.395.606,00
Pajak Parkir	400.932.000,00	326.859.860,00	0,00	326.859.860,00	81,53	323.538.100,00
Pajak Air Tanah	6.448.848.914,00	8.612.515.660,00	26.639.950,00	8.639.155.610,00	133,96	8.000.394.568,00
Pajak Sarang Burung Walet	3.150.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	33,33	1.050.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	2.421.862.102,50	0,00	2.421.862.102,50	121,09	724.137.866,25
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	65.419.511.595,00	56.582.354.918,00	1.707.902.762,00	58.290.257.680,00	89,10	56.179.396.640,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.709.967.000,00	7.252.330.108,95	0,00	7.252.330.108,95	74,69	11.642.832.515,00
Jumlah	148.640.154.163,00	147.791.645.754,95	2.226.532.232,00	150.018.177.986,95	100,93	118.218.692.064,81

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan pajak daerah TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dalam hal ini hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh). Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah omzet/nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai omzet. Realisasi pajak hotel sebesar Rp1.963.569.861,00 mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1.784.418.873,00 atau 110,04%, dan mengalami kenaikan sebesar Rp339.113.869,50 atau 20,88% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.624.455.991,50. Kenaikan realisasi pajak hotel dikarenakan terdapat temuan BPK tahun 2023 sebesar Rp181.282.932,00 terhadap Penginapan Hajar Aswad, Hotel Raodah 2, Hotel Grand Raodah dan Hotel Tiara Surya, dan telah disetorkan ke Kasda sebesar Rp146.275.721,00 Dari



realisasi sebesar Rp1.963.569.861,00 terdapat pelunasan piutang pajak hotel tahun sebelumnya sebesar Rp12.169.678,00;

- 2) **Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp27.409.729.973,00 dengan capaian melebihi target Rp21.967.232.238,00 atau 124,80%, mengalami kenaikan Rp7.293.677.467,09 atau 36,26% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp20.116.052.505,91. Realisasi melebihi target penerimaan dari pajak restoran didominasi oleh adanya penambahan wajib pajak restoran di Bontang Citimall dan realisasi pajak catering. Dari realisasi Rp27.409.729.973,00 terdapat pelunasan piutang pajak restoran tahun sebelumnya sebesar Rp460.711.782,00;
- 3) **Pajak Hiburan** adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah: a) tontonan film; b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d) pameran; e) sirkus, akrobat, dan sulap f) permainan biliar dan bowling; g) pacuan kuda, kendaraan bermotor; h) permainan ketangkasan; i) refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan j) pertandingan olahraga; k) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya. Tarif pajak hiburan ditetapkan bervariasi tergantung dengan jenis hiburan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan mandi uap/spa. Realisasi pajak hiburan sebesar Rp3.083.552.331,00 atau 94,59% dari target sebesar Rp3.260.082.135,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.124.784.843,10 atau 57,42% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.958.767.487,90. Kenaikan pajak hiburan dikarenakan penambahan wajib pajak pada Citimall Bontang yaitu Happy Time Citimall Bontang dan PT. Nusantara Sejahtera Raya (Cinema XXI). Dari realisasi Rp3.083.552.331,00 terdapat pelunasan piutang pajak hiburan sebesar Rp1.110.000,00;
- 4) **Pajak Reklame** adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,



lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Realisasi pajak reklame sebesar Rp1.024.663.862,50 atau 62,25% belum tercapai sesuai anggaran yang ditentukan sebesar Rp1.646.011.408,00. Dari realisasi tersebut terdapat pelunasan piutang pajak reklame tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp17.998.060,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp102.006.921,75 atau 9,05% bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.126.670.784,25.

Penurunan realisasi pajak reklame disebabkan adanya moratorium Perwali No. 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Reklame Rokok, serta untuk mendukung Kota Bontang sebagai Kota Layak Anak. Oleh karena itu, Bapenda tidak memungut pajak reklame rokok. Selain itu, dengan terbitnya Perda No. 1 Tahun 2024 yang mengecualikan reklame politik dari objek pajak reklame, Bapenda juga tidak memungut pajak atas baliho Pilkada dan Pilpres;

- 5) **Pajak Penerangan Jalan** adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain yang bersumber dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 6% (enam persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp39.605.146.598,00 dari anggaran Rp36.000.000.000,00 atau 110,01%, mengalami kenaikan Rp23.083.750.992,00 atau 139,72% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp16.521.395.606,00. Kenaikan pendapatan pajak penerangan jalan disebabkan oleh berlakunya Perda No. 1 Tahun 2024, Bapenda kembali memungut pajak untuk wajib Pajak PLN dan wajib pajak non-PLN, sedangkan pada tahun 2023 hanya memungut wajib pajak PLN;
- 6) **Pajak Parkir** adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10%. Realisasi pajak parkir sebesar Rp326.859.860,00 atau tidak mencapai anggaran Rp400.932.000,00 atau 81,53%, mengalami kenaikan Rp3.321.760,00 atau 1,03% dibandingkan



dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp323.538.100,00. Kenaikan realisasi pajak parkir disebabkan terdapat wajib pajak baru yaitu parkir Bontang Citimall. Namun, penambahan wajib pajak baru tersebut tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan pajak parkir karena tarif pajak parkir pada Perda No. 1 Tahun 2024 mengalami penurunan, yang sebelumnya sebesar 20% menjadi 10%.

- 7) **Pajak Air Tanah** adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a) jenis sumber air; b) lokasi sumber air; c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e) kualitas air; dan f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp8.639.155.610,00 atau capaian target 133,96% dari anggaran Rp6.448.848.914,00 mengalami kenaikan sebesar Rp638.761.042,00 atau 7,98% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.000.394.568,00. Dari realisasi sebesar Rp8.639.155.610,00 terdapat pelunasan piutang tahun 2024 sebesar Rp26.639.950,00. Kenaikan pajak air tanah disebabkan oleh perubahan tarif pajak, yang sebelumnya berdasarkan tarif pada Perwali No. 9 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Tanah, pada Tahun 2024 pengenaan tarif pajak air tanah sesuai Perda No. 1 Tahun 2024. Perhitungan pajak air tanah berdasarkan nilai perolehan air tanah sesuai Pergub No. 59 Tahun 2018 dikalikan tarif 20%;
- 8) **Pajak Sarang Burung Walet** adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Realisasi pajak sarang burung walet tahun 2024 sebesar Rp1.050.000,00 atau 33,33% dari anggaran Rp3.150.000.000 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.050.000,00.
- 9) **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah pajak yang dipungut terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.421.862.102,50 atau mencapai 121,09% dari anggaran Rp2.000.000.000,00, mengalami kenaikan Rp1.697.724.236,25 atau 234,45% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp724.137.866,25. Kenaikan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan pada tahun 2024, PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan pengerukan di Dermaga 4 dengan tujuan untuk menambah kedalaman pelabuhan serta meningkatkan kelancaran navigasi. Pengerukan ini tidak dilakukan setiap tahun, sehingga realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024 cukup besar;



- 10) **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** adalah pajak atas objek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp58.290.257.680,00 belum mencapai target sebesar Rp65.419.511.595,00 atau 89,10%. Realisasi sebesar Rp58.290.257.680,00 merupakan realisasi atas pembayaran ketetapan PBB dan pelunasan piutang tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Realisasi ketetapan PBB tahun 2024 sebesar Rp56.582.354.918,00 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:
- Dilakukan penetapan melalui Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebanyak 48.194 dengan nilai sebesar Rp65.407.036.227,00. Realisasi dari ketetapan Pajak PBB tahun 2024 sebesar Rp56.292.679.237,00 dengan jumlah ketetapan 18.843;
 - Hasil pemutakhiran tahun anggaran berkenaan ditetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) baru sebanyak 461 dengan nilai sebesar Rp359.129.530,00, dan telah terealisasi seluruhnya;
 - Pada tahun 2024 dilakukan koreksi ketetapan sebanyak 174 ketetapan menyebabkan penurunan nilai sebesar Rp69.453.849,00.
- b) Pelunasan piutang pajak PBB P-2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.707.902.762,00 dengan perincian sebagai berikut ini:
- Tahun 2004-2014 (10 WP) sebesar Rp197.402,00
 - Tahun 2018 (486 WP) sebesar Rp45.095.097,00
 - Tahun 2019 (659 WP) sebesar Rp90.550.564,00
 - Tahun 2020 (888 WP) sebesar Rp162.417.691,00
 - Tahun 2021 (1272 WP) sebesar Rp386.121.003,00
 - Tahun 2022 (2046 WP) sebesar Rp326.496.229,00
 - Tahun 2023 (4123 WP) sebesar Rp697.024.776,00
- 11) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp7.252.330.108,95 atau 74,69% dari target Rp9.709.967.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.390.502.406,05 atau 37,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023



sebesar Rp11.642.832.515,00 Penurunan realisasi pajak BPHTB disebabkan turunnya daya beli masyarakat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti: a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima; b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dicapai dengan optimal; c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan retribusi daerah; d) Peningkatan pengawasan di lapangan; e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; f) Penambahan saluran/media pembayaran.

Pengenaan tarif retribusi daerah Kota Bontang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.1.1.1.4 Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bontang TA 2024

Uraian Retribusi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	124.232.267.027,00	106.171.528.459,03	85,46	1.946.256.870,00
Retribusi Jasa Usaha	1.637.990.000,00	1.559.507.500,00	95,21	947.309.000,00
Retribusi Perijinan Tertentu	641.930.000,00	102.217.476,00	15,92	68.312.500,00
Jumlah	126.512.187.027,00	107.833.253.435,03	85,24	2.961.878.370,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan dari retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp126.512.187.027,00 terealisasi sebesar Rp107.833.253.435,03 atau 85,24%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.961.878.370,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.871.375.065,03 atau 3.540,70%. Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Jasa Umum** merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Anggaran pendapatan retribusi jasa umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp124.232.267.027,00 terealisasi sebesar Rp106.171.528.459,03 atau 85,46%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.946.256.870,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.225.271.589,03 atau 5.355,17%.



Tabel 5.1.1.1.5 Retribusi Jasa Umum TA 2024

Uraian Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2024 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	121.262.267.027,00	102.780.515.944,03	0,00	102.780.515.944,03	84,76	672.066.600,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.000.000.000,00	2.273.375.140,00	11.624.500,00	2.284.999.640,00	114,25	302.782.700,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	84.104.000,00	0,00	84.104.000,00	28,03	119.998.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	525.334.000,00	182.824.875,00	708.158.875,00	141,63	434.333.750,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.128.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.307.640,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.261.680,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.028.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	140.000.000,00	269.400.000,00	0,00	269.400.000,00	192,43	119.350.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	30.000.000,00	44.350.000,00	0,00	44.350.000,00	147,83	0,00
Jumlah	124.232.267.027,00	105.977.079.084,03	194.449.375,00	106.171.528.459,03	85,46	1.946.256.870,00

Dari rincian realisasi retribusi jasa umum terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan karena perbedaan pencatatan pendapatan, yang sebelumnya Pendapatan BLUD pada Lain-lain PAD yang Sah, selanjutnya pada tahun 2024 dicatat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sedangkan penurunan signifikan karena adanya penghapusan pemungutan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Retribusi yang dihapuskan antara lain Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang karena bukan termasuk objek retribusi. Demikian juga dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan UU HKPD pada Pasal



187 huruf a dan huruf b, yang menyatakan bahwa retribusi masih dapat dipungut sesuai dengan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, sehingga pada tahun 2024 sudah tidak dilakukan pemungutan. Penjelasan mengenai realisasi retribusi jasa umum TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2024 sebesar Rp102.780.515.944,03 atau 84,76% dari target yang ditetapkan Rp121.262.267.027,00. Pada tahun 2024 realisasi retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp102.108.449.344,03 atau 15.193,20% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp672.066.600,00. Kenaikan retribusi pelayanan Kesehatan disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
 - Tingginya kunjungan kirkes untuk pemeriksaan KPPS, Pilkada, Pilgub, dan Pilpres
 - Penambahan peserta prolanis BPJS
 - Perubahan tarif retribusi pelayanan Kesehatan
 - Pendapatan BLUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun 2024 diklasifikasikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi Rp2.284.999.640,00 atau 114,25% dari target Rp2.000.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp302.782.700,00 mengalami kenaikan Rp1.982.216.940,00 atau 654,67%. Realisasi retribusi pelayanan persampahan di dalamnya terdapat pembayaran retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp11.624.500,00.
- c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi Rp84.104.000,00 atau 28,03% dari target Rp300.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp119.998.000,00 mengalami penurunan Rp35.894.000,00 atau 29,91%. Penurunan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disebabkan pada tahun 2024 Dinas Perhubungan tidak diperbolehkan menarik retribusi pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di tahun 2024 sebesar Rp708.158.875,00 atau 141,63% dari target Rp500.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp434.333.750,00 mengalami kenaikan Rp273.825.125,00 atau 63,04%. Dari realisasi sebesar Rp708.158.875,00 termasuk di dalamnya pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp182.824.875,00. Kenaikan realisasi



- retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh kenaikan tarif retribusi harian dari Rp500,00 menjadi Rp2.000,00/hari/pedagang.
- e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp194.128.500,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dipungut lagi sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - f) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi namun terdapat realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp20.261.680,00. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan.
 - g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi sehingga mengalami penurunan sebesar Rp39.307.640,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2023. Sesuai dengan UU Nomor 1 tentang HKPD Tahun 2022 pasal 88 ayat (1) dan (3), serta PP 35 tentang Ketentuan Umum PDRD pasal 27 ayat (1), Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran bukan termasuk objek retribusi.
 - h) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi sehingga mengalami penurunan sebesar Rp44.028.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2023. Retribusi pelayanan tera/tera ulang, tidak menjadi objek retribusi sesuai dengan UU Nomor 1 tentang HKPD Tahun 2022 pasal 88 ayat (1) dan (3), serta PP 35 tentang Ketentuan Umum PDRD pasal 27 ayat (1).
 - i) Retribusi Jasa Penyedotan Kakus adalah pemungutan atas pembayaran jasa pelayanan penyedotan tinja oleh pemerintah daerah. Retribusi Jasa Penyedotan Kakus tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp140.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp269.400.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp119.350.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp150.050.000,00 atau 125,72%. Kenaikan realisasi retribusi jasa penyedotan kakus disebabkan oleh adanya perberlakuan tarif baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Serta adanya kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah penyedotan terutama pada kelas rumah tangga pada tahun 2023 sebanyak 96 penyedotan, pada tahun 2024 naik menjadi 213 penyedotan. Kelas industri/perusahaan pada tahun 2023 sebanyak 181 penyedotan, pada tahun 2024 naik menjadi 236 penyedotan.
 - j) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.350.000,00 atau 147,83%.



- 2) **Retribusi Jasa Usaha** merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.637.990.000,00 terealisasi sebesar Rp1.559.507.500,00 atau 95,21%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp947.309.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp612.198.500,00 atau 64,63%.

Tabel 5.1.1.1.6 Retribusi Jasa Usaha TA 2024

Uraian Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2024 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	0,00	289.260.000,00	0,00	289.260.000,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	715.000.000,00	769.310.000,00	0,00	769.310.000,00	107,59	832.044.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	75.605.000,00	0,00	75.605.000,00	75,61	94.865.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	55.000.000,00	30.310.000,00	0,00	30.310.000,00	55,10	20.400.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	767.990.000,00	298.707.500,00	96.315.000,00	395.022.500,00	51,44	0,00
Jumlah	1.637.990.000,00	1.463.192.500,00	96.315.000,00	1.559.507.500,00	95,21	947.309.000,00

Dari rincian realisasi retribusi jasa usaha terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Retribusi Terminal pada tahun 2024 dan tahun 2023 tidak terealisasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan untuk terminal berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kota Bontang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Desember 2018 Nomor 137.1/986/BAST-P3D/PEM-UM.A dan Nomor 127/5626/B.PPOD.III.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah pada tahun 2024 tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp289.260.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pembayaran sewa Rumah Susun Api-api sampai dengan Bulan Juni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selanjutnya periode bulan Juli sampai Desember dicatat pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.



- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp769.310.000,00 atau 107,60% dari target Rp715.000.000,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp832.044.000,00 mengalami penurunan Rp62.734.000,00 atau 7,54%. Hal ini disebabkan jumlah pengunjung yang berbelanja di pasar menurun.
 - d) Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp75.605.000,00 atau 75,61% dari target Rp100.000.000,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp94.865.000,00 mengalami penurunan Rp19.260.000,00 atau 20,30%. Penurunan Retribusi Rumah Potong Hewan disebabkan persaingan harga dengan daging beku karena produksi daging segar mengambil ternak dari luar Kota Bontang.
 - e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada tahun 2024 tidak terealisasi, dikarenakan tidak dilakukan pemungutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Laut Bontang Bersinar tentang Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Loktuan Bontang nomor 134.4.03/122/PEM.A dan nomor 001/PKS-LBB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
 - f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp30.310.000,00 atau 55,11% dari target sebesar Rp55.000.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp9.910.000,00 atau 48,58% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp20.400.000,00. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan benur udang dan benih ikan.
 - g) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp395.022.500,00 atau 51,44% dari target sebesar Rp767.990.000,00 sedangkan tahun 2023 tidak terdapat realisasi karena adanya perubahan klasifikasi yang sebelumnya realisasi dicatat pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- 3) **Retribusi Perijinan Tertentu** merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Anggaran pendapatan retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp641.930.000,00 terealisasi sebesar Rp102.217.476,00 atau 15,92%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.312.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.904.976,00 atau 49,63%.



Tabel 5.1.1.1.7 Retribusi Perijinan Tertentu TA 2024

Uraian Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2024 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	641.930.000,00	102.217.476,00	0,00	102.217.476,00	15,92	68.312.500,00
Jumlah	641.930.000,00	102.217.476,00	0,00	102.217.476,00	15,92	68.312.500,00

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp102.217.476,00 dari target sebesar Rp641.930.000,00 atau 15,92%. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Persyaratan yang terlalu berat bagi Masyarakat
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) terlalu memberatkan
- Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mengakomodir anggaran penerimaan PBG untuk pembangunan Pabrik Soda Ash yang akan dibangun tahun 2024. Namun pembangunan tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2025.

Retribusi PBG dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota akan segera melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengurusan PBG.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diterima dan dikelola berupa pendapatan asli daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024

Uraian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagian Laba Dividen BPD KALTIM	4.075.813.311,00	4.137.180.321,93	101,51	3.091.431.779,72
Bagian Laba Dividen PT BME	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00
Bagian Laba Dividen atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.075.813.311,00	4.137.180.321,93	101,51	3.487.431.779,72

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.075.813.311,00 terealisasi sebesar Rp4.137.180.321,93 atau 101,51%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.487.431.779,72 mengalami kenaikan



sebesar Rp289.524.700,93 atau 7,52%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp4.137.180.321,93 atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada PT BPD Kaltim Kaltara.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.9 Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bontang TA 2024

Uraian Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.350.000.000,00	1.165.754.200,00	0,00	1.165.754.200,00	86,35	280.014.800,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	257.472.000,00	0,00	257.472.000,00	85,82	13.652.000,00
Hasil Sewa BMD	226.856.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	92,57	677.867.900,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	631.462.568,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	28,51	3.228.688.304,00
Hasil dari Bangun Guna Serah	250.000.000,00	250.000.000	0,00	250.000.000	100,00	250.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro	4.268.533.966,00	7.326.075.246,14	0,00	7.326.075.246,14	171,63	12.782.709.643,66
Pendapatan Bunga	8.483.606.557,00	47.327.839.264,92	0,00	47.327.839.264,92	557,87	12.111.214.686,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	50.520.000,00	0,00	50.520.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	538.277.670,00	2.805.925.991,56	0,00	2.805.925.991,56	521,28	1.115.765.610,00
Pendapatan Denda Pajak	90.534.880,00	624.463.439,00	0,00	624.463.439,00	689,75	642.188.899,00
Pendapatan Denda Retribusi	1.000.000,00	316.520,00	0,00	316.520,00	31,65	1.450.770,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	1.133.811.933,00	0,00	1.133.811.933,00	2.267,62	25.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	761.541.251,00	2.687.794.809,90	0,00	2.687.794.809,90	352,94	1.849.474.046,82
Pendapatan dari BLUD	150.000.000,00	3.648.691.295,56	0,00	3.648.691.295,56	2.432,46	106.051.855.623,67
Dana Non Kapitasi dan Promotif Preventif BPJS Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.544.378,00
Jumlah	17.101.812.892,00	67.668.664.700,08	0,00	67.668.664.700,08	395,68	139.753.426.661,15

Dari tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain PAD yang Sah Tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.101.812.892,00 terealisasi sebesar Rp67.668.664.700,08 atau 395,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.753.426.661,15 mengalami penurunan sebesar Rp72.084.761.961,07 atau 51,58%. Dari rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat kenaikan maupun penurunan yang cukup signifikan antara tahun



2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan aset tetap peralatan dan mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.165.754.200,00 atau 86,35%, mengalami penurunan sebesar Rp885.739.400,00 atau 316,32% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp280.014.800,00. Hasil penjualan peralatan dan mesin terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.10 Daftar Surat Keputusan Penjualan Peralatan dan Mesin TA 2024

No	No. SK Kepala Daerah	SKPD	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)
1	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Badan Pendapatan Daerah	28.091.000,00	28.091.000,00
2	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	28.052.000,00	28.052.000,00
3	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13.421.000,00	13.421.000,00
4	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10.062.000,00	10.062.000,00
5	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Dinas Kesehatan	15.328.000,00	15.328.000,00
6	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Dinas Kesehatan	17.037.000,00	17.037.000,00
7	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	36.080.000,00	36.080.000,00
8	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	45.697.000,00	45.697.000,00
9	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	55.508.000,00	55.508.000,00
10	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	19.761.000,00	19.761.000,00
11	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.212.000,00	5.212.000,00
12	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	51.561.000,00	51.561.000,00
13	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.675.000,00	16.675.000,00
14	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.187.000,00	5.187.000,00
15	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	RSUD Taman Husada	29.039.000,00	29.039.000,00
16	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	RSUD Taman Husada	5.984.000,00	5.984.000,00
17	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Sekretariat Daerah	532.403.000,00	532.403.000,00
18	100.3.3.6/142/BPKAD/2024	Sekretariat Daerah	71.676.000,00	71.676.000,00
19		Sekretariat Daerah	130.120.000,00	130.120.000,00
20	100.3.3.6/75/BPKAD/2024	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	48.866.000,00	48.866.000,00
JUMLAH				1.165.760.000,00



- 2) Hasil penjualan gedung dan bangunan pada tahun 2024 terealisasi Rp257.472.000,00 atau 85,82% dari target Rp300.000.000,00, mengalami kenaikan Rp243.820.000,00 atau 1.785,97% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp13.652.000,00. Hasil penjualan gedung dan bangunan terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.11 Daftar Surat Keputusan Penjualan Gedung dan Bangunan TA 2024

No	No. SK Kepala Daerah	SKPD	Nilai	Realisasi
1	100.3.3.3/212/BPKAD/2024	Dinas Lingkungan Hidup	1.397.000,00	1.397.000,00
2	100.3.3.3/212/BPKAD/2024	Satuan Polisi Pamong Praja	838.000,00	838.000,00
3	100.3.3.3/212/BPKAD/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	251.179.000,00	251.179.000,00
4	100.3.3.3/212/BPKAD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.058.000,00	4.058.000,00
JUMLAH				257.472.000,00

- 3) Hasil Sewa BMD tahun 2024 terealisasi sebesar Rp210.000.000,00 atau 92,57% dibandingkan target Rp226.856.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp677.867.900,00, mengalami penurunan sebesar Rp467.867.900,00 atau 69,02%. Realisasi hasil sewa BMD mengalami penurunan disebabkan pembayaran sewa rumah susun pada tahun-tahun sebelumnya dicatat pada pendapatan hasil sewa BMD pada tahun 2024 dicatat ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Realisasi hasil sewa tahun 2024 merupakan realisasi pendapatan atas sewa tanah dan bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru yang terletak di Jalan. Ir. H. Juanda sebagai Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Perjanjian sewa ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2026. Besaran biaya sewa yang dibayarkan adalah Rp70.000.000,00 per tahun.
- 4) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD merupakan realisasi dari penerimaan karena adanya pemanfaatan aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi penerimaan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2024 sebesar Rp180.000.000,00 atau 28,51% dari target Rp631.462.568,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.228.688.304,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.048.688.304,00 atau 94,42%. Pemanfaatan kekayaan daerah senilai Rp180.000.000,00 merupakan pembayaran kontribusi tetap Wisma Atlit Kota Bontang Tahun 2024 oleh PT Selat Mutiara. Realisasi hasil kerja sama pemanfaatam BMD Tidak mencapai target yang ditetapkan, disebabkan oleh belum adanya pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 oleh PT Laut Bontang Bersinar untuk kerja sama pemanfaatan Pelabuhan Kota Bontang, berdasarkan perjanjian kerja sama



antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Laut Bontang Bersinar tentang Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Loktuan Bontang Nomor 134.4.03/122/PEM.A dan Nomor 001/PKS-LBB/XII/2021 pada tanggal 31 Desember 2021.

- 5) Hasil dari Bangun Guna Serah tahun 2024 terealisasi Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00. Hasil dari bangun guna serah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan setoran kontribusi tahunan PT Ramayana Bontang, berdasarkan perjanjian Kerjasama Nomor 188.6/15/HUK dan Nomor 15/IGPS-SMG/BNTG/IV/07 antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT. Inti Griya Prima Sakti tentang Pembangunan Plasa Taman Bontang pasal 2 huruf c, masa hak konsesi adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak pambangunan Gedung Plasa Taman Bontang selesai dan diresmikan. Besaran kontribusi tahunan yang diterima Pemerintah Kota Bontang adalah Rp356.650.800,00, namun pemerintah Kota Bontang memberikan keringanan besaran kontribusi tahunan selama pandemi covid 19 sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status pandemi dinyatakan berakhir yaitu sebesar Rp250.000.000,00.
- 6) Penerimaan jasa giro merupakan pendapatan dari jasa giro yang diterima seluruh rekening pada tahun 2024 terealisasi Rp7.326.075.246,14 atau 171,63% dari target Rp4.268.533.966,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp12.782.709.643,66 mengalami penurunan Rp5.456.634.397,52 atau 42,69%.
- 7) Pendapatan bunga tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp8.483.606.557,00 dan terealisasi sebesar Rp47.327.839.264,92 atau 557,87%. Pendapatan bunga mengalami kenaikan sebesar Rp35.216.624.578,92 atau 290,78% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.111.214.686,00. Kenaikan signifikan merupakan pendapatan bunga deposito dari Bank atas penempatan di beberapa Bank dan remunerasi yang merupakan imbal hasil atas penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas TDF, dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.12 Rincian Pendapatan Bunga TA 2024

Uraian	Nilai
Pendapatan Bunga dari Deposito	
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	3.150.684.800,00
Bank Syariah Indonesia (BSI)	4.022.581.793,93
Bank Tabungan Negara (BTN)	4.840.239.726,01
BPD Kaltim Kaltara	7.175.717.212,98
Subtotal Pendapatan Bunga Deposito	19.189.223.532,92
Remunerasi TDF TA 2023	



Uraian	Nilai
Triwulan I	9.508.502.796,00
Triwulan II	9.031.379.324,00
Triwulan III	6.816.602.152,00
Triwulan IV	2.782.131.460,00
Subtotal Remunerasi TDF	28.138.615.732,00
Total Pendapatan Bunga	35.216.624.578,92

- 8) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara tidak dianggarkan, namun terealisasi sebesar Rp50.520.000,00. Rincian realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut ini

Tabel 5.1.1.1.13 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2024

Uraian	Tahun	Nilai
Penatausahaan uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	2010	10.520.000,00
Penerimaan Hak Penyerah Piutang dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara an. PT. Faza Jaya Pratama atas Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Pengadaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bontang	2021	40.000.000,00
Jumlah		50.520.000,00

- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp2.805.925.991,56 atau 521,28% dari target Rp538.277.670,00, dibandingkan tahun 2023 Rp1.115.765.610,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.690.160.381,56 atau 151,48%. Pada tahun 2024, tercatat adanya peningkatan pendapatan dari denda keterlambatan. Hal ini terjadi karena banyak paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Salah satu penyebab utamanya adalah keterlambatan dalam pengadaan bahan baku. Para pemasok bahan baku lebih memprioritaskan distribusi untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga suplai ke daerah menjadi terhambat. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan di daerah, yang pada akhirnya memicu pengenaan denda keterlambatan;
- 10) Pendapatan denda pajak merupakan pendapatan yang diperoleh dari sanksi administrasi berupa denda kepada wajib pajak daerah. Realisasi pendapatan denda pajak tahun 2024 sebesar Rp624.463.439,00 atau 689,75% dari target Rp90.534.880,00 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar



Rp642.188.899,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.725.460,00 atau 2,76%. Rincian pendapatan denda pajak dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.1.14 Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.128.650,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	37.013.979,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	118.975,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	11.771.154,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.031.502,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	572.399.179,00
Jumlah	624.463.439,00

- 11) Pendapatan denda retribusi merupakan pendapatan yang diperoleh dari sanksi administrasi berupa denda karena keterlambatan pembayaran retribusi. Realisasi pendapatan denda retribusi pada tahun 2024 sebesar Rp316.520,00 atau 31,65% dari target Rp1.000.000,00. Pendapatan denda retribusi 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.134.250,00 atau 78,18% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.450.770,00. Pendapatan denda retribusi senilai 316.520,00 merupakan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- 12) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.133.811.933,00 sehingga capaian 2.267,62% dari target Rp50.000.000,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp25.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.108.811.933,00 atau 4.435,25%. Rincian realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.1.15 Rincian Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2024

Uraian	Nilai
Klaim Garansi Bank CV AMRA MDRI	331.247.683,00
Pembayaran Jaminan Pelaksanaan Jalan Karya Bakti Tahun 2015 a.n. PT Sinar Ana Jaya Samarinda	40.000.000,00
Kegiatan Penanganan Longsor Pembangunan Jalan Soekarno - Hatta PT. Bangun Pilar Persada	762.564.250,00
Jumlah	1.133.811.933,00

- 13) Pendapatan dari pengembalian merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian belanja dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp2.687.794.809,90 atau 352,94% dari target Rp761.541.251,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.849.474.046,82 mengalami kenaikan sebesar Rp838.320.763,08 atau 45,33%. Pendapatan dari pengembalian pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan

oleh perbaikan sistem pencatatan transaksi keuangan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bontang masih mengacu pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, akun pendapatan atas pengembalian belum tersedia secara lengkap. Keterbatasan ini, beberapa transaksi pengembalian dicatat pada akun Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis. Demikian juga dengan rekomendasi BPK agar tidak lagi menggunakan akun tersebut karena tidak sesuai substansi dengan akun rekening lain yang semestinya. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bontang sejalan dengan implementasi aplikasi SIPD RI, pendapatan atas pengembalian belanja dicatat pada pendapatan lain-lain yang sah.

- 14) Pendapatan dari BLUD merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. BLUD yang ada di Kota Bontang adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Realisasi pendapatan BLUD tahun 2024 Rp3.648.691.295,56 atau 2.432,46% dari target Rp150.000.000,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp106.051.855.623,67 mengalami penurunan sebesar Rp102.403.164.328,11 atau 96,56%. Penurunan pendapatan dari BLUD disebabkan oleh pencatatan yang sebelumnya pada akun ini selanjutnya pada tahun 2024 direklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pendapatan BLUD yang dicatat pada lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan jasa pelayanan RSUD Taman Husada dari jaminan BPJS dan asuransi lainnya.
- 15) Dana Non Kapitasi dan Promotif Preventif BPJS Kesehatan 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp723.544.378,00. Pada tahun 2024 Dana Non Kapitasi dan Promotif Preventif BPJS Kesehatan dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



Tabel 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bontang TA 2024

Uraian Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.077.483.147.439,00	2.038.019.218.273,00	98,10	1.840.625.887.433,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.695.352.000,00	13.164.686.000,00	196,62	16.446.800.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	371.857.470.000,00	361.320.082.164,00	97,17	259.257.683.219,00
Jumlah	2.456.035.969.439,00	2.412.503.986.437,00	98,23	2.116.330.370.652,00

Pendapatan transfer tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.412.503.986.437,00 atau 98,10% dari target sebesar Rp2.456.035.969.439,00, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.116.330.370.652,00 mengalami kenaikan sebesar Rp296.173.615.785,00 atau 13,99%. Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan pendapatan transfer TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang untuk anggaran dan realisasi pada periode 2024 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bontang

Uraian Dana Perimbangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	142.148.124.443,00	173.553.679.000,00	122,09	137.901.212.119,50
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.583.433.574.000,00	1.515.746.095.989,00	95,73	1.396.592.239.499,50
Dana Alokasi Umum	263.439.139.000,00	267.889.833.686,00	101,69	240.542.351.201,00
Dana Alokasi Khusus	88.462.309.996,00	80.829.609.598,00	91,37	65.590.084.613,00
Jumlah	2.077.483.147.439,00	2.038.019.218.273,00	98,10	1.840.625.887.433,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebagaimana tampak pada tabel di atas, anggaran sebesar Rp2.077.483.147.439,00 dengan realisasi sebesar Rp2.038.019.218.273,00 atau 98,10%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.840.625.887.433,00 mengalami kenaikan sebesar Rp197.393.330.840,00 atau 10,72%.

Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Kota Bontang mendapatkan alokasi sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.2.3 Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2024 Pemerintah Kota Bontang

URAIAN		(dalam ribuan)
TRANSFER KE DAERAH		1.606.766.357
A. Dana Bagi Hasil (DBH)		1.248.164.564
1. DBH Pajak		135.137.929
a. Pajak Penghasilan		53.216.648
b. PBB		81.921.281
c. Cukai Hasil Tembakau		-



PEMERINTAH KOTA BONTANG

URAIAN	
2. DBH Sumber Daya Alam	1.106.712.036
a. Migas	68.437.100
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.033.719.805
c. Kehutanan	3.233.586
d. Perikanan	1.321.545
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	6.314.599
a. Sawit	6.314.599
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	263.439.131
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	235.474.821
2. DAU ditentukan penggunaannya	27.964.310
a. Penggajian Formasi PPPK	10.042.191
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	8.731.924
d. Bidang Kesehatan	5.218.839
e. Bidang Pekerjaan Umum	971.356
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	88.467.310
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	17.021.146
a. Pendidikan	11.940.329
b. Kesehatan	80.817
c. Jalan	5.000.000
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pertanian	-
i. Kelautan dan Perikanan	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Pariwisata	-
l. Transportasi Perairan	-
m. Transportasi Perdesaan	-
n. Lingkungan Hidup	-
o. Kehutanan	-
p. Perdagangan	-
q. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-
r. Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	71.446.164
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	34.678.300
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	27.755.222
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.664.082
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.705.421
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro	505.133
g. Dana Pelayanan Kepariwisata	-
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal	618.006
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
3. Hibah ke Daerah	-
a. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
b. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
c. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilahkan	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	6.695.352



Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/SDA, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kota Bontang yang berupa bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPODN) dan PPh Pasal 21, bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21) dan bagi hasil dari biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (BP PBB). Realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp173.553.679.000,00 atau 122,09% dari target sebesar Rp142.148.124.443,00. Alokasi untuk DBH PBB sebesar Rp109.809.092.000,00, DBH PPh 21 Rp62.707.021.000,00, DBH PPh 25/29 Rp1.037.545.000,00, DBH CHT sebesar Rp21.000,00. Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.652.466.880,50 atau 25,85% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp137.901.212.119,50.

Tabel 5.1.1.2.4 Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Bontang

Uraian DBH Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	88.554.802.443,00	109.809.092.000,00	124,00	81.531.294.504,50
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21)	52.583.881.000,00	62.707.021.000,00	119,25	55.321.097.068,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	1.009.441.000,00	1.037.545.000,00	102,78	1.048.767.262,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	21.000,00	100,00	53.285,00
Jumlah	142.148.124.443,00	173.553.679.000,00	122,09	137.901.212.119,50

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pendapatan dana bagi hasil Sumber Daya Alam merupakan bagi hasil dari provisi sumber daya hutan, bagi hasil dari iuran tetap (*land-rent*), bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan hasil perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan bagi hasil dari pertambangan gas bumi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bontang. Realisasi penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.515.746.095.989,00 atau 95,73% dari target sebesar Rp1.583.433.574.000,00. Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp119.153.856.489,50 atau 8,53% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.396.592.239.499,50. Dana bagi hasil sumber daya



alam untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.2.5 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Bontang

Uraian DBH Sumber Daya Alam	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	19.386.905.000,00	21.801.752.000,00	112,46	41.899.417.484,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	60.633.754.000,00	60.633.754.000,00	100,00	56.191.071.022,50
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Royalty	1.492.543.185.000,00	1.422.440.859.989,00	95,30	1.283.478.387.986,50
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.233.586.000,00	3.233.586.000,00	100,00	13.187.201.190,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	6.314.599.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.321.545.000,00	1.321.545.000,00	100,00	1.836.161.816,50
DBH Sawit	0,00	6.314.599.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.583.433.574.000,00	1.515.746.095.989,00	95,73	1.396.592.239.499,50

3) Dana Alokasi Umum

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp267.889.833.686,00 atau 101,69% dari target sebesar Rp263.439.139.000,00. Dari realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.347.482.485,00 atau 11,37% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp240.542.351.201,00.

Tabel 5.1.1.2.6 Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bontang

Uraian	Anggaran	Realisasi
Dana Alokasi Umum (DAU)	263.439.139.000,00	267.889.833.686,00
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	235.474.829.000,00	240.115.011.000,00
2. DAU ditentukan penggunaannya	27.964.310.000,00	27.774.822.686,00
a. Penggajian Formasi PPPK	10.042.191.000,00	9.852.703.686,00
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
c. Bidang Pendidikan	8.731.924.000,00	8.731.924.000,00
d. Bidang Kesehatan	5.218.839.000,00	5.218.839.000,00
e. Bidang Pekerjaan Umum	971.356.000,00	971.356.000,00

4) Dana Alokasi Khusus

Pemerintah Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2024 menganggarkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp88.462.309.996,00 dan realisasi penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp80.829.609.598,00 atau 91,37%, mengalami kenaikan sebesar Rp15.239.524.985,00 atau 23,23% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp65.590.084.613,00. Pendapatan DAK merupakan transfer pusat-dana



PEMERINTAH KOTA BONTANG

perimbangan yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kementerian teknis yang memberikan alokasi. Adapun rincian DAK dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.2.7 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Bontang

Uraian Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	17.016.145.996,00	14.833.297.689,00	87,17	9.498.072.964,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	80.816.996,00	72.600.000,00	89,83	1.694.283.762,00
DAK Bidang Pendidikan	11.940.329.000,00	10.015.622.689,00	83,88	7.803.789.202,00
DAK Bidang Jalan	4.995.000.000,00	4.745.075.000,00	95,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	71.446.164.000,00	65.996.311.909,00	92,37	56.092.011.649,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	27.591.020.000,00	26.463.988.706,00	95,92	15.848.746.606,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	897.500.000,00	897.500.000,00	100,00	607.500.000,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.444.020.000,00	4.418.188.016,00	99,42	4.617.088.016,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
DAK Tunjangan Profesi Guru PNSD	463.401.000,00	588.593.000,00	127,02	25.228.922.000,00
DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD	27.291.821.000,00	27.647.620.000,00	101,30	411.157.051,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	302.401.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.851.466.000,00	1.271.336.398,00	44,59	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	5.132.305.508,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.336.107.374,00
DAK Bantuan Operasional KB	1.705.421.000,00	1.547.397.050,00	90,73	0,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.610.760.000,00	1.530.732.999,00	95,03	1.625.900.601,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	505.133.000,00	467.941.896,00	92,64	366.665.492,00
DAK Fasilitas Penanaman Modal	618.006.000,00	603.003.929,00	97,57	421.739.399,00
DAK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	425.009.915,00	0,00	377.162.080,00
DAK Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	118.717.522,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.510.215.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	88.462.309.996,00	80.829.609.598,00	91,37	65.590.084.613,00

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di



bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF merupakan alat strategis yang mendukung stabilitas ekonomi dengan cara mengelola likuiditas secara terukur dan seimbang, serta memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam menjaga kondisi keuangan negara. Dari dana alokasi TDF 2023 Kota Bontang telah disalurkan melalui transfer pemerintah pusat sebesar Rp441.135.189.989,00, dengan rincian sebagai berikut ini.

- a) Tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp48.167.321.874,00.
- b) Tanggal 12 Juni 2024 sebesar Rp48.202.968.105,00.
- c) Tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp344.764.900.010,00.

b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp6.695.352.000,00 dan realisasi pada periode 2024 sebesar Rp13.164.686.000,00 atau 196,62% dari target, merupakan alokasi penyaluran insentif fiskal. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp16.446.800.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.282.114.000,00 atau 19,96%.

Insentif Fiskal Kota Bontang terdiri dari alokasi Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.695.352.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp6.469.334.000,00.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp371.857.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp361.320.082.164,00 atau 97,17%. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.2.8 Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	238.874.730.000,00	228.337.342.164,00	95,59	259.257.683.219,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	132.982.740.000,00	132.982.740.000,00	100,00	0,00
Jumlah	371.857.470.000,00	361.320.082.164,00	97,17	259.257.683.219,00

- 1) Pendapatan bagi hasil pajak provinsi terealisasi sebesar Rp228.337.342.164,00 atau 95,59% dari anggaran Rp238.874.730.000,00. Pendapatan bagi hasil



pajak provinsi terdiri dari bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan bagi hasil dari pajak rokok.

Alokasi transfer Pemerintah Provinsi untuk anggaran pada periode 2024 sebesar Rp238.874.730.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/K.34/2024 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 tanggal 23 Februari 2024, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp32.314.605.000,00.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp27.493.164.000,00.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp164.370.820.000,00.
- d) Pajak Air Permukaan sebesar Rp439.328.000,00.
- e) Pajak Rokok sebesar Rp14.257.813.000,00.

Rincian realisasi penerimaan transfer Pemerintah Provinsi untuk anggaran pada periode 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.1.2.9 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Pemerintah Kota Bontang**

Uraian Bagi Hasil Provinsi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	32.314.605.000,00	29.446.388.000,00	91,12	26.834.922.000,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.492.164.000,00	29.439.072.000,00	107,08	25.434.765.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	164.370.820.000,00	155.646.952.000,00	94,69	193.683.209.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	439.328.000,00	224.223.000,00	51,04	245.352.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.257.813.000,00	13.580.707.164,00	95,25	13.059.435.219,00
Jumlah	238.874.730.000,00	228.337.342.164,00	95,59	259.257.683.219,00

- 2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dianggarkan sebesar Rp132.982.740.000,00 dan terealisasi sepenuhnya 100,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp58.800.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp74.182.740.000,00 atau 126,16%. Rincian realisasi bantuan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.2.10 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Bidang	SKPD	Nilai
Bantuan Keuangan untuk Penyuluh Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	150.000.000,00
Bantuan Keuangan untuk Pengawasan kepada Inspektorat Kota Bontang	Inspektorat Daerah	350.000.000,00



Bidang	SKPD	Nilai
Bantuan Keuangan untuk Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.800.000.000,00
Bantuan Keuangan untuk Kesehatan (Stunting)	Dinas Kesehatan	82.740.000,00
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Guntung Kelurahan Guntung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	26.500.000.000,00
Rekonstruksi Jalan Soekarno-Hatta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	10.000.000.000,00
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Gunung Elai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	14.000.000.000,00
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai RT 19 Kelurahan Gn Teliha dan RT 06 Kelurahan Kanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	13.500.000.000,00
Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota, Jalan Brokoli	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.100.000.000,00
Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota Jalan Urip Soemaharjo Bontang Lestari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	28.000.000.000,00
Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota Jalan Moh. Roem	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	10.000.000.000,00
Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota Jalan Satya Lencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	5.500.000.000,00
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai RT.34 Kelurahan Api-api	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	20.000.000.000,00
Jumlah		132.982.740.000,00

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bontang

Uraian Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan hibah	1.684.139.648,00	2.296.338.156,60	136,35	67.554.692.895,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.688.035.104,00	73.210.793.519,28	274,32	0,00
Jumlah	28.372.174.752,00	75.507.131.675,88	266,13	67.554.692.895,00

a. Pendapatan Hibah

Anggaran penerimaan pendapatan hibah Pemerintah Kota Bontang pada periode 2024 sebesar Rp1.684.139.648,00 dengan realisasi Rp2.296.338.156,60 atau 136,35%.

Tabel 5.1.1.3.2 Pendapatan Hibah Kota Bontang

Uraian Pendapatan Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	58.800.000.000,00



Uraian Pendapatan Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Pengembalian Lainnya	1.684.139.648,00	2.296.338.156,60	136,35	426.290.844,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	8.328.402.051,00
Jumlah	1.684.139.648,00	2.296.338.156,60	136,35	67.554.692.895,00

1) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Pada tahun 2024, Bantuan Keuangan dari Provinsi tidak lagi dianggarkan dan direalisasikan pada akun Pendapatan Hibah, tetapi pada akun Transfer Pemerintah Provinsi.

2) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pada tahun 2024, Pendapatan Hibah Dana BOS tidak lagi dianggarkan dan direalisasikan pada Pendapatan Hibah, tetapi pada Transfer Pemerintah Pusat dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Pengembalian Lainnya

Realisasi sumbangan pihak ketiga/sejenis pengembalian lainnya sebesar Rp2.296.338.156,60 atau 136,35% dari target sebesar Rp1.684.139.648,00, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp426.290.844,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.870.047.312,60 atau 438,68%.

Tabel 5.1.1.3.3 Daftar Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Pengembalian Lainnya

Uraian	Jumlah
Lebih setor pajak dan retribusi	1.077.633,50
Penutupan rekening	5.870.797,10
Penerimaan Hibah PKT	2.288.614.046,00
Sumbangan dari perorangan	775.680,00
Jumlah	2.296.338.156,60

4) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pada tahun 2024, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak lagi dianggarkan dan direalisasikan pada akun Pendapatan Hibah, tetapi pada akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan dana darurat pada tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi.

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar Rp73.210.793.519,28 atau 274,32% dari anggaran sebesar



Rp26.688.035.104,00. Rincian Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.485.265.977,00	7.097.907.131,00	83,65	8.328.402.051,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	18.202.769.127,00	65.783.434.869,69	361,39	0,00
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0,00	329.451.518,59	0,00	0,00
Jumlah	26.688.035.104,00	73.210.793.519,28	274,32	8.328.402.051,00

- 1) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP disalurkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan FKTP di Dinas Kesehatan Kota Bontang. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp7.097.907.131,00 atau 83,65% dari target sebesar Rp8.485.265.977,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.328.402.051,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.230.494.920,00 atau 14,77%. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.1.3.5 Pendapatan Dana Kapitasi JKN

(dalam rupiah)

FKTP	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Bontang Lestari	135.752.249,00	91.442.456,00	0,00	123.180.155,00	350.374.860,00
Bontang Selatan II	323.072.177,00	215.147.429,00	245.768.602,00	316.444.944,00	1.100.433.152,00
Bontang Barat	276.952.630,00	197.160.907,00	80.471.244,00	269.494.065,00	824.078.846,00
Bontang Utara II	328.035.511,00	244.643.720,00	182.868.904,00	348.018.020,00	1.103.566.155,00
Bontang Utara I	384.165.832,00	267.499.095,00	304.951.876,00	401.419.647,00	1.358.036.450,00
Bontang Selatan I	414.422.769,00	256.416.113,00	209.104.093,00	342.247.981,00	1.222.190.956,00
Klinik PNS	280.033.065,00	279.655.011,00	288.317.146,00	291.221.490,00	1.139.226.712,00
Jumlah	2.142.434.233,00	1.551.964.731,00	1.311.481.865,00	2.092.026.302,00	7.097.907.131,00

- 2) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dianggarkan sebesar Rp18.202.769.127,00 dan terealisasi sebesar Rp65.783.434.869,69 atau 361,39%. Rincian pendapatan bagi hasil IUPK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.3.6 Dana IUPK

Uraian	Tanggal Setor	Jumlah
PT Kaltim Prima Coal	14/03/2024	47.577.982.320,00
PT Kaltim Prima Coal	08/08/2024	7.198.096.235,69



Uraian	Tanggal Setor	Jumlah
PT Kideco	26/07/2024	9.767.213.171,00
PT Multi Harapan Utama	30/07/2024	1.240.143.143,00
Jumlah		65.783.434.869,69

- 3) Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat tidak dianggarkan pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp329.451.518,59. Realisasi kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan penerimaan kelebihan setor pajak dan retribusi serta penerimaan lainnya.

5.1.2 BELANJA-LRA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD, Belanja yang berasal dari Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Belanja yang berasal dari Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas dan Klinik Pegawai.

Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.117.029.950.793,71 atau 92,74% dari anggaran sebesar Rp3.360.998.808.720,00, angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp902.571.839.952,39 atau 40,76% dari realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.214.458.110.841,32.

Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bontang Menurut Jenis Belanja

Uraian Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	2.198.134.597.820,42	2.064.462.920.368,71	93,92	1.551.892.075.448,32
Belanja Modal	1.159.230.394.543,58	1.051.965.132.367,00	90,75	661.033.963.537,00
Belanja Tidak Terduga	3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	1.532.071.856,00
Jumlah	3.360.998.808.720,00	3.117.029.950.793,71	92,74	2.214.458.110.841,32

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah dari anggaran sebesar Rp2.198.134.597.820,42 telah terealisasi sebesar Rp2.064.462.920.368,71 atau 93,92%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.551.892.075.448,32 terjadi kenaikan sebesar Rp512.570.844.920,39 atau 33,03%.



Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	736.619.612.973,00	709.969.282.885,00	96,38	571.593.451.714,00
Belanja Barang dan Jasa	1.360.705.501.733,42	1.257.207.393.171,71	92,39	867.525.260.190,32
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	99.609.483.114,00	96.086.644.312,00	96,46	111.127.371.310,00
Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.199.600.000,00	99,97	1.645.992.234,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.198.134.597.820,42	2.064.462.920.368,71	93,92	1.551.892.075.448,32

Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD.

Pada tahun 2024, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berjumlah 2.691 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 854 orang. Dari sejumlah pegawai tersebut, 1.542 orang berjenis kelamin perempuan dan 1.149 orang berjenis kelamin laki-laki. Dari sisi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan S-3 (doktor) 1 orang, lulusan S-2 (magister) 277 orang, lulusan S1 (sarjana)/Diploma IV 1.910 orang, lulusan Diploma III 719 orang, lulusan Diploma II 11 orang, lulusan Diploma I sebanyak 7 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 576 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 29 orang dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 15 orang.

PNS di Kota Bontang didominasi pegawai dengan pangkat golongan III. Berdasarkan tingkat kepangkatan, PNS dengan pangkat golongan IV sebanyak 407 orang, pangkat golongan III mencapai jumlah terbanyak 1.892 orang, pangkat golongan II sebanyak 382 orang, dan golongan I hanya 10 orang.

PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 350 orang. Jumlah jabatan fungsional tertentu sebanyak 1387 orang dan jabatan fungsional umum sebanyak 954 orang. Anggaran sebesar Rp736.619.612.973,00 telah terealisasi sebesar



Rp709.969.282.885,00 atau 96,38%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp571.593.451.714,00 terjadi kenaikan sebesar Rp138.375.831.171,00 atau 24,21%.

Tabel 5.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.937.329.173,00	222.015.286.619,00	25.889.834.515,00	247.905.121.134,00	98,40	208.095.145.108,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	375.684.811.758,00	361.006.155.519,00	0,00	361.006.155.519,00	96,09	271.338.776.387,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.221.543.061,00	42.683.074.803,00	0,00	42.683.074.803,00	96,52	38.223.396.916,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.176.623.630,00	17.853.972.812,00	0,00	17.853.972.812,00	98,22	16.663.742.675,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.193.825.351,00	1.022.988.813,00	0,00	1.022.988.813,00	85,69	1.014.951.614,00
Belanja Pegawai BLUD	44.493.000.000,00	38.658.249.804,00	0,00	38.658.249.804,00	86,89	35.455.839.014,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	839.720.000,00	0,00	839.720.000,00	92,03	801.600.000,00
Jumlah	736.619.612.973,00	684.079.448.370,00	25.889.834.515,00	709.969.282.885,00	96,38	571.593.451.714,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN direalisasikan berdasarkan:

- 1) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/397/BKPSDM/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Capaian Parameter dan Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 2) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/398/BKPSDM/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- 3) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/400/BKPSDM/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Daerah Taman Husada;
- 4) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/401/BKPSDM/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 5) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/399/BKPSDM/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Penerima Insentif Pajak Daerah;



- 6) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/404/BKPSDM/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Jenis Jabatan dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;
- 7) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/406/BKPSDM/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Perangkat Daerah, Jenis Jabatan, dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja;
- 8) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/407/BKPSDM/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Objektif Lainnya bagi Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 9) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/407/BKPSDM/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Objektif Lainnya bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah.
- 10) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/91/BKPSDM/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/398/BKPSDM/2023 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah;
- 11) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/92/BKPSDM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/401/BKPSDM/2023 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dan Guru Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 12) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/93/BKPSDM/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/406/BKPSDM/2023 Tentang Perangkat Daerah, Jenis Jabatan, Dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja
- 13) Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/167/BKPSDM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/408/BKPSDM/2023 Tentang besaran Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Objektif Lainnya Bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah.

Realisasi belanja pegawai menurut perangkat daerah sebagai berikut ini.



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tabel 5.1.2.1.4 Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.243.734.836,00	167.718.528.238,00	4.919.910.070,00	172.638.438.308,00	98,51	142.560.031.234,00
Dinas Kesehatan	142.831.468.277,00	147.834.542.988,00	2.968.069.849,00	150.802.612.837,00	105,58	52.952.100.371,00
Rumah Sakit Umum Daerah	63.036.770.811,00	34.970.404.857,00	3.687.844.947,00	38.658.249.804,00	61,33	105.375.049.969,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	19.181.966.253,00	18.042.709.472,00	871.956.280,00	18.914.665.752,00	98,61	14.324.377.053,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.603.039.239,00	8.951.558.327,00	422.248.041,00	9.373.806.368,00	97,61	7.194.639.460,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.044.513.827,00	7.518.893.366,00	361.882.947,00	7.880.776.313,00	97,96	6.912.246.935,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.933.352.505,00	6.560.592.927,00	265.637.792,00	6.826.230.719,00	98,45	3.883.638.418,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.025.540.996,00	17.198.982.038,00	690.751.594,00	17.889.733.632,00	99,25	9.570.463.882,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.824.084.141,00	8.915.525.039,00	422.452.080,00	9.337.977.119,00	95,05	6.696.448.426,00
Dinas Ketenagakerjaan	6.753.669.333,00	6.252.899.430,00	306.902.000,00	6.559.801.430,00	97,13	5.741.487.471,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	9.058.389.553,00	8.210.119.731,00	373.727.926,00	8.583.847.657,00	94,76	6.382.822.528,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	18.445.320.049,00	17.336.135.147,00	776.615.852,00	18.112.750.999,00	98,20	12.342.988.491,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.026.081.759,00	11.293.803.346,00	541.865.343,00	11.835.668.689,00	98,42	8.868.319.070,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.575.978.253,00	8.076.020.953,00	378.421.360,00	8.454.442.313,00	98,58	7.008.902.250,00
Dinas Perhubungan	8.551.755.553,00	7.733.782.044,00	378.065.792,00	8.111.847.836,00	94,86	7.089.194.226,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.926.157.297,00	9.286.355.944,00	443.634.555,00	9.729.990.499,00	98,02	5.851.779.820,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	13.663.934.259,00	12.651.839.275,00	600.810.811,00	13.252.650.086,00	96,99	10.540.710.059,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.084.907.786,00	6.587.477.302,00	356.289.338,00	6.943.766.640,00	98,01	6.322.410.073,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.214.391.235,00	8.628.545.044,00	350.448.601,00	8.978.993.645,00	97,45	6.537.689.669,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.329.249.846,00	7.716.422.466,00	307.340.415,00	8.023.762.881,00	96,33	5.854.845.467,00
Sekretariat Daerah	30.715.460.479,00	28.921.560.965,00	1.324.455.461,00	30.246.016.426,00	98,47	23.120.784.430,00
Sekretariat DPRD	27.674.468.526,00	26.916.070.968,00	390.504.925,00	27.306.575.893,00	98,67	22.781.533.669,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.690.264.972,00	8.150.896.789,00	396.155.346,00	8.547.052.135,00	98,35	6.831.679.159,00
Badan Pendapatan Daerah	12.929.297.210,00	11.844.370.018,00	261.460.466,00	12.105.830.484,00	93,63	10.620.954.561,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.336.165.902,00	8.606.098.309,00	445.509.177,00	9.051.607.486,00	96,95	7.985.679.089,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.016.009.003,00	9.292.343.318,00	430.948.651,00	9.723.291.969,00	97,08	7.564.192.522,00
Inspektorat Daerah	11.656.949.089,00	10.938.933.719,00	574.309.886,00	11.513.243.605,00	98,77	9.362.251.854,00
Kecamatan Bontang Utara	22.494.744.314,00	21.214.021.713,00	967.489.730,00	22.181.511.443,00	98,61	18.838.749.981,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.767.127.799,00	19.809.534.480,00	882.760.481,00	20.692.294.961,00	99,64	17.602.334.455,00
Kecamatan Bontang Barat	12.255.987.775,00	11.505.612.894,00	544.353.398,00	12.049.966.292,00	98,32	10.342.912.616,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.728.832.096,00	5.394.867.263,00	247.011.401,00	5.641.878.664,00	98,48	4.532.234.506,00
Jumlah	736.619.612.973,00	684.079.448.370,00	25.889.834.515,00	709.969.282.885,00	96,38	571.593.451.714,00

Realisasi belanja pegawai termasuk di dalamnya adalah belanja pegawai dari dana BLUD, Kapitasi JKN dan BOS sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.5 Belanja pegawai BLUD, JKN dan BOS Tahun 2024 dan 2023

Nama Unit	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BLUD				
Belanja pegawai	44.493.000.000,00	38.658.249.804,00	86,89	35.455.839.014,00
Subtotal BLUD	44.493.000.000,00	38.658.249.804,00	86,89	35.455.839.014,00
JKN				
Puskesmas Bontang Selatan 1	597.729.112,00	95.457.106,00	15,97	612.909.784,00
Puskesmas Bontang Selatan 2	794.650.203,00	199.789.300,00	25,14	549.350.248,00
Puskesmas Bontang Utara 1	805.364.645,00	251.500.135,00	31,23	705.714.682,00
Puskesmas Bontang Utara 2	739.499.224,00	219.006.804,00	29,62	522.295.475,00
Puskesmas Bontang Lestari	329.592.435,00	82.149.675,00	24,92	148.427.261,00
Puskesmas Bontang Barat	564.424.515,00	170.470.215,00	30,20	380.497.861,00
Klinik Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00
Subtotal JKN	3.832.620.134,00	1.019.733.235,00	26,61	2.919.195.311,00
DANA BOS				
SDN 001 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 002 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 003 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama Unit	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
SDN 004 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 005 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 006 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 007 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 008 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 009 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 010 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 011 Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 001 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 002 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 003 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 004 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 005 Bontang Selatan	0,00	2.082.000,00	100,00	0,00
SDN 006 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 007 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 009 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 010 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 011 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 012 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 013 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 014 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 015 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 016 Bontang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 001 Bontang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 002 Bontang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 003 Bontang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
SDN 004 Bontang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 1 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 2 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 3 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 4 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 5 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 6 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 7 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 8 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
SMP Negeri 9 Bontang	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal BOS	0,00	2.082.000,00	100,00	0,00
Total	48.325.620.134,00	39.680.065.039,00	82,11	38.375.034.325,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

**PEMERINTAH KOTA BONTANG****Tabel 5.1.2.1.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023**

Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Barang Pakai Habis	265.904.790.581,42	241.502.788.104,00	0,00	241.502.788.104,00	90,82	192.864.424.373,78
Belanja Barang Tak Habis Pakai	935.137.627,00	895.130.020,00	0,00	895.130.020,00	95,72	329.228.420,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.396.937.989,00	1.396.082.830,00	0,00	1.396.082.830,00	99,94	0,00
Belanja Jasa Kantor	290.308.472.236,00	267.050.485.090,00	0,00	267.050.485.090,00	91,99	269.473.263.449,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.349.294.279,00	38.252.191.658,00	0,00	38.252.191.658,00	97,21	30.604.771.882,00
Belanja Sewa Tanah	39.939.000,00	39.939.000,00	0,00	39.939.000,00	100,00	136.462.290,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.514.576.493,00	9.109.906.758,00	0,00	9.109.906.758,00	86,64	8.147.443.152,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.479.506.640,00	4.907.751.690,00	0,00	4.907.751.690,00	89,57	4.463.785.557,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	197.580.000,00	174.490.000,00	0,00	174.490.000,00	88,31	348.889.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.290.417.620,00	3.109.597.256,00	0,00	3.109.597.256,00	94,50	4.759.804.825,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.268.983.375,00	2.623.538.048,00	0,00	2.623.538.048,00	80,26	3.656.115.490,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	237.650.000,00	205.650.000,00	0,00	205.650.000,00	86,53	257.350.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	197.749.999.000,00	194.566.118.220,00	0,00	194.566.118.220,00	98,39	65.350.934.262,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	613.198.781,00	567.009.080,00	0,00	567.009.080,00	92,47	435.728.780,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.628.737.015,00	12.178.908.795,00	0,00	12.178.908.795,00	83,25	12.578.449.253,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.060.439.727,00	27.601.368.353,22	0,00	27.601.368.353,22	98,36	22.307.906.077,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.799.987.631,00	2.487.942.655,00	0,00	2.487.942.655,00	88,86	1.262.404.252,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.355.700,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	465.530.000,00	459.926.000,00	0,00	459.926.000,00	98,80	184.089.040,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	297.821.570.665,00	273.781.360.689,00	0,00	273.781.360.689,00	91,93	160.772.333.850,20
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.437.749.116,00	269.859.003,00	0,00	269.859.003,00	11,07	1.511.185.049,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	81.926.419.200,00	78.423.341.471,00	0,00	78.423.341.471,00	95,72	20.378.959.586,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.634.400.000,00	16.534.324.029,02	0,00	16.534.324.029,02	99,40	6.418.318.369,52
Belanja Barang dan Jasa BOS	9.858.841.821,00	8.073.478.077,00	0,00	8.073.478.077,00	81,89	12.787.077.607,94

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.785.342.937,00	72.996.206.345,47	0,00	72.996.206.345,47	84,11	48.452.979.924,88
Jumlah	1.360.705.501.733,42	1.257.207.393.171,71	0,00	1.257.207.393.171,71	92,39	867.525.260.190,32

Realisasi belanja barang dan jasa menurut perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.7 Belanja Barang dan Jasa per perangkat daerah tahun 2024 dan tahun 2023

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.647.426.228,42	148.401.477.295,00	0,00	148.401.477.295,00	88,00	80.442.000.013,94
Dinas Kesehatan	87.927.094.943,00	81.986.614.449,00	0,00	81.986.614.449,00	93,24	63.404.466.881,20
Rumah Sakit Umum Daerah	116.349.721.446,00	98.819.380.492,47	0,00	98.819.380.492,47	84,93	59.982.574.954,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	35.389.738.262,00	32.945.609.214,00	0,00	32.945.609.214,00	93,09	19.030.197.301,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.215.905.241,00	25.002.821.874,00	0,00	25.002.821.874,00	88,61	17.822.693.041,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.588.766.437,00	8.686.444.826,00	0,00	8.686.444.826,00	90,59	7.185.547.690,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.544.644.870,00	4.882.492.413,00	0,00	4.882.492.413,00	88,06	3.950.281.891,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.499.881.799,00	18.671.347.258,00	0,00	18.671.347.258,00	95,75	15.544.558.318,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	18.335.597.851,00	17.799.615.495,00	0,00	17.799.615.495,00	97,08	13.992.456.427,00
Dinas Ketenagakerjaan	28.427.767.554,00	27.872.332.347,00	0,00	27.872.332.347,00	98,05	15.015.518.692,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	20.386.892.682,00	19.363.489.016,00	0,00	19.363.489.016,00	94,98	10.981.304.025,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	24.380.010.675,00	23.239.678.520,00	0,00	23.239.678.520,00	95,32	23.213.707.278,00
Dinas Lingkungan Hidup	45.788.835.862,00	41.883.863.553,00	0,00	41.883.863.553,00	91,47	37.397.601.125,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.972.998.563,00	8.468.777.887,00	0,00	8.468.777.887,00	94,38	5.072.050.451,00
Dinas Perhubungan	24.438.963.667,00	22.813.757.171,00	0,00	22.813.757.171,00	93,35	17.307.204.869,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	28.961.595.096,00	27.785.155.044,00	0,00	27.785.155.044,00	95,94	23.772.125.711,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,	57.997.288.084,00	55.040.238.152,00	0,00	55.040.238.152,00	94,90	39.438.889.802,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Perindustrian, dan Perdagangan						
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.977.787.001,00	12.527.319.615,00	0,00	12.527.319.615,00	89,62	10.185.046.483,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	68.958.389.653,00	65.655.200.640,00	0,00	65.655.200.640,00	95,21	51.126.533.285,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.390.133.937,00	11.894.456.348,00	0,00	11.894.456.348,00	96,00	8.014.430.627,00
Sekretariat Daerah	142.123.183.497,00	133.152.539.651,00	0,00	133.152.539.651,00	93,69	105.083.484.377,00
Sekretariat DPRD	73.483.763.740,00	64.351.023.818,00	0,00	64.351.023.818,00	87,57	51.195.080.428,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	16.319.457.481,00	14.882.675.058,00	0,00	14.882.675.058,00	91,20	12.447.549.217,00
Badan Pendapatan Daerah	11.100.225.954,00	10.502.527.633,00	0,00	10.502.527.633,00	94,62	10.327.039.935,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.512.223.087,00	24.550.884.911,00	0,00	24.550.884.911,00	89,24	19.231.900.615,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.366.029.909,00	14.850.558.350,00	0,00	14.850.558.350,00	96,65	13.060.400.821,00
Inspektorat Daerah	9.385.844.990,00	9.202.629.429,00	0,00	9.202.629.429,00	98,05	5.570.357.388,00
Kecamatan Bontang Utara	81.430.305.512,00	78.713.421.443,02	0,00	78.713.421.443,02	96,66	43.222.695.843,30
Kecamatan Bontang Selatan	79.411.020.328,00	76.539.391.092,22	0,00	76.539.391.092,22	96,38	40.821.226.019,00
Kecamatan Bontang Barat	30.903.611.219,00	29.782.237.748,00	0,00	29.782.237.748,00	96,37	20.403.200.271,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.490.396.165,00	46.939.432.429,00	0,00	46.939.432.429,00	94,85	23.283.136.410,00
Jumlah	1.360.705.501.733,42	1.257.207.393.171,71	0,00	1.257.207.393.171,71	92,39	867.525.260.190,32

Realisasi belanja barang dan jasa termasuk di dalamnya yang tidak melalui mekanisme APBD yaitu Belanja Barang dan Jasa dari dana BLUD, Kapitasi JKN, BOK Kesehatan, BOS, dan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Adapun rincian realisasi belanja barang dan jasa di luar mekanisme APBD diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.8 Belanja Barang BLUD, JKN, BOK, BOS, dan BOP Tahun 2024 dan 2023

Nama Unit	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BLUD				
Belanja barang dan jasa	86.785.342.937,00	72.996.206.345,47	84,11	48.452.979.924,88
Subtotal BLUD	86.785.342.937,00	72.996.206.345,47	84,11	48.452.979.924,88
JKN				



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama Unit	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Puskesmas Bontang Utara 1	693.429.489,00	204.928.630,00	29,55	1.047.377.091,20
Puskesmas Bontang Utara 2	650.477.682,00	223.767.656,00	34,40	840.027.695,00
Puskesmas Bontang Selatan 1	508.355.906,00	184.111.216,00	36,22	730.960.961,00
Puskesmas Bontang Selatan 2	398.178.208,00	136.102.609,00	34,18	618.399.109,00
Puskesmas Bontang Lestari	130.006.770,00	24.721.931,00	19,02	822.286.982,00
Puskesmas Bontang Barat	531.286.603,00	154.682.150,00	29,11	454.680.579,00
Klinik Pegawai	1.190.787.041,00	642.894.050,00	53,99	977.238.427,00
Subtotal JKN	4.102.521.699,00	1.571.208.242,00	38,30	5.490.970.844,20
BOK				
Puskesmas Bontang Utara 1	1.072.508.678,00	598.932.258,00	55,84	488.945.700,00
Puskesmas Bontang Utara 2	305.678.276,00	256.664.904,00	83,97	315.123.000,00
Puskesmas Bontang Selatan 1	346.772.173,00	289.800.921,00	83,57	229.988.575,00
Puskesmas Bontang Selatan 2	296.069.573,00	256.174.192,00	86,52	272.519.000,00
Puskesmas Bontang Lestari	411.688.811,00	229.685.800,00	55,79	271.915.227,00
Puskesmas Bontang Barat	418.748.489,00	329.801.859,00	78,76	382.998.500,00
Sub total BOK	2.851.466.000,00	1.961.059.934,00	68,77	1.961.490.002,00
BOS				
SDN 001 Bontang Utara	403.951.524,00	401.685.427,00	99,44	430.605.419,00
SDN 002 Bontang Utara	317.590.000,00	314.611.175,00	99,06	286.859.232,00
SDN 003 Bontang Utara	478.209.993,00	433.215.380,00	90,59	464.761.573,00
SDN 004 Bontang Utara	434.507.225,00	378.245.112,00	87,05	205.701.386,00
SDN 005 Bontang Utara	307.616.618,00	280.951.738,00	91,33	333.740.222,00
SDN 006 Bontang Utara	340.960.501,00	338.283.799,00	99,21	248.676.725,00
SDN 007 Bontang Utara	496.350.000,00	463.384.075,00	93,36	327.870.837,00
SDN 008 Bontang Utara	445.916.925,00	437.595.028,00	98,13	476.552.696,00
SDN 009 Bontang Utara	338.806.500,00	305.318.581,00	90,12	306.616.875,00
SDN 010 Bontang Utara	328.584.300,00	324.025.785,00	98,61	319.734.619,00
SDN 011 Bontang Utara	61.750.000,00	61.720.250,00	99,95	45.362.725,00
SDN 001 Bontang Selatan	343.650.000,00	322.020.172,00	93,71	321.180.401,00
SDN 002 Bontang Selatan	542.450.000,00	529.348.527,00	97,58	448.069.078,00
SDN 003 Bontang Selatan	327.846.882,00	303.854.019,00	92,68	287.974.062,00
SDN 004 Bontang Selatan	326.490.000,00	321.477.142,00	98,46	252.320.575,00
SDN 005 Bontang Selatan	252.894.748,00	247.676.460,00	97,94	264.066.550,00
SDN 006 Bontang Selatan	345.773.509,00	329.160.501,00	95,20	332.544.525,00
SDN 007 Bontang Selatan	205.199.102,00	179.931.569,00	87,69	110.739.450,00
SDN 009 Bontang Selatan	328.619.600,00	289.273.122,00	88,03	331.098.412,00
SDN 010 Bontang Selatan	234.428.079,00	230.827.261,00	98,46	262.525.695,00
SDN 011 Bontang Selatan	263.410.408,00	254.619.317,00	96,66	301.051.746,00
SDN 012 Bontang Selatan	274.022.691,00	271.045.214,00	98,91	268.856.841,00
SDN 013 Bontang Selatan	317.232.758,00	312.570.920,00	98,53	297.432.445,00
SDN 014 Bontang Selatan	39.900.000,00	39.900.000,00	100,00	45.120.000,00
SDN 015 Bontang Selatan	9.395.472,00	9.395.472,00	100,00	15.457.245,00
SDN 016 Bontang Selatan	21.997.679,00	21.997.679,00	100,00	34.599.950,00
SDN 001 Bontang Barat	243.048.823,00	241.610.123,00	99,41	205.088.735,00
SDN 002 Bontang Barat	203.300.000,00	202.177.650,00	99,45	249.382.053,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama Unit	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
SDN 003 Bontang Barat	341.050.000,00	322.944.301,00	94,69	276.794.320,00
SDN 004 Bontang Barat	547.156.400,00	518.234.044,00	94,71	505.896.655,00
SMP Negeri 1 Bontang	819.028.475,00	816.258.167,00	99,66	473.993.877,00
SMP Negeri 2 Bontang	916.961.500,00	881.886.411,00	96,17	853.241.010,00
SMP Negeri 3 Bontang	507.140.875,00	453.333.303,00	89,39	514.352.636,00
SMP Negeri 4 Bontang	520.800.000,00	494.807.012,00	95,01	503.891.897,00
SMP Negeri 5 Bontang	634.304.810,00	621.067.791,00	97,91	556.181.635,94
SMP Negeri 6 Bontang	275.833.288,00	263.607.722,00	95,57	272.283.054,00
SMP Negeri 7 Bontang	459.343.671,00	425.916.866,00	92,72	372.167.958,00
SMP Negeri 8 Bontang	439.052.203,00	421.819.440,00	96,08	320.945.218,00
SMP Negeri 9 Bontang	313.543.660,00	312.757.107,00	99,75	277.911.372,00
Subtotal BOS	14.008.118.219,00	13.378.553.662,00	95,51	12.401.649.704,94
BOP				
TK Negeri 1 Bontang	128.520.000,00	125.022.402,00	97,28	131.040.000,00
TK Negeri 2 Bontang	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00	33.390.000,00
TK Negeri 3 Bontang	36.255.000,00	36.255.000,00	100,00	35.910.000,00
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bontang	239.940.000,00	236.099.969,00	98,40	185.087.903,00
Subtotal BOP	434.325.000,00	426.987.371,00	98,31	385.427.903,00
Total	108.181.773.855,00	90.334.015.554,47	83,50	68.692.518.379,02

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Belanja Bunga Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.



Tabel 5.1.2.1.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian Belanja Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.308.001.000,00	5.308.001.000,00	0,00	5.308.001.000,00	100,00	34.879.613.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	54.504.769.120,00	53.460.147.276,00	0,00	53.460.147.276,00	98,08	40.742.891.967,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	138.867.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.850.958.400,00	7.682.378.400,00	0,00	7.682.378.400,00	97,85	19.133.772.618,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.470.182.536,00	8.919.018.220,00	0,00	8.919.018.220,00	94,18	13.325.148.655,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.897.560.000,00	1.742.050.000,00	0,00	1.742.050.000,00	60,12	290.278.320,00
Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.642.500,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.024.750,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	897.500.000,00	882.982.696,00	0,00	882.982.696,00	98,38	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.396.350.000,00	6.140.043.339,00	0,00	6.140.043.339,00	95,99	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	4.199.200.000,00	4.107.955.267,00	0,00	4.107.955.267,00	97,83	0,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.815.000,00	692.815.000,00	0,00	692.815.000,00	100,00	670.999.500,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.337.460.000,00	4.311.628.016,00	0,00	4.311.628.016,00	99,40	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.415.820.000,00	1.339.625.098,00	0,00	1.339.625.098,00	94,62	0,00
Jumlah	99.609.483.114,00	96.086.644.312,00	0,00	96.086.644.312,00	96,46	111.127.371.310,00

Alokasi yang ditargetkan untuk belanja hibah pada TA 2024 sebesar Rp99.609.483.114,00 dan telah terealisasi sebesar Rp96.086.644.312,00 atau 96,46%, dengan perincian sebagai berikut ini:

- 1) Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp58.768.148.276,00 atau 98,25% dari anggaran Rp59.812.770.120,00, terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5.308.001.000,00 dan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp53.460.147.276,00.
- 2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sepenuhnya atau 100%. Hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya merupakan hibah uang kepada KODIM 0908 Bontang.
- 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp7.850.958.400,00 dan terealisasi sebesar Rp7.682.378.400,00 atau 97,85%.
- 4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp9.470.182.536,00 dan terealisasi sebesar Rp8.919.018.220,00 atau 94,18%.
- 5) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp1.742.050.000,00 atau 60,12% dari anggaran Rp2.897.560.000,00. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan merupakan hibah kepada KONI Kota Bontang.



- 6) Realisasi belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta terealisasi sebesar Rp6.140.043.339,00 atau 95,99% dari anggaran Rp6.396.350.000,00. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta diberikan kepada 24 SD swasta. Daftar sekolah penerima hibah dijelaskan dalam **Lampiran 5.1**.
- 7) Realisasi belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta terealisasi sebesar Rp4.107.955.267,00 atau 97,83% dari anggaran Rp4.199.200.000,00. Belanja hibah uang dana bos yang diberikan oleh Satdikmen Swasta diberikan kepada 20 SMP swasta. Daftar sekolah penerima hibah dijelaskan dalam **Lampiran 5.2**.
- 8) Realisasi belanja hibah uang Dana BOS Kinerja yang diterima oleh Satdikdas Negeri dan Swasta adalah sebesar Rp882.982.696,00 atau 98,38% dari anggaran Rp897.500.000,00. Rincian belanja hibah uang dan BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri dan Swasta adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.10 Belanja Hibah Uang Dana BOS Kinerja

Uraian	Realisasi (Rp)
SMP Swasta	165.000.000,00
SD Swasta	222.500.000,00
SD dan SMP Negeri	495.482.696,00
Jumlah	882.982.692,00

Daftar sekolah penerima hibah uang dana BOS kinerja dijelaskan dalam **Lampiran 5.3**.

- 9) Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan SK Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/259/BAKESBANGPOL/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun kepada partai politik dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I Anggaran 2024 Rp692.815.000,00, terealisasi sebesar Rp692.815.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp692.815.000,00. Rincian realisasi belanja hibah bantuan keuangan merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2019-2024, sedangkan tahap II merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2024-2029. Realisasi belanja hibah kepada partai politik tahap I dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.11 Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahap I

No	Penerima Bantuan	Jumlah Kursi	Perolehan Suara	Nilai Perolehan Suara	Besaran Bantuan	Realisasi	Tanggal Penyaluran
1	DPD Partai Golkar	5	16.300	7.500,00	81.500.000,00	81.500.000,00	28/08/2024



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Penerima Bantuan	Jumlah Kursi	Perolehan Suara	Nilai Perolehan Suara	Besaran Bantuan	Realisasi	Tanggal Penyaluran
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	3	12.440	7.500,00	62.200.000,00	62.200.000,00	29/08/2024
3	DPC Gerakan Indonesia Raya	3	11.216	7.500,00	56.080.000,00	56.080.000,00	28/08/2024
4	DPD Partai Keadilan Sejahtera	3	9.762	7.500,00	48.810.000,00	48.810.000,00	30/08/2024
5	DPD Partai Nasional Demokrat	2	8.034	7.500,00	40.170.000,00	40.170.000,00	27/08/2024
6	DPC Partai Amanat Nasional	2	7.855	7.500,00	39.275.000,00	39.275.000,00	28/08/2024
7	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	7.291	7.500,00	36.455.000,00	36.455.000,00	28/08/2024
8	DPD Partai Hati Nurani Rakyat	2	6.359	7.500,00	31.795.000,00	31.795.000,00	28/08/2024
9	DPC Persatuan Pembangunan	2	6.006	7.500,00	30.030.000,00	30.030.000,00	28/08/2024
10	DPD Partai Beringin Karya	1	4.241	7.500,00	21.205.000,00	21.205.000,00	28/08/2024
Jumlah		25	89.504			447.520.000,00	

Realisasi belanja hibah kepada partai politik tahap II dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.12 Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahap II

No	Penerima Bantuan	Jumlah Kursi	Perolehan Suara	Nilai Perolehan Suara	Besaran Bantuan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tanggal Penyaluran
1	DPD Partai Golongan Karya	7	27.392	7.500,00	68.480.000,00	68.480.000,00	03/12/2024
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	4	16.300	7.500,00	40.750.000,00	40.750.000,00	28/12/2024
3	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	12.086	7.500,00	30.215.000,00	30.215.000,00	29/11/2024
4	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya	3	11.997	7.500,00	29.992.500,00	29.992.500,00	29/11/2024
5	DPD Partai Keadilan Sejahtera	2	7.193	7.500,00	17.982.500,00	17.982.500,00	02/12/2024
6	DPD Partai Nasional Demokrat	2	6.933	7.500,00	17.332.500,00	17.332.500,00	29/11/2024
7	DPC Partai Amanat Nasional	2	6.219	7.500,00	15.547.500,00	15.547.500,00	03/12/2024
8	DPD Partai Demokrat	1	5.401	7.500,00	13.502.500,00	13.502.500,00	02/12/2024
9	DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	4.597	7.500,00	11.492.500,00	11.492.500,00	02/12/2024
Jumlah		25	25	98.118		245.295.000,00	

- 10) Realisasi belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD terealisasi sebesar Rp4.311.628.016,00 atau 99,40% dari anggaran Rp4.337.460.000,00.
- 11) Realisasi belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan adalah sebesar Rp1.339.625.098,00 atau 94,62% dari anggaran Rp1.415.820.000,00. Belanja hibah dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

**f. Belanja Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.199.600.000,00 atau 99,97%. Belanja bantuan sosial yang dianggarkan adalah bantuan sosial yang direncanakan.

Tabel 5.1.2.1.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.200.000.000,00	1.199.600.000,00	0,00	1.199.600.000,00	99,97	965.992.234,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
Jumlah	1.200.000.000,00	1.199.600.000,00	0,00	1.199.600.000,00	99,97	1.645.992.234,00

Rincian realisasi belanja bantuan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.14 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Nomor SP2D	Periode	Jumlah
64.74/03.0/000011/LS/1.06.2.13.0.00.09.0000/M/2/2024	Januari-Februari	200.000.000,00
64.74/03.0/000160/LS/1.06.2.13.0.00.09.0000/M/6/2024	Maret-Juni	400.000.000,00
64.74/03.0/000321/LS/1.06.2.13.0.00.09.0000/PR/10/2024	Juli-Agustus	199.600.000,00
64.74/03.0/000418/LS/1.06.2.13.0.00.09.0000/PPR1/12/2024	September-Desember	400.000.000,00
Jumlah		1.199.600.000,00

Belanja bantuan sosial tidak terealisasi disebabkan oleh adanya pengembalian sebesar Rp400.000,00 atas nama Alimuddin karena pindah domisili ke luar Kota Bontang.

**5.1.2.2 BELANJA MODAL**

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Tabel 5.1.2.2.1 Belanja Modal Pemerintah Kota Bontang

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Tanah	62.331.818.000,00	5.263.015.170,00	0,00	5.263.015.170,00	8,44	1.520.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	254.064.539.459,58	243.101.129.946,00	0,00	243.101.129.946,00	95,68	245.818.086.686,00
Belanja Gedung dan Bangunan	272.933.938.254,00	259.132.176.018,00	0,00	259.132.176.018,00	94,94	118.003.698.038,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	562.627.007.183,00	537.652.787.319,00	85.496.000,00	537.738.283.319,00	95,58	289.457.351.037,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.335.933.187,00	5.130.404.098,00	0,00	5.130.404.098,00	96,15	4.390.143.417,00
Belanja Aset Lainnya	1.937.158.460,00	1.600.123.816,00	0,00	1.600.123.816,00	82,60	1.844.684.359,00
Jumlah	1.159.230.394.543,58	1.051.879.636.367,00	85.496.000,00	1.051.965.132.367,00	90,75	661.033.963.537,00

Realisasi belanja modal selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.051.965.132.367,00 atau 90,75% dari anggaran sebesar Rp1.159.230.394.543,58. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp390.931.168.830,00 atau 59,14% dari realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp661.033.963.537,00. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran kewajiban tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp85.496.000,00 pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Realisasi belanja modal pada BLUD, JKN dan Dana BOS pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.2 Belanja Modal BLUD, JKN dan BOS Tahun 2024 dan 2023

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BLUD				
Belanja Peralatan dan Mesin	4.315.000.000,00	4.196.939.147,00	97,26	9.398.413.479,00
Belanja Gedung dan Bangunan	1.971.510.599,00	1.287.594.174,00	65,31	7.573.447.452,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	200.000.000,00	138.000.000,00	69,00	150.000.000,00
Subtotal BLUD	6.486.510.599,00	5.622.533.321,00	86,68	17.121.860.931,00
JKN				
Belanja Peralatan dan Mesin	614.152.061,00	585.514.257,00	95,34	441.897.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	58.934.400,00	58.881.000,00	99,91	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal JKN	673.086.461,00	644.395.257,00	95,74	441.897.000,00
DANA BOS				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	200.617.126,00	189.779.700,00	94,60	2.528.577.344,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	835.731.775,00	755.530.975,00	90,40	2.032.189.870,00
Subtotal Dana BOS	1.036.348.901,00	945.310.675,00	91,22	4.560.767.214,00
Total	8.195.945.961,00	7.212.239.253,00	88,00	22.124.525.145,00

a. Belanja Modal Tanah

Anggaran belanja modal tanah Pemerintah Kota Bontang selama 2024 adalah sebesar Rp62.331.818.000,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp5.263.015.170,00 atau 8,44%. Perbandingan realisasi dengan tahun 2023 sebesar Rp1.520.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.743.015.170,00 atau 246,25% dengan perincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.3 Belanja Modal Tanah

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Lapangan	18.220.000.000,00	5.166.365.170,00	28,36	0,00
Belanja Modal Tanah Persil	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.520.000.000,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	39.111.818.000,00	96.650.000,00	0,25	0,00
Jumlah	62.331.818.000,00	5.263.015.170,00	8,44	1.520.000.000,00

Belanja modal tanah berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.4 Belanja Modal Tanah Perangkat Daerah

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Kesehatan	7.250.000.000,00	5.021.729.260,00	69,27	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	43.611.818.000,00	179.540.080,00	0,41	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.470.000.000,00	61.745.830,00	0,95	1.520.000.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	62.331.818.000,00	5.263.015.170,00	8,44	1.520.000.000,00

**b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi belanja peralatan dan mesin selama tahun 2024 sebesar Rp243.101.129.946,00 atau 95,68% dari target Rp254.064.539.459,58. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Rp245.818.086.686,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.716.956.740,00 atau 1,11% yang diperinci berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal peralatan dan mesin pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Modal Alat Besar	5.370.707.240,00	5.170.782.850,00	0,00	5.170.782.850,00	96,28	29.359.955.900,00
Belanja Modal Alat Angkutan	19.237.228.093,00	17.696.557.483,00	0,00	17.696.557.483,00	91,99	47.829.965.680,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	583.031.828,00	488.664.742,00	0,00	488.664.742,00	83,81	895.622.461,00
Belanja Modal Alat Pertanian	688.639.531,00	562.690.000,00	0,00	562.690.000,00	81,71	63.460.125,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.103.806.764,58	76.267.026.949,00	0,00	76.267.026.949,00	95,21	56.901.730.002,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.585.091.922,00	46.270.372.814,00	0,00	46.270.372.814,00	97,24	16.491.733.880,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.904.808.300,00	24.870.836.344,00	0,00	24.870.836.344,00	96,01	44.926.760.989,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	6.017.791.924,00	5.095.423.696,00	0,00	5.095.423.696,00	84,67	2.621.743.040,00
Belanja Modal Komputer	58.548.954.774,00	56.992.294.112,00	0,00	56.992.294.112,00	97,34	29.429.301.758,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.691.468,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.598.204.404,00	3.474.966.731,00	0,00	3.474.966.731,00	96,58	1.674.195.950,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	978.008.300,00	953.201.270,00	0,00	953.201.270,00	97,46	516.589.083,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	578.363.620,00	544.790.550,00	0,00	544.790.550,00	94,20	510.345.527,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	200.617.126,00	189.779.700,00	0,00	189.779.700,00	94,60	2.528.577.344,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	354.285.633,00	326.803.558,00	0,00	326.803.558,00	92,24	0,00
Belanja Modal Pengadaan di BLUD	4.315.000.000,00	4.196.939.147,00	0,00	4.196.939.147,00	97,26	9.398.413.479,00
Jumlah	254.064.539.459,58	243.101.129.946,00	0,00	243.101.129.946,00	95,68	245.818.086.686,00



Belanja modal peralatan dan mesin berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perangkat Daerah

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.100.616.391,58	57.403.270.032,00	0,00	57.403.270.032,00	97,13	23.751.601.824,00
Dinas Kesehatan	17.776.850.877,00	16.151.508.897,00	0,00	16.151.508.897,00	90,86	9.772.506.313,00
Rumah Sakit Umum Daerah	53.927.179.957,00	52.210.574.736,00	0,00	52.210.574.736,00	96,82	56.288.520.808,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	5.858.790.223,00	5.509.408.066,00	0,00	5.509.408.066,00	94,04	18.067.189.571,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.596.949.514,00	3.456.133.542,00	0,00	3.456.133.542,00	96,09	3.657.102.331,00
Satuan Polisi Pamong Praja	832.194.478,00	630.265.000,00	0,00	630.265.000,00	75,74	1.659.481.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.767.437,00	293.762.300,00	0,00	293.762.300,00	80,53	447.726.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.303.146.664,00	2.218.081.470,00	0,00	2.218.081.470,00	96,31	14.054.222.658,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.684.730.067,00	1.662.890.540,00	0,00	1.662.890.540,00	98,70	2.117.552.930,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.225.105.163,00	1.124.239.525,00	0,00	1.124.239.525,00	91,77	1.167.969.160,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	2.207.908.938,00	2.152.456.678,00	0,00	2.152.456.678,00	97,49	867.591.895,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.399.957.470,00	1.340.766.418,00	0,00	1.340.766.418,00	95,77	1.800.507.950,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.392.289.247,00	3.185.761.700,00	0,00	3.185.761.700,00	93,91	20.688.564.894,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.572.109.418,00	2.485.410.000,00	0,00	2.485.410.000,00	96,63	2.559.720.000,00
Dinas Perhubungan	3.955.792.637,00	3.871.236.270,00	0,00	3.871.236.270,00	97,86	5.987.228.100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	10.861.169.642,00	10.473.378.396,00	0,00	10.473.378.396,00	96,43	2.240.836.375,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	3.447.210.860,00	3.397.667.030,00	0,00	3.397.667.030,00	98,56	9.816.145.998,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.547.485.411,00	7.371.487.200,00	0,00	7.371.487.200,00	97,67	1.357.061.983,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13.203.289.313,00	12.923.417.242,00	0,00	12.923.417.242,00	97,88	4.571.178.430,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.001.188.268,00	1.877.105.500,00	0,00	1.877.105.500,00	93,80	1.265.075.050,00
Sekretariat Daerah	13.046.244.959,00	12.534.955.700,00	0,00	12.534.955.700,00	96,08	19.043.966.170,00
Sekretariat DPRD	11.528.697.609,00	10.820.667.670,00	0,00	10.820.667.670,00	93,86	7.085.015.900,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	627.258.521,00	571.175.000,00	0,00	571.175.000,00	91,06	1.452.585.675,00
Badan Pendapatan Daerah	351.832.625,00	341.230.000,00	0,00	341.230.000,00	96,99	2.595.910.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.682.660.917,00	1.584.115.000,00	0,00	1.584.115.000,00	94,14	1.761.783.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.432.387.815,00	3.886.640.972,00	0,00	3.886.640.972,00	87,69	1.223.983.670,00
Inspektorat Daerah	1.305.717.529,00	1.160.202.330,00	0,00	1.160.202.330,00	88,86	461.786.090,00
Kecamatan Bontang Utara	8.921.026.080,00	8.528.717.609,00	0,00	8.528.717.609,00	95,60	11.181.504.271,00
Kecamatan Bontang Selatan	10.141.370.352,00	9.480.135.728,00	0,00	9.480.135.728,00	93,48	12.480.376.510,00
Kecamatan Bontang Barat	1.988.767.988,00	1.940.669.435,00	0,00	1.940.669.435,00	97,58	5.113.277.930,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.779.843.089,00	2.513.799.960,00	0,00	2.513.799.960,00	90,43	1.280.114.000,00
Jumlah	254.064.539.459,58	243.101.129.946,00	0,00	243.101.129.946,00	95,68	245.818.086.686,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja gedung dan bangunan selama tahun 2024 sebesar Rp259.132.176.018,00 atau 94,94% dari target Rp272.933.938.254,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Rp118.003.698.038,00 mengalami kenaikan sebesar Rp141.128.477.980,00 atau 119,60%. Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal gedung dan bangunan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.586.326.339,00	238.489.325.981,00	0,00	238.489.325.981,00	95,17	103.951.786.380,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	17.794.614.946,00	16.845.356.476,00	0,00	16.845.356.476,00	94,67	6.478.464.206,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	243.050.000,00	241.947.532,00	0,00	241.947.532,00	99,55	0,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.338.436.370,00	2.267.951.855,00	0,00	2.267.951.855,00	96,99	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.971.510.599,00	1.287.594.174,00	0,00	1.287.594.174,00	65,31	7.573.447.452,00
Jumlah	272.933.938.254,00	259.132.176.018,00	0,00	259.132.176.018,00	94,94	118.003.698.038,00

Belanja modal gedung dan bangunan berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Perangkat Daerah

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.068.203.942,00	86.937.213.243,00	0,00	86.937.213.243,00	95,46	41.655.358.048,00
Dinas Kesehatan	6.912.999.508,00	6.873.795.061,00	0,00	6.873.795.061,00	99,43	4.689.138.605,00
Rumah Sakit Umum Daerah	14.926.890.610,00	11.836.572.059,00	0,00	11.836.572.059,00	79,30	7.573.447.452,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	92.181.330.175,00	90.126.238.875,00	0,00	90.126.238.875,00	97,77	29.506.287.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.430.418.732,00	3.503.102.800,00	0,00	3.503.102.800,00	79,07	8.454.847.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.159.982,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.275.000,00	45.193.650,00	0,00	45.193.650,00	99,82	156.226.950,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.511.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	36.510.599,00	35.097.900,00	0,00	35.097.900,00	96,13	149.364.981,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	541.990.300,00	540.297.800,00	0,00	540.297.800,00	99,69	436.571.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.680.119.100,00	1.658.191.219,00	0,00	1.658.191.219,00	98,69	978.725.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.598.000,00	581.062.817,00	0,00	581.062.817,00	99,23	898.136.180,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Perhubungan	12.677.004.600,00	11.302.113.300,00	0,00	11.302.113.300,00	89,15	3.616.022.500,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	198.534.750,00	196.552.615,00	0,00	196.552.615,00	99,00	189.352.200,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	2.794.209.365,00	2.674.855.050,00	0,00	2.674.855.050,00	95,73	1.688.790.895,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	22.307.134.991,00	21.105.647.290,00	0,00	21.105.647.290,00	94,61	6.941.466.363,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.535.058.198,00	5.458.487.725,00	0,00	5.458.487.725,00	98,62	0,00
Sekretariat DPRD	601.710.300,00	573.060.993,00	0,00	573.060.993,00	95,24	895.981.334,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	227.121.000,00	174.036.750,00	0,00	174.036.750,00	76,63	860.678.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	258.588.558,00	0,00	258.588.558,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	262.934.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	235.737.600,00	163.925.000,00	0,00	163.925.000,00	69,54	0,00
Kecamatan Bontang Utara	6.298.530.280,00	6.237.363.195,00	0,00	6.237.363.195,00	99,03	3.798.978.985,00
Kecamatan Bontang Selatan	7.296.156.666,00	6.774.653.279,00	0,00	6.774.653.279,00	92,85	2.532.731.068,00
Kecamatan Bontang Barat	2.090.469.788,00	2.076.126.839,00	0,00	2.076.126.839,00	99,31	2.631.371.195,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00
Jumlah	272.933.938.254,00	259.132.176.018,00	0,00	259.132.176.018,00	94,94	118.003.698.038,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2024 sebesar Rp537.738.283.319,00 atau 95,58% dari target Rp562.627.007.183,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Rp289.457.351.037,00 mengalami kenaikan sebesar Rp248.280.932.282,00 atau 85,77%.

Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**PEMERINTAH KOTA BONTANG****Tabel 5.1.2.2.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	257.728.170.654,00	246.772.351.115,00	85.496.000,00	246.857.847.115,00	95,78	162.505.058.446,00
Belanja Modal Bangunan Air	267.802.360.430,00	254.759.166.523,00	0,00	254.759.166.523,00	95,13	95.446.281.432,00
Belanja Modal Instalasi	29.912.016.773,00	29.204.511.408,00	0,00	29.204.511.408,00	97,63	16.409.128.790,00
Belanja Modal Jaringan	7.184.459.326,00	6.916.758.273,00	0,00	6.916.758.273,00	96,27	15.096.882.369,00
Jumlah	562.627.007.183,00	537.652.787.319,00	85.496.000,00	537.738.283.319,00	95,58	289.457.351.037,00

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Perangkat Daerah

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2024 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	199.719.000,00	193.550.460,00	0,00	193.550.460,00	96,91	0,00
Dinas Kesehatan	222.326.700,00	221.052.000,00	0,00	221.052.000,00	99,43	5.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	548.784.534,00	546.603.142,00	0,00	546.603.142,00	99,60	1.766.036.731,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	433.363.557.198,00	410.580.936.364,00	0,00	410.580.936.364,00	94,74	206.693.988.045,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63.310.461.755,00	61.978.293.208,00	85.496.000,00	62.063.789.208,00	98,03	52.775.696.399,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.206.000,00	88.027.148,00	0,00	88.027.148,00	98,68	0,00
Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.469.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	293.129.100,00	256.010.600,00	0,00	256.010.600,00	87,34	425.151.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	264.759.200,00	260.752.000,00	0,00	260.752.000,00	98,49	190.213.651,00
Dinas Perhubungan	71.750.000,00	63.936.000,00	0,00	63.936.000,00	89,11	2.405.625.211,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	362.928.000,00	362.123.100,00	0,00	362.123.100,00	99,78	714.113.937,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13.125.070.000,00	13.118.328.088,00	0,00	13.118.328.088,00	99,95	163.730.700,00
Kecamatan Bontang Utara	24.871.014.188,00	24.418.376.593,00	0,00	24.418.376.593,00	98,18	9.801.130.712,00
Kecamatan Bontang Selatan	19.989.816.405,00	19.678.589.383,00	0,00	19.678.589.383,00	98,44	9.760.879.251,00
Kecamatan Bontang Barat	5.914.485.103,00	5.886.209.233,00	0,00	5.886.209.233,00	99,52	4.531.316.200,00
Jumlah	562.627.007.183,00	537.652.787.319,00	85.496.000,00	537.738.283.319,00	95,58	289.457.351.037,00

**e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi belanja aset tetap lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp5.130.404.098,00 atau 96,15% dari target Rp5.335.933.187,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.390.143.417,00 mengalami kenaikan sebesar Rp740.260.681,00 atau 16,86%.

Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal aset tetap lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.11 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.178.884.341,00	2.154.967.235,00	98,90	13.875.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	154.171.421,00	116.476.720,00	75,55	132.655.320,00
Belanja Modal Tanaman	1.614.641.500,00	1.563.236.000,00	96,82	1.261.664.500,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	949.758.727,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	835.731.775,00	755.530.975,00	90,40	2.032.189.870,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	552.504.150,00	540.193.168,00	97,77	0,00
Jumlah	5.335.933.187,00	5.130.404.098,00	96,15	4.390.143.417,00

Belanja modal aset tetap lainnya berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.12 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.633.173.720,00	1.507.637.653,00	92,31	2.081.695.870,00
Dinas Kesehatan	4.635.000,00	4.500.000,00	97,09	384.011.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota	0,00	0,00	0,00	892.604.227,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.454.641.500,00	1.417.036.000,00	97,41	807.453.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	7.648.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	410.451.190,00	399.653.725,00	97,37	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	1.705.000.000,00	1.683.200.000,00	98,72	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	118.688.777,00	109.276.720,00	92,07	132.655.320,00
Kecamatan Bontang Barat	8.343.000,00	8.100.000,00	97,09	13.875.000,00
Jumlah	5.335.933.187,00	5.130.404.098,00	96,15	4.390.143.417,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja aset lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp1.600.123.816,00 atau 82,60% dari target Rp1.937.158.460,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Rp1.844.684.359,00 mengalami penurunan sebesar Rp244.560.543,00 atau 13,26%.

Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal aset lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.13 Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.737.158.460,00	1.462.123.816,00	84,17	1.694.684.359,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00	138.000.000,00	69,00	150.000.000,00
Jumlah	1.937.158.460,00	1.600.123.816,00	82,60	1.844.684.359,00

Belanja modal aset lainnya berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.2.14 Belanja Modal Aset Lainnya Perangkat Daerah

SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Kesehatan	367.971.664,00	243.260.500,00	66,11	11.100.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	200.000.000,00	138.000.000,00	69,00	150.000.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	102.655.900,00
Dinas Perhubungan	105.134.761,00	99.440.000,00	94,58	54.390.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	452.546.738,00	450.000.000,00	99,44	299.672.250,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	99.436.020,00
Sekretariat Daerah	227.791.990,00	151.587.816,00	66,55	150.188.439,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	179.820.000,00
Badan Pendapatan Daerah	23.363.282,00	23.310.000,00	99,77	199.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	229.204.101,00	175.000.000,00	76,35	196.890.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	272.737.723,00	261.175.500,00	95,76	101.506.750,00
Inspektorat Daerah	58.408.201,00	58.350.000,00	99,90	200.025.000,00
Jumlah	1.937.158.460,00	1.600.123.816,00	82,60	1.844.684.359,00

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan



pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 merupakan realisasi belanja yang dianggarkan di APBD sebesar Rp3.633.816.356,00. Realisasi belanja tak terduga terdiri atas santunan kematian bagi penduduk Kota Bontang dan biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Realisasi belanja tak terduga TA 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang bulan Januari Tahun 2024 sesuai SK Walikota Nomor 100.3.3.3/170/BPKAD/2024 tanggal 13 Maret 2024	90.000.000,00
2	Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang bulan Februari Tahun 2024 sesuai SK Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/238/BPKAD/2024 tanggal 6 Mei 2024	33.000.000,00
3	Santunan kematian bagi penduduk kota Bontang Bulan Maret dan April Tahun 2024 sesuai SK Wali Kota Bontang Nomor: 100.3.3.3/290/BPKAD/2024 tanggal 7 Juni 2024	93.000.000,00
4	Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 sesuai SK Wali Kota Bontang Nomor : 100.3.3.3/419/BPKAD/2024 tanggal 2 September 2024.	120.000.000,00
5	Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang Bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2024 sesuai SK Wali Kota Bontang Nomor : 100.3.3.3/540/BPKAD/2024 tanggal 28 Oktober 2024.	165.000.000,00
6	Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Bontang Bulan Oktober sampai dengan Bulan November Tahun 2024 sesuai SK Wali Kota Bontang Nomor : 100.3.3.3/617/BPKAD/2024 tanggal 17 Desember 2024.	78.000.000,00
7	Biaya Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 sesuai SK Wali Kota Bontang Nomor : 100.3.3.3/636/BPKAD/2024	22.898.058,00
Jumlah		601.898.058,00

5.1.3 SURPLUS – DEFISIT LRA

Selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan merupakan Surplus/Defisit - LRA. Surplus/Defisit – LRA tahun 2024 sebesar Rp299.361.556.236,84 menunjukkan penurunan Rp533.209.937.818,20 atau 228,02% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp233.848.381.581,36.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.4.1.1 Pembiayaan Neto Kota Bontang

Nama Rekening	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	605.260.697.136,10	606.519.074.134,10	100,21	396.412.315.554,74
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	580.260.697.136,10	581.519.074.134,10	100,22	371.412.315.554,74



Realisasi Pembiayaan Neto Daerah Pemerintah Kota Bontang yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam hal Pembiayaan selama Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan sebesar Rp606.519.074.134,10 atau naik 53,00% yaitu sebesar Rp210.106.758.579,36 dari tahun 2023 Rp396.412.315.554,74. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp581.519.074.134,10 dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp282.157.517.897,26.

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp606.519.074.134,10 atau sebesar 100,21% dari anggaran sebesar Rp605.260.697.136,10. Rincian penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.4.1.2 Penerimaan Pembiayaan

Nama Rekening	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penggunaan SiLPA	605.260.697.136,10	606.519.074.134,10	100,21	396.412.315.554,74
Penerimaan Pembiayaan	605.260.697.136,10	606.519.074.134,10	100,21	396.412.315.554,74

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp606.519.074.134,10 atau 100,21% dari anggaran sebesar Rp605.260.697.136,10. Hal ini menunjukkan kenaikan Rp210.106.758.579,36 atau 53,00% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp396.412.315.554,74. Realisasi penerimaan pembiayaan lebih besar daripada target sebesar Rp1.258.376.998,00 adalah saldo kas BOK Kesehatan pada Puskesmas per 31 Desember 2023 yang belum dicatat sebagai SiLPA.

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp25.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00. Rincian pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.4.2.1 Pengeluaran Pembiayaan

Nama Rekening	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan



Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pada pasal 2 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa tahun anggaran 2024 rencana penambahan penyertaan modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00. Pada tahun anggaran 2024 telah direalisasikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp25.000.000.000,00, Pemerintah Kota Bontang telah memenuhi penambahan besaran penyertaan modal.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus (defisit) pendapatan dan belanja, dengan surplus (defisit) pembiayaan, yang menunjukkan sisa dana Kas Daerah Pemerintah Kota Bontang pada akhir TA 2024 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.5.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/(Defisit) Pendapatan dan Belanja	(580.260.697.136,00)	(299.361.556.236,84)
Pembiayaan Neto	580.260.697.136,00	581.519.074.134,10
Jumlah	0,00	282.157.517.897,26

SILPA sebesar Rp282.157.517.897,26 tersebut terdiri dari:

• Kas di BUD/ Kas Daerah	Rp	273.607.969.471,45
• Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
• Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
• Kas di BLUD	Rp	5.241.023.205,67
• Kas Dana Kapitasi di Bendahara FKTP	Rp	1.605.416.610,60
• Kas Dana BOS	Rp	1.134.455.147,54
• Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	568.653.462,00
Total SILPA	Rp	282.157.517.897,26



5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Tabel 5.2.1.1.1 Ringkasan LPSAL 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	605.260.697.136,10	396.412.347.579,74	208.848.349.556,36
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(605.260.697.136,10)	(396.412.315.554,74)	(208.848.381.581,36)
Sub Total (1 + 2)	0,00	32.025,00	(32.025,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	280.899.140.899,26	605.260.697.136,10	(324.361.556.236,84)
Sub Total (3 + 4)	280.899.140.899,26	605.260.729.161,10	(324.361.588.261,84)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	1.258.376.998,00	(32.025,00)	1.258.409.023,00
Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	282.157.517.897,26	605.260.697.136,10	(323.103.179.238,84)

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL TAHUN 2024

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp605.260.697.136,10 mengalami kenaikan sebesar Rp208.848.349.556,36 atau 52,68% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp396.412.347.579,74.

5.2.2 PENGGUNAAN SALDO AWAL LEBIH

Penggunaan Saldo Awal Lebih merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp605.260.697.136,10 terjadi penurunan sebesar Rp208.848.381.581,36 atau 52,68% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp396.412.315.554,74.

5.2.3 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi atas kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya setelah Laporan Keuangan disusun pada periode pelaporan tahun 2024. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.258.376.998,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.258.409.023,00 atau 39.294,58% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp32.025,00. Pada tahun 2024 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.258.376.998,00



merupakan Saldo Kas BOK pada FKTP per 31 Desember 2023. Rincian Koreksi atas Saldo Kas BOK pada FKTP per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.2.4 LAIN-LAIN

Pada periode pelaporan tahun 2024 tidak terdapat hal lain-lain yang mempengaruhi saldo anggaran lebih.

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 sebesar Rp605.260.697.136,10 turun menjadi Rp282.157.517.897,26 atau 53,38% pada tahun 2024.

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 sebesar Rp282.157.517.897,26 terdiri dari:

• SiLPA di Kas Daerah	Rp	273.607.969.471,45
• SiLPA di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
• SiLPA di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
• SiLPA di BLUD	Rp	5.241.023.205,67
• SiLPA di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp	1.605.416.610,60
• SiLPA di Bendahara BOS SDN dan SMPN	Rp	1.134.455.147,54
• SiLPA di BOK Puskesmas	Rp	568.653.462,00



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan struktur yang berkaitan dengan Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kota Bontang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut ini.

5.3.1 ASET

Total Aset Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.604.475.107.766,60 mengalami kenaikan sebesar Rp132.945.496.535,03 atau 2,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.471.529.611.231,57 sebagaimana berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.1 Total Aset 2024

Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Aset Lancar	466.220.854.921,34	790.946.839.841,86	(41,06)
Investasi Jangka Panjang	261.911.680.640,54	235.183.114.040,99	11,37
Aset Tetap	4.883.301.712.208,12	4.141.847.676.904,12	17,90
Properti Investasi	36.732.340.272,00	36.732.340.272,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	956.308.519.724,60	1.266.819.640.172,60	(24,51)
Jumlah	6.604.475.107.766,60	6.471.529.611.231,57	2,05

Rincian aset dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp466.220.854.921,34 mengalami penurunan sebesar Rp324.725.984.920,52 atau 41,06% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp790.946.839.841,86 sebagaimana berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.2 Aset Lancar

Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas di Kas Daerah	273.607.969.471,45	584.521.534.086,41	(53,19)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55	(70,44)
Kas di Bendahara BOSP	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54	50,90
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.605.416.610,60	1.946.947.502,60	(41,73)
Kas di Bendahara BOK Puskesmas	568.653.462,00	0,00	100,00



Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Piutang Pajak Daerah	63.162.418.077,00	55.164.999.100,00	14,50
Piutang Retribusi Daerah	1.228.244.261,00	947.549.871,00	29,62
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.790.241.980,22	2.369.779.863,22	228,73
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	21.955.167.000,00	(100,00)
Piutang Lainnya	0,00	47.639.680.735,00	(100,00)
Penyisihan Piutang	(31.359.905.812,14)	(28.881.837.612,46)	8,60
Beban Dibayar Dimuka	639.432.676,00	627.150.278,00	1,96
Persediaan	142.602.905.842,00	85.863.653.471,00	66,08
Jumlah	466.220.854.921,34	790.946.839.841,86	(41,06)

Rincian Aset Lancar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. KAS

Kas merupakan aset lancar pada laporan neraca yang paling likuid. Aset lancar pada pos ini menunjukkan saldo Kas per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara BLUD RSUD, Bendahara Kapitasi JKN, Bendahara SKPD, dan Bendahara BOS baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan tabungan. Saldo Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp282.157.517.897,26 mengalami penurunan sebesar Rp323.103.179.238,84 atau 53,38% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp605.260.697.136,10 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.3 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas di Kas Daerah	273.607.969.471,45	584.521.534.086,41	(53,19)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOS	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54	6,63
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.605.416.610,60	1.946.947.502,60	(17,54)
Kas Dana BOK Puskesmas	568.653.462,00	0,00	100,00
Kas di BLUD	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55	(70,44)
Jumlah	282.157.517.897,26	605.260.697.136,10	(53,38)

Rincian saldo Kas per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023, dapat disajikan sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kota Bontang Per 31 Desember 2024. Kas pada Kas Daerah yang disimpan pada Bankaltim dengan nomor rekening 0081301360 berupa dana di rekening giro bank. Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp273.607.969.471,45



mengalami penurunan sebesar Rp310.913.564.614,96 atau 53,19% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp584.521.534.086,41.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 yang masih berada di bendahara pengeluaran SKPD dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah nihil.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 yang masih berada di bendahara penerimaan SKPD. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

4) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOSP merupakan dana yang masih berada di dalam penguasaan Bendahara BOSP di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Saldo Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.455.147,54 merupakan saldo dana BOS Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Saldo dana BOS Tahun 2024 sebesar Rp1.134.455.149,54 mengalami kenaikan sebesar Rp70.582.537,00 atau 6,63% bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.063.872.610,54. Perincian Saldo BOS adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.4 Saldo Dana Operasional Sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Nama Sekolah	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
SDN 001 Bontang Utara	6.668.561,30	21.012.369,30	(68,26)
SDN 002 Bontang Utara	11.371.233,89	23.433.868,89	(51,48)
SDN 003 Bontang Utara	75.731.179,40	70.683.706,40	7,14
SDN 004 Bontang Utara	72.287.388,98	56.252.116,98	28,51
SDN 005 Bontang Utara	28.150.118,34	14.963.454,34	88,13
SDN 006 Bontang Utara	4.186.251,00	18.967.575,00	(77,93)
SDN 007 Bontang Utara	40.901.725,32	21.276.985,32	92,23
SDN 008 Bontang Utara	26.243.056,26	46.868.731,26	(44,01)
SDN 009 Bontang Utara	36.324.619,28	32.792.125,28	10,77
SDN 010 Bontang Utara	25.531.515,41	7.200.006,41	254,60
SDN 011 Bontang Utara	959.767,00	1.137.292,00	(15,61)
SDN 001 Bontang Selatan	33.802.402,23	35.402.973,23	(4,52)
SDN 002 Bontang Selatan	28.686.498,00	31.516.947,00	(8,98)
SDN 003 Bontang Selatan	28.328.951,38	31.728.338,38	(10,71)
SDN 004 Bontang Selatan	90.289.703,00	89.521.870,00	0,86
SDN 005 Bontang Selatan	5.714.340,00	17.447.250,00	(67,25)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama Sekolah	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
SDN 006 Bontang Selatan	25.898.391,28	16.322.667,28	58,67
SDN 007 Bontang Selatan	33.164.252,00	16.305.469,00	103,39
SDN 009 Bontang Selatan	107.697.672,58	36.208.182,58	197,44
SDN 010 Bontang Selatan	5.208.138,00	19.391.429,00	(73,14)
SDN 011 Bontang Selatan	27.768.315,00	35.692.856,00	(22,20)
SDN 012 Bontang Selatan	4.115.386,28	9.705.259,28	(57,60)
SDN 013 Bontang Selatan	32.559.422,56	37.394.113,56	(12,93)
SDN 014 Bontang Selatan	11.489.894,00	11.489.894,00	0,00
SDN 015 Bontang Selatan	50.500,00	50.500,00	0,00
SDN 016 Bontang Selatan	212.550,00	218.900,00	(2,90)
SDN 001 Bontang Barat	1.448.507,00	10.817.515,00	(86,61)
SDN 002 Bontang Barat	4.297.082,00	10.924.979,00	(60,67)
SDN 003 Bontang Barat	18.566.465,32	8.640.846,32	114,87
SDN 004 Bontang Barat	32.276.556,49	27.596.993,49	16,96
SMP Negeri 1 Bontang	11.296.232,56	41.829.182,56	(72,99)
SMP Negeri 2 Bontang	35.565.237,07	44.234.438,07	(19,60)
SMP Negeri 3 Bontang	95.104.363,05	45.595.730,05	108,58
SMP Negeri 4 Bontang	26.705.200,66	7.249.428,66	268,38
SMP Negeri 5 Bontang	14.268.415,00	22.299.620,00	(36,01)
SMP Negeri 6 Bontang	39.114.478,00	21.553.288,00	81,48
SMP Negeri 7 Bontang	63.383.487,72	98.152.395,72	(35,42)
SMP Negeri 8 Bontang	19.958.104,31	13.137.212,31	51,92
SMP Negeri 9 Bontang	5.623.653,87	8.856.100,87	(36,50)
TK Negeri 1 Bontang	3.497.598,00	0,00	100,00
TK Negeri 2 Bontang	0,00	0,00	0,00
TK Negeri 3 Bontang	0,00	0,00	0,00
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bontang	7.934,00	0,00	100,00
Jumlah	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54	6,63

5) Kas Dana Kapitasi JKN

Saldo Kas di Bendahara Kapitasi merupakan dana kapitasi JKN yang masih berada di tangan Bendahara Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bontang. Saldo Dana Kapitasi Tahun 2024 sebesar Rp1.605.416.610,60 mengalami penurunan sebesar Rp341.530.892,00 atau 17,54% bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.946.947.502,60. Dana kapitasi dirinci sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.5 Saldo Kas Kapitasi JKN

Kas di Bendahara Kapitasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %
FKTP Puskesmas Bontang Utara I	128.662.084,60	228.888.779,60	(43,79)



Kas di Bendahara Kapitasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %
FKTP Puskesmas Bontang Utara II	132.570.689,00	317.819.528,00	(58,29)
FKTP Puskesmas Bontang Selatan I	532.752.237,00	339.933.791,00	56,72
FKTP Puskesmas Bontang Selatan II	283.016.424,00	211.146.539,00	34,04
FKTP Puskesmas Bontang Barat	90.509.262,00	320.051.467,00	(71,72)
FKTP Puskesmas Bontang Lestari	142.757.265,00	197.679.452,00	(27,78)
FKTP Klinik Pegawai	295.148.649,00	331.427.946,00	(10,95)
Jumlah	1.605.416.610,60	1.946.947.502,60	(17,54)

6) **Kas Dana BOK Puskesmas**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan dana BOK yang masih berada di tangan Bendahara Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bontang. Saldo Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp568.653.462,00. Dana BOK Puskesmas dirinci sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.6 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) n %
Puskesmas Bontang Utara I	151.823.816,00	0,00	100,00
Puskesmas Bontang Utara II	49.013.372,00	0,00	100,00
Puskesmas Bontang Selatan I	56.971.252,00	0,00	100,00
Puskesmas Bontang Selatan II	39.895.381,00	0,00	100,00
Puskesmas Bontang Barat	88.946.630,00	0,00	100,00
Puskesmas Bontang Lestari	182.003.011,00	0,00	100,00
Jumlah	568.653.462,00	0,00	100,00

7) **Kas di BLUD**

Saldo Kas BLUD adalah kas yang masih berada pada BLUD RSUD Taman Husada Bontang per 31 Desember 2024. Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.241.023.205,67 mengalami penurunan sebesar Rp12.487.319.730,88 atau 70,44% dari saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.728.342.936,55.

Tabel 5.3.1.1.7 Kas di BLUD

Kas di BLUD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas di Kas Bankaltim	3.552.452.011,72	15.027.982.752,55	(76,36)
Kas pada Bank Mandiri	445.551.842,12	792.486.320,00	(43,78)
Kas pada Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.241.388.522,00	1.906.873.864,00	(34,90)
Kas pada Bank Syariah Indonesia	630.829,83	0,00	100,00
Kas pada Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Jumlah	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55	(70,44)

Rincian mutasi Kas di BLUD selama TA 2024 adalah sebagai berikut:



Saldo Awal	17.728.342.936,55
Pendapatan	191.408.275.186,59
Belanja:	
Belanja Operasi	139.163.844.980,47
Belanja Modal	64.731.749.937,00
Belanja Tak Terduga	0,00
Koreksi	0,00
Saldo Akhir	5.241.023.205,67

b. PIUTANG

Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bontang dan/atau hak Pemerintah Kota Bontang yang dapat dinilai dengan uang sebagai perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang daerah berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas. Pada tahun 2024 Piutang pada Pemerintah Kota Bontang terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Terdapat piutang yang dilakukan reklasifikasi pencatatan yang sebelumnya dicatat pada Piutang Lainnya, pada tahun 2024 dicatat pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Saldo piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut ini.

1) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan atas pajak daerah. Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah, yang sampai dengan batas tertentu pada tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak tahun 2024 sebesar Rp63.162.418.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.997.418.977,00 atau 14,50% dari piutang pajak Tahun 2023 sebesar Rp55.164.999.100,00.

Tabel 5.3.1.1.8 Piutang Pajak

Piutang Pajak	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	151.634.097,00	94.591.431,00	57.042.666,00	60,30
Piutang Pajak Restoran	1.754.691.245,00	1.223.381.244,00	531.310.001,00	43,43
Piutang Pajak Hiburan	15.641.050,00	13.984.550,00	1.656.500,00	11,85
Piutang Pajak Reklame	224.622.650,00	206.549.354,00	18.073.296,00	8,75
Piutang Pajak Penerangan Jalan	987.988.530,00	14.900.760,00	973.087.770,00	6.530,46
Piutang Pajak Parkir	75.955.200,00	75.955.200,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	127.456.346,00	154.096.296,00	(26.639.950,00)	(17,29)
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.408.780,00	20.408.780,00	0,00	0,00
Piutang BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Piutang Pajak	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	59.804.020.179,00	53.361.131.485,00	6.442.888.694,00	12,07
Jumlah	63.162.418.077,00	55.164.999.100,00	7.997.418.977,00	14,50

Kenaikan piutang pajak ini dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Awal Piutang Pajak adalah Rp55.164.999.100,00;
- Ketetapan pajak Tahun 2024 sebesar Rp157.725.862.180,95;
- Penambahan NOP (PBB-P2) baru sebesar Rp359.129.530,00;
- Pemutakhiran data pajak (PBB-P2) sebesar (Rp69.453.849,00);
- Koreksi penambahan piutang PBB-P2 sebesar Rp59.102,00;
- Realisasi pembayaran pajak tahun 2024 sebesar Rp147.791.645.754,95;
- Pelunasan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp2.226.532.232,00;
- Saldo piutang pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp63.162.418.077,00.

Tabel 5.3.1.1.9 Piutang Pajak

Piutang Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2024 (Rp)	Koreksi Tambah (Kurang) (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
Piutang Pajak Hotel	94.591.431,00	2.020.612.527,00	1.951.400.183,00	0,00	12.169.678,00	151.634.097,00
Piutang Pajak Restoran	1.223.381.244,00	27.941.039.974,00	26.949.018.191,00	0,00	460.711.782,00	1.754.691.245,00
Piutang Pajak Hiburan	13.984.550,00	3.085.208.831,00	3.082.442.331,00	0,00	1.110.000,00	15.641.050,00
Piutang Pajak Reklame	206.549.354,00	1.042.737.158,50	1.006.665.802,50	0,00	17.998.060,00	224.622.650,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	14.900.760,00	40.578.234.368,00	39.605.146.598,00	0,00	0,00	987.988.530,00
Piutang Pajak Parkir	75.955.200,00	326.859.860,00	326.859.860,00	0,00	0,00	75.955.200,00
Piutang Pajak Air Tanah	154.096.296,00	8.612.515.660,00	8.612.515.660,00	0,00	26.639.950,00	127.456.346,00
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.408.780,00	2.421.862.102,50	2.421.862.102,50	0,00	0,00	20.408.780,00
Piutang BPHTB	0,00	7.252.330.108,95	7.252.330.108,95	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	53.361.131.485,00	64.443.411.591,00	56.582.354.918,00	289.734.783,00	1.707.902.762,00	59.804.020.179,00
Jumlah	55.164.999.100,00	157.725.862.180,95	147.791.645.754,95	289.734.783,00	2.226.532.232,00	63.162.418.077,00

Rincian ketetapan Pajak pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.10 Ketetapan Pajak tahun 2024

Piutang Pajak	SKPD	SKPD Terbayar	Tunggakan SKPD
Piutang Pajak Hotel	432	443	(11)
Piutang Pajak Restoran	7.720	7.279	441
Piutang Pajak Hiburan	381	370	11



Piutang Pajak	SKPD	SKPD Terbayar	Tunggakan SKPD
Piutang Pajak Reklame	1.193	1.169	24
Piutang Pajak Penerangan Jalan	220	204	16
Mineral Bukan Logam	11	12	(1)
Piutang Pajak Parkir	86	86	0
Piutang Pajak Air Tanah	72	72	0
Piutang BPHTB	1.144	1.147	(3)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	48.194	18.843	29.351
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	1	1	0

Pada tahun 2024 telah dilakukan pelunasan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp2.226.532.232,00 dengan perincian sebagai berikut ini.

- a) Piutang Pajak Hotel sebesar Rp12.169.678,00
- b) Piutang Pajak Restoran sebesar Rp460.711.782,00
- c) Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp1.110.000,00
- d) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp17.998.060,00
- e) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp26.639.950,00
- f) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.707.902.762,00 dengan perincian sebagai berikut ini
 - (i) PBB Tahun 2004 dari 1 WP sebesar Rp4.696,00
 - (ii) PBB Tahun 2005 dari 1 WP sebesar Rp5.446,00
 - (iii) PBB Tahun 2009 dari 1 WP sebesar Rp17.300,00
 - (iv) PBB Tahun 2010 dari 1 WP sebesar Rp17.300,00
 - (v) PBB Tahun 2011 dari 2 WP sebesar Rp46.100,00
 - (vi) PBB Tahun 2012 dari 2 WP sebesar Rp48.960,00
 - (vii) PBB Tahun 2013 dari 1 WP sebesar Rp28.800,00
 - (viii) PBB Tahun 2014 dari 1 WP sebesar Rp28.800,00
 - (ix) PBB Tahun 2018 dari 486 WP sebesar Rp45.095.097,00
 - (x) PBB Tahun 2019 dari 659 WP sebesar Rp90.550.564,00
 - (xi) PBB Tahun 2020 dari 888 WP sebesar Rp162.417.691,00
 - (xii) PBB Tahun 2021 dari 1.272 WP sebesar Rp386.121.003,00
 - (xiii) PBB Tahun 2022 dari 2.046 WP sebesar Rp326.496.229,00
 - (xiv) PBB Tahun 2023 dari 4.123 WP sebesar Rp697.024.776,00

Dari jumlah piutang pajak TA 2024 terdapat piutang pajak yang termasuk dalam kualitas macet sebesar Rp18.138.823.172,00 dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5.3.1.1.11 Piutang Pajak Macet Tahun 2024

Piutang Pajak	Nilai Piutang (Rp)
Piutang Pajak Hotel	80.025.253,00
Piutang Pajak Restoran	49.034.662,00
Piutang Pajak Hiburan	9.474.450,00
Piutang Pajak Reklame	63.428.750,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	14.900.760,00



Piutang Pajak	Nilai Piutang (Rp)
Piutang Pajak Parkir	75.955.200,00
Piutang Pajak Air Tanah	127.456.346,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.408.780,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.698.138.971,00
Jumlah	18.138.823.172,00

2) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Piutang Retribusi disebabkan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca tertentu belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bontang tahun 2024 sebesar Rp1.228.244.261,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.694.390,00 atau 29,62% dari piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp947.549.871,00.

Tabel 5.3.1.1.12 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.880.200,00	40.947.700,00	39.932.500,00	97,52
Retribusi Pelayanan Pasar	674.867.500,00	608.305.610,00	66.561.890,00	10,94
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	129.082.000,00	129.082.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	174.200.000,00	0,00	174.200.000,00	100,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	52.169.125,00	52.169.125,00	0,00	0,00
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	106.905.436,00	106.905.436,00	0,00	0,00
Jumlah	1.228.244.261,00	947.549.871,00	280.694.390,00	29,62

Kenaikan piutang retribusi ini dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Awal Piutang Retribusi adalah Rp947.549.871,00;
- Ketetapan Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp3.706.074.500,00;
- Reklas Piutang Hasil Sewa BMD ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp138.465.000,00;
- Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp50.962.765,00;
- Realisasi pembayaran retribusi tahun 2024 sebesar Rp3.324.043.500,00;
- Pelunasan retribusi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp290.764.375,00;
- Saldo piutang retribusi tahun 2024 adalah sebesar Rp1.228.244.261,00.

**PEMERINTAH KOTA BONTANG****Tabel 5.3.1.1.13 Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi	Saldo Awal Piutang Retribusi (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2024 (Rp)	Koreksi Tambah/ (Kurang) (Rp)	Pelunasan Retribusi (Rp)	Saldo Akhir Piutang Retribusi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.947.700,00	2.324.916.500,00	2.273.359.500,00	0,00	11.624.500,00	80.880.200,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	608.305.610,00	723.758.000,00	525.334.000,00	50.962.765,00	182.824.875,00	674.867.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	129.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.082.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	657.400.000,00	525.350.000,00	138.465.000,00	96.315.000,00	174.200.000,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	52.169.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.169.125,00
Retribusi Ijin Gangguan/Kera maian	106.905.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.905.436,00
Retribusi Ijin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	947.549.871,00	3.706.074.500,00	3.324.043.500,00	189.427.765,00	290.764.375,00	1.228.244.261,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Dari jumlah piutang retribusi TA 2024 terdapat piutang retribusi yang termasuk dalam kualitas macet sebesar Rp846.213.261,00 dengan perincian sebagai berikut ini:

Tabel 5.3.1.1.14 Piutang Retribusi Macet Tahun 2024

Piutang Retribusi	Nilai Piutang (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.323.200,00
Retribusi Pelayanan Pasar	476.443.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.140.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	129.082.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	42.150.000,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	52.169.125,00
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	106.905.436,00
Jumlah	846.213.261,00

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang merupakan potensi PAD dari hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemda dan sebagainya. Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2024 sebesar Rp7.790.241.980,22 mengalami kenaikan Rp5.420.462.117,00 atau 228,73% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.369.779.863,22.

Tabel 5.3.1.1.15 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2024

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	138.465.000,00	(138.465.000,00)	0,00
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	7.662.903.209,00	2.153.858.667,00	5.509.044.542,00	255,78
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	72.956.196,22	72.956.196,22	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Gaji	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Denda Retribusi Pelayanan Pasar	48.082.575,00	0,00	48.082.575,00	100,00
Jumlah	7.790.241.980,22	2.369.779.863,22	5.420.462.117,00	228,73

Penurunan Piutang Lain-lain PAD yang Sah ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Saldo Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Rp2.369.779.863,22;



- b) Ketetapan Lain-lain PAD yang Sah adalah Rp103.915.558.012,00;
- c) Reklas Masuk dari Piutang Lainnya sebesar Rp47.639.680.735,00 yang terdiri dari:
- Kelebihan Pembayaran Gaji sebesar Rp13.615.840,00
 - Denda Retribusi Pelayanan Pasar Rp48.082.575,00
 - Dana Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebesar Rp47.577.982.320,00
- d) Reklas Keluar dari Piutang Hasil Sewa BMD ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp138.465.000,00.
- e) Pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp266.107.441,00;
- f) Realisasi pembayaran ketetapan lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp98.140.406.029,00;
- g) Pelunasan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp47.589.798.160,00;
- h) Saldo Akhir Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 adalah sebesar Rp7.790.241.980,22.

Tabel 5.3.1.1.16 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2024(Rp)	Koreksi Tambah/ (Kurang) (Rp)	Pelunasan Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Saldo Akhir Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
Piutang Hasil Sewa BMD	138.465.000,00	0,00	0,00	(138.465.000,00)	0,00	0,00
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	2.153.858.667,00	103.915.558.012,00	98.140.406.029,00	(266.107.441,00)	0,00	7.662.903.209,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	72.956.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72.956.196,22
Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	13.615.840,00	11.815.840,00	1.800.000,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	48.082.575,00	0,00	48.082.575,00



Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo Awal Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2024(Rp)	Koreksi Tambah/ (Kurang) (Rp)	Pelunasan Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Saldo Akhir Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
Denda Retribusi Daerah						
Dana Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	0,00	0,00	0,00	47.577.982.320,00	47.577.982.320,00	0,00
Jumlah	2.369.779.863,22	103.915.558.012,00	98.140.406.029,00	47.235.108.294,00	47.589.798.160,00	7.790.241.980,22

4) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer merupakan piutang kurang salur bagi hasil provinsi tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bontang melakukan pencatatan piutang transfer tahun 2024 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp21.955.167.000,00 atau 100,00% dibandingkan piutang transfer tahun 2023 sebesar Rp21.955.167.000,00. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2024, alokasi kurang salur Kota Bontang telah ditetapkan, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum dilakukan penyaluran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 ke Kas Daerah Kota Bontang.

Tabel 5.3.1.1.17 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.994.452.000,00	(2.994.452.000,00)	0,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	3.476.111.000,00	(3.476.111.000,00)	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	15.463.358.000,00	(15.463.358.000,00)	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	21.246.000,00	(21.246.000,00)	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	21.955.167.000,00	(21.955.167.000,00)	0,00

5) Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kota Bontang dengan pihak ketiga di luar piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang lain-lain PAD yang sah, dan piutang transfer antar daerah. Piutang lainnya pada periode tahun anggaran 2024 adalah Rp0,00. Pada tahun 2023 piutang lainnya terdiri dari piutang kelebihan pembayaran gaji, piutang denda retribusi, piutang dana IUPK, dan piutang BLUD, pada tahun 2024 dilakukan reklasifikasi ke piutang lain-lain PAD yang sah.



Tabel 5.3.1.1.18 Reklasifikasi Saldo Awal Piutang Lainnya

2024		2023	
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Nilai	Piutang Lainnya	Nilai
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	13.615.840,00	Kelebihan Pembayaran Gaji	13.615.840,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	48.082.575,00	Denda Retribusi Pelayanan Pasar	48.082.575,00
Dana Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	47.577.982.320,00	Dana Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	47.577.982.320,00
Jumlah	47.639.680.735,00	Jumlah	47.639.680.735,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.1.1.19 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kelebihan Pembayaran Gaji	0,00	13.615.840,00	(13.615.840,00)	0,00
Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	48.082.575,00	(48.082.575,00)	0,00
Dana Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	0,00	47.577.982.320,00	(47.577.982.320,00)	0,00
Jumlah	0,00	47.639.680.735,00	(47.639.680.735,00)	0,00

c. PENYISIHAN PIUTANG

Penyisihan piutang merupakan upaya untuk menyajikan nilai piutang yang benar-benar dapat direalisasikan. Penyisihan piutang terdiri dari penyisihan piutang pajak, penyisihan piutang retribusi, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah, dan penyisihan piutang lainnya. Penyisihan piutang tahun 2024 menggunakan kualitas piutang sebagai dasar penghitungan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Bontang.

Saldo penyisihan piutang tahun 2024 adalah sebesar Rp31.359.905.812,14 atau mengalami kenaikan Rp2.478.068.199,68 atau 8,58% dari tahun 2023 sebesar Rp28.881.837.612,46, dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.20 Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan				
Penyisihan Piutang Pajak	29.794.075.621,14	27.761.969.455,71	2.032.106.165,43	7,32
Penyisihan Piutang Retribusi	810.188.416,00	287.776.869,75	522.411.546,25	181,53
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	755.641.775,00	827.015.867,00	(71.374.092,00)	(8,63)
Penyisihan Piutang Lainnya				
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	5.075.420,00	(5.075.420,00)	(100,00)
Jumlah	31.359.905.812,14	28.881.837.612,46	2.478.068.199,68	8,58



Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

d. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran biaya tahun 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Bontang. Belanja dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp639.432.676,00, mengalami kenaikan sebesar Rp12.282.398,00 atau 1,96% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp627.150.278,00.

Belanja dibayar dimuka tahun 2024 terdapat pada Sekretariat Daerah yang merupakan belanja sewa gedung untuk keperluan mess dan asrama mahasiswa sewa gedung untuk keperluan mess dan asrama mahasiswa dan Kecamatan Bontang Selatan untuk keperluan sewa bangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai.

e. PERSEDIAAN

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Perangkat Kerja. Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.602.905.842,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.739.252.371,00 atau 66,08% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp85.863.653.471,00.

Tabel 5.3.1.1.21 Klasifikasi Persediaan per Jenis

Persediaan	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Baku Bangunan	1.136.039.300,00	906.153.544,00	229.885.756,00	25,37
Bahan Kimia	329.745.605,00	129.957.223,00	199.788.382,00	153,73
Bahan Bakar dan Pelumas	1.938.870.021,00	1.291.028.581,00	647.841.440,00	50,18
Bahan Baku	11.095.340,00	48.610.380,00	(37.515.040,00)	(77,17)
Bahan/Bibit Tanaman	273.836.570,00	732.069.980,00	(458.233.410,00)	(62,59)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	32.435.700,00	41.492.700,00	(9.057.000,00)	(21,83)
Suku Cadang Alat Angkutan	489.720.500,00	402.841.500,00	86.879.000,00	21,57
Suku Cadang Alat Besar	191.196.000,00	417.337.425,00	(226.141.425,00)	(54,19)
Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	22.633.050,00	30.785.425,00	(8.152.375,00)	(26,48)
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	46.000,00	1.320.000,00	(1.274.000,00)	(96,52)
Suku Cadang Alat Bengkel	142.717.120,00	150.499.370	(7.782.250,00)	(5,17)
Alat Tulis Kantor	2.187.610.909,00	2.738.071.301	(550.460.392,00)	(20,10)
Kertas dan Cover	1.324.476.356,00	846.982.105	477.494.251,00	56,38
Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	11.304.000,00	26.918.000	(15.614.000,00)	(58,01)
Bahan Komputer	2.259.144.031,00	2.050.338.341	208.805.690,00	10,18
Perabot Kantor	2.065.420.655,00	1.298.809.449	766.611.206,00	59,02



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Persediaan	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Listrik	1.255.482.267,00	1.299.167.863	(43.685.596,00)	(3,36)
Perlengkapan Dinas	312.917.800,00	747.956.518	(435.038.718,00)	(58,16)
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	14.960.000,00	38.279.274	(23.319.274,00)	(60,92)
Suvenir/Cendera Mata	452.432.300,00	637.137.760	(184.705.460,00)	(28,99)
Obat	19.073.946.783,00	17.376.063.011	1.697.883.772,00	9,77
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	107.942.403.020,00	51.431.892.897,00	56.510.510.123,00	109,87
Natura	192.967.921,00	390.614.459,00	(197.646.538,00)	(50,60)
Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen Rambu - Rambu	763.940.384,00	2.688.505.190,00	(1.924.564.806,00)	(71,58)
Attachment	60.663.000,00	59.500.000,00	1.163.000,00	1,95
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	11.249.900,00	11.249.900,00	0,00	0,00
Pipa Plastik PVC (UPVC)	105.651.310,00	70.071.275,00	35.580.035,00	50,78
Jumlah	142.602.905.842,00	85.863.653.471,00	56.739.252.371,00	66,08

Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.1.1.22 Persediaan per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	416.856.563,00	1.013.475.637,00	(58,87)
2	Dinas Kesehatan	14.283.573.025,00	14.518.252.467,00	(1,62)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.229.457.706,00	4.780.319.970,00	51,23
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	100.433.361.249,00	46.982.161.727,00	113,77
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	958.268.821,00	740.746.658,00	29,37
6	Satuan Polisi Pamong Praja	128.178.975,00	92.940.476,00	37,92
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	207.799.400,00	144.817.450,00	43,49
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	492.600.000,00	10.039.950,00	4806,40
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	83.964.695,00	261.144.560,00	(67,85)
10	Dinas Ketenagakerjaan	18.085.472,00	12.156.522,00	48,77
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	226.684.647,00	146.748.050,00	54,47
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	490.434.316,00	435.870.584,00	12,52
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.016.397.377,00	3.641.886.030,00	10,28
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	361.929.235,00	434.725.939,00	(16,75)
15	Dinas Perhubungan	735.811.681,00	2.666.026.928,00	(72,40)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.154.184.810,00	13.877.550,00	22628,69
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	301.518.759,00	201.659.804,00	49,52
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.889.000,00	51.530.299,00	(80,81)
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	262.186.198,00	181.899.338,00	44,14
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.196.222,00	121.631.521,00	(30,78)
21	Sekretariat Daerah	6.257.036.813,00	6.540.677.256,00	(4,34)
22	Sekretariat DPRD	1.452.601.960,00	1.604.608.917,00	(9,47)
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	467.600,00	16.429.345,00	(97,15)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
24	Badan Pendapatan Daerah	216.052.350,00	364.900.650,00	(40,79)
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	611.521.240,00	524.150.642,00	16,67
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.703.764,00	155.609.070,00	(84,77)
27	Inspektorat Daerah	46.133.292,00	66.303.783,00	(30,42)
28	Kecamatan Bontang Utara	58.268.180,00	90.263.926,00	(35,45)
29	Kecamatan Bontang Selatan	35.102.863,00	28.982.100,00	21,12
30	Kecamatan Bontang Barat	2.172.229,00	7.177.222,00	(69,73)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.467.400,00	12.639.100,00	(64,65)
	Jumlah	142.602.905.842,00	85.863.653.471,00	66,08

Rincian mutasi Persediaan selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal Persediaan	85.863.653.471,00
Penggunaan Persediaan	204.209.294.830,00
Pembelian Persediaan	189.594.216.372,00
Penambahan	132.256.304.606,00
Reklas dari Aset Tetap	13.626.863.824,00
Reklas dari Beban Jasa	7.264.627.256,00
Penerimaan Hibah	5.257.779.945,00
Penambahan Saldo Awal Persediaan	26.215.808,00
Reklas dari Aset Tetap ke Ekstrakomptabel	3.191.303.550,00
Penerimaan Lainnya	18.440.100,00
Reklas dari beban hibah	102.690.901.123,00
Penambahan persediaan tahun 2006 (Laporan No. 000.2.3.2/LAP-Penilaian.079/BPKAD tanggal 24 Desember 2024)	180.173.000,00
Pengurangan	60.901.973.777,00
Reklas ke Aset Tetap	4.042.174.599,00
Reklas ke Beban Jasa	10.694.130.464,00
Reklas ke Belanja Lainnya	145.260.674,00
Reklas ke Beban Hibah	45.450.423.615,00
Koreksi karena kesalahan aplikasi SIM Aset	569.984.425,00
Saldo akhir Persediaan	142.602.905.842,00

Persediaan akhir merupakan hasil penghitungan persediaan *stock opname*, yang dituangkan dalam berita acara *stock opname*.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang, bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode periodik, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode harga pembelian terakhir. Khusus persediaan obat pada BLUD RSUD Taman Husada dan Dinas Kesehatan Kota Bontang terdiri dari persediaan



obat di Instalasi Farmasi dan di Puskesmas, metode penilaian menggunakan metode FIFO (*first in first out*). Untuk pengeluaran persediaan obat diperhatikan terlebih dahulu masa kadaluarsanya yang lebih pendek akan dikeluarkan terlebih dahulu tanpa memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang. Jika persediaan obat tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang sama maka digunakan metode FIFO.

Untuk persediaan rusak pada SKPD tidak dicatat sebagai persediaan karena tidak dapat digunakan untuk operasional kegiatan, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.413.000.788,00 dan RSUD Taman Husada sebesar Rp118.778.240,00 berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat.

Saldo persediaan tahun 2024 tidak termasuk perlengkapan dan peralatan yang terealisasi melalui Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat dalam Program Stimulan UMKM Tahun 2024 pada 15 Kelurahan.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp261.911.680.640,54 mengalami kenaikan mencapai Rp26.728.566.599,55 atau 11,37% dari Tahun 2023 sebesar Rp235.183.114.040,99 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Investasi Non permanen	5.638.652.369,40	5.509.854.325,98	2,34
Investasi Permanen	256.273.028.271,14	229.673.259.715,01	11,58
Jumlah	261.911.680.640,54	235.183.114.040,99	11,37

Investasi tersebut per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

a. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen yang dimiliki berupa dana bergulir. Investasi non permanen saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.638.652.369,40 mengalami kenaikan sebesar Rp128.798.043,42 atau 2,34% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.509.854.325,98.

Pengelolaan dana bergulir pada tahun 2024 melanjutkan kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Bontang Sejahtera berdasarkan SK Walikota Bontang Nomor 188.45/325/DKKUKMP/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Pelaksanaan Kerjasama Program Fasilitas Penguatan Modal Melalui Pola Dana Bergulir.

Saldo Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.638.652.369,40 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.



- 1) Kas di bank merupakan keseluruhan saldo kas yang dimiliki oleh Dana Bergulir sampai dengan akhir tahun 2024. Kas Dana Bergulir yang ada di bank yaitu Bankaltim dan BPR, dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.658.511.488,42, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Rekening Dana Bergulir Pemkot/Bankaltim No. Rekening 0081409611 sebesar Rp3.176.050,42;
 - b) Titipan Dana Bergulir DKUKMP No. Rekening 2.123080 pada BPR Bontang Sejahtera sebesar Rp4.655.375.436,00.
- 2) Dana Bergulir melalui pola kerjasama Bankaltim memiliki saldo tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp1.825.004.040,90 demikian juga dana bergulir melalui pola swakelola memiliki saldo tunggakan pokok dan bunga tahun 2024 sebesar Rp224.726.791,00. Perkembangan dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.2.2 Perkembangan Dana Bergulir

Tunggakan	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Nasabah Kerjasama Bankaltim	1.825.004.040,90	1.834.064.593,09	(9.060.552,19)
Tunggakan Pokok	1.665.562.203,88	1.673.673.311,88	(8.111.108,00)
Tunggakan Bunga	159.441.837,02	160.391.281,21	(949.444,19)
Nasabah Swakelola	224.726.791,00	224.726.791,00	0,00
Tunggakan Pokok	203.755.932,00	203.755.932,00	0,00
Tunggakan Bunga	20.970.859,00	20.970.859,00	0,00
Jumlah	2.049.730.831,90	2.058.791.384,09	(9.060.552,19)

Untuk piutang dana bergulir pola kerja sama Bank Kaltim dan swakelola seluruhnya telah disisihkan.

- 3) Dana Bergulir melalui pola kerja sama BPR, saldo pada tahun 2024 sebesar Rp789.302.876,00 dengan rincian transaksi piutang sebagai berikut ini.

Saldo awal piutang per 1 Januari 2024	Rp	851.302.839,56
Realisasi pinjaman yang disalurkan	Rp	602.000.000,00
Angsuran pokok yang masuk/diterima	Rp	(664.000.949,00)
Pembulatan ke atas piutang	Rp	985,44
Penyisihan piutang	Rp	0,00
Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	789.302.876,00

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan dapat



memberikan pelayanan kepada masyarakat serta lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saldo investasi permanen ini per 31 Desember 2024 sebesar Rp256.273.028.271,14 mengalami kenaikan mencapai Rp26.599.768.556,13 atau 11,58% dari Tahun 2023 sebesar Rp229.673.259.715,01 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.2.3 Investasi Permanen

Investasi Permanen	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Perusda AUJ	11.138.088.874,00	12.124.916.831,00	(8,14)
Perumda Tirta Taman	106.642.973.003,93	104.656.202.621,12	1,90
PT BME	4.871.966.393,21	4.272.140.262,89	14,04
Bankaltim	133.620.000.000,00	108.620.000.000,00	23,02
Jumlah	256.273.028.271,14	229.673.259.715,01	11,58

Nilai investasi pada badan usaha milik daerah mengalami kenaikan dengan penjelasan sebagai berikut ini.

- 1) Berdasarkan Laporan Keuangan Perusda AUJ Unaudited per 31 Desember 2024, ekuitas disajikan sebesar Rp11.138.088.874,00. Perusda AUJ mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp986.827.957,00 atau 8,14% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.124.916.831,00
- 2) Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Tirta Taman Audited per 31 Desember 2024, ekuitas disajikan sebesar Rp107.632.517.971,00. Perumda Taman Tirta mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp2.005.205.715,00 atau 1,90% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.627.312.256,00. Pada Laporan Perhitungan Laba-Rugi Perumda Taman Tirta per 31 Desember 2024, laba bersih setelah pajak penghasilan sebesar Rp1.989.055.517,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan laba bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp966.351.816,00, terdapat kenaikan Rp1.022.703.701,00 atau 105,83%. Kepemilikan modal Pemkot Bontang pada Perumda Taman Tirta sebesar Rp106.642.973.003,93.
- 3) Kepemilikan saham Pemkot Bontang pada PT BME adalah sebesar 99,00%. Nilai ekuitas pada laporan keuangan PT BME Audited per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.926.654.661,00 mengalami kenaikan sebesar Rp605.871.378,00 atau 9,59% dibandingkan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.320.783.283,00. Pada Laporan Perhitungan Laba-Rugi PT BME per 31 Desember 2024, laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebesar Rp605.871.379,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan rugi bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.276.872,00, terdapat kenaikan Rp747.148.251,00 atau 528,85%. Pada tahun 2024, PT BME tidak melakukan pembagian dividen. Pemberian dividen PT BME dapat dijelaskan sebagai berikut ini:



Tabel 5.3.1.2.4 Dividen PT BME

Tahun	Jumlah Dividen (Rp)
2016	495.000.000,00
2017	198.000.000,00
2022	896.575.673,00
2023	396.000.000,00
Jumlah	1.985.575.673,00

Kepemilikan modal Pemkot Bontang pada PT BME sebesar Rp4.871.966.393,21.

- 4) Penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada PT BPD Kaltim Kaltara. Menurut Pencatatan PT BPD Kaltim Kaltara pada tanggal 31 Desember 2024 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang yang telah disetor adalah sebesar Rp133.620.000.000,00. Pada tanggal 3 April 2024, PT BPD Kaltim Kaltara memberikan dividen kepada Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp4.137.180.321,93.

Hasil Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bontang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Dari penyertaan modal belum seluruhnya memberikan dividen, dari investasi ke BUMD pada tahun 2024 Bankaltimtara telah memberikan dividen sebesar Rp4.137.180.321,93, mengalami kenaikan sebesar Rp1.045.748.542,21 atau 33,83% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.091.431.779,72.

Sesuai dengan metode ekuitas maka tabel mengenai tingkat pengendalian dan metode penilaian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.2.5 Metode Penilaian Investasi Permanen

Investasi Permanen	Metode Penilaian	Persentase Kepemilikan	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
Perumda AUJ	Ekuitas	100,00%	11.138.088.874,00	LK 2024 Audited
Perumda Tirta Taman	Ekuitas	99,08%	106.642.973.003,93	LK 2024 Audited
PT BME	Ekuitas	99,00%	4.871.966.393,21	LK 2024 Audited
Penyertaan Modal Daerah pada Bankaltimtara	Biaya	100,00%	133.620.000.000,00	Laporan Tahunan 2024

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023. Perolehan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap



Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.883.301.712.208,12 mengalami kenaikan sebesar Rp741.454.035.304,00 atau 17,90% dari tahun 2023 sebesar Rp4.141.847.676.904,12 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.1 Aset Tetap

Aset Tetap	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Tanah	894.118.450.408,00	887.408.927.014,00	6.709.523.394,00	0,76
Peralatan dan Mesin	1.511.364.046.327,00	1.251.592.918.697,00	259.771.127.630,00	20,76
Gedung dan Bangunan	2.581.291.923.138,12	2.278.112.282.276,12	303.179.640.862,00	13,31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.221.292.724.738,00	2.758.400.752.100,00	462.891.972.638,00	16,78
Aset Tetap Lainnya	78.794.396.864,00	76.206.062.560,00	2.588.334.304,00	3,40
Konstruksi dalam Pengerjaan	211.691.971.792,00	164.285.126.421,00	47.406.845.371,00	28,86
Akumulasi Penyusutan	(3.615.251.801.059,00)	(3.274.158.392.164,00)	(341.093.408.895,00)	10,42
Jumlah	4.883.301.712.208,12	4.141.847.676.904,12	741.454.035.304,00	17,90

Saldo akhir aset tetap merupakan kumpulan dari beberapa transaksi baik transaksi keuangan maupun transaksi pemindahan kepemilikan aset lainnya seperti hibah atau donasi. Transaksi tersebut selama tahun 2024 menyebabkan mutasi aset tetap baik mutasi masuk maupun mutasi keluar yang mempengaruhi saldo akhir aset tetap. Rincian mutasi masuk dan keluar aset tetap tahun 2024 tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini.

a. Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp894.118.450.408,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.709.523.394,00 atau 0,76% dari tahun 2023 sebesar Rp887.408.927.014,00 dengan perincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.2 Aset tanah per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.402.365.426,00	33.402.365.426,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	12.827.637.460,00	7.626.966.000,00	68,19
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	314.940.808.433,00	314.940.808.433,00	0,00
4	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.260.692.062,00	5.539.763.727,00	(5,04)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.577.106.416,00	2.577.106.416,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.403.739.225,00	1.403.739.225,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	525.927.593,00	525.927.593,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	2.178.000.000,00	2.178.000.000,00	0,00
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14.148.188.912,00	14.148.188.912,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	434.918.622.875,00	433.130.699.276,00	0,41
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.457.266.000,00	42.457.266.000,00	0,00
13	Kecamatan Bontang Utara	5.755.015.006,00	5.755.015.006,00	0,00
14	Kecamatan Bontang Selatan	13.808.320.000,00	13.808.320.000,00	0,00
15	Kecamatan Bontang Barat	3.914.761.000,00	3.914.761.000,00	0,00
	Jumlah	894.118.450.408,00	887.408.927.014,00	0,76

Mutasi tanah selama tahun anggaran 2024 disebabkan oleh penerimaan dari hibah dan penghapusan aset tanah yang dihibahkan ke pihak lain, dapat dijelaskan sebagai berikut ini

Saldo Awal	887.408.927.014,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal TA 2024	5.263.015.170,00
Kapitalisasi honorarium	8.760.000,00
Reklas dari beban jasa	170.182.200,00
Mutasi masuk antar SKPD	1.787.923.599,00
Jumlah Mutasi Tambah	7.229.880.969,00
Mutasi Pengurangan	
Reklas ke beban jasa	61.745.830,00
Hibah Keluar	279.071.665,00
Reklas antar KIB	179.540.080,00
Jumlah Mutasi Kurang	520.357.575,00
Saldo Akhir	894.118.450.408,00

Mutasi tambah aset Tanah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal Tanah TA 2024 sebesar Rp5.263.015.170,00.
- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp8.760.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan.
- 3) Reklas dari beban jasa sebesar Rp170.182.200,00 pada Dinas Kesehatan.
- 4) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.787.923.599,00 pada Sekretariat Daerah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Demikian juga untuk mutasi kurang aset Tanah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Reklas dari Tanah ke Beban Jasa sebesar Rp61.745.830,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



- 2) Hibah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke TNI Angkatan Laut Sangatta sebesar Rp279.071.665,00
- 3) Reklas dari tanah ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp179.540.080,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.511.364.046.327,00 mengalami kenaikan sebesar Rp259.771.127.630,00 atau 20,76% dari tahun 2023 sebesar Rp1.251.592.918.697,00. Perincian peralatan dan mesin sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.3 Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Alat Besar	92.802.367.761,00	86.452.839.630,00	7,34
2	Alat Angkutan	228.739.229.057,00	215.128.484.508,00	6,33
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.294.923.369,00	14.499.496.961,00	5,49
4	Alat Pertanian	10.691.283.940,00	10.135.669.347,00	5,48
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.235.519.483,00	360.673.519.999,00	27,88
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	98.258.039.855,00	56.251.186.283,00	74,68
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	308.160.739.052,00	272.116.354.626,00	13,25
8	Alat Laboratorium	58.972.206.033,00	51.556.319.095,00	14,38
9	Alat Persenjataan	2.772.611.730,00	2.807.304.957,00	(1,24)
10	Komputer	209.140.412.278,00	162.018.945.329,00	29,08
11	Alat Eksplorasi	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
12	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.170.133.480,00	2.170.133.480,00	0,00
13	Alat Keselamatan Kerja	7.900.671.727,00	4.368.911.351,00	80,84
14	Peralatan Proses/Produksi	2.085.600.000,00	2.085.600.000,00	0,00
15	Rambu-Rambu	9.195.330.814,00	7.885.334.933,00	16,61
16	Peralatan Olahraga	3.943.197.748,00	3.441.038.198,00	14,59
	Jumlah	1.511.364.046.327,00	1.251.592.918.697,00	20,76

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 pada SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.4 Aset Peralatan dan Mesin per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.503.289.129,00	134.248.464.338,00	41,90
2	Dinas Kesehatan	116.744.089.518,00	97.993.874.480,00	19,13
3	Rumah Sakit Umum Daerah	360.783.292.433,00	310.592.163.854,00	16,16
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	56.756.436.975,00	46.855.301.465,00	21,13
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.233.117.120,00	25.095.156.852,00	68,29
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.565.770.476,00	7.041.932.719,00	7,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.865.756.079,00	13.530.320.779,00	32,04
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42.640.860.143,00	40.764.540.173,00	4,60



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.625.868.064,00	7.970.181.774,00	20,77
10	Dinas Ketenagakerjaan	7.814.212.525,00	6.692.273.000,00	16,76
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	14.582.702.300,00	12.403.310.680,00	17,57
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	25.540.070.385,00	24.452.090.471,00	4,45
13	Dinas Lingkungan Hidup	56.415.305.310,00	57.659.675.910,00	(2,16)
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.676.934.954,00	12.189.775.954,00	20,40
15	Dinas Perhubungan	30.830.852.184,00	27.337.895.528,00	12,78
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.609.609.256,00	22.244.560.656,00	46,60
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	36.266.206.691,00	32.480.035.105,00	11,66
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.130.723.111,00	9.107.795.911,00	77,11
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	31.200.706.236,00	18.117.145.012,00	72,22
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.662.120.891,00	15.111.175.803,00	10,26
21	Sekretariat Daerah	133.257.105.366,00	121.448.178.369,00	9,72
22	Sekretariat DPRD	75.711.311.982,00	63.300.192.248,00	19,61
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	11.436.837.109,00	10.934.877.409,00	4,59
24	Badan Pendapatan Daerah	11.624.485.521,00	11.368.521.521,00	2,25
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.148.659.608,00	17.659.255.119,00	8,43
26	Inspektorat	13.306.562.488,00	9.161.332.958,00	45,25
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.007.816.736,00	5.615.625.406,00	24,79
28	Kecamatan Bontang Utara	40.441.799.151,00	32.419.680.731,00	24,74
29	Kecamatan Bontang Selatan	41.668.454.118,00	31.982.946.468,00	30,28
30	Kecamatan Bontang Barat	21.939.205.647,00	19.962.833.143,00	9,90
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.373.884.821,00	5.851.804.861,00	43,10
	Jumlah	1.511.364.046.327,00	1.251.592.918.697,00	20,76

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Saldo Awal	1.251.592.918.697,00
Mutasi Tambah	
Belanja modal TA 2024	243.101.129.946,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	402.149.315,00
Reklasifikasi dari beban persediaan	1.794.878.186,00
Reklasifikasi dari beban jasa	832.335.764,00
Mutasi masuk antar KIB	25.554.182.566,00
Reklasifikasi antar SKPD	2.701.387.138,00
Donasi/Hibah	7.648.140.826,00
Reklas dari Beban Hibah	2.419.996,00
Penerimaan Lain-lain BOS Kinerja	34.278.558,00
Jumlah Mutasi Tambah	282.070.902.295,00

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Mutasi Pengurangan	
Reklas ke aset lain-lain	13.426.504.467,00
Reklasifikasi antar KIB	2.726.773.723,00
Reklasifikasi ke beban jasa	116.551.590,00
Reklasifikasi ke beban persediaan	3.986.587.896,00
Mutasi keluar antar SKPD	1.113.037.138,00
Mutasi ke ekstrakomptabel	454.602.536,00
Kekurangan Volume Pekerjaan	475.717.315,00
Jumlah Mutasi Kurang	22.299.774.665,00
Saldo Akhir	1.511.364.046.327,00

Mutasi tambah aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp243.101.129.946,00.
- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp402.149.315,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.5 Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium ke Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Mutasi Honorarium
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.360.000,00
Dinas Kesehatan	22.190.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.640.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.295.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.290.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	2.700.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	8.970.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	16.845.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.340.000,00
Dinas Perhubungan	2.704.315,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.625.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	19.960.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.780.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	25.825.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.480.000,00
Sekretariat Daerah	29.875.000,00
Sekretariat DPRD	12.760.000,00
Badan Pendapatan Daerah	3.250.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.730.000,00
Kecamatan Bontang Utara	28.980.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	31.010.000,00
Kecamatan Bontang Barat	33.210.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.330.000,00
Jumlah	402.149.315,00



- 3) Reklas dari beban persediaan sebesar Rp1.794.878.186,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.6 Mutasi Tambah Kapitalisasi Barang/Jasa ke Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Mutasi Beban Persediaan (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	903.991.771,00
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	321.454.457,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	4.437.400,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.050.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	163.350.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	15.592.800,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	9.239.500,00
Dinas Perhubungan	2.380.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.260.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	23.010.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.340.000,00
Sekretariat DPRD	54.737.600,00
Badan Pendapatan Daerah	1.900.000,00
Inspektorat Daerah	68.484.000,00
Kecamatan Bontang Utara	114.706.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	40.546.658,00
Kecamatan Bontang Barat	40.448.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	950.000,00
Jumlah	1.794.878.186,00

- 4) Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp832.335.764,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.7 Reklasifikasi dari Persediaan ke Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Mutasi Beban Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	156.654.608,00
Rumah Sakit Umum Daerah	219.212.977,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.830.000,00
Dinas Perhubungan	187.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	28.327.039,00
Sekretariat DPRD	190.891.040,00
Kecamatan Bontang Selatan	35.420.100,00
Jumlah	832.335.764,00

- 5) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp25.554.182.566,00 dengan rincian sebagai berikut ini.



Tabel 5.3.1.3.8 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Reklasifikasi antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	543.590.063,00
Dinas Kesehatan	845.283.747,00
Rumah Sakit Umum Daerah	614.082.101,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	4.578.843.461,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.827.033.726,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	42.107.996,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.514.000,00
Dinas Perhubungan	104.784.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	399.132.560,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.500.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	341.458.982,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	286.844.225,00
Sekretariat DPRD	1.544.770.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	177.816.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.588.558,00
Inspektorat Daerah	163.925.000,00
Kecamatan Bontang Utara	759.975.500,00
Kecamatan Bontang Selatan	856.782.905,00
Kecamatan Bontang Barat	192.148.992,00
Jumlah	25.554.182.566,00

- 6) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp2.701.387.138,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.9 Mutasi Masuk antar SKPD

Nama SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Kesehatan	34.513.358,00
Rumah Sakit Umum Daerah	17.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	55.883.071,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	78.500.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.247.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	37.230.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	195.607.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	290.143.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.050.000,00
Kecamatan Bontang Utara	531.720.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	932.731.759,00
Kecamatan Bontang Barat	265.860.000,00
Jumlah	2.701.387.138,00



- 7) Mutasi masuk dari Donasi/Hibah sebesar Rp7.648.140.826,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.10 Mutasi Masuk Donasi/Hibah

Nama SKPD	Mutasi Masuk Donasi/Hibah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.900.000,00
Dinas Kesehatan	2.469.598.826,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.041.673.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	573.640.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.950.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	306.379.000,00
Jumlah	7.648.140.826,00

- 8) Penambahan nilai peralatan dan mesin dikarenakan reklas dari beban hibah sebesar Rp2.419.996,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 9) Penambahan nilai peralatan dan mesin dari BOS Kinerja sebesar Rp34.278.558,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian juga untuk mutasi kurang aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp13.426.504.467,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.11 Mutasi Kurang Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Mutasi Kurang Usulan Penghapusan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.681.471.361,00
Dinas Kesehatan	325.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	2.851.371.156,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18.300.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	162.310.314,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.882.419.300,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.765.000,00
Dinas Perhubungan	661.172.929,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	349.058.743,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	167.750.000,0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	860.291.137,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	238.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.577.152,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi Kurang Usulan Penghapusan
Kecamatan Bontang Utara	30.845.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	34.190.000,00
Kecamatan Bontang Barat	442.894.325,00
Jumlah	13.426.504.467,00

- 2) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.726.773.723,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.12 Mutasi Kurang antar KIB

Nama SKPD	Mutasi antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.729.625,00
Dinas Kesehatan	9.950.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	252.060.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.990.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Perhubungan	10.600.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	41.550.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	1.961.556.500,00
Kecamatan Bontang Barat	51.021.598,00
Jumlah	2.726.773.723,00

- 3) Reklasifikasi ke jasa sebesar Rp116.551.590,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.13 Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jasa

Nama SKPD	Mutasi Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.646.798,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	7.369.996,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.870.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	94.664.796,00
Jumlah	116.551.590,00

- 4) Reklasifikasi ke beban persediaan sebesar Rp3.986.587.896,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.14 Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan

Nama SKPD	Mutasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.557.207,00
Dinas Kesehatan	49.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.377.000,00



Nama SKPD	Mutasi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.590.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	580.300.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	6.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.332.300.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	62.400.000,00
Sekretariat DPRD	167.423.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	8.800.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.900.000,00
Kecamatan Bontang Utara	1.710.940.689,00
Jumlah	3.986.587.896,00

- 5) Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp1.113.037.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.15 Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Mutasi Keluar (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.843.700,00
Dinas Kesehatan	356.528.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	100.921.471,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	170.417.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	34.513.358,00
Sekretariat Daerah	356.800.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.013.359,00
Jumlah	1.113.037.138,00

- 6) Mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp454.602.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.16 Mutasi Kurang dari Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel

Nama SKPD	Mutasi antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.391.546,00
Dinas Kesehatan	32.401.540,00
Rumah Sakit Umum Daerah	30.342.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	63.584.950,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	850.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.606.500,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.752.000,00
Dinas Perhubungan	3.375.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	8.463.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	345.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.683.500,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi antar KIB (Rp)
Sekretariat DPRD	26.992.500,00
Badan Pendapatan Daerah	1.900.000,00
Inspektorat Daerah	420.000,00
Kecamatan Bontang Utara	200.195.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	1.752.000,00
Kecamatan Bontang Barat	2.048.000,00
Jumlah	454.602.536,00

- 7) Mutasi kurang yang disebabkan oleh adanya temuan pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp475.717.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.17 Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan

Nama SKPD	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
Sekretariat Daerah	399.103.703,00
Sekretariat DPRD	18.291.076,00
RSUD	58.322.536,00
Jumlah	475.717.315,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.581.291.923.138,12 mengalami kenaikan sebesar Rp303.179.640.862,00 atau 13,31% dari tahun 2023 sebesar Rp2.278.112.282.276,12. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 5.3.1.3.18 Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Bangunan Gedung	2.484.291.570.769,12	2.220.554.966.594,12	11,88
2	Monumen	31.084.798.226,00	6.461.159.435,00	381,10
3	Bangunan Menara	4.738.910.982,00	4.738.910.982,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	61.176.643.161,00	46.357.245.265,00	31,97
Jumlah		2.581.291.923.138,12	2.278.112.282.276,12	13,31

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.19 Aset Gedung dan Bangunan per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	306.033.889.745,00	227.584.223.755,00	34,47
2	Dinas Kesehatan	98.148.377.113,00	92.046.166.342,00	6,63
3	Rumah Sakit Umum Daerah	153.965.980.464,12	140.312.342.929,12	9,73



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	503.354.446.643,00	442.186.349.520,00	13,83
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	143.237.958.211,00	92.286.103.177,00	55,21
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	825.133.983,00	746.262.662,00	10,57
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.872.518.191,00	5.872.518.191,00	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.277.004.603,00	9.277.004.603,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	746.503.498,00	746.503.498,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	2.776.966.480,00	2.741.868.580,00	1,28
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	30.230.704.655,00	29.784.008.535,00	1,50
13	Dinas Lingkungan Hidup	16.528.082.477,00	9.281.893.105,00	78,07
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.355.755.264,00	4.077.958.221,00	6,81
15	Dinas Perhubungan	26.606.372.572,00	16.199.395.932,00	64,24
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.455.442.162,00	1.455.442.162,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	288.075.404.722,00	276.575.413.692,00	4,16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.376.779.129,00	15.845.859.282,00	15,97
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	410.406.183.861,00	393.665.029.123,00	4,25
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.967.274.967,00	8.214.204.297,00	82,21
21	Sekretariat Daerah	227.148.840.111,00	226.241.339.496,00	0,40
22	Sekretariat DPRD	121.752.336.175,00	120.355.181.622,00	1,16
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	3.435.958.514,00	3.435.958.514,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.454.514.880,00	51.454.514.880,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Bontang Utara	58.473.241.943,00	52.673.473.832,00	11,01
29	Kecamatan Bontang Selatan	53.898.110.415,00	26.554.039.358,00	102,98
30	Kecamatan Bontang Barat	29.888.142.360,00	28.499.226.968,00	4,87
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.581.291.923.138,12	2.278.112.282.276,12	13,31

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Saldo Awal	2.278.112.282.276,12
Mutasi Tambah	
Belanja modal TA 2024	259.132.176.018,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	126.135.685,00
Kapitalisasi beban persediaan	771.422.477,00



Kapitalisasi dari beban jasa	9.357.981.839,00	
Reklasifikasi antar KIB	51.120.420.223,00	
Mutasi masuk antar SKPD	43.488.873.400,00	
Hibah Masuk	47.333.360.012,00	
Jumlah Mutasi Tambah		411.330.369.654,00
Mutasi Pengurangan		
Usulan penghapusan	3.514.284.421,00	
Reklasifikasi ke beban persediaan	11.283.364.483,00	
Reklasifikasi ke beban jasa	5.510.335.877,00	
Reklasifikasi antar KIB	40.396.284.304,00	
Mutasi keluar antar SKPD	37.611.908.602,00	
Mutasi ke ekstrakomptabel	8.690.589.018,00	
Pengembalian STS	4.720.000,00	
Kekurangan Volume Pekerjaan	1.139.242.087,00	
Jumlah Mutasi Kurang		108.150.728.792,00
Saldo Akhir		2.581.291.923.138,12

Mutasi masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp259.132.176.018,00.
- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kapitalisasi dengan jumlah sebesar Rp10.255.540.001,00 yang terdiri dari kapitalisasi belanja honorarium sebesar Rp126.135.685,00, kapitalisasi beban persediaan sebesar Rp771.422.477,00 dan kapitalisasi beban jasa sebesar Rp9.357.981.839,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi atau peningkatan standar kinerja yang nilai sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

Tabel 5.3.1.3.20 Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium dan Barang/Jasa ke Gedung dan Bangunan

SKPD	Mutasi Kapitalisasi Honorarium (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Persediaan (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.000.000,00	104.285.500,00	266.429.750,00
Dinas Kesehatan	22.330.000,00	0,00	213.646.450,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	6.447.647.506,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	0,00	424.955.147,00	26.062.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	78.871.321,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.890.000,00	0,00	40.752.500,00
Dinas Perhubungan	14.255.685,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Mutasi Kapitalisasi Honorarium (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Persediaan (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Jasa (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	7.770.000,00	0,00	295.786.622,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.010.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	827.183.560,00
Sekretariat DPRD	4.680.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.780.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bontang Utara	9.750.000,00	0,00	417.067.290,00
Kecamatan Bontang Selatan	14.570.000,00	242.181.830,00	744.534.040,00
Kecamatan Bontang Barat	3.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	126.135.685,00	771.422.477,00	9.357.981.839,00

- 3) Reklasifikasi antar KIB menjadi aset gedung dan bangunan sebesar Rp51.120.420.223,00.

Tabel 5.3.1.3.21 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Gedung dan Bangunan

SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.880.540.898,00
Dinas Kesehatan	159.109.450,00
Rumah Sakit Umum Daerah	546.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	20.662.914.784,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.491.912.947,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.990.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	199.137.620,00
Dinas Lingkungan Hidup	89.632.500,00
Dinas Perhubungan	106.615.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	199.181.900,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	164.455.210,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.430.820,00
Kecamatan Bontang Utara	351.610.552,00
Kecamatan Bontang Selatan	232.138.542,00
Jumlah	51.120.420.223,00

- 4) Mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp43.488.873.400,00.

Tabel 5.3.1.3.22 Mutasi Masuk dari SKPD Lain

SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	6.142.303.792,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	9.399.624.968,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.530.919.847,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.738.834.589,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.552.986.350,00



SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Sekretariat Daerah	907.500.615,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.975.517.239,00
Kecamatan Bontang Barat	241.186.000,00
Jumlah	43.488.873.400,00

- 5) Hibah masuk sebesar Rp47.333.360.012,00, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp46.015.262.612,00 dan Kecamatan Bontang Selatan Rp1.318.097.400,00.

Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut ini.

- 1) Reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke aset lain-lain berdasarkan usulan penghapusan sebesar Rp3.514.284.421,00.

Tabel 5.3.1.3.23 Mutasi kurang usulan penghapusan Gedung dan Bangunan

SKPD	Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.376.269,00
Dinas Kesehatan	395.498.340,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.325.977.073,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45.925.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	501.998.739,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	199.509.000,00
Jumlah	3.514.284.421,00

- 2) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke beban persediaan sebesar Rp11.283.364.483,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp10.818.152.399,00, Kecamatan Bontang Utara sebesar Rp90.863.629,00, dan Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp374.348.455,00.
- 3) Mutasi kurang gedung dan bangunan ke beban jasa sebesar Rp5.510.335.877,00.

Tabel 5.3.1.3.24 Mutasi kurang gedung dan bangunan ke beban jasa

SKPD	Reklas ke jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	793.723.141,00
Dinas Kesehatan	44.649.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.895.806.940,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	59.397.200,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	303.265.774,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	644.206.650,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.361.908.427,00
Kecamatan Utara	58.501.240,00
Kecamatan Bontang Selatan	348.876.755,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Reklas ke jasa (Rp)
Jumlah	5.510.335.877,00

- 4) Reklasifikasi antar KIB dari gedung dan bangunan sebesar Rp40.396.284.304,00.

Tabel 5.3.1.3.25 Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KIB lainnya

SKPD	Reklas antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.266.772.774,00
Dinas Kesehatan	716.572.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.930.589.660,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	14.227.897.057,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	900.893.642,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.193.650,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	191.134.350,00
Dinas Lingkungan Hidup	184.581.900,00
Dinas Perhubungan	844.835.214,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	196.552.615,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	433.020.860,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.266.005.472,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	286.844.225,00
Sekretariat DPRD	7.770.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	177.816.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.588.558,00
Inspektorat Daerah	163.925.000,00
Kecamatan Bontang Utara	883.490.406,00
Kecamatan Bontang Selatan	856.651.079,00
Kecamatan Bontang Barat	557.148.992,00
Jumlah	40.396.284.304,00

- 5) Mutasi keluar ke SKPD lain pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.611.908.602,00.

Tabel 5.3.1.3.26 Mutasi Keluar ke SKPD Lain

SKPD	Mutasi Keluar SKPD (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.399.624.968,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	20.516.993.492,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.142.303.792,00
Kecamatan Bontang Selatan	1.552.986.350,00
Jumlah	37.611.908.602,00



- 6) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp8.690.589.018,00.

Tabel 5.3.1.3.27 Mutasi Kurang Reklas ke Ekstrakomptabel

SKPD	Reklas ke Ekstrakomptabel (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.650.000,00
Dinas Kesehatan	9.950.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	150.653.180,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.965.880.891,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.990.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	42.207.750,00
Dinas Perhubungan	10.600.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	140.537.197,00
Kecamatan Bontang Utara	157.620.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	192.500.000,00
Jumlah	8.690.589.018,00

- 7) Pengembalian STS sebesar Rp4.720.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang disetorkan pada tanggal 10 Maret 2025.
- 8) Mutasi kurang yang disebabkan oleh adanya temuan pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.139.242.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.28 Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan

SKPD	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264.656.249,00
RSUD	246.742.370,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	131.874.342,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.420.000,00
Dinas Perhubungan	160.572.131,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	299.822.255,00
Kecamatan Bontang Utara	25.547.651,00
Kecamatan Bontang Selatan	6.607.089,00
Jumlah	1.139.242.087,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.221.292.724.738,00 dan Rp2.758.400.752.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp462.891.972.638,00 atau 16,78% dari tahun 2023. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini.



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Tabel 5.3.1.3.29 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Jalan dan Jembatan	2.289.594.107.878,00	2.078.974.842.054,00	10,13
2	Bangunan Air	775.883.135.890,00	535.406.367.430,00	44,91
3	Instalasi	61.746.638.846,00	65.935.737.624,00	(6,35)
4	Jaringan	94.068.842.124,00	78.083.804.992,00	20,47
Jumlah		3.221.292.724.738,00	2.758.400.752.100,00	16,78

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.30 Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.234.298.221,00	9.155.081.818,00	11,79
2	Dinas Kesehatan	1.633.945.281,00	1.374.378.281,00	18,89
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.969.950.213,00	6.230.051.503,00	11,88
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.781.009.104.304,00	2.413.012.356.531,00	15,25
5	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	269.078.117.335,00	230.797.709.581,00	16,59
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	623.253.148,00	533.336.000,00	16,86
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	160.257.467,00	160.257.467,00	0,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	301.744.750,00	301.744.750,00	0,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	2.188.778.240,00	2.188.778.240,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	47.596.589,00	47.596.589,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	9.172.994.296,00	8.764.687.342,00	4,66
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.904.645.672,00	5.683.633.672,00	3,89
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	196.332.196,00	196.332.196,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	13.530.953.257,00	13.282.615.557,00	1,87
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	924.258.646,00	882.708.646,00	4,71
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	16.157.352.241,00	15.960.522.741,00	1,23
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	442.334.304,00	442.334.304,00	0,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.862.027.788,00	6.218.261.348,00	58,60
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	724.899.875,00	724.899.875,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	6.848.329.840,00	6.848.329.840,00	0,00
21	Sekretariat DPRD	2.782.213.648,00	2.782.213.648,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	416.854.836,00	416.854.836,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	264.954.900,00	264.954.900,00	0,00
24	Kecamatan Bontang Utara	37.317.763.608,00	13.366.357.575,00	179,19
25	Kecamatan Bontang Selatan	31.290.794.146,00	11.610.374.156,00	169,51
26	Kecamatan Bontang Barat	13.208.969.937,00	7.154.380.704,00	84,63



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Jumlah		3.221.292.724.738,00	2.758.400.752.100,00	16,78

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Saldo Awal	2.758.400.752.100,00
Mutasi Tambah	
Belanja modal TA 2024	537.738.283.319,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	215.160.000,00
Reklasifikasi dari beban persediaan	736.294.288,00
Reklasifikasi dari beban jasa	524.986.770,00
Reklasifikasi antar KIB	53.336.156.741,00
Mutasi masuk antar SKPD	9.955.000,00
Hibah masuk	15.368.728.540,00
Jumlah Mutasi Tambah	607.929.564.658,00
Mutasi Pengurangan	
Reklasifikasi ke beban persediaan	78.475.678,00
Reklasifikasi ke beban jasa	2.263.566.477,00
Reklasifikasi antar KIB	141.687.392.143,00
Mutasi keluar antar SKPD	9.955.000,00
Usulan Penghapusan	298.455.378,00
Pelunasan Utang Belanja Modal TA 2023	85.496.000,00
Hibah keluar	155.209.471,00
Pengembalian STS	10.843.000,00
Kekurangan Volume Pekerjaan	448.198.873,00
Jumlah Mutasi Kurang	145.037.592.020,00
Saldo Akhir	3.221.292.724.738,00

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 adalah sebesar Rp607.929.564.658,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja modal jalan irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp537.738.283.319,00.
- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp215.160.000,00.

Tabel 5.3.1.3.31 Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan

SKPD	Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.270.000,00
Dinas Kesehatan	2.590.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.890.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	3.270.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	680.000,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Masuk (Rp)
Kecamatan Bontang Utara	71.210.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	91.370.000,00
Kecamatan Bontang Barat	37.880.000,00
Jumlah	215.160.000,00

- 3) Reklasifikasi dari beban persediaan sebesar Rp736.294.288,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.
- 4) Reklasifikasi dari beban jasa sebesar Rp524.986.770,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp298.608.220,00 dan Kecamatan Bontang Selatan Rp226.378.550,00.
- 5) Reklasifikasi antar aset tetap (antar KIB) sebesar Rp53.336.156.741,00.

Tabel 5.3.1.3.32 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan

SKPD	Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	879.395.943,00
Dinas Kesehatan	35.925.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	590.045.568,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	45.070.237.467,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.195.223.744,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	149.026.354,00
Dinas Perhubungan	248.337.700,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	41.550.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	33.888.300,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3.643.766.440,00
Kecamatan Bontang Utara	115.575.051,00
Kecamatan Bontang Selatan	202.685.174,00
Kecamatan Bontang Barat	130.500.000,00
Jumlah	53.336.156.741,00

- 6) Mutasi masuk dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.955.000,00.
- 7) Hibah masuk sebesar Rp15.368.728.540,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp9.490.497.767,00 dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp5.878.230.773,00.

Mutasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 adalah sebesar Rp144.589.393.147,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke beban persediaan sebesar Rp78.475.678,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp14.895.000,00, pada



Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp46.019.428,00, dan Kecamatan Bontang Utara sebesar Rp 17.561.250,00.

- 2) Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp2.263.566.477,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.33 Mutasi Kurang Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Beban Jasa

SKPD	Keluar (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.982.104.312,00
Dinas Perhubungan	63.936.000,00
Kecamatan Bontang Utara	199.477.565,00
Kecamatan Bontang Selatan	18.048.600,00
Jumlah	2.263.566.477,00

- 3) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp141.687.392.143,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.34 Mutasi Kurang Reklasifikasi antar KIB dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan

SKPD	Keluar (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	396.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	95.492.484.743,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31.697.579.673,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	199.181.900,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13.118.328.088,00
Kecamatan Bontang Utara	354.782.197,00
Kecamatan Bontang Selatan	428.285.542,00
Jumlah	141.687.392.143,00

- 4) Mutasi keluar dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp9.955.000,00.
- 5) Usulan penghapusan aset sebesar Rp298.455.378,00, dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp248.080.378,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp50.375.000,00.
- 6) Pelunasan utang belanja modal sebesar Rp85.496.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Jalan Kota yang terdiri dari Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut sebesar Rp27.140.000,00 dan Pekerjaan Pembangunan Turap Jalan Tari Jepen RT 01 Kelurahan Guntung sebesar Rp58.356.000,00.
- 7) Hibah keluar sebesar Rp155.209.471,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota ke TNI AL Sangatta



- 8) Pengembalian STS sebesar Rp10.843.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang disetorkan pada tanggal 10 Maret 2025.
- 9) Mutasi kurang yang disebabkan oleh adanya temuan pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp448.198.873,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.35 Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan

SKPD	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	396.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	276.209.429,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.785.870,00
Kecamatan Bontang Utara	72.268.975,00
Kecamatan Bontang Selatan	81.934.599,00
Jumlah	448.198.873,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.794.396.864,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.588.334.304,00 atau 3,40% dari tahun 2023 sebesar Rp76.206.062.560,00. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.36 Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Bahan Perpustakaan	22.942.039.463,00	22.710.382.656,00	1,02
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	5.047.928.513,00	4.688.302.093,00	7,67
3	Hewan	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00
4	Tanaman	6.667.643.656,00	5.029.249.246,00	32,58
5	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	44.037.085.232	43.678.428.565,00	(73,11)
Jumlah		78.794.396.864,00	76.206.062.560,00	3,40

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.37 Aset Tetap Lainnya per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.641.012.035,00	18.256.864.993,00	2,10
2	Dinas Kesehatan	681.593.124,00	677.093.124,00	0,66
3	Rumah Sakit Umum Daerah	55.710.612,00	55.710.612,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	45.466.699.343,00	45.047.371.260,00	0,93
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.025.054.976,00	2.025.054.976,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	119.069.500,00	0,00	100,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	74.994.500,00	74.994.500,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	41.976.619,00	41.976.619,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	331.833.188,00	530.970.808,00	(37,50)
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.344.778.481,00	927.742.481,00	152,74
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	721.000,00	721.000,00	0,00
12	Dinas Perhubungan	17.281.000,00	17.281.000,00	0,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	199.797.628,00	199.797.628,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	3.027.500,00	3.027.500,00	0,00
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	667.184.000,00	667.184.000,00	0,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.440.472.363,00	3.375.234.913,00	1,93
17	Sekretariat Daerah	970.590.400,00	970.590.400,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	1.591.104.410,00	1.369.746.000,00	16,16
19	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	110.476.600,00	110.476.600,00	0,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.355.000,00	15.355.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00
22	Kecamatan Bontang Utara	1.340.457.346,00	1.340.457.346,00	0,00
23	Kecamatan Bontang Selatan	525.123.439,00	376.428.000,00	39,50
24	Kecamatan Bontang Barat	111.351.000,00	103.251.000,00	7,84
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.422.800,00	11.422.800,00	0,00
Jumlah		78.794.396.864,00	76.206.062.560,00	3,40

Mutasi aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Saldo Awal	76.206.062.560,00
Mutasi Tambah	
Belanja modal TA 2024	5.130.404.098,00
Kapitalisasi honorarium	3.580.000,00
Mutasi masuk antar SKPD	37.728.719,00
Reklasifikasi dari beban jasa	191.571.610,00
Reklasifikasi antar KIB	8.410.631.809,00
Reklasifikasi dari persediaan	760.826.440,00
Penerimaan lain-lain & Bos Kinerja	185.607.449,00
Jumlah Mutasi Tambah	14.720.350.125,00
Mutasi Pengurangan	
Mutasi keluar antar SKPD	7.702.617.116,00
Mutasi ke Ekstrakomptabel	2.555.909.662,00
Reklasifikasi ke persediaan	1.000.000,00
Reklasifikasi antar KIB	1.872.489.043,00



Jumlah Mutasi Kurang	12.132.015.821,00
Saldo Akhir	78.794.396.864,00

Mutasi masuk Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp14.720.350.125,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp5.130.404.098,00.
- 2) Mutasi tambah kapitalisasi honorarium sebesar Rp3.580.000,00 dengan rincian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.890.000,00 dan Kecamatan Bontang Selatan sebesar Rp1.690.000,00.
- 3) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang kota sebesar Rp37.728.719,00 ke Kecamatan Bontang Selatan.
- 4) Reklasifikasi dari beban jasa sebesar Rp191.571.610,00 dengan rincian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp116.413.200,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp75.158.410,00.
- 5) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp8.410.631.809,00 dengan rincian:

Tabel 5.3.1.3.38 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB

SKPD	Mutasi Tambah Reklas Antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.957.540.709,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.137.468.985,00
Satuan Polisi Pamong Praja	119.069.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	196.552.615,00
Jumlah	8.410.631.809,00

- 6) Mutasi tambah reklas dari persediaan sebesar Rp760.826.440,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Mutasi tambah dari Penerimaan lain-lain dan Bos Kinerja sebesar Rp185.607.449,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi keluar aset tetap lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp12.132.015.821,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp7.702.617.116,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.787.923.599,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp 5.718.140.902,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp196.552.615,00
- 2) Mutasi kurang ke ekstrakomptabel sebesar Rp2.555.909.662,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.269.165.387,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp285.744.275,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.000.000,00.



- 3) Mutasi kurang ke persediaan sebesar Rp1.000.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.000.000,00
- 4) Mutasi keluar reklas antar KIB Rp1.872.489.043,00 dengan rincian:

Tabel 5.3.1.3.39 Mutasi Kurang antar KIB

SKPD	Mutasi Kurang Reklas Antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.789.423,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	199.137.620,00,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.562.000,00,00
Sekretariat DPRD	1.537.000.000,00
Jumlah	1.872.489.043,00

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.691.971.792,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.406.845.371,00 atau 28,86% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp164.285.126.421,00 dapat disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.40 Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.952.207.720,00	18.783.983.511,00	(25,72)
2	Dinas Kesehatan	1.519.447.971,00	1.229.144.621,00	23,62
3	Rumah Sakit Umum Daerah	44.808.198.802,00	40.979.676.811,00	9,34
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	128.914.705.628,00	95.617.833.475,00	34,82
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.380.097.942,00	3.387.040.544,00	(0,20)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	201.420.600,00	156.226.950,00	28,93
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	103.291.000,00	103.291.000,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	107.514.000,00	107.514.000,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	749.249.400,00	563.054.500,00	33,07
10	Dinas Perhubungan	640.956.014,00	245.257.500,00	161,34
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.202.500,00	98.202.500,00	0,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	184.497.500,00	184.497.500,00	0,00
13	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14.043.271.253,00	511.694.325,00	2.644,46
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	473.180.968,00	98.611.788,00	379,84
15	Sekretariat DPRD	254.729.764,00	254.729.764,00	0,00
16	Kecamatan Bontang Utara	749.810.686,00	0,00	100,00
17	Kecamatan Bontang Selatan	0,00	738.699.186,00	(100,00)
18	Kecamatan Bontang Barat	1.511.190.044,00	1.225.668.446,00	23,30
Jumlah		211.691.971.792,00	164.285.126.421,00	28,86



Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	164.285.126.421,00
Mutasi penambahan	
Reklasifikasi dari beban jasa	496.440.950,00
Reklasifikasi dari beban persediaan	244.000.000,00
Reklasifikasi antar KIB	122.557.336.216,00
Mutasi antar SKPD	91.245.500,00
Jumlah penambahan	123.389.022.666,00
Mutasi pengurangan	
Mutasi antar SKPD	91.245.500,00
Reklasifikasi antar KIB	75.759.532.915,00
Kekurangan Volume Pekerjaan	131.398.880,00
Jumlah Pengurangan	75.982.177.295,00
Saldo Akhir	211.691.971.792,00

Rincian KDP dan mutasi KDP per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp123.389.022.666,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Reklasifikasi dari beban jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp496.440.950,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp199.516.950,00 dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp296.924.000,00.
- 2) Reklasifikasi dari beban persediaan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp244.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 3) Mutasi tambah reklasifikasi antar KIB sebesar Rp122.557.336.216,00, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.41 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB

SKPD	Mutasi Tambah Reklas Antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.038.115.107,00
Dinas Kesehatan	239.945.850,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.828.521.991,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	94.777.597.811,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.148.908.842,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.193.650,00
Dinas Lingkungan Hidup	184.581.900,00
Dinas Perhubungan	491.713.514,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13.324.315.953,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	157.000.000,00
Kecamatan Bontang Utara	35.920.000,00
Kecamatan Bontang Barat	285.521.598,00
Total	122.557.336.216,00



- 4) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp91.245.500,00 dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp75.982.177.295,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp91.245.500,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Mutasi kurang reklasifikasi antar KIB sebesar Rp75.759.532.915,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.3.42 Mutasi Kurang Reklasifikasi antar KIB

SKPD	Mutasi Kurang Reklas Antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.869.890.898,00
Dinas Kesehatan	149.159.450,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	61.349.326.778,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.064.605.944,00
Dinas Lingkungan Hidup	89.632.500,00
Dinas Perhubungan	96.015.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	89.663.025,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.430.820,00
Kecamatan Bontang Utara	24.808.500,00
Jumlah	75.759.532.915,00

- 3) Mutasi kurang yang disebabkan oleh adanya temuan pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp131.398.880,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp3.615.251.801.059,00 ini mengalami kenaikan sebesar Rp341.093.408.895,00 atau 10,42% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.274.158.392.164,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.43 Akumulasi Penyusutan

ASET	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1. Tanah	0,00	0,00	0,00
Tanah	0,00	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	(991.166.356.162,00)	(866.123.319.239,00)	14,44



PEMERINTAH KOTA BONTANG

ASET	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Alat Besar	(40.747.062.241,00)	(34.245.659.616,00)	18,98
Alat Angkutan	(160.679.799.056,00)	(147.146.107.621,00)	9,20
Alat Bengkel dan Alat Ukur	(9.205.725.099,00)	(7.388.765.379,00)	24,59
Alat Pertanian	(9.967.263.475,00)	(9.525.161.105,00)	4,64
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(300.724.209.120,00)	(259.379.152.844,00)	15,94
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(46.842.618.639,00)	(37.473.052.297,00)	25,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	(229.464.001.262,00)	(206.831.338.187,00)	10,94
Alat Laboratorium	(39.609.636.519,00)	(36.765.577.439,00)	7,74
Alat Persenjataan	(2.631.362.731,00)	(2.624.720.211,00)	0,25
Komputer	(141.454.922.427,00)	(117.861.800.891,00)	20,02
Alat Eksplorasi	(534.000,00)	(178.000,00)	200,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	(325.520.022,00)	(108.506.674,00)	200,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	(2.267.152.182,00)	(909.960.796,00)	149,15
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	(391.050.000,00)	(130.350.000,00)	200,00
Rambu-Rambu	(4.364.997.830,00)	(3.899.941.132,00)	11,92
Peralatan Olahraga	(2.490.501.559,00)	(1.833.047.047,00)	35,87
3. Gedung dan Bangunan	(550.801.624.896,00)	(496.318.969.745,00)	10,98
Bangunan Gedung	(542.231.842.667,00)	(489.351.144.807,00)	10,81
Monumen	(1.513.727.933,00)	(1.132.818.544,00)	33,62
Bangunan Menara	(941.361.802,00)	(826.388.834,00)	13,91
Tugu Titik Kontrol/Pasti	(6.114.692.494,00)	(5.008.617.560,00)	22,08
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.040.992.548.068,00)	(1.881.263.723.914,00)	8,49
Jalan dan Jembatan	(1.794.321.852.543,00)	(1.701.450.956.927,00)	5,46
Bangunan Air	(211.544.639.177,00)	(152.163.143.882,00)	39,02
Instalasi	(15.468.078.614,00)	(13.756.143.961,00)	12,44
Jaringan	(19.657.977.734,00)	(13.893.479.144,00)	41,49
5. Aset Tetap Lainnya	(32.291.271.933,00)	(30.452.379.266,00)	6,04
Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
Hewan	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	(32.291.271.933,00)	(30.452.379.266,00)	6,04
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	(3.615.251.801.059,00)	(3.274.158.392.164,00)	10,42



Tabel 5.3.1.3.44 Akumulasi penyusutan per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(170.220.088.747,00)	(149.551.083.745,00)	13,82
2	Dinas Kesehatan	(95.592.070.346,00)	(83.516.723.772,00)	14,46
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(303.321.622.181,00)	(273.573.781.850,00)	10,87
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	(2.060.001.614.429,00)	(1.918.960.635.066,00)	7,35
5	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	(129.787.272.548,00)	(91.593.136.136,00)	41,70
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.935.274.428,00)	(4.166.558.633,00)	18,45
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.669.097.104,00)	(10.193.430.000,00)	14,48
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(28.036.212.111,00)	(23.225.045.331,00)	20,72
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(7.888.714.511,00)	(6.697.037.349,00)	17,79
10	Dinas Ketenagakerjaan	(6.293.674.375,00)	(5.282.969.409,00)	19,13
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	(10.663.398.169,00)	(9.160.538.032,00)	16,41
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	(30.435.643.558,00)	(27.463.688.874,00)	10,82
13	Dinas Lingkungan Hidup	(35.543.222.055,00)	(33.353.159.395,00)	6,57
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(10.047.138.795,00)	(8.545.792.695,00)	17,57
15	Dinas Perhubungan	(28.020.187.910,00)	(23.887.685.987,00)	17,30
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(20.930.211.614,00)	(17.889.008.826,00)	17,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	(71.813.083.530,00)	(61.041.601.413,00)	17,65
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(13.281.091.612,00)	(11.687.509.499,00)	13,63
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(133.377.280.353,00)	(121.649.932.356,00)	9,64
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(16.025.516.196,00)	(14.553.433.058,00)	10,12
21	Sekretariat Daerah	(175.733.303.004,00)	(162.259.355.944,00)	8,30
22	Sekretariat DPRD	(96.082.436.684,00)	(88.393.865.483,00)	8,70
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	(8.386.107.935,00)	(7.316.089.165,00)	14,63
24	Badan Pendapatan Daerah	(9.476.986.974,00)	(8.149.150.227,00)	16,29
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(30.624.485.597,00)	(28.342.278.531,00)	8,05
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(8.209.499.617,00)	(6.883.854.404,00)	19,26
27	Inspektorat Daerah	(5.184.038.974,00)	(4.637.660.998,00)	11,78
28	Kecamatan Bontang Utara	(36.660.937.810,00)	(28.496.049.428,00)	28,66
29	Kecamatan Bontang Selatan	(31.610.631.916,00)	(22.603.239.103,00)	39,84
30	Kecamatan Bontang Barat	(20.722.438.624,00)	(17.256.054.868,00)	20,09
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(4.678.519.352,00)	(3.828.042.587,00)	22,22
	Jumlah	(3.615.251.801.059,00)	(3.274.158.392.164,00)	10,42

Rincian aset tetap berdasarkan jenis aset beserta akumulasi penyusutan dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.1.3.45 Daftar Aset dan Akumulasi Penyusutan

ASET	2024		2023	
	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1. Tanah	894.118.450.408,00	0,00	887.408.927.014,00	0,00
Tanah	894.118.450.408,00	0,00	887.408.927.014,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	1.511.364.046.327,00	(991.166.356.162,00)	1.251.592.918.697,00	(866.123.319.239,00)
Alat Besar	92.802.367.761,00	(40.747.062.241,00)	86.452.839.630,00	(34.245.659.616,00)
Alat Angkutan	228.739.229.057,00	(160.679.799.056,00)	215.128.484.508,00	(147.146.107.621,00)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.294.923.369,00	(9.205.725.099,00)	14.499.496.961,00	(7.388.765.379,00)
Alat Pertanian	10.691.283.940,00	(9.967.263.475,00)	10.135.669.347,00	(9.525.161.105,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.235.519.483,00	(300.724.209.120,00)	360.673.519.999,00	(259.379.152.844,00)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	98.258.039.855,00	(46.842.618.639,00)	56.251.186.283,00	(37.473.052.297,00)
Alat Kedokteran dan Kesehatan	308.160.739.052,00	(229.464.001.262,00)	272.116.354.626,00	(206.831.338.187,00)
Alat Laboratorium	58.972.206.033,00	(39.609.636.519,00)	51.556.319.095,00	(36.765.577.439,00)
Alat Persenjataaan	2.772.611.730,00	(2.631.362.731,00)	2.807.304.957,00	(2.624.720.211,00)
Komputer	209.140.412.278,00	(141.454.922.427,00)	162.018.945.329,00	(117.861.800.891,00)
Alat Eksplorasi	1.780.000,00	(534.000,00)	1.780.000,00	(178.000,00)
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.170.133.480,00	(325.520.022,00)	2.170.133.480,00	(108.506.674,00)
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	7.900.671.727,00	(2.267.152.182,00)	4.368.911.351,00	(909.960.796,00)
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	2.085.600.000,00	(391.050.000,00)	2.085.600.000,00	(130.350.000,00)
Rambu-Rambu	9.195.330.814,00	(4.364.997.830,00)	7.885.334.933,00	(3.899.941.132,00)
Peralatan Olahraga	3.943.197.748,00	(2.490.501.559,00)	3.441.038.198,00	(1.833.047.047,00)
3. Gedung dan Bangunan	2.581.291.923.138,12	(550.801.624.896,00)	2.278.112.282.276,12	(496.318.969.745,00)
Bangunan Gedung	2.484.291.570.769,12	(542.231.842.667,00)	2.220.554.966.594,12	(489.351.144.807,00)
Monumen	31.084.798.226,00	(1.513.727.933,00)	6.461.159.435,00	(1.132.818.544,00)
Bangunan Menara	4.738.910.982,00	(941.361.802,00)	4.738.910.982,00	(826.388.834,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	61.176.643.161,00	(6.114.692.494,00)	46.357.245.265,00	(5.008.617.560,00)
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.221.292.724.738,00	(2.040.992.548.068,00)	2.758.400.752.100,00	(1.881.263.723.914,00)
Jalan dan Jembatan	2.289.594.107.878,00	(1.794.321.852.543,00)	2.078.974.842.054,00	(1.701.450.956.927,00)
Bangunan Air	775.883.135.890,00	(211.544.639.177,00)	535.406.367.430,00	(152.163.143.882,00)
Instalasi	61.746.638.846,00	(15.468.078.614,00)	65.935.737.624,00	(13.756.143.961,00)
Jaringan	94.068.842.124,00	(19.657.977.734,00)	78.083.804.992,00	(13.893.479.144,00)
5. Aset Tetap Lainnya	78.794.396.864,00	(32.291.271.933,00)	76.206.062.560,00	(30.452.379.266,00)
Bahan Perpustakaan	22.942.039.463,00	0,00	4.688.302.093,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.047.928.513,00	0,00	99.700.000,00	0,00
Hewan	99.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	5.029.249.246,00	0,00
Tanaman	6.667.643.656,00	0,00	0,00	0,00



ASET	2024		2023	
	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	43.678.428.565,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	44.037.085.232,00	(32.291.271.933,00)	22.710.382.656,00	(30.452.379.266,00)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.691.971.792,00	0,00	164.285.126.421,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.691.971.792,00	0,00	164.285.126.421,00	0,00
Jumlah	8.498.553.513.267,12	(3.615.251.801.059,00)	7.416.006.069.068,12	(3.274.158.392.164,00)

Aset Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang nilai perolehannya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, diakui sebagai beban dan tidak dicatat sebagai aset tetap.

Tabel 5.3.1.3.46 Aset Ekstrakomptabel

No.	Jenis Aset Tetap	Unit	Nilai (Rp)
	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	73.028	10.279.569.259,00
1	Alat Besar	197	129.825.755,00
2	Alat Angkutan	667	492.753.241,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	216	62.249.970,00
4	Alat Pertanian	30	9.084.450,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	15.216	4.878.447.957,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.430	198.273.045,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.766	1.152.052.708,00
8	Alat Laboratorium	40.844	2.792.789.237,00
9	Alat Persenjataan	7	2.828.960,00
10	Komputer	4.141	118.446.007,00
11	Alat Keselamatan Kerja	31	14.725.000,00
12	Rambu - Rambu	846	321.097.977,00
13	Peralatan Olah Raga	637	106.994.952,00
	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.247	23.290.692.278,00
1	Bangunan Gedung	1.957	21.734.117.772,00
2	Monumen	213	1.312.040.003,00
3	Bangunan Menara	1	7.373.366,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	76	237.161.137,00
	Aset Tetap Lainnya	318.460	11.226.469.890,00
1	Bahan Perpustakaan	315.903	10.963.733.290,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	70	14.543.000,00
3	Tanaman	2.487	248.193.600,00
	Jumlah	393.735	44.796.731.427,00

5.3.1.4 PROPERTI INVESTASI

Sesuai PSAP Nomor 17 mengenai properti investasi, maka sebagian Aset Tanah berupa Tanah Kosong dan belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam operasional



pemerintah. Properti investasi merupakan aset Sekretariat Daerah. Properti Investasi pada tahun 2024 sebesar Rp36.732.340.272,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.4.1 Properti Investasi

No	Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %
1	POS PMK & Polsubsektor	3.487.990.000,00	3.487.990.000,00	0,00
2	Pemekaran Kecamatan Bontang Utara	13.250.079.095,00	13.250.079.095,00	0,00
3	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3.126.977.451,00	3.126.977.451,00	0,00
4	SDN 008	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5	SDN 002 Bontang Barat	2.119.122.476,00	2.119.122.476,00	0,00
6	Kandang Babi Kelurahan Kanaan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
7	Tanah Sirkuit Kelurahan Bontang Lestari	9.510.225.000,00	9.510.225.000,00	0,00
8	Sarana Perkantoran dan Fasilitas Perkantoran	338.476.250,00	338.476.250,00	0,00
9	Lapangan Olah Raga	2.315.120.000,00	2.315.120.000,00	0,00
10	Asrama Perawat	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
11	Asrama Perawat Tahap 2	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
	Jumlah	36.732.340.272,00	36.732.340.272,00	0,00

5.3.1.5 DANA CADANGAN

Pemerintah Kota Bontang tidak membentuk dana cadangan untuk TA 2024.

5.3.1.6 ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Bontang yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp956.308.519.724,60 mengalami penurunan sebesar Rp310.511.120.448,00 atau 24,51% dari tahun 2023 sebesar Rp1.266.819.640.172,60.

Tabel 5.3.1.6.1 Aset Lainnya

Aset Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.983.389.987,00	828.832.832,00	2.154.557.155,00	259,95
Aset Kemitraan	246.121.650.427,00	246.121.650.427,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	121.044.226.668,00	117.928.855.251,00	3.115.371.417,00	2,64
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(112.699.834.387,40)	(108.959.159.412,40)	(3.740.674.975,00)	3,43
Aset Lain-Lain	698.859.087.030,00	1.010.899.461.075,00	(312.040.374.045,00)	(30,87)
Jumlah	956.308.519.724,60	1.266.819.640.172,60	(310.511.120.448,00)	(24,51)



Saldo akhir aset lainnya merupakan kumpulan dari beberapa transaksi baik transaksi anggaran maupun transaksi non anggaran yang menyebabkan pemindahan kepemilikan aset lainnya seperti hibah atau donasi. Transaksi tersebut selama tahun 2024 menyebabkan mutasi aset masuk maupun mutasi keluar yang mempengaruhi saldo akhir aset lainnya. Rincian mutasi masuk dan keluar aset lainnya tahun 2024 tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini.

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 di Pemerintah Kota Bontang adalah sebesar Rp2.983.389.987,00 mengalami kenaikan Rp2.154.557.155,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp828.832.832,00. Mutasi tuntutan Ganti kerugian daerah dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Saldo awal	828.832.832,00
Mutasi penambahan	2.194.557.155,00
Temuan Pemeriksaan TA 2024 Kekurangan Volume Pekerjaan	
1. Sekretariat DPRD	18.291.076,00
2. RSUD	305.064.906,00
3. Sekretariat Daerah	399.103.703,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	539.482.651,00
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264.656.249,00
6. Kecamatan Bontang Utara	107.482.250,00
7. Kecamatan Bontang Selatan	78.876.064,00
8. Dinas Perhubungan	160.572.131,00
9. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21.205.870,00
10. Dinas Pemuda dan Olahraga	299.822.255,00
Mutasi pengurangan	40.000.000,00
Setoran atas temuan kekurangan volume pekerjaan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana (lanjutan) Pasar Loktuan	40.000.000,00
Saldo Akhir	2.983.389.987,00

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 di Pemerintah Kota Bontang adalah sebesar Rp246.121.650.427,00, kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Kerjasama dalam bentuk *Built Operate and Transfer* (BOT) antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Inti Griya Prima Sakti dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 188.6/15/HUK Nomor:15/IGPSSMG/BNTG/I5/07 tanggal 16 April 2007 tentang Pembangunan Plasa Taman Bontang dengan jangka waktu kerja sama 25 tahun terhitung sejak pembangunan selesai dan diresmikan. Tanah



yang menjadi objek kerjasama memiliki luas kurang lebih 6.590 m2 dan bangunan eks. Kantor Camat Bontang Utara, BPU, Sekretariat PKK, dan Rumah Dinas Kecamatan Jl. Mulawarman Bontang dengan nilai sebesar Rp14.352.691.000,00;

- 2) Kerjasama pemanfaatan aset pelabuhan antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Laut Bontang Bersinar berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Laut Bontang Bersinar tentang Kerja Sama Pemanfaatan Pelaubahan untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Loktuan Bontang No. 134.4.03/122/PEM.A dan No. 001/PKS-LBB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Jangka waktu perjanjian selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2036. Aset yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan sebesar Rp171.551.966.563,00 terdiri dari tanah sebesar Rp16.417.278.840,00, peralatan dan mesin senilai Rp633.944.814,00, gedung dan bangunan sebesar Rp586.495.000,00 dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp153.914.247.909,00. Serta nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp288.289.709,00, gedung dan bangunan sebesar Rp127.973.360,00, dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp47.628.542.227,00, secara keseluruhan nilai penyusutan senilai Rp48.044.805.296,00; dan
- 3) Kerjasama pemanfaatan Wisma Atlet Kota Bontang dengan PT Selat Mutiara sesuai akta notaris Juliansyah, SH nomor 04 tanggal 08 April 2019 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 168 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan tanah dan Bangunan Wisma Atlet.
- 4) Dalam perjanjian tersebut mengatur sesuai pasal 3 tentang Objek Kerjasama yaitu pada ayat (1) Kawasan Tanah dan Bangunan Wisma Atlet beserta fasilitas pendukung lainnya, yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Bontang, Kalimantan Timur yang meliputi lahan seluas 20.000M2 dan bangunan seluas Rp14.902.000m2, ayat (2) Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dikelola oleh Pihak Kedua sebagai hotel, bisnis, hiburan, pendidikan, olahraga dan pariwisata. Masa kerjasama (pasal 4) berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2019. Dalam perjanjian mengatur bahwa investasi pihak kedua (pasal 5) pada Tanah dan Bangunan Wisma Atlet sebesar Rp36.000.000.000,00. Kontribusi tetap yang harus dibayarkan (pasal 6) sebesar Rp180.000.000,00 dan dibayarkan ke Pemerintah Kota Bontang melalui Kas Daerah setiap awal tahun anggaran paling lambat bulan Maret setelah diterima Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan disetujui oleh para pihak.



Nilai aset yang menjadi objek kerja sama adalah gedung senilai Rp132.971.946.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp31.910.147.840,00 dan tanah senilai Rp7.200.000.000,00.

c. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024 di Pemerintah Kota Bontang adalah sebesar Rp121.044.226.668,00 mengalami kenaikan Rp3.115.371.417,00 atau 2,64% dari tahun 2023 sebesar Rp117.928.855.251,00.

Tabel 5.3.1.6.2 Aset Tak Berwujud per Jenis

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Hak Cipta	3.100.000,00	2.300.000,00	800.000,00
2	Software	39.495.973.445,00	113.793.324.163,60	(74.297.350.718,60)
3	Hasil Kajian	79.953.368.823,00	3.073.097.853,40	76.880.270.969,60
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.591.784.400,00	1.060.133.234,00	531.651.166,00
Jumlah		121.044.226.668,00	117.928.855.251,00	3.115.371.417,00

Rincian aset tak berwujud per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.6.3 Aset Tak Berwujud per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.899.626.886,00	4.899.626.886,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.044.355.900,00	1.799.205.400,00	13,63
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.209.167.750,00	2.071.167.750,00	6,66
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	56.488.520.088,00	55.123.554.487,00	2,48
5	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.677.111.447,00	7.677.111.447,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	219.446.143,00	219.446.143,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	360.902.830,00	360.902.830,00	0,00
8	Dinas Ketenagakerjaan	100.770.000,00	100.770.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	3.840.633.295,00	3.840.633.295,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.431.115.603,00	1.431.115.603,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	214.795.000,00	214.795.000,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	7.922.647.183,00	7.823.207.183,00	1,27
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.184.405.151,00	1.732.515.151,00	26,08
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	1.671.764.500,00	1.671.764.500,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	972.523.915,00	972.523.915,00	0,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.662.166.942,00	1.661.366.942,00	0,05
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	755.256.656,00	704.694.656,00	7,18
19	Sekretariat Daerah	3.956.229.792,00	3.802.501.976,00	4,04
20	Sekretariat DPRD	3.189.563.500,00	3.189.563.500,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.026.142.812,00	3.026.142.812,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	4.962.830.800,00	4.939.520.800,00	0,47
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.216.638.050,00	6.041.638.050,00	2,90
24	Inspektorat	738.445.000,00	2.364.215.574,00	(68,77)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.718.391.074,00	680.095.000,00	299,71
26	Kecamatan Bontang Utara	979.792.244,00	979.792.244,00	0,00
27	Kecamatan Bontang Selatan	330.832.624,00	330.832.624,00	0,00
28	Kecamatan Bontang Barat	171.151.483,00	171.151.483,00	0,00
Jumlah		121.044.226.668,00	117.928.855.251,00	2,64

Mutasi aset tak berwujud selama tahun anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Saldo awal	117.928.855.251,00
Mutasi penambahan	
Belanja modal TA 2024	1.600.123.816,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	5.920.000,00
Reklas antar KIB	72.748.150,00
Reklas dari beban jasa	2.100.938.271,00
Jumlah penambahan	3.779.730.237,00
Mutasi pengurangan	
Reklas ke beban jasa	664.358.820,00
Jumlah pengurangan	664.358.820,00
Saldo Akhir	121.044.226.668,00

Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud TA 2024 adalah sebesar Rp3.779.730.237,00 dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal aset tak terwujud TA 2024 sebesar Rp1.600.123.816,00.
- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp5.920.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.890.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.890.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp2.140.000,00.
- 3) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp72.748.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp22.186.150,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp50.562.000,00.
- 4) Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp2.100.938.271,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp2.007.138.271,00, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebesar Rp800.000,00, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp93.000.000,00.



Mutasi kurang aset tidak berwujud TA 2024 sebesar Rp664.358.820,00 berupa reklas ke beban jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti sistem informasi/aplikasi (*software*), *good will*, hak cipta, dan hasil kajian atau dokumen yang dipersamakan, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp112.699.834.387,40 ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.740.674.975,00 atau 3,43% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp108.959.159.412,40.

Tabel 5.3.1.6.4 Amortisasi per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.799.371.436,00)	(4.738.589.736,00)	1,28
2	Dinas Kesehatan	(1.763.815.450,00)	(1.670.444.400,00)	5,59
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.829.682.440,00)	(1.618.447.009,00)	13,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	(53.762.012.167,00)	(52.821.191.616,00)	1,78
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(6.571.769.297,00)	(5.929.980.957,00)	10,82
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(219.446.143,00)	(219.446.143,00)	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(360.902.830,00)	(360.902.830,00)	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	(70.539.000,00)	(50.385.000,00)	40,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	(89.100.000,00)	(69.300.000,00)	28,57
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	(3.810.757.295,00)	(3.780.881.295,00)	0,79
13	Dinas Lingkungan Hidup	(1.412.663.603,40)	(1.394.211.603,40)	1,32
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(214.795.000,00)	(214.795.000,00)	0,00
15	Dinas Perhubungan	(7.640.920.547,00)	(7.517.604.523,00)	1,64
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.487.886.576,00)	(1.299.963.926,00)	14,46
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	(1.577.307.550,00)	(1.543.223.850,00)	2,21
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(962.706.415,00)	(943.071.415,00)	2,08
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(1.644.109.742,00)	(1.611.015.342,00)	2,05
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(630.737.642,00)	(600.026.238,00)	5,12
21	Sekretariat Daerah	(3.618.129.985,00)	(3.436.031.815,00)	5,30
22	Sekretariat DPRD	(2.930.260.400,00)	(2.756.152.200,00)	6,32
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	(2.970.398.167,00)	(2.938.508.309,00)	1,09
24	Badan Pendapatan Daerah	(4.542.165.800,00)	(4.270.550.000,00)	6,36
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(5.813.784.300,00)	(5.678.507.800,00)	2,38



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(2.148.655.524,00)	(1.959.921.074,00)	9,63
27	Inspektorat Daerah	(450.520.000,00)	(318.511.000,00)	41,45
28	Kecamatan Bontang Utara	(887.360.119,00)	(751.353.669,00)	18,10
29	Kecamatan Bontang Selatan	(320.888.624,00)	(301.000.624,00)	6,61
30	Kecamatan Bontang Barat	(169.148.335,00)	(165.142.038,00)	2,43
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(112.699.834.387,40)	(108.959.159.412,40)	3,43

e. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 di Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp698.859.087.030,00 mengalami penurunan Rp312.040.374.045,00 atau 30,87% dari tahun 2023 sebesar Rp1.010.899.461.075,00.

Tabel 5.3.1.6.5 Aset Lain-Lain per Jenis

NO	Uraian Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
	Aset Lainnya	698.859.087.030,00	1.010.899.461.075,00	(30,87)
1	Aset lain-lain	698.859.087.030,00	1.010.899.461.075,00	(30,87)

Rincian aset lain-lain per SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.6.6 Daftar Aset Lain-Lain per SKPD

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.496.992.692,00	17.458.276.626,00	0,22
2	Dinas Kesehatan	321.759.288,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	30.471.309,00	2.134.108,00	1.327,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	183.552.646.631,00	183.359.143.936,00	0,11
5	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	34.903.000,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	527.554,00	109.174.554,00	(99,52)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.038.001,00	36.038.001,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.555.323,00	3.555.323,00	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.109.656,00	8.109.656,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	541.283.700,00	541.283.700,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	430.753.725,00	250.987.098,00	71,62
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	1.590.461.370,00	1.578.226.513,00	0,78
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	21.322.237.267,00	21.322.237.267,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.963.583,00	3.963.583,00	0,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	193.523.730,00	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.239.046,00	7.239.046,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	3.043.300,00	3.043.300,00	0,00
22	Sekretariat DPRD	64.410.000,00	64.410.000,00	0,00
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.693.464,00	5.693.464,00	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	472.968.164.987,00	785.913.152.976,00	(39,82)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.331.250,00	4.331.250,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Bontang Utara	35.759.815,00	35.759.815,00	0,00
29	Kecamatan Bontang Selatan	165.507.334,00	165.507.334,00	0,00
30	Kecamatan Bontang Barat	36.149.005,00	25.631.525,00	41,03
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		698.859.087.030,00	1.010.899.461.075,00	(30,87)

Aset tetap yang dihentikan penggunaannya terdapat dalam **Lampiran 3** (per jenis aset, nilai bruto, dan akumulasi)

Mutasi aset lain-lain selama tahun anggaran 2024 disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari jenis aset lain yang menjadi usulan penghapusan/henti guna barang milik daerah, maupun penghapusan barang milik daerah, serta penambahan/pengurangan TDF (*Treasury Deposit Facility*) dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Saldo awal	1.010.899.461.075,00
Mutasi penambahan	
Usulan penghapusan	17.273.925.766,00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan	6.791.324.958,00
Penambahan TDF (<i>Treasury Deposit Facility</i>) TA 2024	128.190.202.000,00
Jumlah penambahan	152.255.452.724,00
Mutasi pengurangan	
Pelunasan TDF (<i>Treasury Deposit Facility</i>) TA 2023	441.135.189.989,00
Penghapusan	8.854.836.404,00
Akumulasi Penyusutan Usulan Penghapusan	14.305.800.376,00
Jumlah pengurangan	464.295.826.769,00
Saldo Akhir	698.859.087.030,00



Mutasi tambah aset lain-lain TA 2024 sebesar Rp152.255.452.724,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Usulan penghapusan sebesar Rp17.273.925.766,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.6.7 Usulan Penghapusan Aset

SKPD	Jumlah Aset (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.726.847.630,00
Dinas Kesehatan	720.498.340,00
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	2.851.371.156,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.592.357.451,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45.925.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	43.240.814,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.434.793.039,00
Dinas Perhubungan	661.172.929,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	349.058.743,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	367.259.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	703.291.137,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	238.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.577.152,00
Kecamatan Bontang Utara	30.845.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	34.190.000,00
Kecamatan Bontang Barat	442.894.325,00
Jumlah	17.273.925.766,00

- 2) Akumulasi Penyusutan Penghapusan sebesar Rp6.791.324.958,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.6.8 Penyusutan Penghapusan Aset

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.897.000,00
Dinas Kesehatan	260.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	111.835.675,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	634.629.927,00
Satuan Polisi Pamong Praja	345.855.866,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	176.296.700,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	271.900.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	167.750.000,00



SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.921.570,00
Sekretariat Daerah	3.233.584.170,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	252.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.050.000,00
Jumlah	6.791.324.958,00

- 3) Penambahan TDF (*Treasury Deposit Facility*) TA 2024 sebesar Rp128.190.202.000,00, terdiri dari DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp110.456.545.000,00 dan DBH PBB sebesar Rp17.733.657.000,00.

Mutasi kurang aset lain-lain TA 2024 sebesar Rp464.295.826.769,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran TDF TA 2023 ke RKUD sebesar Rp441.135.189.989, terdiri dari:
 - a) Tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp48.167.321.874,00.
 - b) Tanggal 12 Juni 2024 sebesar Rp48.202.968.105,00.
 - c) Tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp344.764.900.010,00.
- 2) Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp8.854.836.404,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.6.9 Penghapusan Aset Lain-Lain

SKPD	Jumlah Aset (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.897.000,00
Dinas Kesehatan	260.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	111.835.675,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.344.277.073,00
Satuan Polisi Pamong Praja	454.502.866,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	421.514.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	271.900.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	167.750.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.921.570,00
Sekretariat Daerah	3.233.584.170,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	252.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.050.000,00
Jumlah	8.854.836.404,00



- 3) Akumulasi Penyusutan Usulan Penghapusan sebesar Rp14.305.800.376,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.6.10 Penyusutan Usulan Penghapusan Aset

SKPD	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.688.131.564,00
Dinas Kesehatan	398.739.052,00
Rumah Sakit Umum Daerah	2.823.033.955,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	689.207.610,00
Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	11.022.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	43.240.814,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.009.809.112,00
Dinas Perhubungan	648.938.072,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	349.058.743,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	173.735.270,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	703.291.137,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	238.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.577.152,00
Kecamatan Bontang Utara	30.845.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	34.190.000,00
Kecamatan Bontang Barat	432.376.845,00
Jumlah	14.305.800.376,00

Rincian aset lainnya dan akumulasi amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.6.11 Aset Lainnya dan Amortisasi

No	ASET	Nilai Perolehan Aset (Rp)	Akumulasi Amortisasi/ Penyisihan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.983.389.987,00	0,00	2.983.389.987,00
2	Aset kemitraan	326.076.603.563,00	(79.954.953.136,00)	246.121.650.427,00
3	Aset Kemitraan	326.076.603.563,00	(79.954.953.136,00)	246.121.650.427,00
	Software/Aset Lainnya	121.044.226.668,00	112.699.834.387,40	8.344.392.280,60
	Hak Cipta	3.100.000,00	(1.290.000,00)	1.810.000,00
	Software	39.495.973.445,00	(35.139.275.355,40)	4.356.698.089,60
	Hasil Kajian	79.953.368.823,00	(76.438.285.952,00)	3.515.082.871,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.591.784.400,00	(1.120.983.080,00)	470.801.320,00
4	Aset Lainnya	894.833.874.308,00	(195.974.787.278,00)	698.859.087.030,00
	Aset lain-lain	894.833.874.308,00	(195.974.787.278,00)	698.859.087.030,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bontang mencatat adanya kewajiban yang disebabkan oleh adanya perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban tersebut yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, kewajiban pemerintah juga timbul dari perikatan pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang pada akhir tahun anggaran belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dan telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp37.654.681.939,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.169.853.856,00 atau 16,00% dari tahun 2023 sebesar Rp44.824.535.795,00. Rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut ini:

Tabel 5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Utang PFK	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	37.654.681.939,00	44.824.535.795,00	(16,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.654.681.939,00	44.824.535.795,00	(16,00)

a. Utang PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Utang PFK Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah nihil, sementara saldo per 31 Desember 2023 adalah nihil.

b. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan pembayaran pada tahun berikutnya karena jasa, barang maupun aset tetap sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Utang Belanja terdiri dari utang belanja pegawai atas uang makan dan uang tunjangan kinerja seluruh SKPD dan utang belanja barang dan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada dengan perincian sebagai berikut ini.

Utang Belanja Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.654.681.939,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.169.853.856,00 atau 16,00% dari tahun 2023 sebesar Rp44.824.535.795,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.2.1.2 Utang Belanja per SKPD

Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.609.369.117,00	4.919.910.070,00	14,01
Dinas Kesehatan	6.597.828.777,00	2.968.069.849,00	122,29
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	10.551.870.025,00	22.537.049.627,00	(53,18)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	893.950.812,00	871.956.280,00	2,52
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	457.600.212,00	507.744.041,00	(9,88)
Satuan Polisi Pamong Praja	366.272.973,00	361.882.947,00	1,21
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.853.249,00	265.637.792,00	13,26
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	795.644.987,00	690.751.594,00	15,19
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	405.583.627,00	422.452.080,00	(3,99)
Dinas Ketenagakerjaan	292.599.790,00	306.902.000,00	(4,66)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	404.060.282,00	373.727.926,00	8,12
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	825.191.841,00	776.615.852,00	6,25
Dinas Lingkungan Hidup	570.992.073,00	541.865.343,00	5,38
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	385.747.913,00	378.421.360,00	1,94
Dinas Perhubungan	332.429.850,00	378.065.792,00	(12,07)
Dinas Komunikasi dan Informatika	450.760.528,00	443.634.555,00	1,61
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	592.481.063,00	600.810.811,00	(1,39)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	282.717.933,00	356.289.938,00	(20,65)
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	423.522.537,00	350.448.601,00	20,85
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	346.361.564,00	307.340.415,00	12,70
Sekretariat Daerah	1.450.364.347,00	1.324.455.461,00	9,51
Sekretariat DPRD	490.038.125,00	390.504.925,00	25,49
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	413.885.973,00	396.155.346,00	4,48
Badan Pendapatan Daerah	230.846.187,00	261.460.466,00	(11,71)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	424.728.152,00	445.509.177,00	(4,66)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	468.622.209,00	430.948.651,00	8,74
Inspektorat Daerah	556.393.042,00	574.309.886,00	(3,12)
Kecamatan Bontang Utara	998.882.332,00	967.489.730,00	3,24
Kecamatan Bontang Selatan	920.741.557,00	882.760.481,00	4,30
Kecamatan Bontang Barat	530.198.376,00	544.353.398,00	(2,60)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	284.142.486,00	247.011.401,00	15,03
Jumlah	37.654.681.939,00	44.824.535.795,00	(16,00)

Mutasi utang tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Saldo Awal Utang	44.824.535.795,00
Pengurangan utang	44.824.535.795,00



Pelunasan utang tunjangan ASN 2023	25.889.835.115,00
Pelunasan utang belanja modal tahun 2023	85.496.000,00
Pelunasan utang belanja BLUD tahun 2023	18.849.204.680,00
Penambahan utang	37.654.681.939,00
Utang tambahan penghasilan 2024	27.102.811.914,00
Utang belanja BLUD 2024	10.551.870.025,00
Saldo utang belanja per 31 Desember 2024	37.654.681.939,00

Rincian utang belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dan utang BLUD RSUD Taman Husada dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember tahun 2024 adalah nihil, demikian juga saldo tahun 2024 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pemerintah Kota Bontang tidak memiliki kewajiban jangka panjang untuk tahun anggaran 2024 demikian juga dengan tahun 2023. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Bontang tidak pernah memiliki kewajiban jangka panjang dengan pihak manapun.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bontang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bontang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.566.820.425.827,60 mengalami kenaikan sebesar Rp140.115.350.391,03 atau 2,05% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.426.705.075.436,57.



5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan Pelaporan Operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan LO, Beban dan Surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

5.4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Bontang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	343.324.625.745,99	268.084.154.506,28	75.240.471.239,71	28,07
Pendapatan Transfer	2.077.603.831.448,00	2.391.951.442.033,00	(314.347.610.585,00)	(13,14)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	85.646.903.978,88	159.352.090.205,07	(73.705.186.226,19)	(46,25)
Jumlah	2.506.575.361.172,87	2.819.387.686.744,35	(312.812.325.571,48)	(11,10)

Realisasi Pendapatan LO tahun 2024 sebesar Rp2.506.575.361.172,87 mengalami penurunan sebesar Rp312.812.325.571,48 atau 11,10% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.819.387.686.744,35. Masing-masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut ini.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD-LO pada laporan operasional untuk periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp343.324.625.745,99 mengalami kenaikan sebesar Rp75.240.471.239,71 atau 28,07% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp268.084.154.506,28.

Tabel 5.4.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	157.725.862.180,95	123.482.869.878,42	34.242.992.302,53
Pendapatan Retribusi Daerah	107.816.580.560,03	2.928.936.840,00	104.887.643.720,03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.137.180.321,93	3.487.431.779,72	649.748.542,21
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	73.645.002.683,08	138.184.916.008,14	(64.539.913.325,06)
Jumlah	343.324.625.745,99	268.084.154.506,28	75.240.471.239,71



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp34.242.992.302,53 atau 27,73%, Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp104.887.643.720,03 atau 3.581,08%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp649.748.542,21 atau 18,63%, namun Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO mengalami penurunan sebesar Rp64.539.913.325,06 atau 46,71%. Masing-masing realisasi jenis PAD tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional tahun 2024 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional tahun berjalan melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp157.725.862.180,95 kenaikan sebesar Rp34.242.992.302,53 atau 27,73% dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang terealisasi sebesar Rp123.482.869.878,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Hotel-LO	951.277.971,00	1.331.901.089,20	(380.623.118,20)
Pajak Losmen-LO	192.698.632,00	287.321.794,00	-94.623.162,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	5.966.177.521,00	6.093.121.268,10	(126.943.747,10)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	243.531.912,00	243.772.001,00	(240.089,00)
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	2.012.409.574,00	1.073.442.270,00	938.967.304,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya- LO	7.447.340,00	7.215.000,00	232.340,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	7.127.934.701,91	12.813.545.381,72	(5.685.610.679,81)
Pajak Tontonan Film-LO	0	396.314.554,00	(396.314.554,00)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana- LO	0	305.000,00	(305.000,00)
Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	218.842.041,00	0,00	218.842.041,00
Pajak Pameran-LO	0	9.493.000,00	(9.493.000,00)
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	258.648.856,00	382.940.880,20	(124.292.024,20)
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.564.369.652,00	1.116.136.103,70	448.233.548,30
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)- LO	30.528.500,00	50.097.450,00	(19.568.950,00)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.039.298.408,50	1.155.230.532,25	(115.932.123,75)
Pajak Reklame Kain-LO	0	336.600,00	(336.600,00)
Pajak Reklame Berjalan-LO	3.438.750,00	10.665.000,00	(7.226.250,00)
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	8.911.110.364,00	0,00	8.911.110.364,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	16.955.786.506,00	16.521.395.606,00	434.390.900,00
Pajak Parkir-LO	234.567.460,00	323.538.100,00	(88.970.640,00)
Pajak Air Tanah-LO	8.612.515.660,00	7.620.100.694,00	992.414.966,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	2.421.862.102,50	724.137.866,25	1.697.724.236,25
PBBP2-LO	64.443.411.591,00	61.677.979.298,00	2.765.432.293,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	7.252.330.108,95	11.642.830.390,00	(4.390.500.281,05)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	12.583.538.925,09	0,00	12.583.538.925,09
PBJT-Tenaga Listrik-LO	14.711.337.498,00	0,00	14.711.337.498,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	876.635.924,00	0,00	876.635.924,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	92.292.400,00	0,00	92.292.400,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	1.012.819.782,00	0,00	1.012.819.782,00
Jumlah	157.725.862.180,95	123.482.869.878,42	34.242.992.302,53

Pendapatan pajak-LO merupakan jumlah ketetapan yang dikeluarkan pada tahun 2024, terdapat kenaikan Pajak Daerah-LO dibandingkan tahun 2023 disebabkan kenaikan jumlah SKPD dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.1.4 Ketetapan Pajak tahun 2024 dan 2023

Jenis Pajak	Ketetapan 2024		Ketetapan 2023	
	SKPD	Rincian Pajak Daerah – LO (Rp)	SKPD	Rincian Pajak Daerah – LO (Rp)
Pajak Hotel-LO	432	2.020.612.527,00	421	1.619.222.883,20
Pajak Restoran-LO	7.720	27.941.039.974,00	7.085	20.231.095.920,82
Pajak Hiburan-LO	381	3.085.208.831,00	323	1.955.286.987,90
Pajak Reklame-LO	1.193	1.042.737.158,50	1.497	1.166.232.132,25
Pajak Penerangan Jalan-LO	220	40.578.234.368,00	12	16.521.395.606,00
Pajak Parkir-LO	11	326.859.860,00	103	323.538.100,00
Pajak Air Tanah-LO	86	8.612.515.660,00	60	7.620.100.694,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	72	1.050.000,00	2	1.050.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.144	2.421.862.102,50	6	724.137.866,25
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBBP2)-LO	48.194	64.443.411.591,00	1.438	11.642.830.390,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB)-LO	1	7.252.330.108,95	47.622	61.677.979.298,00
Jumlah	59.454	157.725.862.180,95	58.569	123.482.869.878,42



Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp7.707.684.194,00 (Rp157.725.862.180,95 - Rp150.018.177.986,95). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.5 Selisih Pajak Daerah dalam LO dengan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		7.707.684.194,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		2.226.532.232,00
Pelunasan Piutang	2.226.532.232,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		(9.934.216.426,00)
Ketetapan Pajak TA 2024 yang belum realisasi	9.934.216.426,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(7.707.684.194,00)

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kota Bontang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bontang dipungut dan dikelola oleh delapan SKPD.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp107.816.580.560,03 mengalami kenaikan sebesar Rp104.887.643.720,03 atau 3.581,08% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.928.936.840,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.1.6 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO	102.780.515.944,03	672.066.600,00	102.108.449.344,03
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	2.473.807.640,00	324.308.000,00	2.149.499.640,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	84.104.000,00	119.998.000,00	(35.894.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	723.758.000,00	350.450.500,00	373.307.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	193.944.600,00	(193.944.600,00)



Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	39.307.640,00	(39.307.640,00)
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	153.250.000,00	119.350.000,00	33.900.000,00
Retribusi Terminal – LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	44.028.000,00	(44.028.000,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	49.862.000,00	(49.862.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	228.680.000,00	0,00	228.680.000,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LO	769.310.000,00	832.044.000,00	(62.734.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	75.605.000,00	94.865.000,00	(19.260.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	0,00	0,00	0,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	30.310.000,00	20.400.000,00	9.910.000,00
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	0,00	0,00	0,00
Pemberian Ijin Gangguan/Keramaian – LO	0,00	0,00	0,00
Pemberian Ijin Trayek – LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	102.217.476,00	68.312.500,00	33.904.976,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	395.022.500,00	0,00	395.022.500,00
Jumlah	107.816.580.560,03	2.928.936.840,00	104.887.643.720,03

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp16.672.875,00 (Rp107.816.580.560,03 - Rp107.833.253.435,03). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.7 Selisih Pendapatan retribusi LO dengan pendapatan retribusi LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		(16.672.875,00)
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		1.427.742.011,00
Pelunasan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan Sebelumnya	290.764.375,00	
Koreksi tambah piutang	50.962.765,00	
Piutang pajak tahun 2023	1.086.014.871,00	



Uraian	Nilai	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		1.411.069.136,00
Ketetapan retribusi pelayanan sampah	182.824.875,00	
Piutang retribusi 2024	1.228.244.261,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		16.672.875,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bontang yang diterima melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang dengan realisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.137.180.321,93 mengalami kenaikan sebesar Rp649.748.542,21 atau 18,63% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yang terealisasi sebesar Rp3.487.431.779,72. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah-LO sama dengan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah pada LRA.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pembagian dividen tahun buku 2023 atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada PT BPD Kaltim Kaltara. PT BPD Kaltim Kaltara menyetorkan dividen tahun buku 2023 sebesar Rp4.137.180.321,93 atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada PT BPD Kaltim Kaltara pada tanggal 3 April 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bontang.

d. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp73.645.002.683,08 mengalami penurunan sebesar Rp64.539.913.325,06 atau 46,71% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp138.184.916.008,14 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.1.8 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – LO	1.165.754.200,00	280.014.800,00	885.739.400,00
Hasil Penjualan Gedung dan bangunan-LO	257.472.000,00	13.652.000,00	243.820.000,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	241.186.000,00	0,00	241.186.000,00
Hasil Sewa BMD-LO	210.000.000,00	700.602.900,00	(490.602.900,00)
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	180.000.000,00	3.228.688.304,00	(3.048.688.304,00)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah – LO	0,00	0,00	0,00
Hasil dari Bangun Guna Serah-LO	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Jasa Giro Kas Daerah – LO	7.209.730.995,78	12.671.259.069,69	(5.461.528.073,91)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	116.344.250,36	111.450.573,97	4.893.676,39
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	47.327.839.264,92	11.966.514.038,06	35.361.325.226,86
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	50.520.000,00	0,00	50.520.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	2.805.925.991,56	1.115.765.610,00	1.690.160.381,56
Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	2.128.650,00	1.127.987,00	1.000.663,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	37.013.979,00	19.673.488,00	17.340.491,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	118.975,00	128.640,00	(9.665,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	11.771.154,00	15.266.427,00	(3.495.273,00)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	1.031.502,00	0,00	1.031.502,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	572.399.179,00	605.992.357,00	(33.593.178,00)
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	316.520,00	1.450.770,00	(1.134.250,00)
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	1.093.811.933,00	25.000.000,00	1.068.811.933,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya – LO	2.687.794.809,90	211.414.032,75	2.476.380.777,15
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO	9.423.843.278,56	106.243.370.632,67	(96.819.527.354,11)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	0,00	36.181.200,00	(36.181.200,00)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	0,00	9.899.200,00	(9.899.200,00)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	0,00	36.314.600,00	(36.314.600,00)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	0,00	22.017.800,00	(22.017.800,00)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas Bontang Barat	0,00	6.295.200,00	(6.295.200,00)

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas Bontang Lestari	0,00	44.457.400,00	(44.457.400,00)
Dana Non Kapitasi pada FKTP Klinik PNS	0,00	32.867.978,00	(32.867.978,00)
Dana Non Kapitasi pada Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	535.511.000,00	(535.511.000,00)
Jumlah	73.645.002.683,08	138.184.916.008,14	(64.539.913.325,06)

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah – LO dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Lain – lain PAD yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp5.976.337.983,00 (Rp73.645.002.683,08 – Rp67.668.664.700,08). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.9 Selisih Pendapatan Asli Daerah Lainnya dalam LO terhadap LRA TA 2024

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		5.976.337.983,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		40.000.000,00
Pelunasan TGR	40.000.000,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		6.016.337.983,00
Piutang BLUD	5.775.151.983,00	
Penambahan nilai aset dari DPUPR ke Kec. Bontang Barat	241.186.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(5.976.337.983,00)

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2024 sebesar Rp2.077.603.831.448,00 mengalami penurunan sebesar Rp314.347.610.585,00 atau 13,14% dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.391.951.442.033,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.725.074.230.284,00	2.136.741.069.814,00	(411.666.839.530,00)
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	13.164.686.000,00	16.446.800.000,00	(3.282.114.000,00)



Pendapatan Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	339.364.915.164,00	238.763.572.219,00	100.601.342.945,00
Jumlah	2.077.603.831.448,00	2.391.951.442.033,00	(314.347.610.585,00)

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bontang untuk periode tahun 2024 secara total terealisasi sebesar Rp1.725.074.230.284,00 mengalami penurunan sebesar Rp411.666.839.530,00 atau 19,27% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.136.741.069.814,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-LO

Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	152.871.607.000,00	168.235.765.000,00	(15.364.158.000,00)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.223.483.180.000,00	1.662.372.869.000,00	(438.889.689.000,00)
Dana Alokasi Umum	267.889.833.686,00	240.542.351.201,00	27.347.482.485,00
Dana Alokasi Khusus	80.829.609.598,00	65.590.084.613,00	15.239.524.985,00
Jumlah	1.725.074.230.284,00	2.136.741.069.814,00	(411.666.839.530,00)

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp312.944.987.989,00 (Rp1.725.074.230.284,00 - Rp2.038.019.218.273,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.3 Selisih Dana Perimbangan dalam LRA dengan Dana Perimbangan dalam LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		312.944.987.989,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		441.135.189.989,00
Transfer Non-Tunai TDF TA 2023	441.135.189.989,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		128.190.202.000,00
Penambahan TDF TA 2024	128.190.202.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		312.944.987.989,00

b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya berupa Dana Penyesuaian untuk tahun 2024 Rp13.164.686.000,00 adalah sebesar dan mengalami penurunan sebesar Rp3.282.114.000,00 atau 19,96% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp16.446.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	13.164.686.000,00	16.446.800.000,00	(3.282.114.000,00)
Jumlah	13.164.686.000,00	16.446.800.000,00	(3.282.114.000,00)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada LO sama dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada LRA.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp339.364.915.164,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp100.601.342.945,00 atau 42,13% bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp238.763.572.219,00. Total Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2024 sebesar Rp339.364.915.164,00 yang merupakan realisasi transfer bagi hasil pajak Provinsi sebesar Rp206.382.175.164,00 dan bantuan keuangan Rp132.982.740.000,00. Dari transfer sebesar belanja bagi hasil pajak Provinsi sebesar Rp228.337.342.164,00 dikurangi kurang salur TA 2023 sebesar Rp21.955.167.000,00. Alokasi kurang salur TA 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K. 33/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2023, ditetapkan kurang salur tahun 2023 untuk Kota Bontang sebesar Rp21.955.167.000,00. Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.34/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, selanjutnya dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 900.1.14.3/17/17/III/BPKAD perihal Penyesuaian Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota TA 2024. Bagi Hasil Pajak Provinsi 2024 untuk Kota Bontang setelah penyesuaian dialokasikan sebesar Rp248.272.337.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.



Tabel 5.4.1.2.5 Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Transfer Pemerintah Provinsi	Total Transfer Pemerintah Provinsi (Rp)	Kurang Salur 2023 (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.446.388.000,00	2.994.452.000,00	26.451.936.000,00	27.289.050.000,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.439.072.000,00	3.476.111.000,00	25.962.961.000,00	27.110.737.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	155.646.952.000,00	15.463.358.000,00	140.183.594.000,00	171.054.103.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	224.223.000,00	21.246.000,00	202.977.000,00	250.247.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.580.707.164,00	0,00	13.580.707.164,00	13.059.435.219,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	132.982.740.000,00	0,00	132.982.740.000,00	0,00
Jumlah	361.320.082.164,00	21.955.167.000,00	339.364.915.164,00	238.763.572.219,00

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LRA TA 2024 sebesar Rp21.955.167.000,00 (Rp339.364.915.164,00 - Rp361.320.082.164,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.6 Selisih Transfer Pemerintah Provinsi dalam LRA dengan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		21.955.167.000,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		21.955.167.000,00
Pembayaran Kurang Salur Tahun 2023	21.955.167.000,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		Nihil
Jumlah Penjelasan Selisih		21.955.167.000,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp85.646.903.978,88 dan mengalami penurunan sebesar Rp73.705.186.226,19 atau 46,25% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp159.352.090.205,07 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.1.2.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Hibah	60.014.092.779,60	159.352.090.205,07	(99.337.997.425,47)



Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.632.811.199,28	0,00	25.632.811.199,28
Jumlah	85.646.903.978,88	159.352.090.205,07	(73.705.186.226,19)

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO per SKPD dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4.1.2.8 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO per SKPD

Nama SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.900.000,00
Dinas Kesehatan	4.899.820.745,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.302.049.279,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.990.528.529,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.048.868.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	350.764.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	573.640.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.950.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.929.149.355,88
Kecamatan Bontang Selatan	1.295.233.870,00
JUMLAH	85.646.903.978,88

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp10.139.772.303,00 (Rp85.646.903.978,88 - Rp75.507.131.675,88). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.9 Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		10.139.772.303,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		47.577.982.320,00
Dana IUPK PT KPC Tahun Buku 2023	47.577.982.320,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		(57.717.754.623,00)
Hibah Barang	(57.717.754.623,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(10.139.772.303,00)

a. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp60.014.092.779,60 mengalami penurunan sebesar Rp99.337.997.425,47 atau 62,34% dibandingkan tahun 2023 sebesar



Rp159.352.090.205,07. Pendapatan Hibah-LO merupakan pendapatan hibah barang pada 9 SKPD dan pendapatan hibah uang Rp2.296.338.156 pada BPKAD, pada SKPD berikut ini:

Tabel 5.4.1.2.10 Pendapatan Hibah pada SKPD

Nama SKPD	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.900.000,00
Dinas Kesehatan	4.899.820.745,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.302.049.279,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.990.528.529,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.048.868.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	350.764.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	573.640.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.950.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.296.338.156,60
Kecamatan Bontang Selatan	1.295.233.870,00
Jumlah	60.014.092.779,60

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 sebesar Rp25.632.811.199,28 mengalami kenaikan sebesar Rp25.632.811.199,28 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023 yang nihil. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 5.4.1.2.11 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Jumlah
Penerimaan Kapitasi JKN	7.097.907.131,00
Penerimaan IUPK	18.205.452.549,69
Lebih Setor Penerimaan Pajak dan Retribusi	1.890.190,09
Penerimaan Lainnya	327.561.328,50
Jumlah	25.632.811.199,28

5.4.2 BEBAN – LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Pada prinsipnya pengelompokan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban



bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban-LO terealisasi sebesar Rp2.372.067.787.080,14 dan mengalami kenaikan sebesar Rp530.422.700.224,31 atau 28,80% bila dibandingkan dengan beban tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.841.645.086.855,83, Realisasi beban tahun 2024 dan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.1.1 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	708.241.008.022,00	585.135.436.816,00	123.105.571.206,00
Beban Barang dan Jasa	1.191.141.230.346,24	779.364.026.442,98	411.777.203.903,26
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	49.938.220.008,00	92.088.583.690,00	(42.150.363.682,00)
Beban Bantuan Sosial	1.199.600.000,00	1.645.992.234,00	(446.392.234,00)
Beban Penyusutan	343.034.728.084,00	285.564.829.621,00	57.469.898.463,00
Beban Penyisihan Piutang	2.552.523.136,43	4.371.524.461,51	(1.819.001.325,08)
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	75.960.477.483,47	93.474.693.590,34	(17.514.216.106,87)
Jumlah	2.372.067.787.080,14	1.841.645.086.855,83	530.422.700.224,31

5.4.2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp708.241.008.022,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp123.105.571.206,00 atau 21,04% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp585.135.436.816,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.1.2 Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.207.024.477,00	208.268.500.372,00	39.938.524.105,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	365.533.530.510,00	276.573.736.297,00	88.959.794.213,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.021.463.815,00	37.602.398.014,00	4.419.065.801,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.853.972.812,00	16.663.742.675,00	1.190.230.137,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.022.988.813,00	1.014.951.614,00	8.037.199,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	839.720.000,00	801.600.000,00	38.120.000,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai BLUD	32.762.307.595,00	44.210.507.844,00	(11.448.200.249,00)
Jumlah	708.241.008.022,00	585.135.436.816,00	123.105.571.206,00

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai Beban Pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

Tabel 5.4.2.1.3 Beban Pegawai per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	173.194.267.355,00	143.091.897.368,00	30.102.369.987,00
Dinas Kesehatan	154.376.521.765,00	53.807.211.256,00	100.569.310.509,00
Rumah Sakit Umum Daerah	32.762.307.595,00	114.785.050.004,00	-82.022.742.409,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18.963.300.284,00	14.559.056.439,00	4.404.243.845,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.395.518.539,00	7.249.278.348,00	2.146.240.191,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.885.166.339,00	6.962.469.445,00	922.696.894,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.859.556.176,00	4.016.702.944,00	2.842.853.232,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.993.332.025,00	9.962.485.172,00	8.030.846.853,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.318.818.666,00	6.817.360.388,00	2.501.458.278,00
Dinas Ketenagakerjaan	6.542.799.220,00	5.776.386.906,00	766.412.314,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	8.605.210.013,00	6.453.223.232,00	2.151.986.781,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	18.141.211.988,00	12.610.160.246,00	5.531.051.742,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.846.885.419,00	8.996.402.449,00	2.850.482.970,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.461.768.866,00	7.062.675.454,00	1.399.093.412,00
Dinas Perhubungan	8.049.251.894,00	7.151.917.137,00	897.334.757,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.727.601.472,00	6.035.781.560,00	3.691.819.912,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	13.216.590.338,00	10.638.133.533,00	2.578.456.805,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.865.415.235,00	6.388.095.554,00	477.319.681,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.026.242.581,00	6.539.703.914,00	2.486.538.667,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.043.404.030,00	5.879.540.540,00	2.163.863.490,00
Sekretariat Daerah	30.339.910.312,00	23.342.685.792,00	6.997.224.520,00
Sekretariat DPRD	27.388.669.093,00	22.874.100.741,00	4.514.568.352,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.561.002.762,00	6.895.544.217,00	1.665.458.545,00
Badan Pendapatan Daerah	12.071.966.205,00	10.662.641.889,00	1.409.324.316,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.020.096.461,00	8.041.890.509,00	978.205.952,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.760.965.527,00	7.632.179.806,00	2.128.785.721,00



SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Inspektorat Daerah	11.495.326.761,00	9.501.488.120,00	1.993.838.641,00
Kecamatan Bontang Utara	22.102.964.045,00	18.916.047.029,00	3.186.917.016,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.591.636.037,00	17.588.764.464,00	3.002.871.573,00
Kecamatan Bontang Barat	11.961.621.270,00	10.351.473.284,00	1.610.147.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.671.679.749,00	4.545.089.076,00	1.126.590.673,00
Jumlah	708.241.008.022,00	585.135.436.816,00	123.105.571.206,00

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.728.274.863,00 (Rp708.241.008.022,00 - Rp709.969.282.885,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4 Selisih Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		(1.728.274.863,00)
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Belanja Pegawai terhadap LO:		38.204.620.782,00
Utang belanja pegawai TA 2023	37.471.465.782,00	
Kapitalisasi honorarium	733.155.000,00	
Pengurangan Belanja Pegawai terhadap LO:		(36.476.345.919,00)
Utang belanja pegawai TA 2024	(32.788.500.972,00)	
Penyesuaian pembayaran utang pegawai RSUD	(3.687.844.947,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		1.728.274.863,00

5.4.2.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa. Beban barang dan jasa terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp1.191.141.230.346,24 mengalami kenaikan sebesar Rp411.777.203.903,26 atau 52,84% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp779.364.026.442,98. Beban barang dan jasa dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.2.1 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan	258.816.574.347,00	145.411.461.488,78	113.405.112.858,22
Beban Jasa	616.348.449.970,02	435.291.739.789,00	181.056.710.181,02



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan	41.673.570.870,22	36.571.315.112,00	5.102.255.758,22
Beban Perjalanan Dinas	274.302.635.159,00	162.089.510.053,20	112.213.125.105,80
Jumlah	1.191.141.230.346,24	779.364.026.442,98	411.777.203.903,26

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp258.816.574.347,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp113.405.112.858,22 atau 77,99% bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp145.411.461.488,78 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.3.1 Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan) (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.173.071.214,00	615.664.159,00	557.407.055,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	490.418.021,00	284.264.089,00	206.153.932,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.226.368.780,00	19.918.811.957,00	2.307.556.823,00
Beban Bahan-Bahan Baku	195.064.540,00	686.760.370,00	(491.695.830,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	0,00	52.931.800,00	(52.931.800,00)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.284.888.327,00	2.340.194.532,00	944.693.795,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	69.999.666,00	268.158.262,00	(198.158.596,00)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.516.796.471,00	71.464.400,00	1.445.332.071,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	107.920.300,00	38.546.500,00	69.373.800,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	21.078.280,00	(21.078.280,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	145.376.360,00	237.974.360,00	(92.598.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	548.819.825,00	33.318.259,00	515.501.566,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	725.000,00	25.257.818,00	(24.532.818,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	100.441.474,00	166.424.127,00	(65.982.653,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	35.577.140,00	74.522.930,00	(38.945.790,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	34.016.450,00	23.071.430,00	10.945.020,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.081.600.659,00	11.661.976.220,00	2.419.624.439,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.072.264.773,00	2.660.732.052,00	411.532.721,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	742.952.000,00	553.466.000,00	189.486.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.637.587.567,00	4.199.089.970,00	(561.502.403,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.768.960.261,00	3.519.282.592,00	249.677.669,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.415.935.757,00	1.285.097.631,00	1.130.838.126,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.768.307.348,00	21.474.076.123,00	4.294.231.225,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	526.483.300,00	1.061.124.560,00	(534.641.260,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.180.064.132,00	4.123.067.293,00	1.056.996.839,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan) (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	243.810.156,00	24.299.425,00	219.510.731,00
Beban Obat-Obatan-Obat	9.659.406.775,00	12.199.534.389,00	(2.540.127.614,00)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	27.103.642,00	50.551.974,00	(23.448.332,00)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.967.918.546,00	22.522.771.289,78	31.445.147.256,22
Beban Natura dan Pakan-Natura	5.440.033.094,00	5.695.785.413,00	(255.752.319,00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	104.186.000,00	138.573.047,00	(34.387.047,00)
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.648.513.245,00	0,00	24.648.513.245,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.623.111.804,00	0,00	4.623.111.804,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.335.654.468,00	0,00	25.335.654.468,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	410.796.000,00	365.505.000,00	45.291.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	307.367.500,00	520.175.000,00	(212.807.500,00)
Beban Pakaian Dinas Harian PDH)	4.730.590.000,00	5.038.978.000,00	(308.388.000,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan PDL)	7.080.528.550,00	5.324.332.570,00	1.756.195.980,00
Beban Pakaian Dinas Upacara PDU)	164.165.000,00	115.927.232,00	48.237.768,00
Beban Pakaian KORPRI	995.841.000,00	341.903.668,00	653.937.332,00
Beban Pakaian Adat Daerah	1.602.624.000,00	1.205.846.120,00	396.777.880,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	8.207.986.000,00	10.587.966.561,00	(2.379.980.561,00)
Beban Pakaian Olahraga	5.433.365.000,00	3.815.162.560,00	1.618.202.440,00
Beban Pakaian Jas/Safari	994.830.000,00	1.154.230.000,00	(159.400.000,00)
Beban Komponen-Komponen Peralatan	175.180.000,00	698.526.576,00	(523.346.576,00)
Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	3.754.751.976,00	1.224.500,00	3.753.527.476,00
Beban Komponen-Attachment	11.646.400,00	37.540.200,00	(25.893.800,00)
Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	68.571.360,00	176.272.250,00	(107.700.890,00)
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	181.618.430,00	0,00	181.618.430,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.522.306.036,00	0,00	11.522.306.036,00
Jumlah	258.816.574.347,00	145.411.461.488,78	113.405.112.858,22

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan harga terakhir.

Tabel 5.4.2.3.2 Beban Persediaan per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.926.695.845,00	13.442.998.612,00	32.483.697.233,00
Dinas Kesehatan	20.407.743.776,00	18.836.705.848,00	1.571.037.928,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.793.908.323,00	393.700.000,00	3.400.208.323,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.348.728.256,00	3.105.300.187,00	3.243.428.069,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.859.478.030,00	2.708.244.547,00	11.151.233.483,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.656.948.001,00	1.013.819.192,00	643.128.809,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.517.817.650,00	1.252.905.105,00	264.912.545,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.382.001.707,00	3.183.168.773,00	198.832.934,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.588.242.404,00	3.807.319.042,00	2.780.923.362,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.352.923.568,00	869.789.418,00	483.134.150,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.023.684.187,00	2.703.868.641,00	2.319.815.546,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	6.860.667.709,00	9.699.984.797,00	(2.839.317.088,00)
Dinas Lingkungan Hidup	12.527.331.513,00	9.042.219.074,00	3.485.112.439,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.719.334.709,00	1.723.632.781,00	(4.298.072,00)
Dinas Perhubungan	7.713.172.951,00	2.462.525.212,00	5.250.647.739,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.671.658.609,00	1.230.225.212,00	441.433.397,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.064.919.590,00	4.638.979.796,00	1.425.939.794,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.557.966.749,00	1.224.175.253,00	333.791.496,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.829.519.632,00	8.617.246.095,00	3.212.273.537,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.201.181.324,00	1.536.912.626,00	664.268.698,00
Sekretariat Daerah	17.805.158.065,00	9.839.540.062,00	7.965.618.003,00
Sekretariat DPRD	9.621.141.257,00	4.453.170.315,00	5.167.970.942,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.663.591.788,00	1.229.748.989,00	1.433.842.799,00
Badan Pendapatan Daerah	2.424.905.112,00	2.683.276.953,00	(258.371.841,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.212.173.903,00	2.115.773.646,00	1.096.400.257,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.349.325.127,00	1.218.971.706,00	1.130.353.421,00
Inspektorat Daerah	1.400.194.679,00	1.040.204.317,00	359.990.362,00
Kecamatan Bontang Utara	18.274.829.269,00	9.989.391.986,78	8.285.437.282,22
Kecamatan Bontang Selatan	22.065.238.032,00	11.912.351.254,00	10.152.886.778,00
Kecamatan Bontang Barat	8.639.132.682,00	4.494.857.216,00	4.144.275.466,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.356.959.900,00	4.940.454.833,00	3.416.505.067,00
Jumlah	258.816.574.347,00	145.411.461.488,78	113.405.112.858,22

Pengakuan Beban Persediaan dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Persediaan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp15.022.573.393,00 (Rp258.816.574.347,00 - Rp243.794.000.954,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Persediaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.3.3 Selisih Beban Persediaan -LO dengan Belanja Persediaan - LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		15.022.573.393,00
Penjelasan Selisih:		



Uraian	Nilai	
Penambahan Belanja Barang terhadap LO:		218.106.763.077,00
Penggunaan Saldo Awal Persediaan	85.863.653.471,00	
Reklasifikasi dari Aset	13.626.863.824,00	
Reklasifikasi dari beban jasa	7.251.432.256,00	
Penerimaan Hibah	5.257.779.945,00	
Penambahan saldo awal persediaan Dinkes	26.215.808,00	
Koreksi belanja	841.300,00	
Reklas dari Aset Tetap ke Ekstrakomptabel	3.191.303.550,00	
Penerimaan Lainnya pada BOS	17.598.800,00	
Reklas dari Beban Hibah	102.690.901.123,00	
Penambahan persediaan tahun 2006 (Laporan No. 000.2.3.2/LAP-Penilaian.079/BPKAD tanggal 24 Desember 2024)	180.173.000,00	
Pengurangan Belanja Barang terhadap LO:		(203.084.189.684,00)
Pencatatan Saldo Akhir Persediaan	(142.602.905.842,00)	
Reklas ke aset	(4.042.174.599,00)	
Reklas ke beban jasa	(10.273.440.529,00)	
Reklasifikasi ke Beban Hibah	(45.450.423.615,00)	
Koreksi karena kesalahan aplikasi SIM Aset	(569.984.425,00)	
Koreksi Belanja Barang	(145.260.674,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		15.022.573.393,00

b. Beban Jasa

Beban Jasa Pemerintah Kota Bontang periode 1 Januari tahun 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp616.348.449.970,02 mengalami kenaikan sebesar Rp181.056.710.181,02 atau 41,59% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2023 sebesar Rp435.291.739.789,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.4.1 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.242.745.731,00	(20.242.745.731,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	3.789.909.275,00	(3.789.909.275,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	19.591.042.843,00	(19.591.042.843,00)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.077.302.500,00	6.571.479.500,00	505.823.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.409.505.000,00	4.885.137.000,00	1.524.368.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	839.900.000,00	398.850.000,00	441.050.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	287.400.000,00	213.829.296,00	73.570.704,00
Beban Honorarium Rohaniwan	51.500.000,00	23.020.923.724,00	(22.969.423.724,00)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.071.000,00	4.860.000,00	1.211.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	515.900.000,00	29.950.000,00	485.950.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	368.300.000,00	584.600.000,00	(216.300.000,00)
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	386.856.038,00	232.000.000,00	154.856.038,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.551.516.682,00	4.495.737.519,00	(2.944.220.837,00)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	736.288.490,00	533.906.950,00	202.381.540,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.098.349.515,00	2.215.055.500,00	18.883.294.015,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.938.520.400,00	3.562.833.500,00	375.686.900,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.811.166.750,00	5.960.920.000,00	850.246.750,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	184.357.750,00	608.190.000,00	(423.832.250,00)
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.451.085.725,00	1.437.994.875,00	1.013.090.850,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.619.491.625,00	2.247.500.000,00	371.991.625,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.273.252.200,00	1.224.149.340,00	1.049.102.860,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	58.102.486.538,00	71.913.319.151,00	(13.810.832.613,00)
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	42.900.000,00	41.900.000,00	1.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.470.873.187,00	24.561.117.608,00	(9.090.244.421,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	11.821.070.962,00	6.711.361.264,00	5.109.709.698,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.346.610.905,00	28.077.764.157,00	(6.731.153.252,00)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	13.049.560.497,00	11.082.468.080,00	1.967.092.417,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)
Beban Jasa Tenaga Supir	163.682.000,00	1.012.884.300,00	(849.202.300,00)
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	250.012.000,00	1.610.062.126,00	(1.360.050.126,00)
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.144.500.000,00	811.300.000,00	333.200.000,00
Beban Jasa Tata Rias	84.775.000,00	129.542.970,00	(44.767.970,00)
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	115.503.000,00	407.343.750,00	(291.840.750,00)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	808.845.334,00	1.417.678.909,00	(608.833.575,00)
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	33.049.093,00	(33.049.093,00)
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	3.519.354.838,00	3.471.124.592,00	48.230.246,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	12.766.753.349,00	6.451.723.723,00	6.315.029.626,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	392.605.091,00	305.701.822,00	86.903.269,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	124.931.290,00	97.843.800,00	27.087.490,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Jasa Kalibrasi	401.954.421,00	218.812.500,00	183.141.921,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	159.652.275,00	145.914.600,00	13.737.675,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	680.810.000,00	395.743.860,00	285.066.140,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	152.035.500,00	5.100.000,00	146.935.500,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	27.032.660.400,00	16.735.839.125,00	10.296.821.275,00
Beban Tagihan Telepon	405.179.051,00	379.874.450,00	25.304.601,00
Beban Tagihan Air	2.367.459.771,00	1.975.349.328,00	392.110.443,00
Beban Tagihan Listrik	23.743.640.491,00	20.009.483.351,00	3.734.157.140,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.608.642.716,00	1.733.554.700,00	(124.911.984,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.036.947.908,00	10.479.007.992,00	2.557.939.916,00
Beban Paket/Pengiriman	43.003.741,00	235.491.717,00	(192.487.976,00)
Beban Penambahan Daya	138.101.510,00	1.240.190.392,00	(1.102.088.882,00)
Beban Registrasi/Keanggotaan	8.980.000,00	8.500.000,00	480.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	727.796.092,00	956.474.888,00	(228.678.796,00)
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	57.750.000,00	(57.750.000,00)
Beban Lembur	207.839.500,00	806.503.500,00	(598.664.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.100.162.784,00	1.253.322.481,00	(153.159.697,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	25.201.648.200,00	23.033.571.500,00	2.168.076.700,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	262.967.600,00	261.010.400,00	1.957.200,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.858.180.825,00	4.520.897.048,00	337.283.777,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	342.596.522,00	648.253.926,00	(305.657.404,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	420.314.284,00	266.435.618,00	153.878.666,00
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	29.659.427,00	70.731.649,00	(41.072.222,00)
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	0,00	709.552.800,00	(709.552.800,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	4.248.110.000,00	1.043.460.000,00	3.204.650.000,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	2.888.714.800,00	0,00	2.888.714.800,00
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	39.939.000,00	136.462.290,00	(96.523.290,00)
Beban Sewa Tractor	0,00	1.155.300,00	(1.155.300,00)
Beban Sewa Excavator	8.640.000,00	7.200.000,00	1.440.000,00
Beban Sewa Alat Pengangkat	63.351.900,00	55.405.600,00	7.946.300,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	643.992.311,00	560.871.530,00	83.120.781,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	136.530.000,00	187.592.220,00	(51.062.220,00)
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	709.354.000,00	512.686.310,00	196.667.690,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	6.756.000,00	0,00	6.756.000,00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	288.867.606,00	181.721.793,00	107.145.813,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.316.648.005,00	4.228.030.870,00	88.617.135,00
Beban Sewa Mebel	270.766.500,00	216.248.105,00	54.518.395,00
Beban Sewa Alat Pembersih	96.480.000,00	0,00	96.480.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.385.621.065,00	1.352.463.615,00	33.157.450,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	653.125.151,00	733.702.909,00	(80.577.758,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	168.214.200,00	108.000.000,00	60.214.200,00
Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	336.021.500,00	0,00	336.021.500,00
Beban Sewa Personal Computer	28.980.000,00	0,00	28.980.000,00
Beban Sewa Baju Pengaman	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.762.871.800,00	1.636.401.400,00	126.470.400,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	336.792.400,00	375.527.920,00	(38.735.520,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	911.302.500,00	859.647.760,00	51.654.740,00
Beban Sewa Taman	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
Beban Sewa Asrama	1.046.816.678,00	1.026.058.960,00	20.757.718,00
Beban Sewa Hotel	778.375.914,00	579.547.694,00	198.828.220,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	174.490.000,00	350.638.900,00	(176.148.900,00)
Beban Sewa Tanaman	109.598.100,00	171.495.493,00	(61.897.393,00)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	567.009.080,00	435.728.780,00	131.280.300,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	99.741.200,00	0,00	99.741.200,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	28.509.000,00	0,00	28.509.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	981.357.137,00	23.322.550,00	958.034.587,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	26.107.200,00	838.350.546,00	(812.243.346,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	(78.832.200,00)	0,00	(78.832.200,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	4.074.076.343,00	(4.074.076.343,00)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	710.258.740,00	(710.258.740,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa	463.788.520,00	96.348.000,00	367.440.520,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi			
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	700.561.800,00	0,00	700.561.800,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.153.111.248,00	0,00	1.153.111.248,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.391.594.600,00	0,00	1.391.594.600,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	78.832.200,00	2.849.508.750,00	(2.770.676.550,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	78.199.000,00	0,00	78.199.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	113.250.000,00	(113.250.000,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	202.831.239,00	144.100.000,00	58.731.239,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	61.335.946.416,00	30.304.208.606,00	31.031.737.810,00
Beban Sosialisasi	0,00	328.840.000,00	(328.840.000,00)
Beban Bimbingan Teknis	131.637.775.116,00	34.118.087.582,00	97.519.687.534,00
Beban Diklat Kepemimpinan	1.481.035.000,00	760.675.000,00	720.360.000,00
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.007.800,00	0,00	5.007.800,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.955.045.500,02	0,00	94.955.045.500,02
Jumlah	616.348.449.970,02	435.291.739.789,00	181.056.710.181,02

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.4.2 Beban Jasa per SKPD

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.023.855.517,00	42.052.834.460,00	26.971.021.057,00
Dinas Kesehatan	50.519.992.613,00	42.270.410.677,00	8.249.581.936,00
Rumah Sakit Umum Daerah	5.593.390.396,00	6.201.166.069,00	(607.775.673,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	17.497.432.514,00	10.147.612.483,00	7.349.820.031,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.789.278.716,00	10.814.054.948,00	2.975.223.768,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.726.880.847,00	4.789.723.547,00	(62.842.700,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.699.111.955,00	1.777.287.779,00	(78.175.824,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.569.835.620,00	9.565.177.073,00	2.004.658.547,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.480.275.703,00	5.775.071.518,00	705.204.185,00
Dinas Ketenagakerjaan	22.644.630.332,00	12.631.101.025,00	10.013.529.307,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	7.112.367.416,00	4.278.057.650,00	2.834.309.766,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	8.051.983.554,00	7.771.677.267,00	280.306.287,00
Dinas Lingkungan Hidup	24.407.204.068,00	21.181.806.361,00	3.225.397.707,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.784.311.299,00	1.955.435.775,00	1.828.875.524,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Dinas Perhubungan	12.185.964.227,00	9.141.283.910,00	3.044.680.317,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.726.154.875,00	19.644.807.001,00	1.081.347.874,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	32.205.994.475,00	23.451.659.762,00	8.754.334.713,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.634.532.619,00	5.711.006.274,00	923.526.345,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	33.873.960.176,00	16.738.870.874,00	17.135.089.302,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.160.861.977,00	3.780.618.051,00	2.380.243.926,00
Sekretariat Daerah	85.516.788.412,00	68.218.277.977,00	17.298.510.435,00
Sekretariat DPRD	25.488.724.750,00	23.312.472.971,00	2.176.251.779,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.063.776.464,00	6.276.301.706,00	(212.525.242,00)
Badan Pendapatan Daerah	5.342.450.198,00	4.342.957.930,00	999.492.268,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.893.868.548,00	9.041.059.021,00	1.852.809.527,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.238.385.293,00	7.553.548.759,00	684.836.534,00
Inspektorat Daerah	1.672.063.319,00	1.214.385.852,00	457.677.467,00
Kecamatan Bontang Utara	41.720.200.315,02	20.162.105.749,00	21.558.094.566,02
Kecamatan Bontang Selatan	37.473.478.137,00	15.832.174.018,00	21.641.304.119,00
Kecamatan Bontang Barat	14.848.113.342,00	10.470.379.017,00	4.377.734.325,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.402.582.293,00	9.188.414.285,00	11.214.168.008,00
Jumlah	616.348.449.970,02	435.291.739.789,00	181.056.710.181,02

Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp784.107.670,00 (Rp616.348.449.970,02 - Rp615.564.342.300,02). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.3 Selisih Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa – LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		784.107.670,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Belanja Jasa terhadap LO:		5.568.857.138,00
Reklas dari Beban Persediaan	3.682.776.768,00	
Reklas dari Aset	1.886.080.370,00	
Pengurangan Belanja Jasa terhadap LO:		4.784.749.468,00
Penambahan Beban Dibayar Dimuka	12.282.398,00	
Reklas ke Aset	4.772.467.070,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		784.107.670,00



c. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran pemeliharaan/perbaikan/perawatan aset tetap agar berada dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.673.570.870,22 mengalami kenaikan sebesar Rp5.102.255.758,22 atau 13,95% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp36.571.315.112,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.5.1 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	413.000,00	0,00	413.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.119.829.602,00	13.010.459.707,00	109.369.895,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.201.235.155,22	21.350.532.082,00	4.850.703.073,22
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.985.167.113,00	1.982.878.583,00	2.288.530,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	43.355.700,00	(43.355.700,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	366.926.000,00	184.089.040,00	182.836.960,00
Jumlah	41.673.570.870,22	36.571.315.112,00	5.102.255.758,22

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.5.2 Beban Pemeliharaan per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.048.389.970,00	2.747.521.923,00	(699.131.953,00)
Dinas Kesehatan	2.690.315.961,00	2.713.482.204,00	(23.166.243,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	8.476.366.581,00	1.822.357.274,00	6.654.009.307,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	3.712.045.777,00	4.887.389.649,00	(1.175.343.872,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	938.901.900,00	881.010.413,00	57.891.487,00
Satuan Polisi Pamong Praja	91.337.000,00	100.177.450,00	(8.840.450,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.812.110,00	138.822.881,00	62.989.229,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	332.045.400,00	529.810.542,00	(197.765.142,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	351.448.870,00	183.737.680,00	167.711.190,00
Dinas Ketenagakerjaan	119.955.000,00	98.489.040,00	21.465.960,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	522.115.300,00	234.828.644,00	287.286.656,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	847.347.550,00	392.826.721,00	454.520.829,00
Dinas Lingkungan Hidup	930.659.466,00	1.020.836.443,00	(90.176.977,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	504.472.159,00	156.619.675,00	347.852.484,00
Dinas Perhubungan	582.011.500,00	1.561.791.694,00	(979.780.194,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	287.566.121,00	354.829.185,00	(67.263.064,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	2.465.719.316,00	2.012.719.959,00	452.999.357,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	388.968.030,00	646.824.742,00	(257.856.712,00)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.098.826.107,00	1.843.906.684,00	254.919.423,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.111.931,00	780.508.291,00	(525.396.360,00)
Sekretariat Daerah	4.101.149.663,00	4.001.216.125,00	99.933.538,00
Sekretariat DPRD	3.638.081.409,00	3.978.250.403,00	(340.168.994,00)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	153.484.043,00	282.877.475,00	(129.393.432,00)
Badan Pendapatan Daerah	341.303.340,00	294.384.190,00	46.919.150,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	921.773.005,00	443.523.493,00	478.249.512,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	145.871.844,00	258.283.851,00	(112.412.007,00)
Inspektorat Daerah	147.275.480,00	148.701.290,00	(1.425.810,00)
Kecamatan Bontang Utara	1.433.163.181,00	2.291.980.015,00	(858.816.834,00)
Kecamatan Bontang Selatan	2.497.159.804,22	1.299.917.726,00	1.197.242.078,22
Kecamatan Bontang Barat	369.742.402,00	350.642.650,00	19.099.752,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.150.650,00	113.046.800,00	(33.896.150,00)
Jumlah	41.673.570.870,22	36.571.315.112,00	5.102.255.758,22

Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.054.574.933,00 (Rp41.673.570.870,22 - Rp42.728.145.803,22). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.5.3 Selisih Beban Pemeliharaan -LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		(1.054.574.933,00)
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:		8.116.601.182,00
Reklas dari Beban Lain-lain	13.000.000,00	
Reklas dari Aset	6.275.562.391,00	
Reklas dari Beban Persediaan	1.828.038.791,00	
Pengurangan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:		9.171.176.115,00
Reklas ke Aset	9.162.081.115,00	
Reklas ke Beban Persediaan	9.095.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(1.054.574.933,00)

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp274.302.635.159,00



mengalami kenaikan sebesar Rp112.213.125.105,80 atau 69,23% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp162.089.510.053,20 dengan perincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.6.1 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	264.080.668.215,00	151.613.566.319,20	112.467.101.895,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.121.446.175,00	5.659.589.121,00	461.857.054,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.919.363.388,00	1.564.525.370,00	354.838.018,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.911.298.378,00	1.824.174.654,00	87.123.724,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	269.859.003,00	1.427.654.589,00	(1.157.795.586,00)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00
Beban perjalanan dinas tetap	0,00	0,00	0,00
Jumlah	274.302.635.159,00	162.089.510.053,20	112.213.125.105,80

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.6.2 Beban Perjalanan Dinas per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.879.774.570,00	10.927.470.850,00	13.952.303.720,00
Dinas Kesehatan	12.675.441.287,00	6.748.179.362,20	5.927.261.924,80
Rumah Sakit Umum Daerah	1.260.212.664,00	1.897.769.687,00	-637.557.023,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.890.442.175,00	3.038.557.479,00	3.851.884.696,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.259.714.214,00	2.775.354.304,00	1.484.359.910,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.176.040.479,00	1.260.330.553,00	915.709.926,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.318.941.987,00	825.798.865,00	493.143.122,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.326.460.981,00	2.350.183.730,00	976.277.251,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.568.570.383,00	3.745.179.860,00	823.390.523,00
Dinas Ketenagakerjaan	3.753.895.297,00	1.468.042.386,00	2.285.852.911,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6.960.638.875,00	3.791.116.739,00	3.169.522.136,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	7.525.944.425,00	5.246.315.961,00	2.279.628.464,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.606.404.659,00	2.209.922.503,00	1.396.482.156,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.834.973.198,00	1.236.588.311,00	1.598.384.887,00
Dinas Perhubungan	4.151.354.740,00	1.758.645.887,00	2.392.708.853,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.134.487.035,00	2.354.028.155,00	2.780.458.880,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	14.523.838.805,00	8.770.810.571,00	5.753.028.234,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.987.493.516,00	2.581.035.047,00	1.406.458.469,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	19.016.719.489,00	10.073.908.469,00	8.942.811.020,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.356.624.190,00	1.356.465.813,00	2.000.158.377,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Sekretariat Daerah	25.853.161.963,00	20.013.927.629,00	5.839.234.334,00
Sekretariat DPRD	24.801.528.249,00	18.085.588.641,00	6.715.939.608,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.026.584.508,00	4.649.177.331,00	1.377.407.177,00
Badan Pendapatan Daerah	2.541.767.283,00	2.679.491.182,00	-137.723.899,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.440.598.857,00	7.468.647.871,00	1.971.950.986,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.155.810.792,00	3.935.414.613,00	220.396.179,00
Inspektorat Daerah	5.935.202.442,00	3.150.636.776,00	2.784.565.666,00
Kecamatan Bontang Utara	19.221.411.007,00	7.214.277.017,00	12.007.133.990,00
Kecamatan Bontang Selatan	15.744.433.033,00	7.686.060.351,00	8.058.372.682,00
Kecamatan Bontang Barat	6.266.202.770,00	3.919.332.937,00	2.346.869.833,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.107.961.286,00	8.871.251.173,00	9.236.710.113,00
Jumlah	274.302.635.159,00	162.089.510.053,20	112.213.125.105,80

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2024 sebesar Rp251.415.467,00 (Rp274.302.635.159,00 - Rp274.051.219.692,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Perjalanan Dinas dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.6.3 Selisih Beban Perjalanan Dinas dalam LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		251.415.467,00
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Belanja Perjalanan Dinas terhadap LO:		410.084.833,00
Reklas dari Aset	410.084.833,00	
Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas terhadap LO:		158.669.366,00
Reklas ke Aset	145.669.366,00	
Koreksi realisasi belanja pada SIPD	13.000.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		251.415.467,00

5.4.2.3 BEBAN BUNGA

Tidak ada realisasi beban bunga pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan tidak adanya Kewajiban Jangka Panjang.

5.4.2.4 BEBAN SUBSIDI

Tidak ada realisasi beban subsidi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**5.4.2.5 BEBAN HIBAH**

Beban Hibah yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp49.938.220.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.150.363.682,00 atau 45,77% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp92.088.583.690,00. Berikut ini perincian Beban Hibah per SKPD.

Tabel 5.4.2.9.1 Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	12.831.931.368,00	34.879.613.000,00	(22.047.681.632,00)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	21.798.069.779,00	(21.798.069.779,00)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.682.378.400,00	19.039.807.186,00	(11.357.428.786,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.919.018.220,00	13.325.148.655,00	(4.406.130.435,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.742.050.000,00	290.278.320,00	1.451.771.680,00
Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	148.642.500,00	(148.642.500,00)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.936.024.750,00	(1.936.024.750,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.815.000,00	670.999.500,00	21.815.500,00
Beban Hibah Dana BOSP	5.651.253.114,00	0,00	5.651.253.114,00
Beban Hibah Dana BOS	10.918.773.906,00	0,00	10.918.773.906,00
Jumlah	49.938.220.008,00	92.088.583.690,00	(42.150.363.682,00)

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.9.2 Beban Hibah per SKPD

Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.746.683.840,00	22.887.734.392,00	2.858.949.448,00
Dinas Kesehatan	500.000.000,00	239.017.994,00	260.982.006,00
Rumah Sakit Umum Daerah	631.653.703,00	0,00	631.653.703,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	279.071.665,00	12.977.125.007,00	(12.698.053.342,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	195.360.000,00	(195.360.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	344.126.820,00	(344.126.820,00)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	1.740.664.750,00	(1.740.664.750,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.742.050.000,00	0,00	1.742.050.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.190.996.400,00	0,00	12.190.996.400,00



Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Sekretariat Daerah	0,00	18.059.148.227,00	(18.059.148.227,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	35.645.406.500,00	(35.645.406.500,00)
Kecamatan Bontang Barat	8.847.764.400,00	0,00	8.847.764.400,00
Jumlah	49.938.220.008,00	92.088.583.690,00	(42.150.363.682,00)

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Persediaan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp46.148.424.304,00 (Rp49.938.220.008,00 - Rp96.086.644.312,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.9.3 Selisih Beban Hibah -LO dengan Belanja Hibah – LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO-LRA		(46.148.424.304,00)
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Belanja Hibah terhadap LO:		56.723.266.650,00
Hibah Barang ke TNI AL Sangatta	434.281.136,00	
Reklas dari Beban Jasa	10.838.561.899,00	
Reklas dari Persediaan	45.450.423.615,00	
Pengurangan Belanja Hibah terhadap LO:		102.871.690.954,00
Reklas ke Beban Persediaan	40.966.000,00	
Reklas ke Aset Tetap	180.789.831,00	
Reklas ke Persediaan	102.649.935.123,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(46.148.424.304,00)

5.4.2.6 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.199.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp446.392.234,00 atau 27,12% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.645.992.234,00.

Tabel 5.4.2.10.1 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.199.600.000,00	965.992.234,00	233.607.766,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non	0,00	180.000.000,00	(180.000.000,00)



Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			
Jumlah	1.199.600.000,00	1.645.992.234,00	(446.392.234,00)

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.199.600.000,00.

5.4.2.7 BEBAN PENYUSUTAN

Beban Penyusutan berasal dari perolehan penyusutan aset pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp343.034.728.084,00. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan. Beban penyusutan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp57.469.898.463,00 atau 20,12% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp285.564.829.621,00. Beban penyusutan aset tetap dapat dirinci sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.13.1 Beban Penyusutan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	137.412.077.625,00	97.695.015.495,00	39.717.062.130,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.478.026.389,00	44.346.154.460,00	4.131.871.929,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.682.163.967,00	137.145.039.989,00	14.537.123.978,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	1.721.785.128,00	1.644.521.336,00	77.263.792,00
Beban Penyusutan Aset Kemitraan	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi	3.740.674.975,00	4.734.098.341,00	(993.423.366,00)
Jumlah	343.034.728.084,00	285.564.829.621,00	57.469.898.463,00

Adapun Beban Penyusutan per SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.13.2 Beban Penyusutan per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.669.910.099,00	15.041.121.642,00	9.628.788.457,00
Dinas Kesehatan	12.619.338.254,00	9.887.893.715,00	2.731.444.539,00
Rumah Sakit Umum Daerah	32.751.255.804,00	23.462.408.284,00	9.288.847.520,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	140.747.450.160,00	131.479.032.746,00	9.268.417.414,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.678.612.733,00	21.501.421.592,00	6.177.191.141,00
Satuan Polisi Pamong Praja	875.143.038,00	665.715.883,00	209.427.155,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.475.667.104,00	1.247.346.397,00	228.320.707,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.732.666.780,00	4.225.111.679,00	507.555.101,00



SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.191.452.387,00	766.194.075,00	425.258.312,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.030.858.966,00	875.833.189,00	155.025.777,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.519.182.281,00	1.362.792.491,00	156.389.790,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	3.305.450.042,00	3.140.755.294,00	164.694.748,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.370.903.243,00	4.309.349.412,00	1.061.553.831,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.510.386,00	902.533.371,00	597.977.015,00
Dinas Perhubungan	4.904.338.019,00	4.029.741.809,00	874.596.210,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.227.891.152,00	2.227.565.756,00	1.000.325.396,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	9.493.658.973,00	10.097.877.219,00	-604.218.246,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.966.557.113,00	1.113.545.300,00	853.011.813,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.932.302.250,00	10.005.615.739,00	1.926.686.511,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.740.543.190,00	1.401.465.066,00	339.078.124,00
Sekretariat Daerah	13.979.166.630,00	11.876.269.551,00	2.102.897.079,00
Sekretariat DPRD	7.862.679.401,00	6.312.618.188,00	1.550.061.213,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.340.140.678,00	1.188.655.392,00	151.485.286,00
Badan Pendapatan Daerah	1.575.617.539,00	1.553.443.193,00	22.174.346,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.508.954.969,00	2.543.273.443,00	-34.318.474,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.514.379.663,00	951.182.289,00	563.197.374,00
Inspektorat Daerah	678.386.976,00	479.233.659,00	199.153.317,00
Kecamatan Bontang Utara	8.293.759.832,00	5.258.511.462,00	3.035.248.370,00
Kecamatan Bontang Selatan	7.813.696.759,00	4.239.502.647,00	3.574.194.112,00
Kecamatan Bontang Barat	3.883.776.898,00	2.979.518.329,00	904.258.569,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	850.476.765,00	439.300.809,00	411.175.956,00
Jumlah	343.034.728.084,00	285.564.829.621,00	57.469.898.463,00

5.4.2.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban penyisihan piutang adalah alokasi pembentukan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang yang dimiliki berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp2.552.523.136,43 mengalami penurunan sebesar Rp1.819.001.325,08 atau 41,61% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp4.371.524.461,51.

Tabel 5.4.2.11.1 Beban penyisihan piutang pendapatan

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak – LO	2.032.239.365,18	4.134.502.564,01	(2.102.263.198,83)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi – LO	520.283.771,25	43.598.957,50	476.684.813,75
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah – LO	0,00	193.422.940,00	(193.422.940,00)
Jumlah	2.552.523.136,43	4.371.524.461,51	(1.819.001.325,08)



5.4.2.9 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.2.10 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp75.960.477.483,47 mengalami penurunan sebesar Rp17.514.216.106,87 atau 18,74% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp93.474.693.590,34. Beban Lain-lain adalah beban yang timbul karena beban barang dan jasa BLUD dan beban barang dan jasa BOS. Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.12.1 Beban Lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.073.478.077,00	10.711.033.835,94	(2.637.555.758,94)
Dinas Kesehatan	0,00	187.450.000,00	(187.450.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	67.886.999.406,47	55.698.244.318,88	12.188.755.087,59
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	0,00	34.250.000,00	(34.250.000,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	817.735.000,00	(817.735.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	112.000.000,00	(112.000.000,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	220.000.000,00	(220.000.000,00)
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,00	147.800.000,00	(147.800.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	0,00	124.687.480,00	(124.687.480,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.358.500.000,00	(1.358.500.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	190.500.000,00	(190.500.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	28.500.000,00	(28.500.000,00)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	13.658.124.586,00	(13.658.124.586,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	74.250.000,00	(74.250.000,00)
Sekretariat Daerah	0,00	2.563.050.000,00	(2.563.050.000,00)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	50.250.000,00	(50.250.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	190.100.000,00	(190.100.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	51.200.000,00	(51.200.000,00)
Kecamatan Bontang Utara	0,00	3.113.548.569,52	(3.113.548.569,52)
Kecamatan Bontang Selatan	0,00	2.885.913.100,00	(2.885.913.100,00)
Kecamatan Bontang Barat	0,00	1.139.556.700,00	(1.139.556.700,00)



SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	101.500.000,00	(101.500.000,00)
Jumlah	75.960.477.483,47	93.474.693.590,34	(17.514.216.106,87)

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

5.4.3.1 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Dalam kegiatan operasional tahun 2024, berdasarkan realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp2.506.575.361.172,87 dan realisasi Beban-LO Rp2.372.067.787.080,14 maka surplus dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp134.507.574.092,73.

5.4.3.2 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.186.273.238,30. Surplus disebabkan karena nilai surplus lebih besar daripada nilai defisit. Surplus dari kegiatan non operasional TA 2024 adalah sebesar Rp47.843.850.889,30, sedangkan defisit dari kegiatan non operasional TA 2024 adalah sebesar Rp46.657.577.651,00. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp135.693.847.331,03. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

5.4.3.3 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari kegiatan non operasional TA 2024 adalah sebesar Rp47.843.850.889,30, mengalami penurunan sebesar Rp23.739.833.164,59 atau 33,16% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp71.583.684.053,89. Surplus dari kegiatan non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

Tabel 5.4.3.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per rincian objek

Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Surplus Tukar Menukar Tanah-LO	1.787.923.599,00	11.886.256.500,00
Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO	3.086.440.819,00	1.047.892.861,00
Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	39.745.988.434,00	36.828.577.854,00
Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	8.295.834,00	5.482.961.089,00
Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	37.728.719,00	0,00
Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.177.473.484,30	16.337.995.749,89
Jumlah	47.843.850.889,30	71.583.684.053,89



Tabel 5.4.3.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per jenis transaksi

Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	44.666.377.405,00	55.245.688.304,00
Hibah Masuk	2.219.388.487,00	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD	42.446.988.918,00	55.243.283.655,00
Reklas antar KIB	0,00	2.404.649,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.177.473.484,30	16.337.995.749,89
Kenaikan Ekuitas Dana Bergulir	128.798.043,42	121.986.951,98
Penerimaan Lain-lain	841.300,00	99.800,00
Mutasi aset antar SKPD	495.762.975,00	1.520.000.000,00
Penambahan Aset dari SILPA BOS	16.786.049,00	0,00
Penilaian BMD	180.173.000,00	11.126.266.000,00
Penyertaan Modal	1.599.768.556,13	3.542.707.171,41
Penyesuaian Piutang	468.834.799,75	1.918.882,50
Penambahan Aset dari Dana Pengembalian TA 2021	51.877.358,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	186.961.357,00	0,00
Kurang Catat Klaim 2023	15.115.892,00	0,00
Reklas antar KIB	29.259.734,00	0,00
Penambahan beban persediaan	0,00	97.444,00
Reklas dari belanja jasa TA 2022 ke Aset Tetap	0,00	24.919.500,00
Pelunasan piutang taspen	3.294.420,00	0,00
Jumlah	47.843.850.889,30	71.583.684.053,89

Tabel 5.4.3.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.663.407,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.219.388.487,00	281.489.866,00
Rumah Sakit Umum Daerah	135.685.919,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	180.173.000,00	345.415.782,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	193.089.449,00	868.037.396,00
Satuan Polisi Pamong Praja	119.069.500,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	99.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.022.975,00	5.466.756.727,00
Dinas Ketenagakerjaan	800,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	0,00	21.514.284,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	0,00	32.124.480,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.509.691.876,00	272.707.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00



SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	9.522.876.901,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	8.035.992.449,00	27.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.530.919.847,00	121.986.951,98
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.738.834.589,00	315.971.164,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.087.443.861,00	711.268.700,00
Sekretariat Daerah	2.695.428.214,00	66.600,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	10.171.281.890,00
Badan Pendapatan Daerah	289.867.982,75	24.919.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.732.238.161,55	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.918.882,50
Inspektorat Daerah	0,00	36.347.954.051,41
Kecamatan Bontang Utara	494.540.500,00	789.001.328,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.563.929.872,00	5.561.804.000,00
Kecamatan Bontang Barat	246.870.000,00	726.462.550,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	47.843.850.889,30	71.583.684.053,89

5.4.3.4 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan non operasional TA 2024 adalah sebesar Rp46.657.577.651,00, mengalami penurunan sebesar Rp45.839.791.648,02 atau 49,56% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp92.497.369.299,02. Defisit dari kegiatan non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.3.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per rincian objek

Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	0,00
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO	0,00	38.914.000,00
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	353.864.300,00	0,00
Defisit Tukar Menukar Tanah-LO	0,00	11.627.956.000,00
Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	1.425.311.930,00	1.880.106.445,00
Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO	35.866.490.525,00	56.432.886.358,00
Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	8.295.834,00	2.878.939.925,00
Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	5.718.140.902,00	4.039.255.760,00
Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	0,00	2.491.327,00
Defisit Penghapusan Aset-LO	0,00	1.621.766.831,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.285.474.160,00	13.975.052.653,02
Jumlah	46.657.577.651,00	92.497.369.299,02



Tabel 5.4.3.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per jenis transaksi

Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(43.372.103.491,00)	(76.900.549.815,00)
Koreksi akumulasi penyusutan	(62.496.623,00)	0,00
Mutasi keluar antar SKPD	(42.955.742.568,00)	(65.650.765.867,00)
Mutasi kurang ekstrakomptabel	0,00	(11.208.378.621,00)
Penjualan Aset	(353.864.300,00)	0,00
Koreksi nilai aset	0,00	(38.914.000,00)
Penghapusan Aset	0,00	(2.491.327,00)
Defisit Penghapusan Aset	0,00	(1.621.766.831,00)
Penghapusan	0,00	(1.621.766.831,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(3.285.474.160,00)	(13.975.052.653,02)
Reklas antar KIB	(15.563.000,00)	0,00
Koreksi persediaan	(569.984.425,00)	0,00
Koreksi input realisasi keuangan	(140.080.674,00)	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan	(500.295.651,00)	(5.314.000,00)
Tolakan Piutang	(239.545.833,00)	(48.880.485,00)
Pembayaran Klaim 2023	(41.677.500,00)	0,00
Koreksi Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji	(11.815.840,00)	0,00
Penghapusan Aset	(1.569.958.622,00)	0,00
Mutasi keluar antar SKPD	(196.552.615,00)	0,00
Koreksi nilai Aset Tetap	0,00	(8.594.451.570,00)
Koreksi belanja barang	0,00	(100.047.348,00)
Pengurangan beban persediaan	0,00	(9.000,00)
Double input realisasi keuangan	0,00	(4.125.000,00)
Kurang bayar Bendahara Selisih SPJ	0,00	(500,00)
Koreksi Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(1.412.533.342,92)
Koreksi Pengurangan Piutang BLUD	0,00	(241.664,00)
Koreksi ekuitas penyertaan modal pada BUMD	0,00	(3.809.449.743,10)
Jumlah	(46.657.577.651,00)	(92.497.369.299,02)

Tabel 5.4.3.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 per SKPD

SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(9.947.400.434,00)	(2.574.898.060,00)
Dinas Kesehatan	(19.922.975,00)	(32.894.439,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	(343.719.956,00)	(48.880.485,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	(27.366.359.312,00)	(51.316.855.472,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(5.776.067.904,00)	(8.390.560.000,00)



SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	(108.647.000,00)	(840.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.150.640,00)	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	(967.198.576,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	(1.023.555,00)	(14.216.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	(8.896.642,00)	(899.853,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.480.893.913,00)	(754.262.820,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(835.714,00)	(191.602.280,00)
Dinas Perhubungan	(418.000,00)	(2.460.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(197.786.901,00)	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	(7.189.368,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(741.163.317,00)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(1.875.417,00)	(14.145.168,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	(487.352.571,00)
Sekretariat Daerah	(161.322.193,00)	(20.850.287.633,00)
Sekretariat DPRD	0,00	(3.885.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	(5.221.983.086,02)
Badan Pendapatan Daerah	(114.301.008,00)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(21.262.090,00)	(5.841.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(70.600,00)	(19.802.400,00)
Inspektorat Daerah	0,00	(3.845.500,00)
Kecamatan Bontang Utara	0,00	(636.430.977,00)
Kecamatan Bontang Selatan	(1.089.434.029,00)	(853.513.154,00)
Kecamatan Bontang Barat	0,00	(263.309.844,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	(46.657.577.651,00)	(92.497.369.299,02)

5.4.3.5 POS LUAR BIASA

Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa yaitu beban luar biasa Rp601.898.058,00 mengalami penurunan sebesar Rp930.173.798,00 atau 60,71% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.532.071.856,00.

5.4.3.6 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 surplus sebesar Rp135.091.949.273,03.



Surplus/Defisit-LO selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.3.6.1 Surplus/Defisit LO per SKPD

SKPD	Pendapatan-LO (Rp)	Beban-LO (Rp)	Surplus/Defisit Non Operasional (Rp)	Beban Luar Biasa (Rp)	Surplus/Defisit LO (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.900.000,00	373.563.055.273,00	(9.878.737.027,00)	0,00	(383.416.892.300,00)
Dinas Kesehatan	6.574.456.145,00	253.789.353.656,00	2.199.465.512,00	0,00	(245.015.431.999,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	110.529.723.822,59	152.524.440.769,47	(208.034.037,00)	0,00	(42.202.750.983,88)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.628.359.279,00	194.791.052.869,00	(27.186.186.312,00)	0,00	(215.348.879.902,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40.551.613.529,00	70.235.316.502,00	(5.582.978.455,00)	0,00	(35.266.681.428,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	17.411.515.704,00	10.422.500,00	0,00	(17.401.093.204,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.048.868.200,00	13.072.906.982,00	(10.150.640,00)	0,00	(9.034.189.422,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	41.336.342.513,00	0,00	0,00	(41.336.342.513,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	29.698.408.413,00	2.022.975,00	0,00	(29.696.385.438,00)
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	35.445.062.383,00	800,00	0,00	(35.445.061.583,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	350.764.000,00	29.743.198.072,00	(1.023.555,00)	0,00	(29.393.457.627,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	105.915.000,00	44.732.605.268,00	(8.896.642,00)	0,00	(44.635.586.910,00)
Dinas Lingkungan Hidup	2.887.264.160,00	58.698.945.493,00	4.028.797.963,00	0,00	(51.782.883.370,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	18.805.370.617,00	(835.714,00)	0,00	(18.806.206.331,00)
Dinas Perhubungan	84.104.000,00	37.586.093.331,00	(418.000,00)	0,00	(37.502.407.331,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	40.775.359.264,00	(197.786.901,00)	0,00	(40.973.146.165,00)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	1.493.068.000,00	78.446.707.438,25	8.028.803.081,00	0,00	(68.924.836.357,25)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.217.476,00	21.400.933.262,00	2.530.919.847,00	0,00	(18.767.795.939,00)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0,00	89.519.620.235,00	1.736.959.172,00	0,00	(87.782.661.063,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	249.782.500,00	21.757.726.642,00	1.087.443.861,00	0,00	(20.420.500.281,00)
Sekretariat Daerah	0,00	189.786.331.445,00	2.534.106.021,00	0,00	(187.252.225.424,00)
Sekretariat DPRD	0,00	98.800.824.159,00	0,00	0,00	(98.800.824.159,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	24.808.580.243,00	0,00	0,00	(24.808.580.243,00)
Badan Pendapatan Daerah	158.350.325.619,95	26.330.249.042,17	175.566.974,75	0,00	132.195.643.552,53



PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Pendapatan-LO (Rp)	Beban-LO (Rp)	Surplus/Defisit Non Operasional (Rp)	Beban Luar Biasa (Rp)	Surplus/Defisit LO (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.173.025.354.571,33	35.997.465.743,01	1.710.976.071,55	601.898.058,00	2.138.136.966.841,87
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	26.164.738.246,00	(70.600,00)	0,00	(26.164.808.846,00)
Inspektorat Daerah	0,00	21.328.449.657,00	0,00	0,00	(21.328.449.657,00)
Kecamatan Bontang Utara	0,00	111.047.531.870,02	494.540.500,00	0,00	(110.552.991.370,02)
Kecamatan Bontang Selatan	1.304.508.870,00	106.184.437.581,22	19.474.495.843,00	0,00	(85.405.432.868,22)
Kecamatan Bontang Barat	264.136.000,00	45.968.589.364,00	246.870.000,00	0,00	(45.457.583.364,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	62.316.575.043,00	0,00	0,00	(62.316.575.043,00)
Jumlah	2.506.575.361.172,87	2.372.067.787.080,14	1.186.273.238,30	601.898.058,00	135.091.949.273,03



5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 untuk seluruh OPD, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri dan FKTP di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Tabel 5.5.1.1.1 Arus Kas Bersih

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Aktivitas Operasi	751.180.349.930,16	894.588.678.318,36	(143.408.328.388,20)
Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(1.050.541.906.167,00)	(660.740.296.737,00)	(389.801.609.430,00)
Aktivitas Pendanaan	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	0,00
Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih	(324.361.556.236,84)	208.848.381.581,36	(533.209.937.818,20)

Dari tabel pada realisasi Arus Kas Bersih TA 2024 sebesar Rp(324.361.556.236,84) atau mengalami penurunan sebesar Rp533.209.937.818,20 atau 255,31% jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp208.848.381.581,36. Realisasi kas bersih dapat rinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2024, Pemerintah Kota Bontang mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus masuk kas sebesar Rp2.816.245.168.356,87 dan jumlah arus keluar kas sebesar Rp2.065.064.818.426,71 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp751.180.349.930,16. Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas 1) Arus Masuk Kas yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya dan 2) Arus Keluar Kas yaitu untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bagi Hasil Retribusi, dan Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

**5.5.1.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi periode 2024 sebesar Rp2.816.245.168.356,87 mengalami kenaikan sebesar Rp368.232.342.734,19 atau 15,04% dibandingkan dengan arus masuk kas periode 2023 Rp2.448.012.825.622,68.

Tabel 5.5.1.1.2 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	150.018.177.986,95	118.218.692.064,81	31.799.485.922,14
Pajak Hotel	1.963.569.861,00	1.624.455.991,50	339.113.869,50
Pajak Restoran	27.409.729.973,00	20.116.052.505,91	7.293.677.467,09
Pajak Hiburan	3.083.552.331,00	1.958.767.487,90	1.124.784.843,10
Pajak Reklame	1.024.663.862,50	1.126.670.784,25	(102.006.921,75)
Pajak Penerangan Jalan	39.605.146.598,00	16.521.395.606,00	23.083.750.992,00
Pajak Parkir	326.859.860,00	323.538.100,00	3.321.760,00
Pajak Air Tanah	8.639.155.610,00	8.000.394.568,00	638.761.042,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.421.862.102,50	724.137.866,25	1.697.724.236,25
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.252.330.108,95	56.179.396.640,00	(48.927.066.531,05)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	58.290.257.680,00	11.642.832.515,00	46.647.425.165,00
Penerimaan Retribusi Daerah	107.833.253.435,03	2.961.878.370,00	104.871.375.065,03
Retribusi Jasa Umum	106.171.528.459,03	1.946.256.870,00	104.225.271.589,03
Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.780.515.944,03	672.066.600,00	102.108.449.344,03
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.445.499.640,00	302.782.700,00	2.142.716.940,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	84.104.000,00	119.998.000,00	(35.894.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	708.158.875,00	434.333.750,00	273.825.125,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	194.128.500,00	(194.128.500,00)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	39.307.640,00	(39.307.640,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	153.250.000,00	119.350.000,00	33.900.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	44.028.000,00	(44.028.000,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	20.261.680,00	(20.261.680,00)
Retribusi Jasa Usaha	1.559.507.500,00	947.309.000,00	612.198.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	289.260.000,00	0,00	289.260.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	769.310.000,00	832.044.000,00	(62.734.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan	75.605.000,00	94.865.000,00	(19.260.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.310.000,00	20.400.000,00	9.910.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	395.022.500,00	0,00	395.022.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	102.217.476,00	68.312.500,00	33.904.976,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	102.217.476,00	68.312.500,00	33.904.976,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.137.180.321,93	3.487.431.779,72	649.748.542,21
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.137.180.321,93	3.487.431.779,72	649.748.542,21
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	66.245.438.500,08	139.459.759.861,15	(73.214.321.361,07)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	640.000.000,00	4.156.556.204,00	(3.516.556.204,00)
Jasa Giro	7.326.075.246,14	12.782.709.643,66	(5.456.634.397,52)
Pendapatan Bunga	47.327.839.264,92	12.111.214.686,00	35.216.624.578,92
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.520.000,00	0,00	50.520.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.805.925.991,56	1.115.765.610,00	1.690.160.381,56
Pendapatan Denda Pajak Daerah	624.463.439,00	642.188.899,00	(17.725.460,00)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	316.520,00	1.450.770,00	(1.134.250,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.133.811.933,00	25.000.000,00	1.108.811.933,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.687.794.809,90	1.849.474.046,82	838.320.763,08
Pendapatan BLUD	3.648.691.295,56	106.051.855.623,67	(102.403.164.328,11)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	723.544.378,00	(723.544.378,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	173.553.679.000,00	137.901.212.119,50	35.652.466.880,50
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	109.809.092.000,00	81.531.294.504,50	28.277.797.495,50
DBH PPh Pasal 21	62.707.021.000,00	55.321.097.068,00	7.385.923.932,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.037.545.000,00	1.048.767.262,00	(11.222.262,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau CHT)	21.000,00	53.285,00	(32.285,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.515.746.095.989,00	1.396.592.239.499,50	119.153.856.489,50
DBH Sumber Daya Alam SDA) Minyak Bumi	21.801.752.000,00	41.899.417.484,00	(20.097.665.484,00)
DBH Sumber Daya Alam SDA) Gas Bumi	60.633.754.000,00	56.191.071.022,50	4.442.682.977,50
DBH Sumber Daya Alam SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil DBH) Sumber Daya Alam SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.425.674.445.989,00	1.283.478.387.986,50	142.196.058.002,50
DBH Sumber Daya Alam SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan PSDH)	21.000,00	13.187.201.190,00	(13.187.180.190,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
DBH Sumber Daya Alam SDA) Perikanan	1.321.545.000,00	1.836.161.816,50	(514.616.816,50)
DBH Sawit	6.314.599.000,00	0,00	6.314.599.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	267.889.833.686,00	240.542.351.201,00	27.347.482.485,00
DAU	240.115.011.000,00	211.923.005.201,00	28.192.005.799,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.852.703.686,00	25.619.346.000,00	(15.766.642.314,00)
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.731.924.000,00	0,00	8.731.924.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5.218.839.000,00	0,00	5.218.839.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	971.356.000,00	0,00	971.356.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	80.829.609.598,00	65.590.084.613,00	15.239.524.985,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK) Fisik	14.833.297.689,00	9.498.072.964,00	5.335.224.725,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus DAK) Non Fisik	65.996.311.909,00	56.092.011.649,00	9.904.300.260,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	13.164.686.000,00	16.446.800.000,00	(3.282.114.000,00)
DID	0,00	16.446.800.000,00	(16.446.800.000,00)
Insentif Fiskal	13.164.686.000,00	0,00	13.164.686.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	228.337.342.164,00	259.257.683.219,00	(30.920.341.055,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.446.388.000,00	26.834.922.000,00	2.611.466.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.439.072.000,00	25.434.765.000,00	4.004.307.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	155.646.952.000,00	193.683.209.000,00	(38.036.257.000,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	224.223.000,00	245.352.000,00	(21.129.000,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.580.707.164,00	13.059.435.219,00	521.271.945,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	132.982.740.000,00	0,00	132.982.740.000,00
Penerimaan Hibah	2.296.338.156,60	67.554.692.895,00	(65.258.354.738,40)
Bantuan Keuangan	0,00	58.800.000.000,00	(58.800.000.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.296.338.156,60	426.290.844,00	1.870.047.312,60
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	8.328.402.051,00	(8.328.402.051,00)
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	73.210.793.519,28	0,00	73.210.793.519,28
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.097.907.131,00	0,00	7.097.907.131,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	65.783.434.869,69	0,00	65.783.434.869,69
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	329.451.518,59	0,00	329.451.518,59
Jumlah Arus Masuk Kas	2.816.245.168.356,87	2.448.012.825.622,68	368.232.342.734,19

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**5.5.1.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp2.065.064.818.426,71 mengalami kenaikan sebesar Rp511.640.671.122,39 atau 32,94% dibandingkan arus keluar kas aktivitas operasi TA 2024 sebesar Rp1.553.424.147.304,32.

Tabel 5.5.1.2.3 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pembayaran Pegawai	709.969.282.885,00	571.593.451.714,00	138.375.831.171,00
Belanja Gaji dan tunjangan ASN	247.905.121.134,00	208.095.145.108,00	39.809.976.026,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	361.006.155.519,00	271.338.776.387,00	89.667.379.132,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.683.074.803,00	38.223.396.916,00	4.459.677.887,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.853.972.812,00	16.663.742.675,00	1.190.230.137,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.022.988.813,00	1.014.951.614,00	8.037.199,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	839.720.000,00	801.600.000,00	38.120.000,00
Belanja Pegawai BLUD	38.658.249.804,00	35.455.839.014,00	3.202.410.790,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.257.207.393.171,71	867.525.260.190,32	389.682.132.981,39
Belanja Barang	243.794.000.954,00	193.193.652.793,78	50.600.348.160,22
Belanja Jasa	520.606.676.800,00	387.634.548.687,00	132.972.128.113,00
Belanja Perjalanan Dinas	42.728.145.803,22	162.283.518.899,20	(119.555.373.095,98)
Belanja Pemeliharaan	274.051.219.692,00	36.376.204.322,00	237.675.015.370,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.957.665.500,02	26.797.277.955,52	68.160.387.544,50
Belanja Barang dan Jasa BOS	8.073.478.077,00	12.787.077.607,94	(4.713.599.530,94)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	72.996.206.345,47	48.452.979.924,88	24.543.226.420,59
Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	96.086.644.312,00	111.127.371.310,00	(15.040.726.998,00)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	58.768.148.276,00	75.622.504.967,00	(16.854.356.691,00)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.343.446.620,00	34.833.866.843,00	(16.490.420.223,00)
Belanja Hibah Dana BOS	11.130.981.302,00	0,00	11.130.981.302,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.815.000,00	670.999.500,00	21.815.500,00
Belanja Hibah Dana BOSP	5.651.253.114,00	0,00	5.651.253.114,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.199.600.000,00	1.645.992.234,00	(446.392.234,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.199.600.000,00	965.992.234,00	233.607.766,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	0,00	180.000.000,00	(180.000.000,00)



Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	601.898.058,00	1.532.071.856,00	(930.173.798,00)
Belanja Tidak Terduga	601.898.058,00	1.532.071.856,00	(930.173.798,00)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.065.064.818.426,71	1.553.424.147.304,32	511.640.671.122,39

Pada akun belanja pegawai dan belanja barang dan jasa termasuk di dalamnya adalah belanja dari dana BLUD, JKN dan BOS yang terdiri dari:

Tabel 5.5.1.2.4 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi BLUD, JKN, BOK, BOS

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Pegawai	39.680.065.039,00	38.375.034.325,00	1.305.030.714,00
BLUD	38.658.249.804,00	35.455.839.014,00	3.202.410.790,00
JKN	1.019.733.235,00	2.919.195.311,00	(1.899.462.076,00)
BOK	0,00	0,00	0,00
BOS	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
Belanja Barang Jasa	90.334.015.554,47	72.588.589.091,02	17.745.426.463,45
BLUD	72.996.206.345,47	48.452.979.924,88	24.543.226.420,59
JKN	1.571.208.242,00	5.490.970.844,20	(3.919.762.602,20)
BOK	1.961.059.934,00	0,00	1.961.059.934,00
BOS	13.805.541.033,00	18.644.638.321,94	(4.839.097.288,94)

5.5.1.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp751.180.349.930,16 mengalami penurunan sebesar Rp143.408.328.388,20 atau 16,03% dibandingkan arus kas bersih aktivitas operasi TA 2023 sebesar Rp894.588.678.318,36.

Tabel 5.5.1.3.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Arus Masuk Kas	2.816.245.168.356,87	2.448.012.825.622,68	368.232.342.734,19
Arus Keluar Kas	2.065.064.818.426,71	1.553.424.147.304,32	511.640.671.122,39
Jumlah Arus Kas Bersih	751.180.349.930,16	894.588.678.318,36	(143.408.328.388,20)



5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Bontang di masa yang akan datang. Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas 1) Arus Masuk Kas: Pendapatan Penjualan atas Tanah, Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen dan Penerimaan Kembali Penyertaan modal Daerah 2) Arus Keluar Kas: Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembiayaan Fasilitas Perumahan.

5.5.2.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp1.423.226.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.129.559.400,00 atau 384,64% dibandingkan arus masuk kas aktivitas investasi TA 2023 sebesar Rp293.666.800,00.

Tabel 5.5.2.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.423.226.200,00	293.666.800,00	1.129.559.400,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.165.754.200,00	280.014.800,00	885.739.400,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	257.472.000,00	13.652.000,00	243.820.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.423.226.200,00	293.666.800,00	1.129.559.400,00

5.5.2.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus keluar kas dari aktivitas investasi TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp1.051.965.132.367,00 mengalami kenaikan sebesar Rp390.931.168.830,00 atau



59,14% dibandingkan arus keluar kas aktivitas investasi aset non keuangan TA 2023 sebesar Rp661.033.963.537,00.

Tabel 5.5.2.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Perolehan Tanah	5.263.015.170,00	1.520.000.000,00	3.743.015.170,00
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	1.520.000.000,00	(1.520.000.000,00)
Belanja Modal Tanah Non Persil	96.650.000,00	0,00	96.650.000,00
Belanja Modal Lapangan	5.166.365.170,00	0,00	5.166.365.170,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	243.101.129.946,00	245.818.086.686,00	(2.716.956.740,00)
Belanja Modal Alat Besar Darat	660.000.000,00	18.307.106.700,00	(17.647.106.700,00)
Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	4.824.615.000,00	(4.824.615.000,00)
Belanja Modal Alat Bantu	4.510.782.850,00	6.228.234.200,00	(1.717.451.350,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.361.888.736,00	46.997.620.880,00	(29.635.732.144,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	265.468.747,00	351.024.800,00	(85.556.053,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	69.200.000,00	481.320.000,00	(412.120.000,00)
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	288.564.932,00	210.640.801,00	77.924.131,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	92.702.080,00	173.087.590,00	(80.385.510,00)
Belanja Modal Alat Ukur	107.397.730,00	511.894.070,00	(404.496.340,00)
Belanja Modal Alat Pengolahan	562.690.000,00	63.460.125,00	499.229.875,00
Belanja Modal Alat Kantor	15.491.672.134,00	10.069.430.042,00	5.422.242.092,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.768.561.514,00	45.477.412.200,00	14.291.149.314,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.006.793.301,00	1.354.887.760,00	(348.094.459,00)
Belanja Modal Alat Studio	43.115.254.585,00	14.202.583.150,00	28.912.671.435,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	3.048.213.229,00	2.080.654.130,00	967.559.099,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	106.905.000,00	208.496.600,00	(101.591.600,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran	24.870.836.344,00	44.926.760.989,00	(20.055.924.645,00)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.513.947.255,00	2.080.839.350,00	2.433.107.905,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	2.900.000,00	(2.900.000,00)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	80.950.000,00	0,00	80.950.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	114.780.741,00	132.788.000,00	(18.007.259,00)
Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	14.174.700,00	0,00	14.174.700,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	371.571.000,00	405.215.690,00	(33.644.690,00)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Komputer Unit	33.523.196.884,00	21.461.257.090,00	12.061.939.794,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	23.469.097.228,00	7.968.044.668,00	15.501.052.560,00
Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)
Belanja Modal Sumur	0,00	2.658.691.468,00	(2.658.691.468,00)
Belanja Modal Alat Pelindung	415.092.500,00	408.923.550,00	6.168.950,00
Belanja Modal Alat SAR	3.059.874.231,00	1.265.272.400,00	1.794.601.831,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	953.201.270,00	516.589.083,00	436.612.187,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	544.790.550,00	510.345.527,00	34.445.023,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	189.779.700,00	2.528.577.344,00	(2.338.797.644,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	326.803.558,00	0,00	326.803.558,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.196.939.147,00	9.398.413.479,00	(5.201.474.332,00)
Perolehan Gedung dan Bangunan	259.132.176.018,00	118.003.698.038,00	141.128.477.980,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	238.489.325.981,00	103.951.786.380,00	134.537.539.601,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.267.951.855,00	0,00	2.267.951.855,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	16.845.356.476,00	6.478.464.206,00	10.366.892.270,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	241.947.532,00	0,00	241.947.532,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.287.594.174,00	7.573.447.452,00	(6.285.853.278,00)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	537.738.283.319,00	289.457.351.037,00	248.280.932.282,00
Belanja Modal Jalan	224.479.022.313,00	154.943.942.534,00	69.535.079.779,00
Belanja Modal Jembatan	22.378.824.802,00	7.561.115.912,00	14.817.708.890,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	728.516.948,00	434.268.256,00	294.248.692,00
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.259.228.429,00	706.775.946,00	1.552.452.483,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	195.478.637.252,00	58.124.301.572,00	137.354.335.680,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.073.378.402,00	673.862.640,00	24.399.515.762,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	31.219.405.492,00	35.507.073.018,00	(4.287.667.526,00)
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	256.822.000,00	111.619.500,00	145.202.500,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.774.514.411,00	2.494.216.406,00	1.280.298.005,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.048.901.808,00	787.982.453,00	260.919.355,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	24.124.273.189,00	11.443.523.700,00	12.680.749.489,00

Catatan atas Laporan Keuangan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	1.571.786.731,00	(1.571.786.731,00)
Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.520.008.273,00	12.514.968.758,00	(5.994.960.485,00)
Belanja Modal Jaringan Listrik	396.750.000,00	2.581.913.611,00	(2.185.163.611,00)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.130.404.098,00	4.390.143.417,00	740.260.681,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	755.530.975,00	2.032.189.870,00	(1.276.658.895,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	540.193.168,00	0,00	540.193.168,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	617.967.235,00	13.875.000,00	604.092.235,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.537.000.000,00	0,00	1.537.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	116.476.720,00	132.655.320,00	(16.178.600,00)
Belanja Modal Tanaman	1.563.236.000,00	1.261.664.500,00	301.571.500,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	949.758.727,00	(949.758.727,00)
Perolehan Aset Lainnya	1.600.123.816,00	1.844.684.359,00	(244.560.543,00)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.462.123.816,00	1.694.684.359,00	(232.560.543,00)
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	138.000.000,00	150.000.000,00	(12.000.000,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	1.051.965.132.367,00	661.033.963.537,00	390.931.168.830,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan termasuk di dalamnya belanja modal dari Belanja Modal BLUD, Kapitasi JKN dan BOS sebesar Rp8.952.717.313,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.2.1.3 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi BLUD, JKN, BOS

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal BLUD	5.622.533.321,00	17.121.860.931,00	(11.499.327.610,00)
Belanja Modal Kapitasi JKN	545.214.257,00	441.897.000,00	103.317.257,00
Belanja Modal BOK	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BOS	2.784.969.735,00	4.560.767.214,00	(1.775.797.479,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	8.952.717.313,00	22.124.525.145,00	(13.171.807.832,00)

5.5.2.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar (Rp1.050.541.906.167,00) mengalami penurunan sebesar Rp389.801.609.430,00 atau 58,99% dibandingkan arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan TA 2023 sebesar (Rp660.740.296.737,00).



Tabel 5.5.2.3.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Arus Masuk Kas	1.423.226.200,00	293.666.800,00	1.129.559.400,00
Arus Keluar Kas	1.051.965.132.367,00	661.033.963.537,00	390.931.168.830,00
Jumlah Arus Kas Bersih	(1.050.541.906.167,00)	(660.740.296.737,00)	(389.801.609.430,00)

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pembiayaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

5.5.3.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan TA 2024 Pemerintah Kota Bontang adalah nihil demikian juga dengan arus masuk kas pembiayaan TA 2023 yang nihil.

Tabel 5.5.3.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00

5.5.3.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp25.000.000,00 berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sama dengan TA 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00.

Tabel 5.5.3.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00

5.5.3.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan TA 2024 adalah sebesar (Rp25.000.000.000,00) berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sama dengan TA 2023 sebesar (Rp25.000.000.000,00).

Tabel 5.5.3.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	0,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

**5.5.4.1 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN**

Arus masuk kas dari Aktivitas Non Anggaran TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp21.308.333.227,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.387.533.071,00 atau 25,74% dibandingkan dengan arus masuk kas Aktivitas Transitoris TA 2023 sebesar Rp28.695.866.298,00.

Tabel 5.5.4.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK)	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)
Jumlah Arus Masuk Kas	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)

Tabel 5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
IWP Terusan	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes 1%	0,00	504.666.786,00	(504.666.786,00)
Iuran Askes 2%	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes 3%	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes 4%	0,00	8.034.115.677,00	(8.034.115.677,00)
Iuran BPJS Kesehatan Non PNS 1%	0,00	24.873.604,00	(24.873.604,00)
Iuran BPJS Kesehatan Non PNS 4%	0,00	102.677.602,00	(102.677.602,00)
BPJS Kesehatan PNS	5.951.493.133,00	0,00	5.951.493.133,00
BPJS Kesehatan PPPK	1.385.713.954,00	0,00	1.385.713.954,00
Iuran IWP 1%	1.834.302.435,00	1.502.779.313,00	331.523.122,00
Iuran IWP 2%	0,00	1.200.269,00	(1.200.269,00)
Iuran IWP 8%	10.754.524.868,00	10.080.361.006,00	674.163.862,00
Iuran IWP 3,25%	1.019.471.859,00	0,00	1.019.471.859,00
Iuran Kurang Bayar BPJS Kesehatan PNS 1%	0,00	317.627,00	(317.627,00)
Iuran Taperum	0,00	0,00	0,00
Kompensasi PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 21	0,00	3.441.935.840,00	(3.441.935.840,00)
PPh Pasal 21 (15%)	0,00	1.847.465.632,00	(1.847.465.632,00)
PPh Pasal 21 (5%)	0,00	1.978.251.842,00	(1.978.251.842,00)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	362.826.978,00	294.304.572,00	68.522.406,00
Iuran Jaminan Kematian JKM)	0,00	882.916.528,00	(882.916.528,00)
Jumlah	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)

5.5.4.2 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus keluar kas dari Aktivitas Non Anggaran TA 2024 Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp21.308.333.227,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.387.533.071,00 atau



25,74% dibandingkan dengan arus keluar kas Aktivitas Non Anggaran TA 2023 sebesar Rp28.695.866.298,00.

Tabel 5.5.4.1.3 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (Transito)	0,00	000	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)

Tabel 5.5.4.1.4 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
IWP Terusan	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes 1%	0,00	504.666.786,00	(504.666.786,00)
Iuran Askes 2%	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes 3%	0,00	0,00	0,00
Iuran Askes 4%	0,00	8.034.115.677,00	(8.034.115.677,00)
Iuran BPJS Kesehatan Non PNS 1%	0,00	24.873.604,00	(24.873.604,00)
Iuran BPJS Kesehatan Non PNS 4%	0,00	102.677.602,00	(102.677.602,00)
BPJS Kesehatan PNS	5.951.493.133,00	0,00	5.951.493.133,00
BPJS Kesehatan PPPK	1.385.713.954,00	0,00	1.385.713.954,00
Iuran IWP 1%	1.834.302.435,00	1.502.779.313,00	331.523.122,00
Iuran IWP 2%	0,00	1.200.269,00	(1.200.269,00)
Iuran IWP 8%	10.754.524.868,00	10.080.361.006,00	674.163.862,00
Iuran IWP 3,25%	1.019.471.859,00	0,00	1.019.471.859,00
Iuran Kurang Bayar BPJS Kesehatan PNS 1%	0,00	317.627,00	(317.627,00)
Iuran Taperum	0,00	0,00	0,00
Kompensasi PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 21	0,00	3.441.935.840,00	(3.441.935.840,00)
PPh Pasal 21 (15%)	0,00	1.847.465.632,00	(1.847.465.632,00)
PPh Pasal 21 (5%)	0,00	1.978.251.842,00	(1.978.251.842,00)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	362.826.978,00	294.304.572,00	68.522.406,00
Iuran Jaminan Kematian JKM)	0,00	882.916.528,00	(882.916.528,00)
Jumlah	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)

5.5.4.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan TA 2023 Rp0,00.



Tabel 5.5.4.1.5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Arus Masuk Kas	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)
Arus Keluar Kas	21.308.333.227,00	28.695.866.298,00	(7.387.533.071,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	0,00	0,00	0,00

5.5.5 KENAIKAN PENURUNAN KAS

Kenaikan/(Penurunan) Kas bersih selama TA 2024 dan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.5.4.1.6 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	751.180.349.930,16	894.588.678.318,36	(143.408.328.388,20)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(1.050.541.906.167,00)	(660.740.296.737,00)	(389.801.609.430,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	(0,00)
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	0,00	0,00	(0,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	(324.361.556.236,84)	208.848.381.581,36	(533.209.937.818,20)

5.5.6 SALDO AWAL KAS

Saldo awal kas TA 2024 sebesar Rp605.260.697.136,10 merupakan saldo akhir TA 2023 yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.4.1.7 Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	584.521.534.086,41	381.627.410.623,70
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	183.900,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	17.728.342.936,55	12.707.167.182,76
Kas Dana BOS	1.946.947.502,60	1.568.651.168,48
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.063.872.610,54	509.118.604,80
Jumlah	605.260.697.136,10	396.412.531.479,74

5.5.7 KOREKSI SALDO AWAL KAS

Pada tahun anggaran 2024 terdapat koreksi saldo awal kas sebesar Rp1.258.376.998,00 yang merupakan saldo kas BOK Kesehatan pada Puskesmas tahun 2023 yang belum dicatat sebagai SiLPA, sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat koreksi saldo awal kas.

5.5.8 SALDO AKHIR KAS

Saldo awal kas per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp605.260.697.136,10 merupakan saldo awal kas di kas daerah, saldo awal kas di BLUD, saldo awal kas di Bendahara FKTP dan saldo awal kas di BOS per 1 Januari 2024. Perubahan saldo kas di Kas



Daerah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah penurunan sebesar Rp324.361.556.236,84 dengan koreksi saldo awal sebesar Rp1.258.376.998,00. Saldo akhir kas merupakan posisi kas dan setara kas pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp282.157.517.897,26 terdiri dari:

Tabel 5.5.8.1.1 Saldo Akhir Kas

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Kas di BUD/ Kas Daerah	273.607.969.471,45	584.521.534.086,41
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN dan BOK di FKTP	2.174.070.072,60	1.946.947.502,60
Kas Dana BOS	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54
Saldo Kas Akhir	282.157.517.897,26	605.260.697.136,10

**5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2024. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.566.820.425.827,60.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp6.426.705.075.436,57.
- b. Surplus/Defisit LO
Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 adalah Rp135.091.949.273,03.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dipengaruhi Lain-lain sebesar Rp5.023.401.118,00.

Tabel 5.6.1.1.1 Penjelasan Lain-lain yang Menyebabkan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SKPD

Nama SKPD	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
Dinas Kesehatan	1.284.592.806,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.687.844.947,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	50.962.765,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	600,00	0,00
Jumlah	5.023.401.118,00	0,00

Sedangkan perubahan ekuitas ini berdasarkan transaksi yang menjadi penyebab dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

Tabel 5.6.1.1.2 Penjelasan Lain-lain yang Menyebabkan Perubahan Ekuitas

Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
Saldo Awal BOK	1.258.376.998,00	0,00
Penyesuaian pembayaran utang pegawai APBD	3.687.844.947,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan	26.215.808,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	50.962.765,00	0,00
Selisih pengakuan dan pelunasan utang belanja pegawai	600,00	0,00
Jumlah	5.023.401.118,00	0,00

- d. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Rp6.566.820.425.827,60.



5.7 PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG BELUM DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Pengungkapan informasi yang belum disampaikan dalam lembar muka laporan keuangan merupakan kejadian penting yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi pelaporan keuangan baik pada OPD terkait maupun Pemerintah Kota Bontang.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bontang memiliki sejumlah perkara hukum yang masih dalam proses di pengadilan maupun mahkamah konstitusi. Daftar perkara hukum disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.7.1.1.1 Daftar Proses Hukum Yang Masih Berjalan Pada Pemerintah Kota Bontang

No	Penggugat/Pemohon	Isi Gugatan/ Permohonan	Tergugat/Pemohon	Status
1.	Yoseph S. Sitompul (perkara nomor: 4/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan di Sungai Siagian	Wali Kota Bontang	Putusan Inkrach (Penggugat Tidak melakukan banding)
2.	Johansyah (perkara nomor: 10/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan tumpang tindih di Jln. K.S. Tubun	Camat Bontang Utara	Putusan
3.	Indhra Mahardika (perkara nomor: 11/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan tumpang tindih di Kelurahan Bontang Kuala	Camat Bontang Utara	Putusan
4.	YKHT (perkara nomor: 24/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan di Wisma Atlet, Kelurahan Belimbing	Wali Kota Bontang	Banding
5.	M.Toyib (perkara nomor: 27/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja di Sungai Telihan	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
6.	Faisal Rizal (perkara nomor: 28/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (pemasangan tiang listrik di Loktuan)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
7.	Risfani (perkara nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (Normalisasi sungai kayu mas)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
8	Sri Wahyuni (perkara nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (drainase turap kelurahan guntung)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
9.	M.Jeri Maulana (perkara nomor: 31/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (Taman median Jln. Slamet Riyadi dan Jln. R.E. Martadinata)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
10.	M.Jeri Maulana (perkara nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (Normalisasi sungai guntung)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
11.	M.Rian (perkara nomor: 35/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (Pekerjaan Parit Pasangan Batu Kota Bontang)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
12.	CV.Tandung Mayang (perkara nomor: 38/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (pembuatan parit di Jln. Bung Karno V dan Jln.Bung Karno VI)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
13.	CV. Widas Perkasa (perkara nomor: 39/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (pembuatan drainase pasang batu gunung RT.28 Kelurahan Api-api)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O



PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Penggugat/Pemohon	Isi Gugatan/ Permohonan	Tergugat/Pemohon	Status
14.	CV. Putra Kharisma (perkara nomor: 40/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja peningkatan jalan damai kelurahan telihan)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
15.	CV.Khosugi (perkara nomor: 41/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (pembuatan parit pasang batu belakang perumahan country wood)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
16.	CV. Rana Gemilang (perkara nomor: 42/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (normalisasi dan penurapan sungai pasar telihan)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
17.	PT. Kelapindo (perkara nomor: 43/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan proyek tanpa surat perintah kerja (pembangunan turap samping SMKN 4/SMKN 3)	Kepala Dinas PUPRK	Putusan N.O
18.	Yoseph S. Sitompul (perkara nomor: 47/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan di Sungai Siagian	Wali Kota Bontang	Proses persidangan (bukti tertulis)
19.	Andi Abdul Wahab (perkara nomor: 48/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan di Jln. Arif Rahman Hakim	Camat Bontang Barat	Pencabutan gugatan
20.	Andi Abdul Wahab (perkara nomor: 48/Pdt.G/2024/PN.BON)	Permasalahan lahan di Jln. Arif Rahman Hakim	Lurah Belimbing	Pencabutan gugatan
21.	Drs. Naim (perkara TUN Nomor:30/G/TF/2024/PTUN.SMD	Permasalahan pembongkaran warung terapung di pelabuhan Loktuan	Lurah Loktuan	Proses persidangan (Duplik)

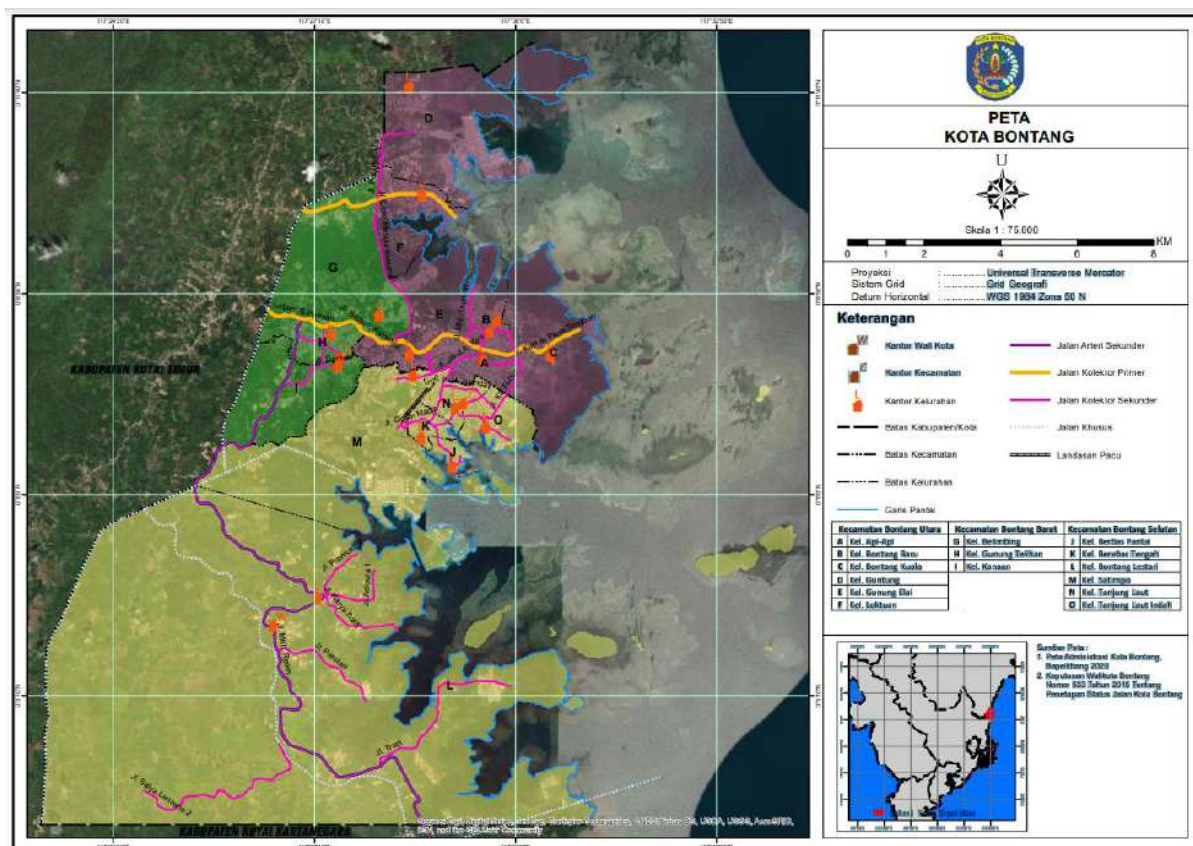
BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

Pada awalnya, Bontang merupakan kota administratif di wilayah Kabupaten Kutai. Kota Bontang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang. Secara geografis, Kota Bontang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat, berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Selatan. Secara astronomis, Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. Luas Wilayah Kota Bontang tercatat 161,87km² dengan ketinggian di atas permukaan laut (DPL) berkisar 0-125 meter. Luas per wilayah kecamatan adalah sebagai berikut ini:

- Bontang Selatan 110,91 km²
- Bontang Utara 33,03 km²
- Bontang Barat 17,93 km²

Luas Bontang merupakan luas terkecil apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.



6.1 GAMBARAN UMUM DAERAH

6.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang. Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 161,88 km². Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah yang terluas (110,91 km²), disusul Kecamatan Bontang Utara (33,03 km²) dan Kecamatan Bontang Barat (17,94 km²). Adapun batas wilayah administratif, yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Pandan – Kab. Kutai Timur.
- Sebelah Timur : Selat Makassar.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marang Kayu – Kab. Kutai Timur.
- Sebelah Barat : Kecamatan Teluk Pandan – Kab. Kutai Timur.

6.1.2 TOPOGRAFI KOTA BONTANG

Topografi wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara topografi kawasan Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0 – 120 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lereng yang bervariasi dan terdiri dari sebagian besar wilayah daratan dan beberapa wilayah berupa pulau-pulau kecil. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Kota Bontang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi dari pantai Timur dan Selatan hingga bagian Barat. Kemiringan lahan datar antara 0% - 2% mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79%. Kemiringan lahan bergelombang antara 3% - 15% seluas 4.001 ha atau 27,07%, serta luas lahan dengan kemiringan curam antara 16% - 40% hampir sama dengan luas bergelombang yaitu 24,14% atau 3.568 ha.

Luas wilayah Kota Bontang berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.1.1.1 Luas Kemiringan Lahan rata-rata Kota Bontang

Kemiringan	(Luas ha)	%
Datar 0-2%)	7.211	48,79
Bergelombang 13-15%)	4.001	27,07
Curam 16-40%)	3.568	24,14
Sangat Curam >40%)	0.000	0,00
Jumlah	14.780	100,00

Sumber: Bapelitbang

6.1.3 IKLIM

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.

Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Tanjung Laut sebesar 179,21 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan per bulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,78 mm³ dengan rata-rata 145 hari hujan per bulan.

6.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

6.2.1 KEPENDUDUKAN

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang terutama dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional yakni PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2024 adalah 191.811 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 71.167 jiwa (37,10%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 89.010 jiwa (46,41%) dan di Kecamatan Bontang Barat 31.634 jiwa (16,49%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2023 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan



Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 642 jiwa/km²; 2.695 jiwa/km², dan 1.764 jiwa/km².

Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 98.222 jiwa) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (99.151 jiwa). Hal ini berdampak pada besarnya rasio jenis kelamin pada tahun 2024 adalah 107,01 yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2024 terdapat 107-108 orang penduduk laki-laki.

Indikator kependudukan Kota Bontang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 penduduk yang datang sebanyak 5.925 orang, pindah 5.768 orang, kelahiran 1.736 orang, dan kematian 655 orang.

Tabel 6.2.1.1.1 Indikator Kependudukan Kota Bontang

Kecamatan	(Pendudukan ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
(1)	(2)	(3)
Bontang Selatan	71,167	0,18
Bontang Utara	89,010	1,50
Bontang Barat	31,634	1,27

6.2.2 PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya. Sesuai dengan amanat yang diemban negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan dimensi pembentuk dan penentu kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata dan menyeluruh dilaksanakan dengan adanya program wajib belajar sembilan tahun, kejar paket A, B, dan C.

Tolak ukur umum yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan di suatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid terhadap guru.

Secara umum jumlah sarana sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, baik negeri maupun swasta di Kota Bontang secara kuantitatif mengalami perkembangan. Pada tahun 2024 sarana pendidikan yang tercatat di Kota Bontang terdiri 57 Sekolah Dasar (SD), 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 31 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 6 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 11 Sekolah Menengah Atas (SMA), 14 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 2 Madrasah Aliyah (MA).

6.2.3 KESEHATAN

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang vital adalah kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan kesehatan yang memadai harus didukung sarana dan



prasarana yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Bontang pada tahun 2024 terdiri dari 5 rumah sakit umum, 6 puskesmas non-rawat inap. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan, agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Diharapkan dengan penyuluhan ini penularan penyakit seperti diphteria, muntaber, kolera, dan demam berdarah, sebagai akibat dari sanitasi lingkungan yang buruk dan kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat dicegah. Salah satu dari sepuluh penyakit utama yang paling sering diderita masyarakat Kota Bontang selama tahun 2024 menurut hasil laporan Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah tekanan darah tinggi dengan jumlah 23.316 penderita. Pada sisi yang lain dapat dilihat bahwa program Keluarga Berencana (KB) mempunyai tujuan yang bersifat kualitatif yaitu melembagakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan kuantitatif yaitu penurunan tingkat kelahiran penduduk. Untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan penurunan angka kelahiran (fertilitas) yang lebih cepat. Pada tahun 2024 di Kota Bontang tercatat sebanyak 28.365 pasangan usia subur (PUS). Dari pasangan usia subur tersebut, 18.865 orang adalah akseptor KB aktif. Menurut pemakaian jenis alat kontrasepsi, yang paling banyak dipakai adalah alat KB Suntik, yakni 42,23%, disusul IUD sebanyak 23,80%, dan pil KB sebanyak 13,99%, sedangkan 19,97% lainnya memakai selain ketiga alat kontrasepsi tersebut, seperti kondom, implan, MOW, dan MOP.

6.2.4 PRASARANA DAN SARANA DASAR

Produksi tenaga listrik Kota Bontang mengalami peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya tenaga listrik yang terjual, yaitu sebesar 362.605.540 KWh atau naik sekitar 13,75%. Jumlah pelanggan listrik yang pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 59.096 penggan atau naik sebesar 3,05%. Selain itu, penyediaan air yang bersih dan layak digunakan untuk keperluan sehari-hari dapat dipenuhi dengan tersedianya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan PDAM Kota Bontang pada tahun 2024 mencapai 34.049 pelanggan atau mengalami peningkatan sebesar 4,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume air yang disalurkan pada tahun 2024 sebesar 12.783.470 m³ atau meningkat sebesar 17,62%.

Jumlah pelanggan gas kota di Kota Bontang mengalami peningkatan pada tahun 2023, yang sebelumnya 17.224 sambungan di tahun 2022 menjadi 17.862 sambungan di tahun 2023. Dari sejumlah sambungan yang dilayani tersebut, PT. Bontang Migas menyalurkan gas kota sebesar 90,41 mmscf.

6.2.5 POTENSI UNGGULAN DAERAH

6.2.5.1 TANAMAN PANGAN

Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Bontang tidak terlalu menonjol, mengingat Bontang adalah daerah perkotaan. Selama ini, Kota Bontang masih mengandalkan suplai bahan-bahan makanan dari daerah lain.

Lahan sawah yang ada di Kota Bontang merupakan lahan non irigasi. Pada tahun 2024, luas lahan sawah yang ada di Kota Bontang seluas 37 hektar, dimana 97,30% berada di Kecamatan Bontang Selatan. Selain itu, di Kota Bontang juga terdapat tegal/kebun seluas 891 hektar dan ladang/huma 1.620 hektar.

Tanaman padi di Kota Bontang hanya diusahakan di Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Barat. Pada tahun 2024, luas panen padi sawah sebesar 24,00 hektar.

6.2.5.2 HORTIKULTURA

Untuk tanaman sayur-sayuran, yang paling banyak produksinya selama tahun 2024, yaitu kangkung sebesar 904 kuintal, disusul tomat 813 kuintal, dan petsai/sawi 753 kuintal. Sementara untuk tanaman buah-buahan, yang paling banyak produksinya selama tahun 2024 adalah mangga yaitu sebesar 1.369 kuintal, disusul pisang 1.062 kuintal, dan nangka 953 kuintal.

Selain tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan, terdapat juga tanaman biofarmaka seperti jahe, kencur, kunyit, laos/lengkuas, temulawak, jeruk nipis, dan serai dengan luas panen masing-masing sebesar 91 m², 21 m², 87 m², 47 m², 16 m², 100 m², dan 20 m². Diantara tanaman biofarmaka tersebut, jeruk nipis yang paling banyak produksinya tahun 2024, yaitu sebesar 7.410 kg.

6.2.5.3 PERKEBUNAN

Pada tahun 2024, komoditi kelapa menjadi salah satu komoditi dengan produksi terbesar yaitu sebesar 223,00 ton di areal seluas 32 hektar. Selain itu ada juga komoditi kelapa sawit dengan produksi sebesar 111,00 ton di areal seluas 27 ribu hektar.

6.2.5.4 PETERNAKAN

Populasi ternak di Kota Bontang tahun 2024 didominasi oleh hewan ternak babi, yaitu sebanyak 1.781 ekor. Selain itu terdapat pula sapi potong sebanyak 546 ekor, kerbau 39 ekor, kuda 4 ekor, dan domba 271 ekor. Sedangkan populasi unggas di Kota Bontang tercatat ada sebanyak 89.777 ekor ayam kampung dan 5.428 ekor itik/itik manila.

6.2.5.5 PERIKANAN

Wilayah laut di Kota Bontang lebih luas daripada wilayah daratan. Oleh karena itu wajar jika hasil produksi perikanan didominasi oleh perikanan laut. Pada tahun 2024, tercatat produksi perikanan budidaya di Kota Bontang sebesar 3.609,65 ton dengan produksi budidaya laut sebesar 3.546,10 ton, produksi budidaya tambak sebesar 9,29 ton, dan produksi budidaya kolam sebesar 54,26 ton.

6.2.5.6 PARIWISATA

Selain kota kawasan industri, Kota Bontang juga merupakan daerah tujuan wisata. Pulau Beras Basah dengan tekstur alamnya yang eksotik dan birunya laut menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Bontang. Perjalanan ke Pulau ini dapat ditempuh sekitar 1 jam dari pelabuhan Tanjung Laut. Selain itu kita juga bisa melakukan snorkling untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Selain pulau Beras Basah, ada juga pulau Segajah yang tak kalah indahnya.

Kota Bontang masih memiliki daerah tujuan wisata lainnya, seperti daerah Bontang Kuala yang merupakan pemukiman penduduk di atas laut. Di Bontang Kuala kita bisa menikmati beragam masakan hasil laut seperti ikan, kepiting, udang, cumi-cumi yang

tentunya masih segar. Untuk mendukung pariwisata di Kota Bontang, kini telah berdiri 27 hotel dan penginapan, terdiri atas 3 hotel berbintang dan 24 hotel melati, dengan total 740 kamar dan 1.105 tempat tidur.

Masyarakat Kota Bontang juga turut serta melestarikan budaya. Setiap tahun, Kota Bontang melaksanakan 2 acara adat, yaitu Pesta Laut di Bontang Kuala dan Erau Pelas Benua di Kelurahan Guntung. Selain itu, di Kota Bontang juga ada beberapa kelompok kesenian seperti seni musik dan tari, seni musik, seni suara, seni tari, serta kelompok kesenian lainnya.

6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat;
- b. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;
- c. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;
- d. Unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta
- e. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 terdapat 31 (tiga puluh satu) SKPD dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Sekretariat Daerah Kota Bontang
- 2) Sekretariat DPRD Kota Bontang

b. Dinas Daerah

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 6) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Dinas Lingkungan Hidup
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9) Dinas Perhubungan
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 11) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- 12) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 14) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 16) Dinas Ketenagakerjaan
- 17) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian

c. Lembaga Teknis Daerah

- 1) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 6) Badan Pendapatan Daerah
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja
- 8) Inspektorat

d. Pemerintah Kota Bontang mempunyai 3 (tiga) Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Bontang Utara
- 2) Kecamatan Bontang Selatan
- 3) Kecamatan Bontang Barat

e. Pemerintah Kota Bontang mempunyai 15 (lima belas) Kelurahan yang terdiri dari:

- 1) Kelurahan Guntung
- 2) Kelurahan Loktuan
- 3) Kelurahan Gunung Elai
- 4) Kelurahan Bontang Baru
- 5) Kelurahan Api-Api
- 6) Kelurahan Bontang Kuala
- 7) Kelurahan Satimpo
- 8) Kelurahan Tanjung Laut
- 9) Kelurahan Tanjung Laut Indah
- 10) Kelurahan Berbas Tengah
- 11) Kelurahan Berbas Pantai
- 12) Kelurahan Bontang Lestari
- 13) Kelurahan Belimbing
- 14) Kelurahan Kanaan
- 15) Kelurahan Gunung Telihan

f. RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang (BLUD), ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2009 berdasarkan keputusan Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2009 Tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang sebagai Badan Layanan Umum.



g. Pemerintah Kota Bontang mempunyai 3 (tiga) BUMD yang terdiri dari:

- 1) Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang
- 2) Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang
- 3) PT Bontang Migas dan Energi

6.4 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kota Bontang Tahun 2021 – 2026

Visi : **TERWUJUDNYA KOTA BONTANG YANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB**

Misi :

1. Kota Bontang yang harmoni melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan;
2. Kota Bontang berkelanjutan, layak huni, estetik, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
3. Kota Bontang yang berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.



BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2024, diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca).

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bontang dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bontang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai pencapaian target, hambatan dan kendala serta kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Wali Kota,



Neni Moerniaeni